LAPORAN KEUANGAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2025

RESPONSIBILITY FOR THE 2025 ANNUAL REPORT

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Kupang, 22 April 2026

Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners on Responsibility for the 2025 Annual Report

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2025 Annual Report of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur has been fully disclosed, and we assume full responsibility for the accuracy and completeness of the contents of the Company's Annual Report.

This statement has been made truthfully and in good faith.
Kupang, April 22, 2026

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DEWAN KOMISARIS

S. Donny H. Heatubun, S.E., M.B.M.
Komisaris Utama
President Commissioner

Prof. Dr. Drs. Frans Gana, M.Si.
Komisaris Independen
Independent Commissioner

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKSI

Ir. Charlie Paulus, M.S.M
Direktur Utama
President Director

Rahmat Saleh, S.T.
Direktur Umum & Sumber Daya Manusia
Director of General Affairs & Human Capital

Christofel S.M. Adoe, S.Sos.
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Heru Helbianto, S.E., M.M.
Direktur Keuangan & Treasury
Director of Finance & Treasury

Aloysius R.A. Geong, S.E.
Direktur Kredit
Credit Director

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Laporan Keuangan
tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal – tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

Financial Statements
as of December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
with independent auditors' report

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letttter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditors' Report***
Laporan Keuangan		***Financial Statements***
Laporan Posisi Keuangan	1-2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	5-6	*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	7-119	*Notes to the Financial Statement*

bankNTT
melayani lebih sungguh

bersama membangun Indonesia

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Charlie Paulus
   Alamat Kantor : Jl. W. J. Lalamentik No. 102, Kupang
   Alamat Domisili : Jl. Alam Asri IV/3, RT.008/RW.015, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : 0380-840555
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Rahmat Saleh
   Alamat Kantor : Jl. W. J. Lalamentik No. 102, Kupang
   Alamat Domisili : Jl. Srikandi No. 18A, RT.034 / RW.015, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
   Nomor Telepon : 0380-840555
   Jabatan : Direktur Umum & SDM

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENT DECEMBER 31, 2025 AND 2024 AND FOR THE YEARS THEN ENDED

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

We, the undersigned:

1. *Name* : *Charlie Paulus*
   Office Address : *Jl. W. J. Lalamentik No. 102, Kupang*
   Domicile Address : *Jl. Alam Asri IV/3, RT.008/RW.015, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan*
   Telephone : *0380-840555*
   Title : *President Director*
2. *Name* : *Rahmat Saleh*
   Office Address : *Jl. W. J. Lalamentik No. 102, Kupang*
   Domicile Address : *Jl. Srikandi No. 18A, RT.034 / RW.015, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang*
   Telephone : *0380-840555*
   Title : *General & Human Resource Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (the "Bank");*
2. *The financial statements of the Bank have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the financial statements of the Bank have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The financial statements of the Bank do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. *We are responsible for the Bank internal control system.*

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Kupang, Maret 2026 / *March* ,2026

Charlie Paulus
Direktur Utama/
President Director

Rahmat Saleh
Direktur Umum & SDM/
General & Human Resource Director

Kantor Pusat
Jl. W. J. Lalamentik No. 102
Kupang - NTT
T. (0380) 8406[illegible]
F. (0380) 840561
W. www.bankntt.co.id

PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

Laporan Auditor Independen

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur as at December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang dapat teridentifikasi dalam audit kami dijabarkan dibawah ini.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements" paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is outlined below.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Hal audit utama (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian ("KKE") – cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2e (informasi kebijakan akuntansi yang material – identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan) dan Catatan 8 (kredit yang diberikan) atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Desember 2025, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan Bank adalah sebesar Rp466.589.628.373. Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditentukan oleh Bank berdasarkan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") berdasarkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan" ("PSAK 109").

Kami fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat atas kredit yang diberikan, yang mewakili 69,41% dari total aset Bank, dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas kredit tersebut yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang nilainya signifikan terhadap laporan keuangan Bank. Lebih lanjut penentukan KKE membutuhkan pertimbangan manajemen yang subyektif dan melibatkan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Key audit matters (continued)

Expected credit losses ("ECL") – allowance for impairment losses of loans

As described in Note 2e (material accounting policies information – identification and measurement of impairment on financial assets) and Note 8 (loans) to the financial statements, as at December 31, 2025, the allowance for impairment losses for loans of the Bank was Rp 466,589,628,373. These allowance for impairment losses for loans measured at amortised cost are determined by the Bank based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under PSAK 109, "Financial Instruments" ("PSAK 109").

We focused on this area due to the size of the carrying value of loans, which represented 69.41% of total assets of the Bank, and the respective allowance for impairment losses provided against the loans measured at amortised cost, which are significant to the Bank's financial statements. In addition, determining ECL involves subjective management judgment and is subject to high degree of estimation uncertainty.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Hal audit utama (lanjutan)

Bank menghitung KKE untuk kredit yang diberikan yang tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk. Untuk kredit yang diberikan tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk, yang secara individual tidak dianggap signifikan, Bank menghitung KKE secara kolektif menggunakan parameter risiko yang menggunakan model parameter risiko yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain, *probability of default, loss given default, exposure at default* dan tingkat diskonto, setelah memperhitungkan faktor masa depan dan data eksternal lainnya.

Untuk kredit yang memburuk, yang secara individual dianggap signifikan, Bank menghitung KKE secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari kredit yang diberikan. Bank menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menghitung KKE untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pertimbangan-pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menentukan KKE meliputi:

- Mengembangkan model penilaian kolektif yang tepat untuk menghitung KKE. Model yang dikembangkan secara inheren kompleks dan melibatkan pertimbangan manajemen dalam menyusun model tersebut;

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Key audit matters (continued)

The Bank calculates ECL for both non-credit-impaired and credit-impaired loans. For non-credit-impaired loans and or credit-impaired loans which are not considered individually significant, the Bank assesses collective ECL using the risk parameter modeling approach that incorporates key parameters, including probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate, after considering forward looking factors and other external information.

For credit-impaired loans, which are considered individually significant, the Bank assesses individual ECL by estimating the expected cash flows obtained from the loans. The Bank uses a consistent approach in calculating ECL for other financial assets measured at amortised cost.

The significant judgments involved in determining the ECL include the following:

- *Developing appropriate collective assessment models used to calculate ECL. The models are inherently complex, and management's judgment is applied in determining the models;*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Hal audit utama (lanjutan)

- Mengidentifikasi kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan; dan
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model KKE seperti proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan, perkiraan faktor ekonomi makro masa depan, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian *overlay* KKE yang dibuat.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti obyektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan *rating* internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen perjanjian. Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Bank memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, dan membuat penilaian independen kami terhadap peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti obyektif penurunan nilai.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Key audit matters (continued)

- *Identification of loans measured at amortised cost that have experienced a significant increase in credit risk; and*
- *Assumptions used in the ECL models such as expected future cash flows, forward-looking macroeconomic factors, probability weighted multiple scenarios and ECL overlay adjustments made.*

How our audit addressed the Key Audit Matters

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We understood and tested the relevant controls over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment by performing control testing over internal rating process and examining the credit files on sampling basis. We examined samples of financial assets identified by the Bank as having lower credit quality and restructured, and formed our own independent judgement as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Hal audit utama (lanjutan)

- Ketika bukti obyektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Bank dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan memeriksa baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Bank dalam perhitungan kerugian penurunan nilai, menguji rata-rata probabilitas tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas, termasuk membandingkan rencana waktu pembayaran dan penggunakan faktor diskonto dengan perjanjian kredit.

- Kami menilai dan menguji metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default, loss given default* dan *exposure at default,* yang diterapkan terhadap pesyaratan PSAK 109, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; (ii) evaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum; dan (iii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam estimasi untuk memastikan *input* data yang digunakan dalam perhitungan KKE adalah sesuai dengan data aktual yang tersedia di Bank.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Key audit matters (continued)

- *Where objective evidence of impairment was identified by the Bank and impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of impairment allowance by examining both the quantum and timing of future cash flows used by the Bank in the impairment loss calculation, challenging the probability-weighted outcome used in preparing the cash flows, including comparing the schedule of repayment and the discount factor used to the loan agreement.*

- *We assessed and tested the methodologies and significant modeling assumptions inherent within the ECL models, which include determination of probability of default, loss given default and exposure at default, which applied against the requirements of PSAK 109, which involved (i) evaluating the models and methodologies used in quantitative calculations; (ii) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information; and (iii) testing the completeness and accuracy of data used in the estimate in ensuring the data input used in the ECL calculation is consistent with the actual data available within the Bank.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Hal audit utama (lanjutan)

- Kami menilai dan mempertimbangkan penentuan asumsi prakiraan masa depan.

- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Key audit matters (continued)

- *We assessed and considered the determination of forward-looking forecasts assumptions.*

- *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio.*

Hal lain

Laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024 yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025, diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 19 Maret 2025 menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

Other matter

The financial statements of the Bank as of December 31, 2024 which are presented as corresponding figures to the financial statements as of December 31, 2025, were audited by other independent auditor, whose report dated March 19, 2025 expressed an unmodified opinion on those financial statements.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole, are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

-
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Gideon, CPA
Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant Registration* No.AP.1192
12 Maret 2026 / *March 12, 2026*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ASET				***ASSETS***
Kas	2d,4	687.295.642.009	594.934.066.970	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2d,2f,5	997.936.030.834	1.510.734.797.378	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2d,2e,2f,6	16.089.608.774	18.091.833.276	*Current accounts with other banks*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(2.722.680)	(28.705.478)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih		16.086.886.094	18.063.127.798	*Total - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2d,2e,2g,7	3.137.850.149.969	399.941.683.676	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(5.742.187)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih		3.137.844.407.782	399.941.683.676	*Total - net*
Kredit yang diberikan	2d,2e,2h,2ab,8,35			*Loans*
Pihak berelasi		31.708.303.575	6.662.299.094	*Related parties*
Pihak ketiga		13.913.994.001.815	12.757.923.148.416	*Third parties*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(466.589.628.373)	(347.945.094.597)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih		13.479.112.676.817	12.416.640.352.913	*Total - net*
Surat berharga	2d,2e,2i,9	941.920.294.323	907.845.096.794	*Marketable securities*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		-	(4.265.151)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih		941.920.294.323	907.840.831.644	*Total - net*
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	2d,2e,2j,10	258.790.818.168	-	*Securities purchased under resale agreements*
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp304.756.920.561 (31 Desember 2024 : Rp278.284.125.125)	2k,11	280.173.455.279	202.528.101.039	*Fixed assets Net of accumulated depreciation of Rp304,756,920,561 (December 31, 2024 : Rp278,284,125,125)*
Aset takberwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp13.772.875.148 (31 Desember 2024 : Rp13.252.254.105)	2l,12	1.793.854.932	1.998.189.574	*Intangible assets Net of accumulated amortization of Rp13,772,875,148 (December 31, 2024 : Rp13,252,254,105)*
Aset hak guna setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp72.359.311.543 (31 Desember 2024 : Rp119.556.774.877)	2z,13	43.503.517.825	57.760.078.799	*Right of use assets Net of accumulated amortization of Rp72,359,311,543 (December 31, 2024 : Rp119,556,774,877)*
Aset pajak tangguhan	2s,19d	51.622.606.910	47.691.658.341	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain - bersih	2d,2e,2n,14	196.824.320.730	274.328.639.879	*Other assets - net*
JUMLAH ASET		**20.092.884.511.703**	**16.434.461.528.009**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				*LIABILITIES AND EQUITY*
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	2d,2o,15	62.439.844.787	70.808.421.090	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	2d,2p,2ab,16,35			*Deposits from customers*
Pihak berelasi		1.568.184.565.937	260.760.731.729	*Related parties*
Pihak ketiga		14.361.627.710.745	11.726.494.295.908	*Third parties*
Jumlah		15.929.812.276.682	11.987.255.027.637	*Total*
Simpanan dari bank lain	2d,2q,17	266.648.689.186	421.089.316.957	*Deposits from other banks*
Surat berharga yang diterbitkan	2d,2r,18	-	36.955.494.571	*Securities issued*
Utang pajak	2s,19b	1.460.374.624	18.038.396.871	*Taxes payable*
Pinjaman yang diterima	2t,20	745.109.502.734	905.345.188.006	*Borrowings*
Liabilitas lain-lain	2d,2aa,21,33	276.139.714.288	294.499.883.189	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**17.281.610.402.301**	**13.733.991.728.321**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp10.000 per saham				*Share capital - par value Rp10,000 per share*
Modal dasar:				*Authorized capital:*
- 700.000.000 saham				*700,000,000 shares -*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				*Issued and fully paid-in capital:*
- Seri A 220.822.955 (31 Desember 2024 : 211.324.361) lembar saham				*Serie A 220,822,955 - (December 31, 2024 : 211,324,361) shares*
- Seri B 130.725 lembar saham	2u,22	2.209.536.800.000	2.114.550.860.000	*Serie B 130,725 shares -*
Tambahan modal disetor	22	33.818.538.586	11.747.108.586	*Additional paid-in capital*
Kerugian pengukuran kembali program manfaat pasti - setelah pajak tangguhan	2aa,33	(95.792.242.849)	(68.224.203.763)	*Loss remeasurement of defined benefit pension plans - net of deferred tax*
Selisih penilaian kembali aset tetap	11	83.428.725.329	-	*Revaluation surplus of fixed assets*
Saldo laba	2v,23			*Retained earnings*
- telah ditentukan penggunaannya		487.664.061.080	465.559.493.396	*Appropriated -*
- belum ditentukan penggunaannya		92.618.227.256	176.836.541.469	*Unappropriated -*
JUMLAH EKUITAS		**2.811.274.109.402**	**2.700.469.799.688**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**20.092.884.511.703**	**16.434.461.528.009**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years then ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan bunga	2w,2x,2ab,24,35	1.678.299.390.699	1.639.358.431.888	*Interest income*
Beban bunga	2w,2x,2ab,25,35	(597.016.168.357)	(556.618.616.448)	*Interest expense*
Pendapatan bunga - bersih		**1.081.283.222.342**	**1.082.739.815.439**	***Interest income - net***
Pendapatan operasional lainnya				***Other operating income***
Provisi dan komisi lainnya	2x	65.250.423.414	58.194.224.544	*Other fees and commissions*
Lain-lain	26	78.774.819.023	76.435.294.336	*Others*
		144.025.242.437	134.629.518.880	
Pendapatan operasional		**1.225.308.464.779**	**1.217.369.334.319**	***Operating income***
Beban operasional lainnya				***Other operating expenses***
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset	2e,27	(184.730.104.257)	(135.865.351.780)	*Allowance for impairment losses on assets*
Beban operasional lainnya				*Other operating expenses*
Tenaga kerja	2aa,28,33	(535.925.711.543)	(548.070.635.820)	*Personnel*
Umum dan administrasi	29	(321.044.386.950)	(307.716.065.828)	*General and administrative*
		(1.041.700.202.750)	(991.652.053.427)	
LABA OPERASIONAL		**183.608.262.029**	**225.717.280.892**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL	30			***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan non-operasional		9.877.071.730	30.179.610.317	*Non-operating income*
Beban non-operasional		(21.654.594.846)	(24.788.221.444)	*Non-operating expenses*
		(11.777.523.116)	**5.391.388.873**	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		**171.830.738.913**	**231.108.669.765**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX EXPENSE***
Beban pajak				***Tax expense***
Kini	2s,19c	(39.865.437.480)	(65.302.262.518)	*Current*
Tangguhan	2s,19c	(3.844.652.198)	11.030.134.222	*Deferred*
Pajak sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP)	2s,19c	(35.502.421.979)	-	*Tax related to Tax Assessment Letter (SKP)*
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		**(79.212.511.657)**	**(54.272.128.296)**	***INCOME TAX EXPENSE - NET***
LABA BERSIH		**92.618.227.256**	**176.836.541.469**	***NET INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:***
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti	2y	(35.343.639.853)	4.423.094.061	*Gain (loss) remeasurement of defined benefit pension plans*
Selisih penilaian kembali aset tetap	11	83.428.725.329	-	*Revaluation surplus of fixed assets*
Pajak penghasilan terkait	2y	7.775.600.767	(973.080.693)	*Related income tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		**148.478.913.499**	**180.286.554.837**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA BERSIH PER SAHAM	2ac,34	431	851	***EARNINGS PER SHARE***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-in capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*		Selisih penilaian kembali aset tetap/ *Revaluation surplus of fixed assets*	Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali kembali program manfaat pasti - setelah pajak tangguhan/ *Gain (loss) remeasurement of defined benefit pension plans - net of deferred tax*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
			Modal sumbangan/ *Donation capital*	Modal disetor lainnya/ *Other paid-in capital*			Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Cadangan umum/ *General reserves*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 1 Januari 2024		**2.045.186.350.000**	**247.088.700**	**12.467.514.968**	**-**	**(71.674.217.131)**	**451.790.573.273**	**110.151.360.982**	**2.548.168.670.792**	***Balance as at January 1, 2024***
Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh	22	69.364.510.000	-	(69.364.510.000)	-	-	-	-	-	*Reclassified to issued and fully paid-in capital*
Setoran modal	22	-	-	68.397.014.918	-	-	-	-	68.397.014.918	*Paid-in capital*
Pembagian laba tahun 2023:										*Distribution of profit in 2023:*
Cadangan umum	23	-	-	-	-	-	13.768.920.123	(13.768.920.123)	-	*General reserves*
Dividen kas	2ad, 23	-	-	-	-	-	-	(96.382.440.859)	(96.382.440.859)	*Cash dividends*
Laba komprehensif periode berjalan		-	-	-	-	3.450.013.368	-	176.836.541.469	180.286.554.837	*Comprehensive income for the period*
Saldo 31 Desember 2024		**2.114.550.860.000**	**247.088.700**	**11.500.019.886**	**-**	**(68.224.203.763)**	**465.559.493.396**	**176.836.541.469**	**2.700.469.799.688**	***Balance as at December 31, 2024***
Saldo 1 Januari 2025		**2.114.550.860.000**	**247.088.700**	**11.500.019.886**	**-**	**(68.224.203.763)**	**465.559.493.396**	**176.836.541.469**	2.700.469.799.688	***Balance as at January 1, 2025***
Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh	22	94.985.940.000	-	(94.985.940.000)	-	-	-	-	-	*Reclassified to issued and fully paid-in capital*
Setoran modal	22	-	-	88.485.940.000	-	-	-	-	88.485.940.000	*Paid-in capital*
Agio saham	22	-	-	28.571.430.000	-	-	-	-	28.571.430.000	*Share premium*
Pembagian laba tahun 2024:										*Distribution of profit in 2024:*
Cadangan umum	23	-	-	-	-	-	22.104.567.684	(22.104.567.684)	-	*General reserves*
Dividen kas	2ad, 23	-	-	-	-	-	-	(154.731.973.785)	(154.731.973.785)	*Cash dividends*
Jumlah laba komprehensif - tahun berjalan:										*Total comprehensive income for the year*
- Laba bersih		-	-	-	-	(27.568.039.086)	-	92.618.227.256	65.050.188.170	*Net income -*
- Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	83.428.725.329	-	-	-	83.428.725.329	*Other comprehensive income -*
Saldo 31 Desember 2025		**2.209.536.800.000**	**247.088.700**	**33.571.449.886**	**83.428.725.329**	**(95.792.242.849)**	**487.664.061.080**	**92.618.227.256**	**2.811.274.109.402**	***Balance as at December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga, provisi dan komisi		1.672.799.721.548	1.639.468.727.072	*Interest income, fees and commission received*
Pembayaran bunga		(592.089.284.712)	(556.580.013.319)	*Interest expenses paid*
Pembayaran beban karyawan		(567.093.167.873)	(561.768.059.189)	*Employee expenses paid*
Pembayaran beban umum dan administrasi		(252.525.094.580)	(321.231.322.866)	*General and administrative expenses paid*
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya		144.025.242.437	161.031.724.526	*Other operating income received*
Pembayaran beban non-operasional		(12.620.816.795)	(24.788.221.444)	*Other non-operating expense paid*
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		**392.516.600.025**	**336.132.834.780**	***Cash received before changes in operating assets and liabilities***
(Kenaikan) penurunan dalam aset operasi:				***(Increase) decrease in operating assets:***
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali		(258.790.818.168)	-	*Securities purchased under resale agreements*
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		(304.370.894.108)	-	*Marketable securities and Government Bonds at fair value through profit or loss*
Kredit yang diberikan		(1.219.515.561.888)	(292.373.231.551)	*Loans*
Aset hak guna	13	(14.103.845.915)	12.226.114.126	*Right of use assets*
Aset lain-lain		11.802.745.075	24.465.832.774	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:				***Decrease (increase) in operating liabilities:***
Liabilitas segera		(8.368.576.303)	(33.219.038.703)	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah:				*Deposits from customers*
Giro		(9.212.622.046)	(48.360.751.459)	*Current accounts*
Tabungan		83.979.918.635	69.484.538.210	*Saving deposits*
Deposito berjangka		3.867.789.952.458	(929.616.212.551)	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain		(154.440.627.771)	55.354.117.483	*Deposits from other banks*
Liabilitas lain-lain		(7.468.342.401)	57.242.218.707	*Other liabilities*
Pembayaran pajak penghasilan		(56.443.459.727)	(50.260.432.064)	*Income tax paid*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		**2.323.374.467.864**	**(798.924.010.249)**	***Net cash provided by (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penurunan (kenaikan) surat berharga		278.000.000.000	77.218.467.941	*Decrease (increase) in Marketable securities*
Pembelian aset tetap	11	(20.689.424.347)	(22.792.435.233)	*Acquisitions of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	12	(316.286.400)	(1.214.660.999)	*Acquisitions of intangible assets*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi		**256.994.289.253**	**53.211.371.709**	***Net cash provided by investing activities***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima		(160.235.685.272)	(169.567.320.146)	*Borrowings received (paid)*
Setoran modal	22	117.057.370.000	68.397.014.918	*Paid-in capital*
Pembayaran dividen kas	2ad, 23	(154.731.973.785)	(96.382.440.859)	*Cash dividend paid*
Pembayaran liabilitas sewa		(30.537.460.559)	(41.560.618.243)	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran efek-efek yang diterbitkan		(37.000.000.000)	-	*Payment of securities issued*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(265.447.749.616)**	**(239.113.364.330)**	***Net cash used in financing activities***
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		**2.314.921.007.501**	**(984.826.002.871)**	***Net increase (decrease) in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun		2.523.673.675.821	3.504.722.274.021	*Cash and cash equivalents at beginning of year*
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		846.598.295	3.777.404.671	*Effect of foreign currency exchange rate changes*
Kas dan setara kas pada akhir tahun		**4.839.441.281.617**	**2.523.673.675.821**	***Cash and cash equivalents at end of year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:				***Cash and cash equivalents at end of year consisted of:***
Kas	4	687.295.642.009	594.934.066.970	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	997.936.030.834	1.510.734.797.378	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6	16.069.608.774	18.063.127.798	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	7	3.138.140.000.000	399.941.683.676	*Placements with other banks maturing three months or less since - the acquisition date*
Jumlah kas dan setara kas		**4.839.441.281.617**	**2.523.673.675.821**	***Total cash and cash equivalents***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank") didirikan berdasarkan akta notaris No.12 tanggal 18 Oktober 1961 yang dibuat dihadapan Casper Melchior Keluanan Amalo, wakil notaris sementara di Kupang. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM.9-13/II tanggal 5 Februari 1962.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.2490), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perubahan status hukum Bank dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.01/pd/DPRD-GR/1963 tanggal 12 Maret 1963.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, Bank kembali merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tanggal 26 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.584.63-345 tanggal 20 April 1999 tentang pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No.122 tanggal 22 April 1999 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-8228.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 11 Juni 1999, Tambahan No.3491.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank telah dilakukan penyesuaian melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 April 2008. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dinyatakan dalam akta No.26 tanggal 6 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, S.H., notaris di Kupang, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-48098.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 7 Oktober 2008 Tambahan No.19417.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (the "Bank") was established based on the notarial deed No.12 dated October 18, 1961 as notarised by Casper Melchior Keluanan Amalo, vice notary in Kupang. The Bank has started commercial operations on July 17, 1962 based on the Decision Letter of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.BUM.9-13/II dated February 5, 1962.

In complying with the regulations of Law No.13 Year 1962 on Basic Regulations of Regional Development Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 No.59, Supplement to the State Gazette No.2490), East Nusa Tenggara Provincial Government establishes the Bank's legal status change from Limited Company became Region Company through Regional Regulation Level I East Nusa Tenggara No.01/pd/DPRD-GR/1963 dated March 12, 1963.

Based on the regulation of Minister of Home Affairs No.1 Year 1998 dated February 4, 1998 on the Legal Entity of the Regional Development Bank, the Bank re-change of the legal entity of the Regional Company into a Limited Company (PT). Changes of legal entity of the Bank was stipulated in Regional Regulation of the Province Level 1 of East Nusa Tenggara No.3 Year 1999 dated March 26, 1999 regarding the Legal Forms Amendment of Regional Development Bank of the Province of East Nusa Tenggara Level I from the Regional Company into a Limited Company that has been approved by the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia based on Decree No.584.63-345 dated April 20, 1999 on the retification of the Regional Regulation of the Province Level 1 of East Nusa Tenggara No.3 Year 1999 on Amendment Legal Forms Bank Regional Development of the Province of East Nusa Tenggara Level I from the Regional Company into PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Amendment of legal entity into a Limited Company stated on notarial deed No.122 dated April 22, 1999 as notarized by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., that has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia Decree No.C2-8228.HT.01.01.TH.99 dated May 5, 1999 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.47 dated June 11, 1999, Supplement No.3491.

To comply with the Law No.40 Year 2007 dated August 16, 2007 regarding the Limited Company, the Bank's Articles of Association has been amended through the Shareholders' Extraordinary General Meeting dated April 10, 2008. Decision of Shareholders' Extraordinary General Meeting is stated in the deed No.26 dated June 6, 2008 as notarized by Emmanuel Mali, S.H., notary in Kupang, and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No.AHU-48098.AH.01.02. Tahun 2008 dated August 5, 2008 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.81 dated October 7, 2008 Supplement No.19417.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum Bank (lanjutan)

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.10 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. notaris di Kupang mengenai Direksi dan Komisaris. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-AH.01.03-0156996.Tahun 2025 tanggal 12 Juni 2025.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Bank telah memperoleh izin beroperasi sebagai Bank Devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-62/D.03/2023 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing Bagi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

b. Maksud dan tujuan

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank antara lain adalah:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberi kredit;
- Menerbitkan surat pengakuan utang;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Jaringan kantor

Bank berkantor pusat di Jalan W.J. Lalamentik No.102, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bank mengklasifikasikan Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional. Jumlah kantor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Kantor cabang utama	1	1	*Main branch office*
Kantor cabang khusus	1	1	*Special branch office*
Kantor cabang	21	21	*Branch office*
Kantor cabang pembantu	46	46	*Sub-branch office*
Kantor fungsional	117	117	*Functional office*
Payment point	28	26	*Payment point*
Kas mobil	8	8	*Mobile cash*
Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	248	248	*Automated Teller Machines (ATM)*

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The latest amendment to the Bank's Articles of Association based on the deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.10 dated May 14, 2025, as notarized by Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. notary in Kupang regarding the Board of Directors and Board of Commissioners. This amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-AH.01.03-0156996.Year 2025 dated June 12, 2025.

On August 31, 2023, the Bank has obtained a license to operate as a Foreign Exchange Bank from the Financial Services Authority (OJK) in accordance with a Copy of the Decree of the Member of the Board of Commissioners OJK No.KEP-62/D.03/2023 regarding the Granting of Licenses to Conduct Business Activities in Foreign Currencies for PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

b. Purpose and objectives

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's purpose and objective of the Bank is to engage in banking services. To achieve its purpose and objectives, the scope of activities of the Bank include:

- *Collecting funds from the public in the form of deposits such as current accounts, time deposits, certificates of deposit, savings and/or other equivalent form with it;*
- *Giving loans;*
- *Issuing debt instruments;*
- *Placing funds on, borrow from or lend funds to other banks, either by using the mail, telecommunication facilities and the money order, check or other means;*
- *Other activities commonly conducted by the Bank is not contrary to the applicable regulations.*

c. Office network

The Bank's head office is located at Jalan W.J. Lalamentik No.102, Kupang, Nusa Tenggara Timur. The Bank classifies Branch Offices to the Main Branch Office, Special Branch Office, Branch Office, Sub-branch Office, Cash Office and Functional Office. Number of office as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Manajemen eksekutif

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi Bank adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Executive Boards

As of December 31, 2025 and 2024, the members of the Bank's Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee are as follows:

2025

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Stefanus Donny H. Heatubun[*)]	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Frans Gana	*Independent Commissioners*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Charlie Paulus[*)]	*President Director*
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	Rahmat Saleh[*)]	*Information Technology and Operations Director*
Direktur Keuangan dan Treasury	Heru Helbianto[*)]	*Finance and Treasury Director*
Direktur Kredit	Aloysius Rahmat Aliman Geong[*)]	*Loans Director*
Direktur Kepatuhan	Christofel Samuel Melianus Adoe	*Compliance Director*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Frans Gana	*Chairman*
Anggota	Stanis Man	*Members*
Komite Pemantau Risiko		***Risk Monitoring Committee***
Ketua	-	*Chairman*
Anggota	Ahmad Atang	*Members*
	Agustinus Tetiro	
Komite Remunerasi dan Nominasi		***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	Frans Gana	*Chairman*
Anggota	Kepala Divisi SDM	*Members*

2024

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	-	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Frans Gana[**)]	*Independent Commissioners*
Direksi		***Directors***
Plt. Direktur Utama	Yohanis Landu Praing [***)]	*Acting President Director*
Direktur Teknologi Informasi dan Operasional	Yohanis Landu Praing [**)]	*Information Technology and Operations Director*
Direktur Dana dan Treasury	Hilarius Minggu [*)]	*Fund and Treasury Director*
Plt.Direktur Kredit	Hilarius Minggu [***)]	*Acting Loans Director*
Direktur Kepatuhan	Christofel Samuel Melianus Adoe	*Compliance Director*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Frans Gana	*Chairman*
Anggota	Yosef Juma Dobe Ngole	*Members*
	Fauziyah Lamaya	
Komite Pemantau Risiko		***Risk Monitoring Committee***
Ketua	-	*Chairman*
Anggota	Ahmad Atang	*Members*
	Stanis Man	
Komite Remunerasi dan Nominasi		***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	Frans Gana	*Chairman*
Anggota	Kepala Divisi SDM	*Members*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Manajemen eksekutif (lanjutan)

*) Diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 2025, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.09 oleh Sarlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.

**) Diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 13 oleh Emmanuel Mali, SH, MH.

***) Diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 16 November 2024, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 18 oleh Notaris Sarlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.

****) Diangkat berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 8 Mei 2024 (Akta No. 13 oleh Notaris Emmanuel Mali, S.H., M.H.) dan diperpanjang melalui keputusan RUPSLB tanggal 16 November 2024 (Akta No. 18 oleh Notaris Sarlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.)

Pembentukan Komite Audit Bank telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.IX.I.5 tanggal 24 September 2004.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Kepala Satuan Kerja Audit Intern	Max Daniel Siokain	Max Daniel Siokain	*Head of Internal Audit*
Sekretaris Perusahaan	Fransiskus A.L.A. Boli Tobi	Yuan N. Taneo	*Corporate Secretary*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki karyawan masing-masing sebanyak 2.007 dan 2.057 (tidak diaudit).

e. Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan penyajian laporan keuangan ini yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 12 Maret 2026.

f. Penawaran umum obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 diterbitkan tanggal 21 Desember 2018, terdiri dari:

(i). Seri A dengan nilai nominal Rp228.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 9,25% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama 370 hari sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
(ii). Seri B dengan nilai nominal Rp155.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 10,5% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama tiga tahun sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
(iii). Seri C dengan nilai nominal Rp80.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 10,75% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama lima tahun sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

1. *GENERAL INFORMATION (continued)*

d. *Executive Boards (continued)*

**) Appointed in accordance with the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 12, 2025, as stated in notarial deed No.09 by Sarlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.*

***) Appointed in accordance with the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on May 8, 2024, as stated in notarial deed No. 13 by Emmanuel Mali, SH, MH.*

****) Appointed in accordance with the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 16, 2024, as stated in notarial deed No. 18 by Notary Sarlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.*

****\) Appointed based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 8, 2024 (Deed No. 13 by Notary Emmanuel Mali, S.H., M.H.) and extended through the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 16, 2024 (Deed No. 18 by Notary Sarlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.)*

Establishment of Audit Committee in accordance with the Regulatory Authority for the Indonesian Capital Market-Financial Institution (Bapepam-LK) No.IX.I.5 dated September 24, 2004.

As of December 31, 2025 and 2024, the composition of the Head of Internal Audit and Corporate Secretary are as follows:

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has 2,007 dan 2,057 employees, respectively (unaudited).

e. *The management of the Bank is responsible for the preparation of these financial statements which were completed and authorised for issuance by the Directors on March 12, 2026.*

f. *Public offering of bonds*

Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I issued on December 21, 2018, consisting of:

(i). Series A with a par value of Rp228,000,000,000, a fixed interest rate of 9.25% per annum payable every three months, a period of 370 days to the date of January 1, 2020;
(ii). Series B with a par value of Rp155,000,000,000, a fixed interest rate of 10.5% per annum payable every three months, a period of three years up to the date of December 21, 2021;
(iii). Series C with a par value of Rp80,000,000,000, a fixed interest rate of 10.75% per annum payable every three months, a period of five years up to the date of December 21, 2023;

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Penawaran umum obligasi (lanjutan)

(iv). Seri D dengan nilai nominal Rp37.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 11% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama tujuh tahun sampai dengan tanggal 21 Desember 2025.

Obligasi ini ditawarkan sebesar nilai nominal, dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Desember 2018 dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 17 Desember 2018.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (mulai tanggal 1 Januari 2013 BAPEPAM-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No.VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", serta Surat Edaran BAPEPAM-LK No.SE-17/BL/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang "Penggunaan Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan Untuk Semua Jenis Industri di Pasar Modal di Indonesia".

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan diklasifikasikan ke dalam arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Public offering of bonds (continued)

(iv). Series D with a par value of Rp37,000,000,000, a fixed interest rate of 11% per annum payable every three months, a period during the seven years prior to the date of December 21, 2025.

The bonds were offered at their par value, listed on the Indonesia Stock Exchange on December 26, 2018 and effectively declared by decision letter of Financial Services Authority on December 17, 2018.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

The material accounting policies that are consistently applied in the preparation of the financial statements as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

a. Statement of compliance

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprised of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of the Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) and Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (starting January 1, 2013 BAPEPAM-LK is called Financial Services Authority (OJK)) Regulation No.VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Publicly Listed Companies", and Circular Letter of BAPEPAM-LK No.SE-17/BL/2012 dated December 21, 2012 regarding the "Use of Financial Statements Disclosure Checklist For All Types of Industries in the Capital Market of Indonesia".

b. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows, using the historical cost convention, except for certain accounts which are valued on other measurement bases as described in the accounting policies for such accounts.

The statements of cash flows have been prepared using the direct method and are classified into cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalent consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Certificates of Bank Indonesia maturing 3 (three) months since acquisition date, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings and not restricted for use.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rupiah), which is the functional currency of the Bank.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas standar akuntansi keuangan

Berikut ini adalah standar, perubahan dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

  Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang dapat dipertukarkan. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahun yang dimulai pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dimana entitas diharuskan mengungkapkan fakta tersebut. Tanggal penerapan awal adalah awal periode tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.
- Amendemen PSAK 117: "Kontrak Asuransi" tentang kontrak asuransi
  Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: Kontrak asuransi. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Aset dan liabilitas keuangan

(i) Klasifikasi
Sesuai dengan PSAK 109, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:
- Biaya perolehan diamortisasi;
- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL);
- Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

c. *Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of the statements of financial accounting standard*

The following standards, amendments and interpretations became effective since January 1, 2025:

- *Amendment of PSAK 221: "Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding the lack of convertibility.*
  The amendments require the disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of currency exchange. The amendments apply to annual reporting periods beginning with annual reporting periods beginning on or after January 1, 2025. Early application is permitted where an entity is required to disclose that fact. The date of initial application is the beginning of the annual period in which the entity first applies the amendments.

- *Amendment of PSAK 117: "Insurance Contract" regarding insurance contract.*
  A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, when effective PSAK 117 will replace PSAK 104: Insurance contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and reinsurance, regardless of the issuing entity, as well as to certain guarantees and financial instruments with non-binding participation features, and some scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide a more useful and consistent accounting model for insurance contracts for insurers.

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current period or prior financial years.

d. *Financial assets and liabilities*

(i) Classification
In accordance with PSAK 109, there are three measurement classifications for financial assets:
- *Amortised cost;*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL);*
- *Fair value through other comprehensive income (FVOCI).*

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Suatu instrumen utang diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.
Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

A financial asset is measured at amortised cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:
- *The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

A debt instruments measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:
- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell); and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Unrealized gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces accounting mismatch.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Bank. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Bank menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat desk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Bank's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Bank. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Bank assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. sub-portfolios or sub-business lines).

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- *how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for PSAK 109 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)
Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Bank dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Bank untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 109 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/conscious.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

(ii) Pengakuan awal

Bank dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Bank pada awalnya mengakui kredit yang diberikan dan simpanan pada tanggal perolehan.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk item yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Business model assessment (continued)
Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Bank reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Bank did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

The Targeting Operating Model for PSAK 109 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

(ii) Initial recognition

The Bank can reclassified all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

The Bank initially recognises loans and deposits on the date of origination.

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for an item not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual, FVOCI dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya dicatat sebagai nilai wajar. Kredit yang diberikan dan piutang dan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga.

(iii) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

d. *Financial assets and liabilities (continued)*

(ii) Initial recognition (continued)

Financial assets carried at fair value through profit or loss are initially recognised at fair value and transaction costs are expensed in the profit or loss. Available-for-sale financial assets, FVOCI and financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value. Loans and receivables and financial asset held to maturity are carried at amortised cost using the effective interest rate method.

For financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt initially recognised. Such transactions costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest rate method and are recorded as part of interest expense.

(iii) Amortised cost measurement

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, less principal repayments, plus or less the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount and minus any allowance for impairment losses.

The impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as amortised cost and recognised in the statement of profit or loss as impairment losses on financial assets.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider any future credit losses.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.
Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan posisi long berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi short berdasarkan harga permintaan.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi net long (atau dibayar untuk mengalihkan posisi net short) untuk eksposur risiko tertentu.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Penyesuaian pada level kelompok tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam kelompok.

(v) Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

(vi) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Fair value measurement (continued)

Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

(v) Derecognition

The Bank derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognised as a separate asset or liability.

In transactions in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognises the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank determines that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

(vi) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy or the Bank or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (12-*month* ECL) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime* ECL). Lifetime ECL adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Losses* (ECL) diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/ hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.
Bank menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD) dan *exposure at default* (EAD), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

- *Probability of Default* (PD)
  Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*Stage* 1) atau sepanjang umur (*Stage* 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

- *Loss Given Default* (LGD)
  Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Bank mengestimasikan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

- *Exposure at Default* (EAD)
  Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang *commited* pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Identification and measurement of impairment on financial assets

PSAK 109 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month expected credit losses (ECL) or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

Expected Credit Losses (ECL) are recognized for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as hold to collect/hold to collect and sell and have cash flows that are solely payments of principal and interest. Expected credit losses are not recognized for equity instruments designated at FVOCI.

The Bank primarily uses sophisticated models that utilize the probability of default (PD), loss given default (LGD) and exposureat default (EAD) metrics, discounted using the effective interest rate.

- *Probability of Default (PD)*
  The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

- *Loss Given Default (LGD)*
  The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the historical recovery rates that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.

- *Exposure at Default (EAD)*
  The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)

ECL diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. ECL terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka ECL dihitung kembali berdasarkan basis dua belas bulan.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (*Stage* 2)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam ECL. Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dinilai menggunakan faktor kuantitatif. Aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (*Stage* 3)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut.

Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. ECL akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

e. *Identification and measurement of impairment on financial assets (continued)*

12-month expected credit losses (Stage 1)

ECL are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. ECL continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, ECL will revert to being determined on a 12-month basis.

Significant increase in credit risk (Stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor is it assessed in the context of changes in ECL. Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using quantitative factors. Financial assets that are 30 or more days past due and not creditimpaired will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk.

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3)

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset.

Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (*Stage* 3) (lanjutan)

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk portofolio revolving tertentu, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit (berdasarkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk fasilitas kredit ditarik), bukan sepanjang periode kontrak.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif.

Ketika ada sejumlah kewajiban debitur yang dianggap tidak bisa diselesaikan, maka cadangan kerugian penurunan nilai kredit *Stage* 3 akan dibuat. Cadangan kerugian penurunan nilai *Stage* 3 ini adalah selisih antara jumlah pinjaman yang tercatat dan probabilitas tertimbang nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang telah dihitung menggunakan tiga skenario (antara lain dari hasil penyelesaian terbaik, terburuk atau yang paling mungkin) dimana Bank akan memberikan bobot probabilitas individu untuk setiap skenario pemulihan yang diidentifikasi berdasarkan rencana workout untuk masing-masing debitur individu.

Proyeksi arus kas juga mencakup jaminan yang dapat direalisasi, nilai-nilai yang digunakan akan memperhitungkan dampak dari informasi ekonomi di masa mendatang (forward looking). Keadaan dari masing-masing debitur secara individu dipertimbangkan ketika memperkirakan arus kas masa depan dan kapan penyelesaian kewajiban diterima dengan memasukan unsur pertimbangan yang signifikan.

Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen kredit yang diberikan dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen aset keuangan dan komitmen yang belum ditarik dan tidak dapat dipisahkan atas kerugian kredit ekspektasian pada komponen ini, jumlah kerugian kredit atas komitmen tersebut diakui bersamaan dengan kerugian kredit atas aset keuangan. Dalam kondisi jumlah kerugian kredit ekspektasian gabungan melebihi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, maka kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai liabilitas lain-lain.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

e. *Identification and measurement of impairment on financial assets (continued)*

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3) (continued)

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, including credit cards, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk (which is based on the length of time it takes for credit facilities to be withdrawn) rather than the contractual term.

For assets measured at amortised cost, the balance sheet amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the balance sheet amount reflects the instrument's fair value, with the expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income.

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the balance sheet date using the effective interest rate as the discount rate.

Where any amount is considered irrecoverable, a Stage 3 credit impairment provision is raised. This Stage 3 provision is the difference between the loan carrying amount and the probability weighted present value of estimated future cash flows, reflecting minimum 3 scenarios (among others typically the best, worst or most likely recovery outcomes) where the Bank assigns individual probability weighting for each recovery scenario that has been identified based on the workout plan for each individual debtors.

The cash flows projection include realisable collateral, the values used will incorporate the impact of forward looking economic information. The individual circumstances of each debtor are considered when estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgment.

Expected credit loss on loan commitments and financial guarantees is recognised as other liabilities. Where a financial instrument includes both financial asset and an undrawn commitment and it is not possible to separately identify the expected credit loss on these components, expected credit loss amounts on the loan commitment are recognised together with expected credit loss amounts on the financial asset. To the extent the combined expected credit loss exceeds the gross carrying amount of the financial asset, the expected credit loss is recognised as other liabilities.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari *deposit facilities* dan *interbank call money*.

Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan pendapatan bunga yang ditangguhkan.

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

h. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang signifikan dan dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit sindikasi
Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Kredit yang dihapusbuku
Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan, pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada periode sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Setelah pengakuan awal, kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Untuk kredit yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi, setelah pengakuan awal diukur menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan untuk kredit yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL, setelah pengakuan awal diukur pada nilai wajar dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar dicatat pada pendapatan transaksi perdagangan-bersih.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

f. *Current accounts with Bank Indonesia and other banks*

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortised cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

g. *Placements with Bank Indonesia and other banks*

Placements with Bank Indonesia and other banks consist of deposit facilities and interbank call money.

Placements with Bank Indonesia are stated at the outstanding balances net of unearned interest income.

Placements with other banks are stated at amortised cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

h. *Loans*

Loans are measured at amortised cost using the effective interest method, less allowance for impairment losses. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate. The amortisation is recognised in profit or loss. Allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment.

Syndicated loans
Loans in order to the joint finance (syndicated loans) are stated at amortised cost in accordance with the risk portion which covered by the Bank.

Loans written-off
Loans are written-off when there is no realistic prospect of collection or when the Bank's normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. The recoveries of written-off loans, in current period is credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous period are recorded as operational incomes other than interest income.

Subsequent to initial recognition, loans are measured at amortised cost or fair value depending on the respective classification. For loan which classified as amortised cost is subsequently measured using the effective interest method. While for loans which classified as fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value, with gains or losses arising from changes in fair value are recorded in net trading income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi kredit yang diberikan
Bank mencatat restrukturisasi kredit bermasalah berdasarkan jenis restrukturisasi.

Dalam restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan dengan penerimaan aset (termasuk kepentingan ekuitas debitur), Bank mencatat aset tersebut (termasuk kepentingan ekuitas) sebesar nilai wajarnya pada saat restrukturisasi. Kelebihan nilai tercatat kredit yang diberikan di atas nilai wajar aset yang diterima setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual aset tersebut, diakui sebagai kerugian dalam laba rugi tahun berjalan.

Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan. Biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

i. Surat berharga

Surat Berharga yang dimiliki terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi (termasuk obligasi korporasi yang diperdagangkan di bursa efek) dan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, efek-efek diukur sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI).

Diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Surat berharga untuk tujuan investasi yang diklasifikasikan ke dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Bila terjadi penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehan (termasuk amortisasi premi dan/atau diskonto) yang bersifat permanen, maka biaya perolehan Surat berharga yang bersangkutan diturunkan sebesar nilai wajarnya. Jumlah penurunan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi periode berjalan.

Premi atau diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

h. Loans (continued)

Restructuring of loans
The Bank accounts for troubled debtrestructuring in accordance with the type of restructuring.

In troubled debt restructuring which involves a repossesion of assets (including an equity interest of the debtor), the Bank records those assets (including an equity interest) at their fair values at the time of restructuring. The excess of the carrying amount of the loans over the fair value of assets received less estimated costs to sell, is recognised as a loss in the current year profit or loss.

When the contractual cash flows of a financial asset are renegotiated or otherwise modified and the renegotiation or modification does not result in the derecognition of that financial asset, the Bank shall recalculate the gross carrying amount of the financial asset and shall recognise a modification gain or loss in profit or loss. The gross carrying amount of the financial asset shall be recalculated as the present value of the renegotiated or modified contractual cash flows that are discounted at the financial asset's original effective interest rate. Any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the modified financial asset and are amortised over the remaining term of the modified financial asset.

i. Marketable securities

Marketable securities consist of Government Treasury Bills, Certificates of Bank Indonesia, bonds (including corporate bonds traded on the stock exchanges) and that are classified as financial assets held to maturity.

Subsequently accounted for, depending on their respective classifications, as either measured at amortised cost, measured at fair values through profit or loss or measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Measured at amortised cost
Marketable securities classified as amortised cost are stated at cost adjusted for unamortised premium and/or discount. If it is probable that the cost (including amortisation of premium and/or discount) of such marketable securities will not be fully recovered, a permanent decline in value is considered to have occurred and the individual security is written down to its fair value. Any such write-down is recognised as loss in the current period's profit or loss.

Premium or discount is amortised using effective interest method.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

i. Surat berharga (lanjutan)

Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Surat berharga yang diklasifikasikan ke dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah surat berharga yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan dan/atau tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi maupun nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Surat berharga tersebut dicatat pada nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar, termasuk pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian dari pelepasan, serta selisih perubahan nilai wajar, diakui langsung dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Biaya transaksi yang timbul pada saat perolehan surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan langsung pada laporan laba rugi pada saat terjadinya dan tidak dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai tercatat surat berharga.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dan perubahan nilai wajar disajikan sebagai penambah/pengurang terhadap surat berharga untuk tujuan investasi.

j. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali disajikan sebagai tagihan sebesar harga jual kembali yang disepakati dikurangi dengan selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati (pendapatan bunga yang ditangguhkan) dan penyisihan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak Surat Berharga itu dibeli hingga saat dijual kembali.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

k. Aset tetap

Bank menerapkan PSAK 216, "Aset Tetap". Revisi PSAK ini juga mengatur akuntansi tanah dan sekaligus mencabut PSAK 47, "Akuntansi Tanah".

Efektif 13 Desember 2025, Bank mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap atas tanah. Perubahan kebijakan akuntansi ini diperlakukan secara prospektif.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

i. Marketable securities (continued)

Measured at fair values through profit or loss

Securities classified as measured at fair value through profit or loss are securities that are held for trading purposes and/or do not meet the criteria to be classified as measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Such securities are recognized at fair value in the statement of financial position. Gains or losses arising from changes in fair value, including interest income, gains or losses on disposal, and changes in fair value, are recognized directly in profit or loss for the current period.

Transaction costs incurred on the acquisition of securities measured at fair value through profit or loss are expensed immediately in profit or loss when incurred and are not capitalized as part of the carrying amount of the securities.

The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment.

The allowance for impairment losses and changes in fair value are presented as additions to/deductions from the outstanding balance of marketable securities.

j. Securities purchased under resale agreements

Securities purchased under resale agreements are presented as receivables at the agreed resale price net of the difference between the purchase price and agreed resale price (unearned interest income) and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the agreed resale price are amortized using effective interest rate as interest income over the period, commencing from the acquisition date to the resale date.

Securities purchased under resale agreements are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

k. Fixed assets

The Bank implemented PSAK 216, "Fixed Assets". This revised PSAK also prescribes the accounting for land and therefore, it revoked PSAK 47, "Accounting for Land".

Effective December 13, 2025, the Bank has changed its accounting policy from cost model to revaluation model on measurement of fixed assets on the class of land. The changes in this accounting policy is applied prospectively.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Tanah disajikan pada nilai revaluasian dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasian. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Tanah tidak disusutkan.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah tersebut dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di surplus revaluasi pada bagian ekuitas, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini, kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi.

Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah yang dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari revaluasi sebelumnya, jika ada.

Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan yang dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari revaluasi sebelumnya, jika ada.

Hak atas tanah, termasuk biaya pengurusan legal hak yang timbul pada awal perolehan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembaharuan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau taksiran masa manfaat ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Biaya yang ditangguhkan tersebut disajikan sebagai "Aset Takberwujud".

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap". Akumulasi biaya perolehan meliputi biaya konstruksi dan biaya langsung lainnya. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan dan hanya akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Seluruh aset tetap, kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Pengakuan penyusutan dimulai ketika aset tersebut ada di lokasi dan kondisinya dan dapat dioperasikan sebagaimana yang dimaksud oleh manajemen. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

k. Fixed assets (continued)

Land are stated at their revalued amount, it is the fair value at the date of revaluation less accumulated impairment losses occurring after the date of revaluation. Revaluation carried out with sufficient regularity to ensure that regular carrying amount does not differ materially from the amount determined using fair value at reporting date. Land is not depreciated.

The increase from the revaluation of land are recognized as other comprehensive income and accumulated to revaluation surplus in equity, unless earlier revaluation decrease over the same asset been recognized in the profit on loss, in this case, the increase revaluation of up to write-downs due to the revaluation, are recognized in the statement of profit or loss.

Impairment in the carrying amount derived from the revaluation of land are charged to profit or loss when the account balance exceeds the decline in revaluation surplus of fixed assets that come from the previous revaluation, if any.

Impairment in the carrying amount derived from the revaluation of land dan buildings are charged to profit or loss when the account balance exceeds the decline in revaluation surplus of fixed assets that come from the previous revaluation, if any.

Land rights, including the right to legal expenditures incurred in the early acquisition of land, are stated at cost and is not amortised. Costs incurred in connection with the renewal or extension of land rights are deferred and amortised over the period of land rights or the estimated useful lives of the land, whichever is shorter. Deferred costs are presented as "Intangible Assets".

Assets under construction are stated at cost and are presented as part of "Fixed Assets". The accumulated costs include cost of construction and other direct costs. Assets under construction are not depreciated and they will only be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the constructed asset is ready for its intended use.

All fixed assets except land, are depreciated using the straight line method.

Recognition of depreciation commences when an asset is in its location and condition and capable of being operated in the manner intended by management. Depreciation of fixed assets, is calculated using the straight line to allocate the purchase price up to the residual value over the expected useful lives as follows:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Bangunan	20	5%	*Building*
Kendaraan bermotor	4 - 8	12,5% - 25%	*Vehicles*
Perlengkapan dan perabot kantor	4 - 16	6,25% - 25%	*Office equipment and furnitures*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung dari selisih antara jumlah *neto* hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi pada tahun yang sama ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

l. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak dan hak legal atas tanah.

Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tidak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh biaya yang berkaitan secara langsung dengan persiapan perangkat lunak tersebut sampai menjadi siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Perangkat lunak
Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan, dimana kinerjanya akan lebih baik dari yang semula diperkirakan. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Pengakuan amortisasi dimulai ketika perangkat lunak tersebut ada di kondisinya dan siap digunakan atau dioperasikan sebagaimana yang dimaksud oleh manajemen. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan masa manfaat perangkat lunak yang diestimasi, yaitu 4 (empat) tahun.

Hak legal atas tanah
Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek menggunakan metode garis lurus.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

k. *Fixed assets (continued)*

When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalised as part of the replacement cost of the asset's carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalisation criteria, are recognised in profit or loss upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

An item of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is recognised in profit or loss in the year the asset is derecognised.

l. *Intangible assets*

Intangible assets consist of software and land right.

Intangible assets is recognised only when its cost can be measured reliably and it is probable that expected future benefits that are attributable to it will flow to the Bank.

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible asset and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortisation.

Cost of software consists of all expenses directly attributable to the preparation of such software until it becomes ready to be used for its intended purpose.

Software
Subsequent expenditures on the software is capitalised only when it increases the future economic benefits, wherein its performance becomes better than originally expected. Expenditures with no additional future economic benefits from the software is directly recognised as expenses when incurred.

Recognition of amortisation commences when the software is in its condition and ready to be used or operated in the manner intended by management. Amortisation is calculated using the double declining balance method, based on the estimated useful lives of the software, which is 4 (four) years.

Land right
Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land recognised as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter using the straight-line method.

Intangible assets are derecognised when removed or when there are no further future economic benefits are expected from its use or disposal.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat suatu aset tidak dapat dipulihkan. Jika ada indikasi seperti itu dan nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah terpulihkan, aset atau unit penghasil kas diturunkan nilainya ke jumlah terpulihkan. Taksiran jumlah terpulihkan aset adalah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset dan nilai pakai. Nilai wajar adalah nilai yang diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi yang wajar dikurangi biaya penjualan sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang diharapkan muncul dari penggunaan aset secara terus menerus dan dari penjualannya pada akhir masa pakainya. Untuk aset yang tidak menghasilkan arus kas masuk independen yang besar, jumlah terpulihkan ditentukan untuk unit penghasil kas terkait aset tersebut. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Dalam membuat taksiran nilai pakai, estimasi arus kas masa mendatang didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu dari uang dan risiko spesifik untuk aset.

Untuk aset non-keuangan tidak termasuk aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan, apakah ada indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui mungkin tidak lagi ada atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut terjadi, jumlah terpulihkan diperkirakan.

Rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika ini kasusnya, jumlah tercatat aset meningkat menjadi jumlah terpulihkan tersebut. Jumlah peningkatan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, setelah dikurangi penyusutan atau amortisasi, sehingga seolah-olah kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi.

Pembalikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi kecuali aset dicatat pada nilai revaluasi, yang mana pembalikan diperlakukan sebagai peningkatan revaluasi. Setelah pembalikan itu, beban penyusutan atau amortisasi disesuaikan dalam tahun-tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah revisi nilai tercatat aset, dikurangi nilai sisa, secara sistematis atas sisa manfaatnya.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun baik secara individu maupun di tingkat unit penghasil kas mana yang sesuai dan ketika keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset non-keuangan Bank yang terdiri atas aset tetap dan perangkat lunak.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

m. Impairment of non-financial assets

The carrying values of non-financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. If such indication exists and where the carrying amount of an asset exceeds the estimated recoverable amount, the assets or cash-generating units are written down to their recoverable amount. The estimated recoverable amount of an asset is the higher of an asset's fair value and value-in-use. The fair value is the amount obtainable from the sale of an asset in an arm's length transaction less costs of disposal while value-in-use is the present value of estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life. For an asset that does not generate largely independent cash inflows, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. Impairment losses are recognised in profit or loss.

In assessing value-in-use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

For non-financial assets excluding intangible assets with indefinite useful life, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

Such reversal is recognised in profit or loss unless the asset is carried at revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase. After such a reversal, the depreciation or amortisation expense is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Intangible assets with indefinite useful lives are tested for impairment annually either individually or at the cash generating unit level as appropriate and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

As of December 31, 2025 and 2024, no impairment loss was recognised for the Bank's non-financial assets which consist of fixed assets and software.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

n. Aset lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari taksiran tagihan pajak, pendapatan yang masih akan diterima, beban dibayar di muka, agunan yang diambil alih, uang muka, persediaan dan lain-lain.

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aset lain-lain".
Agunan yang diambil alih disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut. Kelebihan saldo kredit yang diberikan yang belum dilunasi oleh peminjam di atas nilai dari AYDA, dibebankan terhadap penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasi dengan hasil penjualan AYDA diakui sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan pada saat dijual.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan AYDA dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan pada saat terjadinya. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

o. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Liabilitas segera diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Simpanan nasabah

Giro, tabungan dan deposito berjangka diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan nasabah dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

n. *Other assets*

Other assets include estimated tax receivables, interest receivables, prepaid expenses, foreclosed assets, advances, office supplies and others.

Prepaid expenses are amortised over their beneficial period using the straight-line method.

Foreclosed assets represent assets acquired by Bank, both from auction and non auction based on voluntary transfer by the debtor or based on debtor's approval to sell the collateral when the debtor could not fulfill their obligations to Bank. Foreclosed assets represent loan collateral acquired in settlement of loans and are presented in "Other assets".

Foreclosed assets are presented at their net realizable value. Net realizable value is the fair value of the foreclosed assets less estimated cost of liquidating the foreclosed assets. Any excess of the loan balance over the value of the foreclosed assets, which is not recoverable from the borrower, is charged to the allowance for impairment losses. The difference between net realizable value and proceed from selling is recognized as gains or losses in the current period.

Expenses related of foreclosed assets maintainance are charged to the current year statements of profit or loss as incurred. If there is permanent impairment then the carrying value is decreased to recognize the impairment and the loss is charged to the current year statements of profit or loss.

o. *Liabilities immediately payable*

Liabilities immediately payable represent obligations to third parties based on contract or order by those having authority that have to be settled immediately. Liabilities immediately payable are measured at their amortised cost using effective interest method.

p. *Deposits from customers*

Current accounts, savings deposits and time deposits are classified as liabilities measured at amortised cost, which are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of the deposits from customers and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

p. Simpanan nasabah (lanjutan)

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

q. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, *call money* dan *negotiable certificate of deposit*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada awalnya diakui pada nilai wajar pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dari bank lain dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

r. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank berupa obligasi.

Surat berharga yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan efek dikurangkan dari jumlah surat berharga yang diterbitkan.

Obligasi yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

p. Deposits from customers (continued)

Current accounts represent deposits from customers that can be used as a medium of exchange, which may be withdrawn at any time by check, or by transfer to a bank draft or other medium of exchanges.

Saving deposits represent deposit from customers who may only be withdrawn over the counter and Automated Teller Machine (ATM), if the agreed conditions are met, but may not be withdrawn by check or other equivalent instruments.

Time deposits represent deposit from customers that can be withdrawn only at a certain time in accordance with the agreement between the depositor and the Bank.

q. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of current accounts, saving deposits, time deposits, call money and negotiable certificate of deposit.

Deposits from other banks are classified as liabilities measured at amortised cost, which are initially recognised at fair value and are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from other banks and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

r. Securities issued

Securities issued by the Bank in the form of bonds.

Securities issued are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Incremental costs directly attributable to the issuance of securities are deducted from the amount of securities issued.

Bonds issued are recorded at par value less the balance of unamortized discount. Costs incurred in connection with the issuance of bonds recorded as a deduction of the related proceeds and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 212, "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak untuk tahun berjalan dan dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas posisi keuangan untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh digunakan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi laporan keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi *neto* tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan, atau apabila diajukan permohonan keberatan atau banding, ketika hasil keberatan atau banding sudah ditetapkan.

t. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada awalnya dinyatakan sebesar nilai wajar dan kemudian dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation

The accounting treatment for income taxes in accordance with PSAK 212, "Income Taxes".

Current tax expense is determined based on taxable income for the current year and is calculated using the applicable tax rates. Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the assets and liabilities of financial and tax reporting at each reporting date.

Deferred tax assets are recognised using the liability method of financial position for all temporary differences are deductible and tax losses that have not been used to the extent that the possibility of temporary differences may be used and tax losses that have not been used can be utilized to reduce taxable income in the future come.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each financial statement position date and the carrying value of deferred tax assets is no longer reduced to the extent that it is probable that sufficient taxable profit will be available to compensate for some or all of the benefits of the deferred tax assets.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that will apply in the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Tax effects related to the allowance for and/or reversal of all temporary differences during the year, including the effect of changes in tax rates, are recognised as "Benefit (Expense) Income Taxes - Deferred" and included in the net earnings or losses of the current year, except for transactions previously charged or credited to equity.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or if the petition filed an objection or appeal, as the result of an objection or appeal has been set.

t. Borrowings

Borrowings are funds received from other parties with the obligation of repayment in accordance with the terms of the borrowing agreement.

Borrowings are classified as financial liabilities measured at amortized cost, which was initially valued at fair value and subsequently stated at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated with the initial recognition of loans received and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Modal saham

Modal saham diukur dengan nilai nominal untuk seluruh saham yang diterbitkan dan diklasifikasikan sebagai bagian dari "Ekuitas". Biaya tambahan yang terkait langsung dengan penerbitan saham baru dikurangkan terhadap modal saham.

v. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif laba atau rugi bersih, distribusi dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

w. Pengakuan pendapatan dan beban bunga

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi dan beban bunga atas seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi berdasarkan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya diamortisasi yang mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal (*Stage* 3) diakui berdasarkan suku bunga efektif kredit yang disesuaikan.

Tingkat bunga ini dihitung dengan cara yang sama dalam perhitungan suku bunga efektif kecuali bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian dimasukkan dalam arus kas ekspektasian. Oleh karenanya, pendapatan bunga diakui atas aset keuangan dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi termasuk kerugian kredit ekspektasian. Dalam kondisi risiko kredit atas aset keuangan *Stage* 3 mengalami perbaikan sehingga aset keuangan tidak lagi diperlimbangkan mengalami penurunan nilai, pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset keuangan.

x. Pengakuan pendapatan dan beban provisi dan komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi atas aset dan liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari suku bunga efektif, dimasukkan dalam perhitungan suku bunga efektif. Pendapatan dan beban ini diamortisasi sepanjang umur aset atau liabilitas keuangan, atau selama periode risiko.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan atau jangka waktu perkreditan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

y. Penghasilan komprehensif lain

Penghasilan komprehensif lain terdiri item pendapatan atau beban (termasuk item yang sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas) yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan sesuai dengan PSAK.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

u. *Share capital*

Share capital is measured with a par value of the shares issued and classified as part of the "Equity". Incremental costs directly associated with the issuance of new shares are deducted against the share capital.

v. *Retained earnings*

Retained earnings are the cumulative balance of net income or loss, dividend distribution, prior period adjustments, the effects of changes in accounting policies and other capital adjustments.

w. *Interest income and expense recognition*

Interest income for financial assets held at either fair value through other comprehensive income or amortised cost and interest expense on all financial liabilities held at amortised cost are recognised in profit or loss using the effective interest method.

Interest income for financial assets that are either held at fair value through other comprehensive income or amortised cost that have become credit impaired subsequent to initial recognition (Stage 3) is recognised using the credit adjusted effective interest rate.

This rate is calculated in the same manner as the effective interest rate except that expected credit losses are included in the expected cash flows. Interest income is therefore recognised on the amortised cost of the financial asset including expected credit losses. Should the credit risk on a Stage 3 financial asset improve such that the financial asset is no longer considered credit impaired, interest income recognition reverts to a computation based on the rehabilitated the carrying value of the financial asset gross.

x. *Fees and commission income and expense*

Fees and commissions income and expense of financial assets and liabilities, which are an integral part of the effective interest rate are being taken into account in calculating the effective interest rate. These income and expense are amortised during the life of financial assets or liabilities or during the period of the risk.

Commissions and fees not related to lending activities or loan period, or not material are recognised as revenues and expenses at the time the transactions occur.

Fees and commission income related to lending activities are recognised as part of interest income.

y. *Other comprehensive income*

Other comprehensive income comprises items of income or expense (including items previously presented under the statements of changes in equity) that are not recognised in profit or loss for the year in accordance with PSAK.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

z. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka pendek; dan
- Sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah
- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

z. *Lease*

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Bank can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- *Short term lease; and*
- *Low value asset*
- *The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  1. *The Bank has the right to operate the asset;*
  2. *The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.*

The Bank recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use asset is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

z. Sewa (lanjutan)

Bank mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

aa. Imbalan kerja

Bank menerapkan PSAK 219, "Imbalan Kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, baik jangka pendek dan jangka panjang. Bank juga diharuskan untuk mengakui kewajiban dan beban pada saat karyawan telah memberikan jasa serta entitas telah menerima manfaat ekonomi dari jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, tunjangan, iuran jaminan sosial, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja, seperti pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bhakti dan penghargaan masa bhakti proporsional, dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.6/2023.

Sehubungan dengan imbalan pensiun, Bank memiliki program pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun imbalan pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Pendirian Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No.KEP-479/KM.17/1996 tanggal 30 Desember 1996.

Program imbalan pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.
Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

z. Lease (continued)

The Bank account for a leases modification as a separate leases if both:

- *the modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *the consideration for the leases increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

aa. Employee benefit

Bank apply PSAK 219, "Employee Benefits", which regulates the accounting and disclosure for employee benefits, both short-term and long-term. The Bank also requires recognition of liability and expense when an employee has provided service and the entity consumes economic benefit arising from the service.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when owed to employees on an accrual basis.

Short-term employee benefits such as salary, benefits, social security contributions, bonuses and non-monetary rewards are recognised over the period the services are rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Long-term employee benefits and post-employment benefits

Long-term employee benefits and post-employment benefits, such as pensions, long service leave, service pay benefits and proportional service pay benefits, calculated based on company regulations in accordance with Job Creation Law No.6/2023.

In connection with pension benefits, the Bank has a defined benefit pension plan for all its permanent employees. Defined benefit pension plan is funded through payments to Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur are determined by periodic actuarial calculations. Establishment of the Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its letter No.KEP-479/KM.17/1996 dated December 30, 1996.

Defined benefit plan is a pension plan that defines the amount of pension benefit that an employee will receive on retirement which is usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The number of employee contributions to pension plans is set at 5% of the basic salary of the employee concerned and the rest is borne by the Bank.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

aa. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja (lanjutan)

Beban kewajiban masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode *vesting*). Dalam hal ini biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode *vesting*.

Liabilitas imbalan kerja merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Pengukuran kembali dapat timbul dari perubahan pada asumsi-asumsi aktuarial yang dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain dan disajikan bagian dari penghasilan komprehensif lain di ekuitas.

Biaya jasa lalu diakui segera di laporan laba rugi.

Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya jumlah program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh dana pensiun Bank akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan, oleh karena itu, Bank tidak perlu melakukan penyesuaian atas imbalan pensiun yang disediakannya.

Program imbalan jangka panjang lainnya

Diluar program pensiun imbalan pasti, Bank juga memberikan imbalan yang bersifat jangka panjang lainnya, yaitu meliputi penghargaan masa bhakti, penghargaan masa bhakti proporsional, cuti besar dan uang duka.

Sama seperti imbalan pensiun, liabilitas dan beban pendanaan penghargaan masa bhakti, penghargaan masa bhakti proporsional, cuti besar dan uang duka dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

aa. *Employee benefit (continued)*

Long-term employee benefits and post- employment benefits (continued)

The expense of past liabilities are recognised immediately in the statement of profit or loss, except for the payment of the reward depends on whether the employee remaining in service for a certain period of time (the vesting period). In this case the past service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period.

Employee benefit liabilities is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets and adjusted for gains or losses and past service costs not yet recognised. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows future using interest rates of government bonds (considering currently there is no active market for high quality corporate bonds) in the same currency with the benefit that will be paid and maturity roughly equal to the time to maturity remuneration is concerned.

Remeasurement may arise from changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income and presented part of other comprehensive income in equity.

Past service cost is recognised immediately in the statement of profit or loss.

Banks should provide a minimum amount of pension benefits specified in accordance with the Labor Law. Since the Labor Law sets the formula for calculating the minimum amount of benefits, basically the number of pension plans under Labor Law represent defined benefit plans. The calculation of pension benefits made by the actuary shows that the expected benefits are provided by the Bank's pension fund will exceed the minimum pension benefits of the Labor Law, therefore, the Bank did not need to make adjustments on pension benefits that it provides.

Other long-term benefit plan

Outside the defined benefit pension plan, the Bank also provides rewards that are other long terms, which includes service pay benefits, proportional service pay benefits, long service leave and mourning.

Same as pension benefits, liabilities and financing costs of the service pay benefits, proportional service pay benefits, long service leave and mourning is calculated by independent actuaries using the projected unit credit method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

aa. Imbalan kerja (lanjutan)

Jasa produksi

Bank juga memberikan jasa produksi kepada karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi. Estimasi besarnya penyisihan tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank, dan kemudian dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Jika terdapat selisih antara jumlah yang dicadangkan dengan realisasinya, maka selisih tersebut dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Kesejahteraan pensiun pegawai

Bank memberikan dana kesejahteraan pensiun pegawai kepada karyawan Bank. Estimasi besarnya penyisihan tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank, dan kemudian dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika terdapat selisih antara jumlah yang dicadangkan dengan realisasinya, maka selisih tersebut dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Jasa pengabdian dan penghargaan masa bhakti bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Bank memberikan jasa pengabdian kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank pada setiap akhir masa jabatannya. Besarnya jasa pengabdian direksi secara bersama-sama ditetapkan maksimum 2,5% dari laba setelah pajak tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan, dengan perbandingan Direktur menerima 90% dari jumlah yang diterima Direktur Utama.

Besarnya jasa pengabdian bagi Komisaris Utama ditetapkan sebesar 70% dari jasa pengabdian yang diterima Direktur Utama, sedangkan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari jumlah yang diterima Komisaris Utama. Jasa pengabdian tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Bank memberikan Penghargaan Masa Bhakti kepada Direksi Bank yang telah menyelesaikan masa jabatannya dan tidak terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Besarnya penghargaan masa bhakti bagi Direktur Utama ditetapkan maksimum sebesar 10 kali penghasilan terakhir yang diterima. Penghargaan Masa Bhakti untuk Direktur ditetapkan 90% dari Penghargaan Masa Bhakti yang diterima Direktur Utama. Penghargaan Masa Bhakti tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Berdasarkan Siaran Pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada April 2022, menyebutkan bahwa PSAK 219: Imbalan Kerja paragraf 70 – 74 mensyaratkan entitas untuk mengatribusikan imbalan ke periode jasa berdasarkan formula imbalan program dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan menurut program sampai tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan selanjutnya yang material berdasarkan program, selain dari kenaikan gaji berikutnya.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

aa. Employee benefit (continued)

Bonuses

Banks also provide bonuses to employees, the Board of Commissioners and Board of Directors. Estimates of the amount of the allowance is determined based on the experiences of the previous year, taking into account the financial capacity of the Bank, and then require approval by the General Meeting of Shareholders. If there is a difference between the amount reserved to its realization, the difference is charged to profit and loss for the year.

Employee pension welfare

Bank provides employee pension welfare fund to the employees of the Bank. Estimates of the amount of the allowance is determined based on the experiences of the previous year, taking into account the financial capacity of the Bank, and then require approval by the General Meeting of Shareholders. If there is a difference between the amount reserved to its realization, the difference is charged to profit and loss for the year.

Dedication services and service pay benefits for the Directors and Board of Commissioners

The Bank provides dedication services to the Board of Directors and the Board of Commissioners at the end of his term. The amount of directors dedication services jointly set a maximum of 2.5% from profit after tax financial year before the end of the services, by comparison Directors receives 90% of the amount received by the President Director.

The amount of dedication services for the Commissioner set at 70% of the service pay benefits received by President Director, while Commissioners set at 90% of the amount received President Commissioner. The dedication services is reserved proportionally each year during his services, which is recognised as expenses in the current year.

The Bank provides end of service pay benefits to its Directors who had completed his services and was not re-elected for another term. The amount of the end of service pay benefits to the President Director is set to a maximum of 10 times the last income received. End of service pay benefits for Directors shall be 90% of the end of service pay benefits received by President Director. The end of service pay benefits proportionally reserved each year during his services, which is recognised as expenses in the current year.

Based on the Press Release issued by Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) of Iketan Akuntan Indonesia (IAI) in April 2022, states that PSAK 219: Employee Benefits paragraphs 70 – 74 requires an entity to attribute benefits to the period of service based on the plan benefit formula from the date when employee service first leads to benefits under the plan until the date when further service by the employee will lead to no material amount of further benefits under the plan, other then from further salary increases.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ab. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".
Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

(i). Suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (a) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (b) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (c) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
(ii). suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
(iii). suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai venturer;
(iv). suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
(v). suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (i) atau (iv);
(vi). suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (iv) atau (v);
(vii). suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (Catatan 35).

ac. Laba bersih per saham dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

ad. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Bank diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan Bank pada tahun ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Bank.

ae. Segmen operasi

Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain entitas, yang mana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ab. Related parties transactions

Bank transactions with related parties. In these financial statements, the term related parties in accordance with PSAK 224 on "Related Party Disclosures".
The Bank considers the following as its related parties:

(i). a person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (a) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank, (b) has significant influence over the Bank or (c) has joint control over the Bank;
(ii). an entity which is a member of the same group as the Bank;
(iii). an entity which is a joint venture of a third party in which the Bank has ventured in;
(iv). a member of key management personnel of the Bank;
(v). a close family member of the person described in clause (i) or (iv);
(vi). an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (iv) or (v);
(vii). an entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank.

Transactions with related parties are made on terms agreed by both parties, where such requirements may not be the same as other transactions undertaken with third parties. Material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements and the relevant details have been presented in note of the financial statements (Note 35).

ac. Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted average number of shares issued and fully paid during the year.

ad. Dividend

Dividend distribution to the Bank's shareholders is recognised as a liability in the financial statements of the Bank in the year the dividends are approved by the shareholders of the Bank.

ae. Operating segment

An operating segment is a component of an entity engaged in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components of the entity, which whose operating results are regularly reviewed by the operating decision maker to make decisions about resource allocated to the segment and assess its performance, and financial information is available that can be separated.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ae. Segmen operasi (lanjutan)

Karena pada saat ini Direksi Bank hanya menelaah alokasi aset keuangan tertentu di antara nasabah ritel, nasabah usaha kecil dan menengah (UKM) serta nasabah Middle Market, tetapi tidak untuk hasil operasi lainnya serta informasi keuangan yang dapat dipisahkan juga tidak tersedia di Bank, maka manajemen berkeyakinan bahwa Bank pada saat ini dikelola sebagai segmen operasi tunggal.

af. Provisi

Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain entitas, yang mana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

ag. Liabilitas dan aset kontinjensi

Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain entitas, yang mana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

ah. Peristiwa setelah periode pelaporan

Setiap peristiwa setelah periode pelaporan yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank (*adjusting event*) akan disesuaikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan adjusting event, jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

ai. Transaksi dan penjabaran mata uang asing

Bank menerapkan PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing".

Transaksi dalam mata uang asing awalnya dicatat menggunakan kurs tukar mata uang fungsional pada tanggal transaksi. Pada tanggal posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup mata uang fungsional. Aset dan liabilitas nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs tukar mata uang fungsional pada tanggal awal transaksinya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ae. Operating segment (continued)

Because at this time the Board of Directors of the Bank only examine the allocation of financial assets of certain among retail customers, clients small and medium enterprises (SMEs) as well as the customers of Middle Market, but not to the results of other operations as well as financial information that can be separated is also not available in the Bank, management believes that the Bank is currently managed as a single operating segment.

af. Provision

An operating segment is a component of an entity engaged in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components of the entity, which whose operating results are regularly reviewed by the operating decision maker to make decisions about resource allocated to the segment and assess its performance, and financial information is available that can be separated.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If the outflow of resources to settle the obligation is most likely not the case, then the provision is cancelled.

ag. Contingent liabilities and assets

An operating segment is a component of an entity engaged in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components of the entity, which whose operating results are regularly reviewed by the operating decision maker to make decisions about resource allocated to the segment and assess its performance, and financial information is available that can be separated.

ah. Events after the reporting period

Each event after the reporting period that led to additional information about the financial position of the Bank (adjusting event) will be adjusted in the financial statements. Events after the reporting period that is not an adjusting event, if any, will be disclosed when it has a material impact on the financial statements.

ai. Foreign currency transaction and translations

The Bank adopted PSAK 221 : "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

Transactions in foreign currencies are initially recorded using the functional currency exchange rate at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are restated using the closing functional currency exchange rate at the financial position date. Non-monetary assets and liabilities that are measured in terms of historical cost in foreign currency are translated using the functional currency exchange rates at the date of the initial transactions.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ai. Transaksi dan penjabaran mata uang asing (lanjutan)

Aset dan liabilitas non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs mata uang fungsional pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Keuntungan dan kerugian mata uang asing, baik yang telah terealisasi maupun belum terealisasi, tercermin dalam laporan laba rugi.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang menggunakan kurs tengah berdasarkan kurs penutupan Bank Indonesia (pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat):

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ai. Foreign currency transaction and translations (continued)

Non-monetary assets and liabilities measured at fair value in a foreign currency are translated using the functional currency exchange rates at the date when fair value was determined.

Foreign exchange gains and losses, both realised and unrealised, are reflected in the profit or loss.

Below are the major exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2025 and 2024 using the middle rates based on Bank Indonesia closing rate (16.00 hours Western Indonesian Time):

	2025	2024	
Euro Eropa	19.571	16.758	*European Euro*
Dolar Amerika Serikat	16.675	16.095	*United States Dollar*
Dolar Singapura	12.965	11.845	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	11.152	10.014	*Australian Dollar*
Yen Jepang	107	103	*Japan Yen*
Yuan China	2.385	2.205	*China Yuan*
Ringgit Malaysia	4.108	3.598	*Malaysian Ringgit*

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:
- nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan,
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

In the preparation of financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia required estimates and assumptions that affect:
- *reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements,*
- *the amount of revenues and expenses during the reporting period.*

Although these estimates are based on Management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Significant professional judgment and estimates in determining the amounts recognised in the financial statements are as follows:

Going concern

The Bank's management made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada catatan 2d.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Bank menampilkan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1 - nilai wajar berdasarkan harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif;
- Tingkat 2 - nilai wajar yang menggunakan *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya diperoleh dari harga); dan
- Tingkat 3 - nilai wajar yang menggunakan *input* yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

Kontinjensi

Manajemen Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen Bank tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Classification financial assets and liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in note 2d.

Fair value of financial instruments

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as prepayment rates and default rate assumptions.

The Bank presents the fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy:

- *Level 1 - the fair value is based quoted prices (unadjusted) in active markets;*
- *Level 2 - the fair value uses inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable, either directly (ie as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and*
- *Level 3 - the fair value uses inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

Contingencies

Management of the Bank is involved in legal proceedings. Estimated cost for the possibility of settlement of claims has been developed through consultation with the assistance of Bank's legal counsel based on an analysis of potential results. Management of the Bank does not believe that the outcome of this case will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimate or the effectiveness of the strategies associated with it.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. Banks base their assumptions and estimates that are used on parameters available when the financial statements are prepared.

Assumptions and circumstances regarding future developments are subject to change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. The changes are reflected in the assumptions used at the time of the occurrence.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Penurunan nilai instrumen keuangan

Bank menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya diamortisasi berdasarkan PSAK 109 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi.

PSAK 109 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu seperti, antara lain, kesulitan keuangan debitur, penurunan kualitas kredit; dan
ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang mencerminkan:
   a. Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil;
   b. Nilai waktu dari uang; dan
   c. Informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada tanggal pelaporan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Penghitungan kerugian kredit ekspektasian Bank berdasarkan PSAK 109 adalah keluaran dari model kompleks dengan sejumlah asumsi mendasar mengenai pilihan *input* variabel dan saling ketergantungannya. Elemen-elemen dari model kerugian kredit ekspektasian yang dianggap sebagai pertimbangan dan estimasi akuntansi meliputi:

a. Model penilaian kredit internal, yang menetapkan *probability of default* untuk tingkat individual.
b. Kriteria penilaian jika ada peningkatan risiko kredit yang signifikan dan oleh karena itu cadangan untuk aset keuangan harus diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur dan penilaian kualitatif;
c. Pengembangan model kerugian kredit ekspektasian, termasuk berbagai formula dan pilihan *input*;
d. Penentuan asosiasi antara skenario makroekonomi dan, *input* ekonomi, seperti nilai tukar Dolar Amerika Serikat ke Rupiah dan suku bunga BI, dan pengaruhnya terhadap *probability of defaults, exposure at defaults* dan *loss given defaults*; dan
e. Pemilihan skenario forward-looking untuk makroekonomi dan bobot probabilitasnya, untuk mendapatkan *input* ekonomi ke dalam model kerugian kredit ekspektasian.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Impairment losses on financial instruments

The Bank review their financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at amortised cost under PSAK 109 which required to recognise the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss.

PSAK 109 incorporates forward-looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation.

In carrying out the impairment review, the following management's judgements are required:

i. Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as, amongst others, financial difficulties of the debtor's, deterioration of the credit quality of the debtor's; and
ii. Determination of expected credit life that reflect:
   a. An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
   b. The time value of money; and
   c. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The Bank's expected credit loss calculations under PSAK 109 are outputs of complex models with a number of underlying assumptions regarding the choice of variable inputs and their interdependencies. Elements of the expected credit loss models that are considered accounting judgements and estimates include:

a. Internal credit grading model, which assigns PDs to the individual grades;
b. Criteria for assessing if there has been a significant increase in credit risk and so allowances for financial assets should be measured on a life time expected credit loss basis and the qualitative assessment;
c. Development of expected credit loss models, including the various formulas and the choice of inputs;
d. Determination of associations between macroeconomic scenarios and, economic inputs, such as USD to IDR exchange rate and BI rate, and the effect on probability of defaults, exposure at defaults and loss given defaults; and
e. Selection of forward-looking macroeconomic scenarios and their probability weightings, to derive the economic inputs into the expected credit loss models.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Umur ekonomis aset tetap dan aset takberwujud

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan.

Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap dan aset takberwujud didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban usaha.

Penurunan nilai atas aset non-keuangan

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non-finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Bank yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kinerja dibawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
- Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diputihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal dan perbedaan temporer sampai pada batas adanya kemungkinan bahwa keuntungan yang dikenai pajak akan tersedia dimana kerugian dapat dimanfaatkan. Pertimbangan manajemen yang signifikan juga diperlukan untuk menentukan jumlah dari aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu yang mungkin terjadi dan tingkatan dari keuntungan yang dikenakan pajak di masa yang akan datang bersama dengan strategi perencanaan pajak di masa yang akan datang.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Useful life of fixed assets and intangible assets

The Bank estimate the useful lives of fixed assets and intangible assets based on the period over which the assets are expected to be available for use.

The estimated useful lives of fixed assets are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets.

In addition, estimation of the useful lives of fixed assets and intangible assets is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of fixed assets would increase operating expenses.

Impairment of non-financial assets

Bank assesses the impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Factors that are considered important by the Bank which could lead to impairment review include the following:

- *Performance is below average are significant relative to historical or projected results of operations results are expected in the future;*
- *Significant changes on how to use the acquired assets or the strategy for the overall business; and*
- *The negative trend of the industry and the economy are significant.*

The Bank recognises an impairment loss when the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. Recoverable amount is the higher value between fair value less costs to sell and value in use of the asset (cash-generating unit). Estimated recoverable amount for individual assets or, if not possible, for the cash-generating unit in which the asset forming part of the unit.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognised for all unused tax losses and temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilised. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Nilai sekarang dari kewajiban pensiun

Biaya untuk program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca-kerja ditentukan menggunakan penilaian aktuaria. Penilaian aktuarial melibatkan pembuatan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian dari aset yang diharapkan, peningkatan gaji di masa depan, tingkat kematian dan peningkatan jumlah pensiun di masa depan. Karena sifat jangka panjang rencana-rencana ini, estimasi memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

The present value of pension liabilities

The cost for defined benefit pension plan and post-employment benefits is determined using actuarial valuation. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected return on assets, future salary increases, mortality rates and an increase in the number of pensions in the future. Because the long-term nature of these plans, estimates have significant uncertainties.

4. KAS / *CASH*

	2025	2024	
Rupiah	685.996.826.150	593.809.031.350	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	777.021.650	495.371.910	*United States Dollars*
Dolar Singapura	217.086.797	369.783.942	*Singapore Dollars*
Euro Eropa	178.100.150	192.215.579	*European Euro*
Dolar Australia	74.831.530	42.056.721	*Australian Dollars*
Ringgit Malaysia	36.792.636	13.419.999	*Malaysian Ringgit*
Yuan China	9.658.096	7.055.968	*China Yuan*
Yen Jepang	5.325.000	5.151.500	*Japan Yen*
Jumlah	**687.295.642.009**	**594.934.066.970**	***Total***

Saldo kas dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) masing-masing sebesar Rp114,146,900,000 dan Rp105,861,600,000 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Cash balance in Rupiah includes cash at the ATM machine (Automatic Teller Machine), amounted Rp114,146,900,000 and and Rp105,861,600,000 As of December 31, 2025 and 2024 respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	2025	2024	
Rupiah	991.598.826.816	1.504.618.017.847	*Rupiah*
Mata uang asing:			*Foreign currencies*
Dollar Amerika Serikat	6.337.204.019	6.116.779.531	*United States Dollar*
Total	**997.936.030.834**	**1.510.734.797.378**	*Total*

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) diungkapkan pada Catatan 43a.

Minimum Statutory Reserves (GWM) Bank in accordance with Bank Indonesia (BI) Regulation Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) are disclosed in Note 43a.

6. GIRO PADA BANK LAIN / *CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

Tidak terdapat giro pada bank lain kepada pihak berelasi.

There was no related party in current accounts with other banks.

a. Berdasarkan nama bank / *By counterparty bank*

	2025	2024	
Bank Umum			***Commercial Bank***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	589.829.414	586.587.070	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	554.078.816	552.803.598	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	231.536.288	231.057.074	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	211.321.512	236.308.873	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	13.502.159	15.433.873	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
	1.600.270.189	1.622.200.486	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollars***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.581.046.380	11.946.267.657	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	164.665.625	160.950.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	111.617.948	141.636.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	12.857.329.953	12.248.853.657	
Dolar Singapura			***Singapore Dollars***
PT Bank DBS Indonesia	212.626.820	226.231.383	*PT Bank DBS Indonesia*
	212.626.820	226.231.383	
Dolar Australia			***Australian Dollars***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.223.883.062	743.427.845	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
	1.223.883.062	743.427.845	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) / 6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

a. Berdasarkan nama bank (lanjutan) / a. By counterparty bank (continued)

	2025	2024	
Mata uang asing (lanjutan)			*Foreign currencies (continued)*
Bank Pemerintah Daerah			*Regional Development Bank*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	81.402.104	3.138.045.887	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	55.732.562	56.092.562	*PT Bank Pembangunan Daerah Papua*
PT Bank Jakarta	29.340.593	29.580.593	*PT Bank Jakarta*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	9.023.491	2.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
Bank Pembangunan Daerah Timor Timur	-	25.400.862	*Bank Pembangunan Daerah Timor Timur*
	175.498.750	3.251.119.904	
Jumlah	16.069.608.774	18.091.833.276	***Total***
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.722.680)	(28.705.478)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**16.066.886.094**	**18.063.127.798**	***Total - net***

Tidak terdapat giro pada bank lain yang diblokir dan dijadikan agunan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There are no other banks were blocked and used as collateral on December 31, 2025 and 2024.

b. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / b. Average annual interest rates

	2025	2024	
Rupiah	0,09%	0,20%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,00%	0,00%	*Foreign currencies*

c. Penyisihan kerugian penurunan nilai / c. Allowance for impairment losses

	2025	2024	
Saldo awal	28.705.478	28.728.038	*Beginning balance*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(25.400.862)	-	*Written-off during the year*
Pemulihan selama tahun berjalan	(581.936)	(22.560)	*Recovery during the year*
Saldo akhir	**2.722.680**	**28.705.478**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible current accounts with other banks.

d. Berdasarkan kolektibilitas / d. By collectibility

Kolektibilitas giro pada bank lain sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 43b.

Collectibility current accounts with other banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 43b.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan pada bank lain kepada pihak berelasi.

a. **Berdasarkan jenis dan jatuh tempo**

	Jatuh tempo (bulan)	2025	2024	*Maturity (month)*	
Deposit facilities	< 1	2.782.850.149.969	399.941.683.676	*< 1*	*Deposit facilities*
Interbank call money	< 1	355.000.000.000	-	*< 1*	*Interbank call money*
Jumlah		3.137.850.149.969	399.941.683.676		*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(5.742.187)	-		*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih		**3.137.844.407.782**	**399.941.683.676**		***Total - net***

b. **Berdasarkan jenis dan *counterparty***

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Deposit facilities			***Deposit facilities***
Bank Indonesia	2.782.850.149.969	399.941.683.676	*Bank Indonesia*
Interbank call money			***Term deposit***
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda)	165.000.000.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda)*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	100.000.000.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	50.000.000.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk	40.000.000.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Jumlah	3.137.850.149.969	399.941.683.676	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.742.187)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**3.137.844.407.782**	**399.941.683.676**	***Total - net***

c. **Tingkat suku bunga rata-rata per tahun**

	2025	2024	
Deposit facilities	4,48%	5,25%	*Deposit facilities*
Interbank call money	4,35%	-	*Interbank call money*

d. **Penyisihan kerugian penurunan nilai**

	2025	2024	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	5.742.187	-	*Allowance during the year*
Saldo akhir	**5.742.187**	**-**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

d. **Berdasarkan kolektibilitas**

Kolektibilitas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada catatan 43c.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

There was no related party in placement with Bank Indonesia and other banks.

a. ***By type and maturity***

b. ***By type and counterparty***

c. ***Average annual interest rates***

d. ***Allowance for impairment losses***

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible placements with Bank Indonesia and other banks.

d. ***By collectibility***

Collectibility placements with Bank Indonesia and other banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in note 43c.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

8. KREDIT YANG DIBERIKAN / *8. LOANS*

a. Berdasarkan jenis dan kualitas kredit / *a. By type and loan quality*

	2025				
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Pihak berelasi					*Related parties*
Modal kerja	185.807.092	643.390.556	7.746.248.920	8.575.446.568	*Working capital*
Konsumsi	22.461.338.503	128.810.052	252.838.705	22.842.987.260	*Consumer*
Investasi	247.579.058	-	42.290.689	289.869.747	*Investment*
	22.894.724.653	772.200.608.00	8.041.378.314	31.708.303.575	
Pihak ketiga					*Third parties*
Konsumsi	11.653.254.177.040	66.046.810.425	80.452.957.613	11.799.753.945.078	*Consumer*
Modal kerja	620.749.361.700	78.492.959.363	264.283.518.163	963.525.839.226	*Working capital*
Investasi	152.281.533.077	27.026.537.203	109.627.749.151	288.935.819.431	*Investment*
Sindikasi	178.461.246.580	-	186.773.737.791	365.234.984.371	*Syndication*
Karyawan	488.473.973.420	4.479.320.927	3.590.119.162	496.543.413.509	*Employee*
	13.093.220.291.817	176.045.627.918	644.728.081.880	13.913.994.001.615	
Jumlah	13.116.115.016.470	176.817.828.526	652.769.460.194	13.945.702.305.190	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(14.583.358.225)	(13.552.222.025)	(438.454.048.123)	(466.589.628.373)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**13.101.531.658.245**	**163.265.606.501**	**214.315.412.071**	**13.479.112.676.817**	***Total - net***

	2024				
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Pihak berelasi					*Related parties*
Konsumsi	916.050.174	-	7.746.248.920	8.662.299.094	*Consumer*
	916.050.174	-	7.746.248.920	8.662.299.094	
Pihak ketiga					*Third parties*
Konsumsi	10.196.164.836.106	127.458.681.879	428.195.666.351	10.751.819.184.336	*Consumer*
Modal kerja	900.840.722.740	7.368.948.381	32.098.259.878	940.307.930.999	*Working capital*
Investasi	125.532.526.610	457.467.588	3.444.557.050	129.434.551.248	*Investment*
Sindikasi	462.610.791.171	-	-	462.610.791.171	*Syndication*
Karyawan	472.634.037.574	1.116.653.088	-	473.750.690.662	*Employee*
	12.157.782.914.201	136.401.750.936	463.738.483.279	12.757.923.148.416	
Jumlah	12.158.698.964.375	136.401.750.936	471.484.732.199	12.766.585.447.510	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(33.102.661.118)	(9.234.605.419)	(305.607.828.060)	(347.945.094.597)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**12.125.596.303.257**	**127.167.145.517**	**165.876.904.139**	**12.418.640.352.913**	***Total - net***

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *8. LOANS (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. By economic sectors*

	2025	2024	
Rumah tangga	12.320.477.370.144	10.873.538.745.180	*Households*
Perdagangan besar dan eceran	532.748.347.095	645.007.107.537	*Wholesale and retail*
Konstruksi	460.484.374.701	491.555.431.926	*Construction*
Industri pengolahan	121.120.581.629	213.849.739.912	*Manufacturing*
Real estate, usaha persewaan dan perusahaan jasa	202.718.950.408	38.342.835.973	*Real estate, leasing services and servicing companies*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	111.240.118.290	126.277.905.837	*Accommodation and food and beverages*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	39.845.860.969	76.997.862.976	*Agriculture, hunting and forestry*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	55.283.389.485	76.103.503.389	*Services in social, art culture, recreation and other individual services*
Perikanan	26.380.680.331	32.901.916.204	*Fishing*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	20.711.623.040	23.476.564.045	*Health services and social activities*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	14.567.952.696	19.911.658.447	*Transportation, warehousing and communication*
Listrik, gas dan air	13.823.534.794	19.680.991.057	*Electricity, gas and water*
Jasa pendidikan	10.151.044.775	11.991.620.842	*Education services*
Pertambangan dan penggalian	15.898.824.227	20.853.915.774	*Mining and excavation*
Perantara keuangan	149.652.606	96.096.648.411	*Financial intermediary*
Jumlah	13.945.702.305.190	12.766.585.447.510	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(466.589.628.373)	(347.945.094.597)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**13.479.112.676.817**	**12.418.640.352.913**	***Total - net***

Rincian kredit yang diberikan kepada sektor ekonomi "Rumah tangga" adalah sebagai berikut:

Details of loans to the economic sectors "Households" as follows:

	2025	2024	
Kredit Multiguna	12.012.780.206.248	10.698.809.902.406	*Multipurpose Loans*
Kredit Pemilikan Rumah	307.697.163.896	274.728.842.774	*House Ownership Loans*
Jumlah	**12.320.477.370.144**	**10.873.538.745.180**	***Total***

Kredit Multiguna merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan untuk keperluan konsumer.

Multipurpose Loan represent loans facility granted to civil servants (PNS) and employees for the purposes of the consumer.

Kredit Pemilikan Rumah merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan pembangunan atau renovasi rumah.

House Ownership Loans represent loans facilities granted for the construction or renovation of house.

Pembayaran kredit tersebut di atas sebagian besar dilakukan melalui pemotongan gaji bulanan oleh Bank.

Loans payments mentioned above are mostly done through monthly payroll deductions by the Bank.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *8. LOANS (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By maturity date*

Jangka waktu kredit diklasifikasikan berdasarkan periode kredit sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Loans period classified by loans period as specified in the loans agreement and the remaining period until the maturity date is as follows:

Berdasarkan periode perjanjian kredit / *Based on the period of the loans agreement*

	2025	2024	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	88.061.953.874	328.516.107.281	*1 year or less*
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	228.917.624.089	188.099.670.950	*More than 1 year to 2 years*
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	3.793.039.024.714	2.786.265.398.839	*More than 2 years to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	9.835.683.702.513	9.463.704.270.440	*More than 5 years*
Jumlah	13.945.702.305.190	12.766.585.447.510	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(466.589.628.373)	(347.945.094.597)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**13.479.112.676.817**	**12.418.640.352.913**	***Total - net***

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *Based on the remaining period to maturity*

	2025	2024	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	1.281.820.760.706	1.253.045.698.879	*1 year or less*
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	657.386.226.162	565.504.552.379	*More than 1 year to 2 years*
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	4.107.096.185.695	3.118.818.600.722	*More than 2 years to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	7.899.399.132.627	7.829.216.595.530	*More than 5 years*
Jumlah	13.945.702.305.190	12.766.585.447.510	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(466.589.628.373)	(347.945.094.597)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**13.479.112.676.817**	**12.418.640.352.913**	***Total - net***

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *d. Average annual interest rates*

	2025	2024	
Kredit yang diberikan	11,41%	11,17%	*Loans*

e. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai / *e. Movements in the allowance for impairment losses*

	2025	2024	
Saldo awal	347.945.094.597	262.691.065.528	***Beginning balance***
Penyisihan selama tahun berjalan	159.043.237.984	112.852.553.892	*Allowance during the year*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(40.398.704.208)	(27.598.524.823)	*Written-off during the year*
Saldo akhir	**466.589.628.373**	**347.945.094.597**	***Ending balance***
Minimum penyisihan kerugian menurut Otoritas Jasa Keuangan	599.083.136.928	573.636.601.895	*Minimum of Allowance for losses by the Financial Services Authority*
Rasio	77,88%	60,66%	*Ratio*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses of loans is adequate.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f. Berdasarkan *stage*

Berikut adalah perubahan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan *stage* pada tanggal 31 Desember 2025:

8. *LOANS (continued)*

f. *By stage*

Below is movement of loans based on stages as of December 31, 2025:

	2025				
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	*Jumlah / Total*	
Saldo awal	12.158.698.964.375	136.401.750.936	471.484.732.199	12.766.585.447.510	***Beginning balance***
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage 2*)	(134.890.443.717)	135.559.822.869	(669.379.152)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage 3*)	(242.813.518.356)	(41.625.622.517)	284.439.140.873	-	*Transfer to impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)	54.362.433.487	(38.784.795.956)	(15.597.637.531)	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Penghapusbukuan	-	-	(40.398.704.208)	(40.398.704.208)	*Write-off*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	1.280.737.580.661	(14.733.326.806)	(46.488.691.987)	1.219.515.561.868	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**13.116.116.016.470**	**176.817.828.526**	**652.769.460.194**	**13.945.702.305.190**	***Ending balance***

Berikut adalah perubahan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan *stage* pada tanggal 31 Desember 2024:

Below is movement of loans based on stages as of Desember 31, 2024:

	2024				
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	*Jumlah / Total*	
Saldo awal	11.829.629.329.625	272.248.819.088	372.334.067.246	12.474.212.215.959	***Beginning balance***
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage 2*)	(82.928.223.023)	84.123.576.310	(1.295.353.287)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage 3*)	(61.334.944.017)	(131.988.977.752)	193.323.921.769	-	*Transfer to impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)	57.021.219.478	(55.807.629.259)	(1.213.590.219)	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Penghapusbukuan	-	-	(27.598.524.823)	(27.598.524.823)	*Write-off*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	416.211.582.312	(32.174.037.451)	(64.065.766.487)	319.971.758.374	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**12.158.698.964.375**	**136.401.750.936**	**471.484.732.199**	**12.766.585.447.510**	***Ending balance***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *8. LOANS (continued)*

f. Berdasarkan *stage* / *f. By stage*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The movement of allowance for impairment losses loans as of December 31, 2025 was as follows:

	2025				
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Saldo awal	33.102.661.118	9.234.605.419	305.607.828.060	347.945.094.597	***Beginning balance***
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage 2*)	(802.243.730)	1.197.909.479	(395.665.749)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage 3*)	(22.073.146.187)	(2.570.286.867)	24.643.433.055	-	*Transfer to impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)	10.790.920.073	(2.341.453.257)	(8.449.466.816)	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Penghapusbukuan	-	-	(40.398.704.208)	(40.398.704.208)	*Write-off*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(6.434.833.049)	8.031.447.252	157.446.623.781	159.043.237.984	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**14.583.358.225**	**13.552.222.025**	**438.454.048.123**	**466.589.628.373**	***Ending balance***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The movement of allowance for impairment losses loans as of Desember 31, 2024 was as follows:

	2024				
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Saldo awal	17.595.399.723	32.154.437.980	212.941.227.825	262.691.065.528	***Beginning balance***
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage 2*)	(4.653.917.380)	4.739.449.241	(85.531.861)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage 3*)	(32.139.333.047)	(71.139.111.373)	103.278.444.420	-	*Transfer to impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)	283.326.562	(233.362.410)	(49.964.152)	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Penghapusbukuan	-	-	(27.598.524.823)	(27.598.524.823)	*Write-off*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	52.017.185.260	43.713.191.981	17.122.176.651	112.852.553.892	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**33.102.661.118**	**9.234.605.419**	**305.607.828.060**	**347.945.094.597**	***Ending balance***

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

g. Berdasarkan kolektibilitas dan lainnya

Kolektibilitas dan informasi penting lainnya kredit yang diberikan sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada catatan 43d.

h. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan

1. Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh perbankan.
2. Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.
3. Kredit karyawan adalah kredit yang diberikan kepada karyawan untuk membeli kendaraan, rumah atau keperluan lainnya dengan tingkat bunga sebesar 5%-7,5% per tahun dan jangka waktu antara 1 sampai 25 tahun. Pinjaman dan bunganya dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.
4. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kredit yang diberikan kepada personel manajemen kunci (pihak berelasi) masing-masing sebesar Rp20.795.027.956 dan Rp8.662.299.094.
5. Rasio kredit usaha kecil terhadap kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 1,21% dan 2,72%.
6. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur melalui perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank dalam kredit sindikasi dengan bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp365.234.984.371 dan Rp462.610.791.171. Partisipasi Bank dalam kredit sindikasi tersebut masing-masing sebesar 4,45%-15,35% dan 1,00%-14,07% pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.
7. Kredit yang dihapusbukukan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berjumlah Rp419.088.321.840 dan Rp385.257.258.978. Penghapusbukuan kredit ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan.
8. Deposito yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.025.000.000 dan Rp6.613.500.000 dengan jumlah kredit yang dijamin masing-masing sebesar Rp8.920.432.241 dan Rp6.340.000.000.
9. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah melakukan perjanjian dan perikatan dengan Perum Jaminan Kredit Indonesia sehubungan dengan perlanggungan asuransi debitur kredit Multiguna, Pensiunan, Umum (Mikro), Konstruksi dan Pengadaan Barang atau Jasa. Nilai pertanggungan per debitur maksimum sebesar plafon pokok kredit. Premi asuransi tersebut ditanggung oleh debitur.

8. LOANS (continued)

g. By Collectibility

Collectibility loans and other important information in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in note 43d.

h. Other significant information relating to loans

1. *Loans are secured by time deposits, collateral bound by hypothecation or a power of attorney to sell and other collateral commonly accepted by banks.*
2. *The consumer loans portfolio consists of house ownership loans, vehicle loans and other personal loans.*
3. *Employee loans are loans granted to employees to purchase a vehicle, house or other purposes with an interest rate of 5%-7.5% per year and the maturity period between 1 to 25 years. Loans and interest repaid through monthly payroll deductions.*
4. *For the years ended December 31, 2025 and 2024, loans granted to key management personnel (a related party) amounted Rp20,795,027,956 and Rp8,662,299,094 respectively.*
5. *Ratio of small business loans as of December 31, 2025 and 2024 amounted 1.21% and 2.72%, respectively.*
6. *Syndication loans are loans given to customers under syndication agreements with other banks. Bank's participation in syndication loans with other banks on December 31, 2025 and 2024 amounted Rp365,234,984,371 and Rp462,610,791,171 respectively. Bank's participation in the syndication loans amounted 4.45%-15.35% and 1,00%-14,07% As of December 31, 2025 and 2024, respectively.*
7. *Written-off loans for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted Rp419,088,321,840 and Rp385,257,258,978 respectively. This credit write-off is not a charge-off, so collection efforts are still made.*
8. *Deposits which were blocked and pledged as collateral as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp12,025,000,000 and Rp6,613,500,000, respectively with the guaranteed loans amounted Rp8,920,432,241 and Rp6,340,000,000, respectively.*
9. *As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has made agreements and engagements with Perum Jaminan Kredit Indonesia in connection with debtor's insurance coverage of Multipurpose, Retired, General (Micro), Construction and Procurement of Goods or Services loans. The insured amount per borrower maximum ceiling of loan principal. The insurance premium is borne by the debtor.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

h. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan)

10. Kredit restrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berjumlah Rp520.826.267.199 dan Rp491.231.000.000. Restrukturisasi dilakukan melalui penambahan jangka waktu, penurunan suku bunga kredit dan perubahan fasilitas kredit.

    Pinjaman yang direstrukturisasi meliputi antara lain penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman dan bunga, penyesuaian tingkat suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan penambahan fasilitas pinjaman.

    Restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara perpanjangan masa pelunasan kredit, penurunan bunga yang jatuh tempo, perubahan persentase tingkat bunga dan kapitalisasi bunga menjadi pokok kredit.

    Tidak ada kredit yang direstrukturisasi yang termasuk dalam kredit yang diberikan kepada pihak berelasi.

8. LOANS (continued)

h. Other significant information relating to loans (continued)

10. Restructured loans as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp520,826,267,199 and Rp491,231,000,000 respectively. Restructuring is performed through the addition of period, reduction of interest rates and change of loan facilities.

Restructured loans consist of loan with rescheduled principal and interest payments, adjusted interest rates, reduced overdue interest and increased loan facilities.

The term of restructured loans consists of extension of payment maturity dates, reduced overdue interest, modification of interest rate and capitalised interest into the new outstanding principal loan balance.

There are no restructured loans to related parties.

9. SURAT BERHARGA

Tidak terdapat surat berharga kepada pihak berelasi.

a. Berdasarkan tujuan dan jenis

	2025	2024	
Dimiliki hingga jatuh tempo			***Held-to-maturity***
Obligasi pemerintah	634.876.000.000	904.876.000.000	*Government bonds*
Sertifikat Bank Indonesia	-	30.000.000.000	*Certificates of Bank Indonesia*
Diskonto yang belum diamortisasi	(27.326.599.785)	(35.030.903.206)	*Unamortised discount*
Sub jumlah	607.549.400.215	899.845.096.794	*Sub total*
Obligasi korporasi	-	8.000.000.000	*Corporate bonds*
Jumlah	607.549.400.215	907.845.096.794	*Total*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)			***Fair value through profit loss (FVTPL)***
Sertifikat Bank Indonesia	334.559.800.000	30.000.000.000	*Certificates of Bank Indonesia*
Perubahan rugi yang belum direalisasi	(188.905.892)	-	*Movement of unrealized loss*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(4.265.151)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	334.370.894.108	29.995.734.849	*Total*
Jumlah - bersih	**941.920.294.323**	**907.840.831.644**	***Total - net***

b. Berdasarkan penerbit

b. By issuer

	2025	2024	
Bank Indonesia			***Bank Indonesia***
Sertifikat Bank Indonesia	334.559.800.000	30.000.000.000	*Certificates of Bank Indonesia*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(596.925.394)	*Unamortised discount*
Perubahan rugi yang belum direalisasi	(188.905.892)		*Movement of unrealized loss*
	334.370.894.108	**29.403.074.606**	

9. SURAT BERHARGA (lanjutan) / *9. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan) / *b. By issuer (continued)*

	2025	2024	
Pemerintah			***Government***
Obligasi pemerintah	634.876.000.000	904.876.000.000	*Government bonds*
Diskonto yang belum diamortisasi	(27.326.599.785)	(34.433.977.812)	*Unamortised discount*
	607.549.400.215	870.442.022.188	
Bank			***Bank***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	8.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	-	8.000.000.000	
Jumlah	941.920.294.323	907.845.096.794	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(4.265.151)	*Total*
Jumlah - bersih	**941.920.294.323**	**907.840.831.644**	***Total - net***

c. Berdasarkan peringkat / *c. By rating*

	2025	2024	
Obligasi Berwawasan Lingkungan I PT BNI (Persero) Tbk Tahun 2022 Seri A	-	idAAA	*Obligasi Berwawasan Lingkungan I PT BNI (Persero) Tbk Tahun 2022 Seri A*

d. Berdasarkan jatuh tempo / *d. By maturity*

	2025	2024	
Kurang dari 1 tahun	513.441.678.185	272.969.096.794	*Less than 1 year*
1-5 tahun	126.242.301.405	284.160.000.000	*1-5 years*
Lebih dari 5 tahun	302.236.313.753	350.716.000.000	*More than 5 years*
Jumlah	941.920.294.323	907.845.096.794	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(4.265.151)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**941.920.294.323**	**907.840.831.644**	***Total - net***

e. Berdasarkan efek pemerintah dan bukan pemerintah / *e. By government and non-government securities*

	2025	2024	
Pemerintah			***Government***
Obligasi pemerintah	634.876.000.000	544.876.000.000	*Government bonds*
Sertifikat Bank Indonesia	334.370.894.108	30.000.000.000	*Certificates of Bank Indonesia*
Surat Perbendaharaan Negara	-	360.000.000.000	*Government Treasury Bills*
Diskonto yang belum diamortisasi	(27.326.599.785)	(35.030.903.206)	*Unamortised discount*
Jumlah	941.920.294.323	899.845.096.794	*Total*
Bukan pemerintah			***Non-government***
Obligasi korporasi	-	8.000.000.000	*Corporate bonds*
Jumlah	941.920.294.323	907.845.096.794	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(4.265.151)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**941.920.294.323**	**907.840.831.644**	***Total - net***

f. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *f. Average annual interest rates*

	2025	2024	
Surat berharga	5,96%	6,35%	*Investment securities*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

9. SURAT BERHARGA (lanjutan)

g. Berdasarkan Kolektibilitas

Kolektibilitas surat-surat berharga sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada catatan 43e.

h. Penyisihan kerugian penurunan nilai

	2025	2024	
Saldo awal	4.265.151	10.096.693	*Beginning balance*
Pemulihan selama tahun berjalan	(4.265.151)	(5.831.542)	*Recovery during the year*
Saldo akhir	**-**	**4.265.151**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya surat berharga adalah memadai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada surat berharga yang digunakan sebagai agunan.

9. MARKETABLE SECURITIES (continued)

g. By collectibility

Collectibility marketable securities in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in note 43e.

h. Allowance for impairment losses

Management believes that the allowance for impairment losses on marketable securities is adequate.

As of December 31, 2025 and 2024, no marketable securities that are used as collateral.

10. SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Tidak terdapat surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali kepada pihak berelasi.

10. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS

There was no securities purchased under resale agreements which are related parties.

2025						
Seri/ *Series*	**Jangka waktu/ *Period***	**Tanggal dimulai/ *Start date***	**Tanggal jual kembali/ *Resell date***	**Harga jual kembali/ *Resell price***	**Bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortised***	**Nilai bersih/ *Net value***
Bank Indonesia						
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.223	7.459.762	9.424.100.461
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
				75.452.481.777	59.678.096	75.392.803.681

10. SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

10. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS (continued)

			2025			
Seri/ *Series*	Jangka waktu/ *Period*	Tanggal dimulai/ *Start date*	Tanggal jual kembali/ *Resell date*	Harga jual kembali/ *Reseli price*	Bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortised interest*	Nilai bersih/ *Net value*
Pindahan/ *Carried forward*				75.452.461.777	59.678.096	75.392.803.681
Bank Indonesia						
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.223	7.459.762	9.424.100.461
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
Bank Lain						
FR0071	7 hari/*days*	24 Desember / *December 24*, 2025	2 Januari / *January 2*, 2026	54.009.768.138	7.162.738	54.002.605.400
FR0071	7 hari/*days*	24 Desember / *December 24*, 2025	2 Januari / *January 2*, 2026	54.009.768.138	7.162.732	54.002.605.406
Jumlah/*Total*				**258.924.499.830**	**133.681.662**	**258.790.818.168**

Kolektibilitas Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada catatan 43f.

Collectibility Marketable securities purchased with agreements to resell in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in note 43f.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSETS*

	2025					
	1 Januari/ *January 1*	Penambahan/ *Addition*	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ *Revaluation*	31 Desember/ *December 31*	
Biaya perolehan						***Cost***
Tanah	36.832.174.671	-	-	83.428.725.329	120.260.900.000	*Land*
Bangunan	191.345.386.174	-	(2.264.740.100)	-	189.080.646.074	*Buildings*
Kendaraan	14.182.499.993	285.258.000	-	-	14.467.757.993	*Vehicles*
Perlengkapan dan perabot kantor	219.537.750.727	7.212.620.947	2.264.740.100	-	229.015.111.774	*Office equipment and furnitures*
	461.897.811.565	7.497.878.947	-	83.428.725.329	552.824.415.841	
Aset dalam penyelesaian	18.914.414.599	13.191.545.400	-	-	32.105.959.999	*Construction in progress*
	480.812.226.164	20.689.424.347	-	83.428.725.329	584.930.375.840	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	83.553.217.418	9.557.462.688	-	-	93.110.680.106	*Buildings*
Kendaraan	12.178.152.130	814.628.829	-	-	12.992.780.959	*Vehicles*
Perlengkapan dan perabot kantor	182.552.755.577	16.100.703.919	-	-	198.653.459.496	*Office equipment and furnitures*
	278.284.125.125	26.472.795.436	-	-	304.756.920.561	
Nilai buku	**202.528.101.039**				**280.173.455.279**	***Book value***

	2024					
	1 Januari/ *January 1*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 31*	
Biaya perolehan						***Cost***
Tanah	36.832.174.671	-	-	-	36.832.174.671	*Land*
Bangunan	187.197.927.507	181.792.000	-	3.965.666.667	191.345.386.174	*Buildings*
Kendaraan	13.695.431.493	487.068.500	-	-	14.182.499.993	*Vehicles*
Perlengkapan dan perabot kantor	210.241.044.194	9.296.706.533	-	-	219.537.750.727	*Office equipment and furnitures*
	447.966.577.865	9.965.567.033	-	3.965.666.667	461.897.811.565	
Aset dalam penyelesaian	10.053.213.066	12.826.868.200	-	(3.965.666.667)	18.914.414.599	*Construction in progress*
	458.019.790.931	22.792.435.233	-	-	480.812.226.164	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	74.258.896.584	9.294.320.834	-	-	83.553.217.418	*Buildings*
Kendaraan	11.641.394.411	536.757.719	-	-	12.178.152.130	*Vehicles*
Perlengkapan dan perabot kantor	166.076.729.785	16.476.025.792	-	-	182.552.755.577	*Office equipment and furnitures*
	251.977.020.780	26.307.104.345	-	-	278.284.125.125	
Nilai buku	**206.042.770.151**				**202.528.101.039**	***Book value***

Rincian bangunan dan prasarana dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Details of the buildings and infrastructure in the settlement on December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Persentase penyelesaian/ *Completion percentage*	Akumulasi biaya/ *Accumulated cost*	Estimasi tanggal penyelesaian/ *Estimated completion date*	
Bangunan				***Buildings***
31 Desember 2025				***December 31, 2025***
Pembangunan gedung kantor	45,87%	32.105.959.999	Tahun/*Year* 2026	*Construction of office buildings*
31 Desember 2024				***December 31, 2024***
Pembangunan gedung kantor	27,02%	18.914.414.599	Tahun/*Year* 2026	*Construction of office buildings*

11. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak 38 bidang. Sertifikat tersebut mempunyai masa manfaat hingga 30 (tiga puluh) tahun. Masa berlaku HGB berakhir antara tahun 2031-2041. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Bank telah mengasuransikan aset tetap untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp494.632.154.120 dan Rp355.543.573.714 pada PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Jasa Indonesia bukan pihak yang mempunyai relasi dengan Bank.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 13 Desember 2025, Bank melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi. Berdasarkan laporan penilaian revaluasi dari Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman & Rekan tanggal 27 Februari 2026 tentang penilaian nilai wajar atas aset tetap sebesar Rp120.260.900.000.
Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp83.428.725.329.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode pendekatan data pasar.

Manajemen telah mengkaji ulang metode penyusutan dan nilai residu aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Bank memiliki aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Bank masing-masing sebesar Rp177.797.050.022 dan Rp131.157.935.594.

Tidak terdapat aset tetap yang diJaminkan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

11. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank had 38 plots of land, respectively, with Building Use Rights (HGB) titles. Those certificates have useful lives until 30 years. The HGB expiration period up to 2031-2041. Management believes that there will be no difficulty in obtaining the extension of the land rights as all the land were acquired legally and are supported by sufficient evidence of ownership.

Bank has insured its fixed assets to cover potential losses against fire, theft and natural disasters with the insurance coverage as of December 31, 2025 and December 31, 2024 Rp494,632,154,120 and Rp355,543,573,714, respectively on PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Asuransi Central Asia and PT Asuransi Jasa Indonesia does not have a related with Bank.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on these insured fixed assets.

On December 13, 2025, the Bank revalued its fixed assets of land for the purpose of accounting. Based on revaluation appraisal report of "Desmar, Susanto, Salman & Rekan" dated February 27, 2026 related with the valuation of fixed assets amounted Rp120,260,900,000.

The increase in the carrying amount arising from the revaluation are recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income of Rp83,428,725,329.

Assessment is conducted by Indonesian Standards Assessment, is determined based on current market transactions and carried out with the usual provisions. Valuation method used is a market data approach.

Management has reviewed the depreciation method and residual value of fixed assets as of December 31, 2025 and 2024.

Bank has fixed assets as of December 31, 2025 and 2024 have been fully depreciated but still in use to support the activities of Bank operations respectively Rp177,797,050,022 and Rp131,157,935,594.

There are no fixed assets that pledged by the Bank as of December 31, 2025 and 2024.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TAKBERWUJUD / *12. INTANGIBLE ASSETS*

	2025					
	1 Januari/ *January 1*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 31*	
Biaya perolehan						***Cost***
Perangkat lunak	14.231.420.805	399.600.000,00	-	-	14.631.020.805	*Software*
Hak legal atas tanah	650.391.875	-	-	-	650.391.875	*Land rights*
Aset dalam penyelesaian	368.631.000	316.286.400	399.600.000	-	285.317.400	*Assets in progress*
	15.250.443.680	316.286.400	-	-	15.566.730.080	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	12.601.862.230	520.621.043	-	-	13.122.483.273	*Software*
Hak legal atas tanah	650.391.875	-	-	-	650.391.875	*Land rights*
	13.252.254.105	520.621.043	-	-	13.772.875.148	
Nilai buku	**1.998.189.575**				**1.793.854.932**	***Book value***

	2024					
	1 Januari/ *January 1*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 31*	
Biaya perolehan						***Cost***
Perangkat lunak	12.719.270.805	44.400.000	-	1.467.750.000	14.231.420.805	*Software*
Hak legal atas tanah	650.391.875	-	-	-	650.391.875	*Land rights*
Aset dalam penyelesaian	666.120.000	1.170.261.000	-	(1.467.750.000)	368.631.000	*Assets in progress*
	14.035.782.680	1.214.661.000	-	-	15.250.443.680	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	12.348.355.148	253.507.082	-	-	12.601.862.230	*Software*
Hak legal atas tanah	650.391.875	-	-	-	650.391.875	*Land rights*
	12.998.747.023	253.507.082	-	-	13.252.254.105	
Nilai buku	**1.037.035.657**				**1.998.189.575**	***Book value***

Rincian aset takberwujud dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Details of intangible assets in progress as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Persentase penyelesaian/ *Completion percentage*	Akumulasi biaya/ *Accumulated cost*	Estimasi tanggal penyelesaian/ *Estimated completion date*	
31 Desember 2025				***December 31, 2025***
Perangkat lunak				***Software***
Host to Host KPR Tapera	80%	46.886.400	Tahun/*Year* 2026	*Host to Host KPR Tapera*
Otomatis Treasury Reporting	80%	238.431.000	Tahun/*Year* 2026	*Automated Treasury Reporting*
31 Desember 2024				***December 31, 2024***
Perangkat lunak				***Software***
Activo Asset Management	70%	279.720.000	Tahun/*Year* 2025	*Activo Asset Management*
Otomatis Treasury Reporting	30%	88.911.000	Tahun/*Year* 2026	*Automated Treasury Reporting*

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset takberwujud yang dimiliki Bank.

Management believes there is no indication of impairment on intangible assets owned by the Bank.

13. ASET HAK GUNA / *13. RIGHT OF USE ASSETS*

Berikut adalah rincian transaksi sewa Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Following are the details of the Bank's lease transactions as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025					
	1 Januari/ *January 1*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 31*	
Biaya perolehan						***Cost***
Tanah dan bangunan	29.624.435.841	13.558.077.003	15.721.750.485	3.773.461.098	31.234.223.457	*Land and buildings*
Kendaraan	38.425.220.335	8.154.561.895	23.434.730.512	-	23.145.051.718	*Vehicles*
Core Banking System	53.188.066.937	605.910.274	44.616.092.483	-	9.157.884.128	*Core Banking System*
Mesin ATM	56.099.131.163	-	-	(3.773.461.098)	52.325.670.065	*Automatic Teller Machine*
Jumlah	177.316.853.676	22.318.549.172	83.772.573.480	-	115.862.829.368	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Tanah dan bangunan	18.180.381.702	8.956.708.625	15.721.750.485	2.470.599.105	13.895.938.947	*Land and buildings*
Kendaraan	27.774.583.433	8.268.833.621	23.434.730.512	-	12.608.686.542	*Vehicles*
Core Banking System	45.980.928.518	7.509.358.402	44.616.092.483	-	8.874.194.437	*Core Banking System*
Mesin ATM	27.820.881.224	11.830.209.498	-	(2.470.599.105)	38.980.491.617	*Automatic Teller Machine*
Jumlah	119.556.774.877	36.575.110.146	83.772.573.480	-	72.359.311.543	***Total***
Nilai buku	**57.760.078.799**				**43.503.517.825**	***Book value***

	2024					
	1 Januari/ *January 1*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 31*	
Biaya perolehan						***Cost***
Tanah dan bangunan	24.007.232.595	5.617.203.246	-	-	29.624.435.841	*Land and buildings*
Kendaraan	34.402.647.545	4.022.572.790	-	-	38.425.220.335	*Vehicles*
Core Banking System	51.218.966.146	1.949.100.191	-	-	53.188.066.337	*Core Banking System*
Mesin ATM	55.461.893.264	637.237.899	-	-	56.099.131.163	*Automatic Teller Machine*
Jumlah	165.090.739.550	12.226.114.126	-	-	177.316.853.676	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Tanah dan bangunan	13.137.072.903	5.043.308.799	-	-	18.180.381.702	*Land and buildings*
Kendaraan	19.142.755.170	8.631.828.263	-	-	27.774.583.433	*Vehicles*
Core Banking System	34.539.751.063	11.441.177.455	-	-	45.980.928.518	*Core Banking System*
Mesin ATM	17.743.681.702	9.877.199.522	-	-	27.620.881.224	*Automatic Teller Machine*
Jumlah	84.563.260.838	34.993.514.039	-	-	119.556.774.877	***Total***
Nilai buku	**80.527.478.712**				**57.760.078.799**	***Book value***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

14. ASET LAIN-LAIN / *14. OTHER ASSETS*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	2025	2024	
Pendapatan yang masih akan diterima	86.863.286.952	88.778.071.191	*Interest receivables*
Agunan yang diambil alih-bersih	54.241.675.500	80.044.056.433	*Foreclosed assets-net*
Taksiran tagihan pajak (Catatan 19a)	42.479.672.477	87.240.766.889	*Estimated tax receivables (Note 19a)*
Persediaan	5.319.305.466	6.633.976.672	*Office supplies*
Uang muka	3.844.259.279	4.301.599.355	*Advance*
Beban dibayar di muka	529.798.579	1.697.114.296	*Prepaid expenses*
Lain-lain	3.546.322.477	5.633.055.043	*Others*
Jumlah	**196.824.320.730**	**274.328.639.879**	***Total***

Pendapatan yang masih akan diterima terdiri dari bunga yang masih akan diterima dari giro pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga dan kredit yang diberikan.

Interest receivables consist of interest accrued from current accounts with Bank Indonesia, placements with other banks, investment securities and loans.

Beban dibayar di muka merupakan pembayaran di muka yang berkaitan dengan beban sewa dan premi asuransi.

Prepaid expenses represents advance payments related to rental expenses and insurance premiums.

Agunan yang diambil alih
Mutasi agunan yang diambil alih:

Foreclosed assets
Movement of foreclosed assets:

	2025	2024	
Saldo awal	113.919.906.636	113.919.906.636	*Beginning balance*
Penambahan	-	-	*Additions*
Penjualan	-	-	*Disposal*
Saldo akhir	**113.919.906.636**	**113.919.906.636**	***Ending balance***

b. Penyisihan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih: / *b. Allowance for impairment losses of foreclosed assets:*

	2025	2024	
Saldo awal	33.875.850.204	10.315.058.569	*Beginning balance*
Penambahan	25.802.380.932	23.560.791.635	*Additions*
Saldo akhir	**59.678.231.136**	**33.875.850.204**	***Ending balance***

15. LIABILITAS SEGERA / *15. LIABILITIES IMMEDIATELY PAYABLE*

	2025	2024	
Rekening titipan	37.971.692.331	1.896.453.148	*Deposit accounts*
Titipan dana bantuan Pemerintah	712.152.733	137.560.815	*Deposit of government grants*
Titipan gaji Pegawai Negeri Sipil	129.646.402	1.663.263.727	*Deposit of government employees salary*
Lain-lain	23.626.353.321	67.111.143.400	*Others*
Jumlah	**62.439.844.787**	**70.808.421.090**	***Total***

Rekening titipan merupakan titipan transfer dari nasabah, titipan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak yang diterima Bank sebagai bank persepsi dan titipan lainnya dari pihak ketiga.

Deposit accounts represent a transfer deposits from customers, deposit of the tax proceeds from taxpayers received by the bank as a perception bank and other deposit from third parties.

16. SIMPANAN NASABAH / *16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	1.447.556.491.534	243.521.378.038	*Current accounts*
Tabungan			*Saving deposits*
Tabungan Simpeda	8.977.255.826	3.438.438.591	*Tabungan Simpeda*
Tabungan Flobamora	3.054.819.540	3.181.364.856	*Tabungan Flobamora*
Tabungan Khusus PNS	2.075.739.614	840.680.810	*Tabungan Khusus PNS*
TabunganKu	281.389.138	27.813.662	*TabunganKu*
Tabungan Pensiun	394.686.453	221.499.331	*Tabungan Pensiun*
Deposito berjangka	105.137.414.197	8.988.500.000	*Time deposits*
	1.567.477.796.302	260.219.675.288	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Tabungan			*Saving deposits*
Tabungan Flobamora	698.432.135	524.755.103	*Tabungan Flobamora*
Deposito berjangka	8.337.500	16.301.338	*Time deposits*
	706.769.635	541.056.441	
	1.568.184.565.937	260.760.731.729	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	969.280.362.516	2.182.537.018.597	*Current accounts*
Tabungan			*Saving deposits*
Tabungan Flobamora	1.493.397.056.663	1.499.970.299.393	*Tabungan Flobamora*
Simpeda	1.075.338.597.723	1.085.030.773.423	*Simpeda*
Tabungan Khusus PNS	1.076.059.559.594	1.029.617.382.696	*Tabungan Khusus PNS*
TabunganKu	470.084.754.912	446.880.992.157	*TabunganKu*
Tabungan Simpel	67.576.937.616	83.104.988.208	*Tabungan Simpel*
Tabungan Pensiun	34.152.377.391	16.215.682.307	*Tabungan Pensiun*
Tabungan Ziarah	462.222.389	327.179.128	*Tabungan Ziarah*
Deposito berjangka	9.173.496.628.778	5.401.866.878.575	*Time deposits*
	14.359.848.497.583	11.725.561.192.484	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Giro	24.803.729	15.883.190	*Current accounts*
Tabungan			*Saving deposits*
Tabungan Flobamora	1.532.416.160	724.480.855	*Tabungan Flobamora*
Deposito berjangka	221.991.274	202.739.380	*Time deposits*
	1.779.213.162	943.103.425	
	14.361.627.710.745	11.726.494.285.909	
Jumlah	**15.929.812.276.682**	**11.987.255.027.537**	***Total***

b. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu / *b. Details of time deposits by term*

	2025	2024	
1 bulan	205.483.445.180	201.486.486.533	*1 month*
3 bulan	167.930.620.747	141.543.939.008	*3 months*
6 bulan	1.751.743.261.630	156.796.635.807	*6 months*
9 bulan	1.690.300.000	2.322.000.000	*9 months*
12 bulan	7.125.677.654.321	4.867.799.859.742	*12 months*
24 bulan	26.339.089.871	41.125.498.204	*24 months*
Jumlah	**9.278.864.371.749**	**5.411.074.419.293**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

16. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / ***c. Average annual interest rates***

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
Giro	0,64%	0,25%	*Current accounts*
Tabungan	0,94%	0,26%	*Saving deposits*
Deposito berjangka	6,43%	3,40%	*Time deposits*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Giro	0,75%	0,75%	*Current accounts*
Tabungan	0,56%	0,38%	*Saving deposits*
Deposito berjangka	2,47%	2,47%	*Time deposits*

d. Simpanan nasabah yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.025.000.000 dan Rp6.613.500.000.

d. *Deposits from customer which were blocked and pledged as loan collateral as of December 31, 2025 and 2024 amounted RpRp12,025,000,000 and Rp6,613,500,000, respectively.*

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

Tidak terdapat simpanan dari bank lain kepada pihak berelasi.

There was no related party in deposits from customer

a. Berdasarkan jenis / ***a. By type***

	2025	2024	
Call money	-	405.000.000.000	*Call money*
Deposito berjangka	4.440.000.000	5.440.000.000	*Time deposits*
Giro	7.569.435.714	5.663.841.311	*Current accounts*
Tabungan	5.320.580.226	4.985.475.645	*Saving deposits*
Negotiable Certificate of Deposit	249.318.573.246	-	*Negotiable Certificate of Deposit*
Jumlah	**266.648.589.186**	**421.089.316.957**	***Total***

b. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu / ***b. Details of time deposits by term***

	2025	2024	
1 bulan	440.000.000	440.000.000	*1 month*
12 bulan	4.000.000.000	5.000.000.000	*12 months*
Jumlah	**4.440.000.000**	**5.440.000.000**	***Total***

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / ***c. Average annual interest rates***

	2025	2024	
Giro	0,44%	0,50%	*Current accounts*
Tabungan	1,73%	0,41%	*Saving deposits*
Deposito berjangka	3,60%	3,33%	*Time deposits*
Negotiable Certificate of Deposit	7,00%	0,00%	*Negotiable Certificate of Deposit*
Call money	-	6,39%	*Call money*

d. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan.

d. *As of December 31, 2025 and 2024 there are no deposits from other banks that are blocked or pledged as loans collateral.*

18. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN / *18. SECURITIES ISSUED*

	2025	2024	
Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018			***Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018***
Nilai nominal	-	37.000.000.000	*Par value*
Dikurangi beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	-	(44.505.429)	*Less unamortised bond issuance costs*
Jumlah	**-**	**36.955.494.571**	***Total***
Mutasi beban emisi obligasi yang belum diamortisasi			***Movement of unamortised bond issuance costs***
Saldo awal	44.505.429	83.108.558	*Beginning balance*
Amortisasi selama tahun berjalan	(44.505.429)	(38.603.129)	*Amortisation during the year*
Saldo akhir	**-**	**44.505.429**	***Ending balance***

Pada tanggal 21 Desember 2018, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 dengan Tingkat Bunga Tetap dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000 di Bursa Efek Indonesia. Obligasi ini terbagi menjadi 4 seri, yaitu seri A, seri B, seri C dan seri D yang masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020, 21 Desember 2021, 21 Desember 2023 dan 21 Desember 2025 dan memiliki suku bunga tetap masing-masing sebesar 9,25%, 10,5%, 10,75% dan 11% setahun.

As of December 21, 2018, the Bank issued and listed continuous Bonds I Bank NTT Phase I Year 2018 with Fixed Interest Rate with a par value amounted Rp500,000,000,000 in the Indonesia Stock Exchange. These bonds are divided into four series, namely Series A, Series B, Series C and Series D, each of which will mature on January 1, 2020, December 21, 2021, December 21, 2023 and December 21, 2025 and has a fixed interest rate amounted 9.25%, 10.5%, 10.75% and 11% a year, respectively.

Bunga dibayar setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 21 Maret 2019 dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri obligasi. Wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Interest is paid every three months with the first payment was paid on March 21, 2018 and last payment performed together with payment of the principal of each series of bonds. Trustee for Bonds I Bank NTT is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Continuous Bonds I Bank NTT Phase I Year 2018 is not guaranteed with specific collateral, but guaranteed with all assets of the Bank, that exist in the present or in the future, whether fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

Perjanjian obligasi juga mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai penggabungan dan peleburan usaha, perubahan bidang usaha untuk Bank, serta pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Bond agreement also includes several restrictions, among others, the merger and consolidation, changes in the field of business for the Bank, and the reduction of the authorized capital, issued and paid-in capital.

Bank dapat melakukan pembelian kembali (buyback) untuk sebagian atau seluruh obligasi dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah ulang tahun pertama sejak tanggal emisi.

The Bank may repurchase (buyback) for part or all of the bonds provided that it can only be implemented after the first anniversary of the issuance date.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 mendapat peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

As of December 31, 2025 and 2024, Continuous Bonds I Bank NTT Phase I Year 2018 received rating idA- from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah mematuhi semua pembatasan-pembatasan penting sehubungan dengan perjanjian obligasi yang diterbitkan. Seluruh pembayaran atas jumlah bunga yang jatuh tempo telah dilakukan secara tepat waktu.

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has complied with all the important limitations with respect to the securities issued agreement. All payments on the amount of interest due has been done in a timely manner.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

19. PERPAJAKAN / *19. TAXATION*

a. Taksiran tagihan pajak / *a. Estimated tax receivables*

	2025	2024	
Lebih bayar pajak penghasilan badan:			*Over payment of corporate income tax:*
Tahun 2018	-	15.256.593.210	*Year 2018*
Tahun 2019	23.764.911.822	41.662.707.003	*Year 2019*
Tahun 2021	7.019.180.491	18.625.886.512	*Year 2021*
Tahun 2023	11.695.580.164	11.695.580.164	*Year 2023*
Jumlah	**42.479.672.477**	**87.240.766.889**	***Total***

b. Utang pajak penghasilan / *b. Income tax payables*

	2025	2024	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
Pasal 25	858.109.323	5.776.769.526	*Article 25*
Pasal 29	602.265.301	12.261.627.345	*Article 29*
Jumlah	**1.460.374.624**	**18.038.396.871**	***Total***

Utang pajak lainnya disajikan dalam liabilitas lain-lain (Catatan 21). / *Other tax liabilities are presented in other liabilities (Note 21).*

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expenses*

	2025	2024	
Kini	(39.865.437.480)	(65.302.262.518)	*Current*
Tangguhan	(3.844.652.198)	11.030.134.222	*Deferred*
Pajak sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP)	(35.502.421.979)	-	*Tax related to tax assessment letter (SKP)*
Jumlah	**(79.212.511.657)**	**(54.272.128.296)**	***Total***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut: / *The reconciliation between income before tax based on statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income are as follows:*

	2025	2024	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	171.830.738.913	231.108.669.765	*Income before tax per statements of profit or loss*
Perbedaan temporer			***Temporary differences***
Penyisihan jasa produksi	(17.934.174.985)	17.195.549.686	*Provision for bonuses*
Penyisihan tunjangan hari raya			*Holiday allowance*
Penyisihan imbalan kerja	(14.143.701.016)	10.062.258.488	*Employee benefits allowance*
Penyusutan aset hak guna	(7.045.253.277)	(811.715.829)	*Depreciation of right of use assets*
Penyisihan penghargaan kerja	47.186.667	(3.359.649.685)	*Service awards allowance*
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	(27.598.524.823)	27.598.524.823	*Allowance for impairment losses loans*
Penyisihan penurunan nilai - selain kredit yang diberikan	49.009.869.736	(547.993.747)	*Allowance for impairment other than loans*
Rugi yang belum direalisasi atas surat berharga yang diperdagangkan	188.905.892	-	*Unrealised loss on trading marketable securities*
Jumlah perbedaan temporer	(17.475.691.806)	50.136.973.736	***Total temporary differences***

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

19. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses (continued)

The reconciliation between income before tax based on statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income are as follows (continued):

	2025	2024	
Perbedaan tetap			***Permanent differences***
Representasi	5.310.383.951	6.203.617.975	*Representations*
Hadiah dan suvenir	8.344.695.276	3.732.163.158	*Gifts and souvenir*
Tunjangan karyawan	1.747.960.132	-	*Employee allowances*
Lain-lain	11.448.447.534	5.647.041.357	*Others*
	26.851.486.893	15.582.622.490	
Laba kena pajak	**181.206.534.000**	**296.828.465.991**	***Taxable income***
Beban pajak penghasilan			***Income tax expense***
22% x Rp181.017.628.000	39.865.437.480	-	*22% x Rp181,017,628,000*
22% x Rp296.828.465.991	-	65.302.262.518	*22% x Rp296,828,465,991*
Jumlah pajak kini	39.865.437.480	65.302.262.518	***Total current tax***
Dikurangi:			*Less:*
Pajak penghasilan yang dibayar di muka	(39.263.172.179)	(53.040.635.173)	*Prepaid income tax*
Kurang bayar pajak penghasilan badan	**(602.265.301)**	**(12.261.627.345)**	***Under payment of corporate income tax***

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaporkan ke kantor pajak.

The calculation of corporate income tax for the years ended December 31, 2024 is in accordance with the Annual Corporate Income Tax Return reported to the Tax Office.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Bank's income tax expense and the Bank's commercial reporting income before income tax expense multiplied by the tax rate is as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	171.830.738.913	231.108.669.765	*Income before tax per statements of profit or loss*
Tarif pajak efektif:			***Effective tax rate:***
22% x Rp171.830.738.913	(37.802.762.561)	-	*22% x Rp171,830,738,913*
22% x Rp231.108.669.765	-	(50.843.907.348)	*22% x Rp231,108,669,765*
Pengaruh pajak atas beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			*Tax effect of non deductible expense:*
Representasi	(1.168.284.469)	(1.364.795.954)	*Representations*
Hadiah dan suvenir	(1.835.832.961)	(821.075.895)	*Gifts and souvenir*
Tunjangan karyawan	(384.551.229)	-	*Employee allowances*
Lain-lain	(2.518.658.458)	(1.242.349.099)	*Others*
Jumlah	(5.907.327.117)	(3.428.220.948)	*Total*
Pajak sehubungan dengan SKP	(35.502.421.979)	-	*Impact on changes of tax rate*
Jumlah beban pajak	**(79.212.511.657)**	**(54.272.128.296)**	***Total tax expense***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pemeriksaan pajak tahun 2018

Bank menerima pengembalian atas Pajak Lebih Bayar hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2018. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan tahun 2018 pada tanggal 15 Mei 2020 dan pada tanggal 22 Desember 2023 Bank memperoleh kembali masing-masing sebesar Rp4.324.242.623 dan sebesar Rp3.783.241.322.

Pada tahun 2023 Bank menerima hasil putusan Pengadilan Pajak No.PUT-009410.15/2021/PP/M.IIIA yang diputuskan pada tanggal 3 November 2023 terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-00011/KEB/WPJ.31/2021 tanggal 23 Juni 2021. Berdasarkan putusan tersebut, Pengadilan pajak mengabulkan banding Bank sehingga pajak penghasilan lebih bayar adalah sebesar Rp8.109.456.123.

Pada tahun 2024, Bank menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4082/B/PK/Pjk/2024 tanggal 30 September 2024 terkait peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 009410.15/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023. Putusan Mahkamah Agung tersebut mengabulkan sebagian banding Bank atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Fiskal 2018. Atas selisih lebih bayar pajak yang sebelumnya dicatat sebagai uang muka pajak dan setelah memperhitungkan restitusi yang telah diterima, Bank membebankan sisa selisih tersebut ke beban pajak kini pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pemeriksaan pajak tahun 2019

Pada tanggal 22 April 2021, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2019 atas pajak penghasilan badan sebesar Rp27.958.071.150 terdiri dari pokok sebesar Rp21.652.781.250 dan sanksi administrasi sebesar Rp6.305.289.900. Bank telah melakukan pembayaran atas pokok pajak beserta sanksi administrasi dan dicatat sebagai taksiran tagihan pajak (Catatan 19a). Bank mengajukan keberatan atas SKPLB pajak penghasilan badan tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2022, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPKB) hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2019 atas pajak penghasilan badan sebesar Rp19.651.030.072. Bank mengajukan keberatan atas SKPKB pajak penghasilan badan tersebut.

Bank menerima surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Nomor KEP-0015/KP-CT/KPP.3104/2025 tanggal 21 April 2025 yang menyebutkan berdasarkan putusan banding nomor PUT-008993.15/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2025 tanggal 27 Februari 2025 untuk jenis pajak PPh Pasal 25/29 Tahun Pajak 2019 sebesar Rp23.764.911.822, terdapat kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan/atau deposit pajak serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak. Bank mengajukan keberatan atas SKPLB pajak penghasilan badan tersebut.

19. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses (continued)

Tax audit year 2018

The Bank received refunds for overpaid taxes resulting from the 2018 fiscal year tax audit. Based on the Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) for Corporate Income Tax (PPh Badan) for 2018, issued on May 15, 2020, and December 22, 2023, the bank recovered Rp4,324,242,623 and Rp3,783,241,322 respectively.

In 2023, the Bank received the Tax Court Decision No. PUT-009410.15/2021/PP/M.IIIA dated November 3, 2023 regarding the Director General of Taxes Decree No. KEP-00011/KEB/WPJ.31/2021 dated June 23, 2021. Based on this decision, the Tax Court granted the Bank's appeal, resulting in a corporate income tax overpayment of Rp8,109,456,123.

In 2024, the Bank received a copy of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision No. 4082/B/PK/Pjk/2024 dated September 30, 2024, regarding a judicial review of Tax Court Decision No. PUT 009410.15/2021/PP/M.IIIA of 2023. The Supreme Court decision partially granted the Bank appeal against the Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) for Corporate Income Tax for Fiscal Year 2018. The remaining tax overpayment, which had previously been recorded as a tax prepayment and after accounting for the restitution received, was charged by the Bank to current tax expense in the current year's statement of profit or loss.

Tax audit year 2019

On April 22, 2021, the Bank received Notice of Overpayment Assessment (SKPLB) related the tax audit fiscal year 2019 on the corporate income tax amounted Rp27,958,071,150 consisting of principal for Rp21,652,781,250 and administrative sanctions for Rp6,305,289,900. The Bank has paid the tax principal along with administrative sanctions and recorded it as an estimated tax receivables (Note 19a). The Bank appeal the Notice of Underpayment Assessment on the corporate income tax.

On May 31, 2022, the Bank received Notice of Underpayment Assessment (SKPLB) related the tax audit fiscal year 2019 on the corporate income tax amounted Rp19,651,030,072. Bank appeal the Notice of Underpayment Assessment on the corporate income tax.

The Bank received the Tax Refund Decree No. KEP-0015/KP-CT/KPP.3104/2025 dated April 21, 2025, which stated that, based on Appeal Decision No. PUT-008993.15/2022/PP/M.XIIIA of 2025 dated February 27, 2025, for Income Tax Article 25/29 of Fiscal Year 2019 amounting to Rp23,764,911,822, there was a tax overpayment. The overpayment was fully offset against tax payables and/or tax deposits, leaving no remaining tax overpayment. Bank appeal the Notice of Underpayment Assessment on the corporate income tax.

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pemeriksaan pajak tahun 2020
Pada tanggal 10 Februari 2025, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2020 atas pajak penghasilan badan sebesar Rp25.571.460.123 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan pasal 21 tahun fiscal 2020 sebesar Rp4.696.687.972. Bank berencana mengajukan keberatan.

Pemeriksaan pajak tahun 2021
Pada tanggal 13 April 2023, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Krang Bayar (SKPKB) hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2021 atas pajak penghasilan badan sebesar Rp9.488.360.561 terdiri dari pokok sebesar Rp7.394.295.949 dan sanksi administrasi sebesar Rp2.094.064.612. Bank telah melakukan pembayaran atas pokok pajak beserta sanksi administrasi dan dicatat sebagai taksiran tagihan pajak (Catatan 19a). Bank mengajukan keberatan atas SKPKB pajak penghasilan badan tersebut.

Pemeriksaan pajak tahun 2022
Pada tanggal 8 Januari 2025, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2022 atas pajak penghasilan badan sebesar Rp31.575.076.367, SKPKB atas pajak penghasilan pasal 21 tahun 2021 sebesar Rp1.476.928.113, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan pasal 21 masa pajak Desember 2022 sebesar Rp448.505.294. Bank berencana mengajukan keberatan.

19. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses (continued)

Tax audit year 2020
On Februari 10, 2025, the Bank received a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) resulting from a tax audit for the 2020 fiscal year on corporate income tax of Rp25,571,460,123 and a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for income tax article 21 for the 2020 fiscal year of Rp4,696,687,972. The Bank plans to submit an objection.

Tax audit year 2021
On April 13, 2023, the Bank received Notice of Underpayment Assessment (SKPKB) related the tax audit fiscal year 2021 on the corporate income tax amounted Rp9,488,360,561 consisting of principal for Rp7,394,295,949 and administrative sanctions for Rp2,094,064,612. The Bank has paid the tax principal along with administrative sanctions and recorded it as an estimated tax receivables (Note 19a). The Bank appeal the Notice of Underpayment Assessment on the corporate income tax.

Tax audit year 2022
On January 8, 2025, the Bank received a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) resulting from a tax audit for the 2022 fiscal year on corporate income tax of Rp31,575,076,367, a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for income tax article 21 for the 2021 fiscal year of Rp1,476,928,113, and a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for income tax article 21 for the December 2022 tax period of Rp448,505,294. The bank plans to submit an objection.

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

	2024	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	Dibebankan ke laporan laba rugi/ *Charged to other comprehensive income*	2025
Aset (liabilitas) pajak tangguhan/				
Deferred tax assets (liabilities)				
Penyisihan imbalan kerja/				
Provision for employee benefits	30.323.851.424	7.775.600.767	(3.111.614.224)	34.987.837.967
Penyisihan jasa produksi/				
Provision for bonuses	10.031.859.146	-	(3.945.518.497)	6.086.340.649
Penyisihan tunjangan hari raya/				
Provision for holiday allowance	-	-	-	-
Penyisihan penghargaan kerja/				
Provision for service awards	211.273.306	-	10.381.067	221.654.373
Penyusutan aset hak guna/				
Depreciation of right of use assets	(1.293.840.504)	-	(1.549.955.721)	(2.843.796.225)
Penyisihan penurunan nilai selain kredit yang diberikan/				
Allowance for impairment other than loans	2.347.039.508	-	10.782.171.342	13.129.210.850
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan/				
Allowance for impairment other than loans	6.071.675.461	-	(6.071.675.461)	-
Laba yang belum direalisasi atas surat berharga yang diperdagangkan/				
Unrealised gain on trading marketable securities	-	-	41.559.296	41.559.296
Jumlah/ *Total*	47.691.658.341	7.775.600.767	(3.844.652.198)	51.622.606.910

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / *19. TAXATION (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred tax (continued)*

	2023	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *Credited to statement of profit or loss*	2024
Aset (liabilitas) pajak tangguhan/ *Deferred tax assets (liabilities)*				
Penyisihan imbalan kerja/ *Provision for employee benefits*	29.083.035.250	(973.080.693)	2.213.696.867	30.323.651.424
Penyisihan jasa produksi/ *Provision for bonuses*	6.248.838.215	-	3.783.020.931	10.031.859.146
Penyisihan penghargaan kerja/ *Provision for service awards*	950.396.237	-	(739.122.931)	211.273.306
Penyusutan aset hak guna/ *Depreciation of right of use assets*	(1.115.263.022)	-	(178.577.482)	(1.293.840.504)
Penyisihan penurunan nilai selain kredit yang diberikan/ *Allowance for impairment other than loans*	2.467.598.132	-	(120.558.624)	2.347.039.508
Penyisihan kredit yang diberikan/ *Allowance for credit provided*	-	-	6.071.675.461	6.071.675.461
Jumlah/ *Total*	**37.634.604.812**	**(973.080.693)**	**11.030.134.222**	**47.691.658.341**

e. Administrasi / *e. Administrative*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang "Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" yang berlaku mulai tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Based on Law of the Republic of Indonesia No.28 Year 2007 regarding "Third Amendment of Law No.6 Year 1983 regarding General Rules and Procedures of Taxation" which are applicable starting 2008, the Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

20. PINJAMAN YANG DITERIMA / *20. BORROWINGS*

	2025	2024	
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	300.000.000.000	200.000.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	249.944.444.637	250.083.333.542	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Dana kelolaan	195.165.058.097	175.261.854.464	*Managed funds*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	280.000.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
Jumlah	**745.109.502.734**	**905.345.188.006**	***Total***

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Perusahaan memperoleh *Term Loan Facility* dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan perjanjian No. 7 tanggal 6 Desember 2024 oleh Notaris Yatiningsih, SH., dengan limit fasilitas Rp 280.000.000.000. Jangka waktu fasilitas maksimal 3 (tiga) bulan dan jangka waktu pencairan selama 14 (empat belas) hari. Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman ini 7,20% dengan jaminan berupa *clean basis*.

Selama periode pinjaman Perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian diantaranya menjaga NPL tidak lebih dari 5% dan rasio kecukupan modal (KPMM) minimal sebesar 14%.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

The Company obtained a Term Loan Facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk with agreement No. 7 dated December 6, 2024 by Notary Yatiningsih, SH., with a facility limit amounting to Rp280,000,000,000. The maximum facility term is 3 (three) months and the witdrawal period is 14 (fourteen) days. The interest rate for this loan facility is 7.20% with a clean basis guarantee.

During the loan period, the Company has an obligation to fulfill the provisions in the agreement, including maintaining an NPL of no more than 5% and a minimum capital adequacy ratio (KPMM) of 14%.

20. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumater Utara dengan perjanjian No. 29 tanggal 23 Desember 2024, dengan limit fasilitas Rp 200.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas kredit adalah 6 (enam) bulan. Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman ini 7,10% dengan jaminan berupa *clean basis*.

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumater Utara dengan perjanjian No. 00001/351/KKLK/2025 tanggal 26 Juni 2025, dengan limit fasilitas Rp 300.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 (duabelas) bulan. Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman ini 7,60% dengan jaminan berupa *clean basis*.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Pada tanggal 18 Agustus 2023, Bank memperoleh fasilitas pinjaman berupa pinjaman Uncommitted Facility Linebatch dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan akta perjanjian No.96. Jumlah fasilitas maksimal sebesar Rp500.000.000.000.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Bank memperoleh fasilitas pinjaman berupa pinjaman Kredit Multiguna Perumahan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan Perjanjian No. 096/PP/SMF-BPD.NTT/V/2023. Jumlah fasilitas sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,50% p.a. tetap selama jangka waktu pinjaman. Tujuan fasilitas pinjaman ini digunakan untuk refinancing multiguna perumahan. Jangka waktu fasilitas selama 1 tahun terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman. Bank telah melunasi atas fasilitas tersebut tanggal 31 Mei 2024.

Pada tanggal 22 Februari 2023, Bank memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Perumahan Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berdasarkan Perjanjian No. 036/FLPP/PP/SMF-BPD.NTT/II/2023. Fasilitas ini menyediakan pendanaan sebesar 25% dari pembiayaan dan digunakan untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit pemilikan rumah sejahtera, dengan jangka waktu 20 tahun sejak tanggal pencairan.

Pada tanggal 18 Agustus 2022, Bank memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Multiguna Perumahan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berdasarkan Perjanjian No. 199/PP/SMF-BPD.NTT/VIII/2022 dengan plafon sebesar Rp250.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga tetap sebesar 4,50% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pencairan dan digunakan untuk keperluan refinancing multiguna perumahan.

BP Tapera

Dana ketofaan merupakan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera, dimana Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia menyediakan 75%-90% dana dan Bank menyediakan 10%-25% dana sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.07/PKS/DP/2016 dan No.79/MOU-BNTT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

20. *BORROWINGS (continued)*

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

The Company obtained a credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Sumater Utara with agreement No. 29 dated December 23, 2024, with a facility limit of Rp200,000,000,000 with a credit facility term of 6 (six) months. The interest rate for this loan facility is 7.10% with a clean basis guarantee.

The Company obtained a credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Sumater Utara with agreement No. No. 00001/351/KKLK/2025 dated June 26, 2025 , with a facility limit of Rp300,000,000,000 with a credit facility term of 12 (twelve) months. The interest rate for this loan facility is 7.60% with a clean basis guarantee.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

On August 18, 2023, the Bank obtained a loan facility in the form of an Uncommitted Facility Linebatch loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) with deed of agreement No.96. The maximum amount of facilities is Rp500,000,000,000.

On May 30, 2023, the Bank obtained a loan facility in the form of a Housing Multiguna Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) with agreement No.096/PP/SMF-BPD.NTT/V/2023. The total facility is Rp350,000,000,000 with an interest rate of 6.50% p.a. fixed for the term of the loan. The purpose of this loan facility is used for refinancing Housing Multiguna. The term of the facility is 1 year from the date of disbursement of the loan facility. The Bank has paid off the facility on May 31, 2024.

On February 22, 2023, the Bank obtained a Housing Loan facility for Low-Income Communities from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) under Agreement No. 036/FLPP/PP/SMF-BPD.NTT/II/2023. The facility provides funding amounting to 25% of the total financing and is used for the distribution of the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) through subsidized home ownership loans, with a tenor of 20 years from the date of disbursement.

On August 18, 2022, the Bank obtained a Multi-purpose Housing Loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) under Agreement No. 199/PP/SMF-BPD.NTT/VIII/2022 with a maximum facility amount of Rp250,000,000,000. The loan bears a fixed interest rate of 4.50% per annum with a tenor of one year from the date of disbursement and is used for refinancing multi-purpose housing loans.

BP Tapera

Managed funds represent the fund distribution Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) in order to procure housing through prosperous house ownership loans, in which the Government, through the Ministry of Housing of the Republic of Indonesia provide 75%-90% of the funds and the Bank provides 10%-25% of funds in accordance with the Agreement between the Ministry of Housing of the Republic of Indonesia with PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.07/PKS/DP/2016 and No.79/MOU-BNTT/VIII/2016 dated August 3, 2016 regarding fund distribution of the Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) in the Framework of Housing Procurement through Prosperous House Ownership Loans/Finance.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

20. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

BP Tapera (lanjutan)

Bank melaksanakan penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka pengadaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyaluran dana dilakukan kepada debitur dengan suku bunga tetap maksimal sebesar 5% per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 20 (dua puluh) tahun. Dana kelolaan atas pembiayaan FLPP KPR dikelola melalui rekening program FLPP KPR Sejahtera sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional No. 117/PKS/Sg/2018 dan No. 124/PKS-BNTT/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.

20. BORROWINGS (continued)

BP Tapera (continued)

The Bank distributes Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) funds for housing provision through subsidized home ownership loans (KPR Sejahtera) for low-income communities. The loans are granted to borrowers at a fixed interest rate of up to 5% per annum with a maximum tenor of 20 (twenty) years. The managed funds related to FLPP housing financing are administered through the FLPP Subsidized Mortgage program account in accordance with the provisions stipulated in the Operational Cooperation Agreements No. 117/PKS/Sg/2018 and No. 124/PKS-BNTT/XII/2018 dated December 21, 2018.

21. LIABILITAS LAIN-LAIN / *21. OTHER LIABILITIES*

	2025	2024	
Penyisihan imbalan kerja (Catatan 33)	159.034.718.038	137.834.779.201	*Provision for employee benefits (Note 33)*
Liabilitas sewa	30.577.171.348	50.166.308.164	*Lease liabilities*
Jasa produksi	27.665.184.765	45.599.359.750	*Productivity bonus*
Bunga yang masih harus dibayar	21.942.933.393	18.207.535.616	*Interest payables*
Beban yang masih harus dibayar	11.518.301.716	12.189.164.397	*Accrued expenses*
Utang pajak lainnya	4.549.842.986	2.113.608.526	*Other tax liabilities*
Penghargaan kerja	1.007.519.877	960.333.210	*Service awards*
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas transaksi rekening administratif	203.922.442	320.332.201	*Allowance for impairment losses on transactions of administrative accounts*
Lain-lain	19.640.119.723	27.108.462.125	*Others*
Jumlah	**276.139.714.288**	**294.499.883.190**	***Total***

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai rekening administratif / ***Movements in the allowance for impairment losses of administrative accounts***

	2025	2024	
Saldo awal	320.332.201	862.471.846	*Beginning balance*
Pemulihan selama tahun berjalan	(116.409.759)	(542.139.645)	*Recovery during the year*
Saldo akhir	**203.922.442**	**320.332.201**	***Ending balance***

22. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR / *22. AUTHORISED CAPITAL, ISSUED AND FULLY PAID-IN CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

a. Modal dasar / *a. Authorised capital*

Berdasarkan akta No.8 tanggal 27 Mei 2016 dari notaris Lalu Muhamad Supriandi, S.H., M.Kn., modal dasar Bank adalah sebesar Rp4.000.000.000.000, terbagi atas 300.000.000 saham seri A dengan nominal Rp10.000 dan 100.000.000 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp10.000.

Based on the deed No.8 dated May 27, 2016 of notary Lalu Muhamad Supriandi, S.H., M.Kn., the authorised capital of the Bank amounted Rp4,000,000,000,000, divided into 300,000,000 series A shares with a nominal amounted Rp10,000 and 100,000,000 series B shares with a nominal amounted Rp10,000.

Berdasarkan akta No.4 tanggal 7 Februari 2022 dari notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn., modal dasar Bank mengalami perubahan menjadi sebesar Rp7.000.000.000.000.

Based on deed No. 4 dated February 7, 2022 from notary Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn., the authorized capital of the Bank has changed to Rp7,000,000,000,000.

Saham seri A merupakan saham yang hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Saham seri A mempunyai hak suara khusus, dapat ditukar dengan saham seri B, menerima dividen dan sisa likuidasi terlebih dahulu serta memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota direksi dan dewan komisaris Bank. Saham seri B adalah saham biasa.

Series A shares are shares that can only be owned by the provincial government, municipal government and district government. Series A shares have special voting rights, can be exchanged for shares of series B, receive dividends and the remaining liquidation in advance and has special voting rights in proposing the nomination of directors and board of commissioners Bank. Series B shares are common shares.

22. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

b. Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor

Pada tanggal 31 Desember 2025 susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

22. *AUTHORISED CAPITAL, ISSUED AND FULLY PAID-IN CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

b. Issued and fully paid-in capital and additional paid-in capital

As of December 31, 2025, the shareholder composition is as follows:

Pemegang saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage*	Jumlah/ *Total*	*Shareholders*
Saham Seri A				***Series A Shares***
A. Provinsi Nusa Tenggara Timur	52.500.755	23,76%	525.007.550.000	*A. East Nusa Tenggara Province*
B. Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur:				*B. City/Municipality the Province East Nusa Tenggara:*
Pemerintah Kota				***Municipal Government***
- Kupang	13.000.000	5,88%	130.000.000.000	*Kupang -*
Pemerintah Kabupaten				***District Government***
- Kupang	12.500.000	5,66%	125.000.000.000	*Kupang -*
- Timor Tengah Utara	11.565.422	5,23%	115.654.220.000	*Timor Tengah Utara -*
- Manggarai Timur	10.058.282	4,55%	100.582.820.000	*Manggarai Timur -*
- Timor Tengah Selatan	10.006.577	4,53%	100.065.770.000	*Timor Tengah Selatan -*
- Sumba Barat Daya	9.678.175	4,38%	96.781.750.000	*Sumba Barat Daya -*
- Sumba Timur	9.228.066	4,18%	92.280.660.000	*Sumba Timur -*
- Sumba Barat	9.034.031	4,09%	90.340.310.000	*Sumba Barat -*
- Rote Ndao	9.027.261	4,09%	90.272.610.000	*Rote Ndao -*
- Malaka	7.904.141	3,58%	79.041.410.000	*Malaka -*
- Belu	7.387.172	3,34%	73.871.720.000	*Belu -*
- Sumba Tengah	6.642.283	3,01%	66.422.830.000	*Sumba Tengah -*
- Manggarai	6.140.811	2,78%	61.408.110.000	*Manggarai -*
- Manggarai Barat	5.719.967	2,59%	57.199.670.000	*Manggarai Barat -*
- Sabu Raijua	5.649.283	2,56%	56.492.830.000	*Sabu Raijua -*
- Lembata	5.396.088	2,44%	53.960.880.000	*Lembata -*
- Ende	5.261.653	2,38%	52.616.530.000	*Ende -*
- Nagekeo	4.469.967	2,02%	44.699.670.000	*Nagekeo -*
- Sikka	3.572.463	1,62%	35.724.630.000	*Sikka -*
- Flores Timur	3.529.859	1,60%	35.298.590.000	*Flores Timur -*
- Alor	2.702.105	1,22%	27.021.050.000	*Alor -*
- Ngada	2.705.737	1,22%	27.057.370.000	*Ngada -*
C. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	7.142.857	3,23%	71.428.570.000	*C. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
	168.322.200	76,18%	1.683.222.000.000	
Jumlah Saham Seri A	**220.822.955**	**99,94%**	**2.208.229.550.000**	***Total Series A Shares***
Saham Seri B				***Series B Shares***
Charles Amos Corputty, BSc, MBA, MSc	95.744	0,04%	957.440.000	*Charles Amos Corputty, BSc, MBA, MSc*
Luther Oktovianus Wila Huky	23.321	0,01%	233.210.000	*Luther Oktovianus Wila Huky*
Johan Christian Tallo	11.660	0,01%	116.600.000	*Johan Christian Tallo*
Jumlah Saham Seri B	**130.725**	**0,06%**	**1.307.250.000**	***Total Series B Shares***
Jumlah	**220.953.680**	**100,00%**	**2.209.536.800.000**	***Total***

Berdasarkan akta pernyataan persetujuan penambahan setoran modal Bank No.14 tanggal 15 Oktober 2025 dari Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.114.550.860.000 menjadi Rp2.209.536.800.000, yang terdiri dari 220.822.955 saham seri A dan 130.725 saham seri B. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0243578 tanggal 16 October 2025.

Based on the deed of approval statement of Bank's additional paid-in capital No.14 dated October 15, 2025 of Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn has approved the increase of the issued and fully paid-in capital amounted Rp2,114,550,860,000 to Rp2,209,536,800,000, consisting of 220,822,955 series A shares and 130,725 shares of series B. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0243578 dated October 16, 2025.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

22. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

b. Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

22. *AUTHORISED CAPITAL, ISSUED AND FULLY PAID-IN CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

b. *Issued and fully paid-in capital and additional paid-in capital (continued)*

As of December 31, 2024, the shareholder composition is as follows:

Pemegang saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage*	Jumlah/ *Total*	*Shareholders*
Saham Seri A				***Series A Shares***
A. Provinsi Nusa Tenggara Timur	52.500.755	24,83%	525.007.550.000	*A. East Nusa Tenggara Province*
B. Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur:				*B. City/Municipality the Province East Nusa Tenggara:*
Pemerintah Kota				***Municipal Government***
- Kupang	12.500.000	5,91%	125.000.000.000	*Kupang -*
Pemerintah Kabupaten				***District Government***
- Kupang	12.500.000	5,91%	125.000.000.000	*Kupang -*
- Timor Tengah Utara	11.565.422	5,47%	115.654.220.000	*Timor Tengah Utara -*
- Manggarai Timur	10.058.282	4,76%	100.582.820.000	*Manggarai Timur -*
- Timor Tengah Selatan	10.006.577	4,73%	100.065.770.000	*Timor Tengah Selatan -*
- Sumba Timur	9.228.066	4,36%	92.280.660.000	*Sumba Timur -*
- Sumba Barat	9.034.031	4,27%	90.340.310.000	*Sumba Barat -*
- Sumba Barat Daya	8.978.175	4,25%	89.781.750.000	*Sumba Barat Daya -*
- Rote Ndao	9.027.261	4,27%	90.272.610.000	*Rote Ndao -*
- Belu	7.387.172	3,49%	73.871.720.000	*Belu -*
- Malaka	7.404.141	3,50%	74.041.410.000	*Malaka -*
- Sumba Tengah	6.342.283	3,00%	63.422.830.000	*Sumba Tengah -*
- Manggarai	6.140.811	2,90%	61.408.110.000	*Manggarai -*
- Manggarai Barat	5.719.967	2,71%	57.199.670.000	*Manggarai Barat -*
- Sabu Raijua	5.649.283	2,67%	56.492.830.000	*Sabu Raijua -*
- Ende	5.261.653	2,49%	52.616.530.000	*Ende -*
- Lembata	5.396.088	2,55%	53.960.880.000	*Lembata -*
- Nagekeo	4.369.967	2,07%	43.699.670.000	*Nagekeo -*
- Sikka	3.572.463	1,69%	35.724.630.000	*Sikka -*
- Flores Timur	3.479.859	1,65%	34.798.590.000	*Flores Timur -*
- Alor	2.702.105	1,28%	27.021.050.000	*Alor -*
- Ngada	2.500.000	1,18%	25.000.000.000	*Ngada -*
	158.823.606	75,11%	1.588.236.060.000	
Jumlah Saham Seri A	**211.324.361**	99,94%	**2.113.243.610.000**	***Total Series A Shares***
Saham Seri B				***Series B Shares***
Charles Amos Corputty, BSc, MBA, MSc	95.744	0,05%	957.440.000	*Charles Amos Corputty, BSc, MBA, MSc*
Luther Oktovianus Wila Huky	23.321	0,01%	233.210.000	*Luther Oktovianus Wila Huky*
Johan Christian Tallo	11.660	0,01%	116.600.000	*Johan Christian Tallo*
Jumlah Saham Seri B	**130.725**	0,06%	**1.307.250.000**	***Total Series B Shares***
Jumlah	**211.455.086**	**100,00%**	**2.114.550.860.000**	***Total***

Berdasarkan akta pernyataan persetujuan penambahan setoran modal Bank No.16 tanggal 13 November 2024 dari Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.045.186.350.000 menjadi Rp2.114.550.860.000, yang terdiri dari 211.324.361 saham seri A dan 130.725 saham seri B. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0210882 tanggal 14 November 2024.

Based on the deed of approval statement of Bank's additional paid-in capital No.16 dated November 13, 2024 of Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn has approved the increase of the issued and fully paid-in capital amounted Rp2,045,186,350,000 to Rp2,114,550,860,000, consisting of 211,324,361 series A shares and 130,725 shares of series B. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0210882 dated November 14, 2024.

22. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

22. *AUTHORISED CAPITAL, ISSUED AND FULLY PAID-IN CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

c. Tambahan modal disetor

c. *Additional paid-in capital*

Agio saham

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo agio saham adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Penjualan saham kepada:			Sale of shares to:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	28.571.430.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jumlah	**28.571.430.000**	**-**	**Total**

Agio Saham merupakan selisih lebih yang timbul dari penerbitan saham di atas nilai nominalnya. Selisih ini telah dicatat dalam akun tambahan modal disetor atas agio saham pada bagian ekuitas Perseroan. Penerimaan setoran modal tersebut telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 4 September 2025, yang kemudian dituangkan secara resmi dalam Akta Pernyataan Persetujuan Penambahan Setoran Modal No. 14 tanggal 15 Oktober 2025. Akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. di Kupang.

Share premium

As of December 31, 2025 and 2024 the balance of share premium are as follows:

Share Premium is the excess amount arising from the issuance of shares above their nominal value. This excess has been recorded in the Additional Paid-In Capital – Share Premium account within the Company's equity. The receipt of this capital contribution was approved through the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 10 dated September 4, 2025, and was formally documented in the Deed of Statement of Approval for Additional Capital Contribution No. 14 dated October 15, 2025. This deed was executed before Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. in Kupang.

Modal disetor lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo modal disetor lainnya adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo awal	11.500.019.886	12.467.514.968	*Beginning balance*
Setoran modal tahun berjalan:			*Paid-in capital during the year:*
Saham Seri A			***Series A Shares***
A. Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	*A. East Nusa Tenggara Province*
B. Pemerintah Kota Kupang	5.000.000.000	5.000.000.000	*B. Kupang City Government*
C. Pemerintah Kabupaten	12.057.370.000	63.397.014.918	*C. District Government*
D. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	71.428.570.000	-	*D. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
Jumlah	**88.485.940.000**	**68.397.014.918**	***Total***
Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh	(94.985.940.000)	(69.364.510.000)	*Reclassification to issued and fully paid-in capital*
Saldo akhir tahun	**5.000.019.886**	**11.500.019.886**	***Balance at end of year***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, terdapat setoran modal dari para pemegang saham masing-masing sebesar Rp88.486.940.000 dan Rp68.397.014.918.

Setoran modal dari para pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2025 and 31 Desember 2024, yang belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan masing-masing sebesar Rp5.000.019.886 dan Rp11.500.019.886, yang merupakan setoran saham seri A dan seri B. Setoran modal tersebut dibukukan pada akun "Tambahan modal disetor - modal disetor lainnya".

As of December 31, 2025 and 2024, there is paid-in capital from shareholders amounted Rp88,485,940,000 and Rp68,397,014,918 respectively.

Paid-in capital from the shareholders of the Bank as of December 31, 2025 and 2024, that has not received approval from the Financial Services Authority amounted Rp5,000,019,886 and Rp11,500,019,886, respectively, which is the shares of series A and series B. The paid-in capital recorded as "Additional paid-in capital - other paid-in capital".

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

22. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

c. Tambahan modal disetor (lanjutan)

Modal sumbangan

Modal sumbangan sebesar Rp247.088.700 merupakan sumbangan bantuan sarana perbankan yang diperoleh dari Bank Indonesia berupa penyediaan jasa konsultansi, penyediaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) serta pelatihan sesuai dengan surat dari Bank Indonesia No.26/23/Bppp tanggal 21 Mei 1993.

22. AUTHORISED CAPITAL, ISSUED AND FULLY PAID-IN CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

c. Additional paid-in capital (continued)

Donation capital

Donation capital amounted Rp247,088,700 represent donations of banking facilities obtained from Bank Indonesia in the form of the procurement of consultancy services, procurement of hardware and software and training in accordance with the letter from Bank Indonesia No.26/23/Bppp dated May 21, 1993.

23. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Penggunaan laba bersih tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 14 Mei 2025, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.9 oleh Serlina Sari Darmawan, S.H., M.H.

Penggunaan laba bersih tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 8 Mei 2024, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.12 oleh Emmanuel Mali, S.H., M.H.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, penggunaan laba bersih tahun 2024 dan 2023 ditetapkan sebagai berikut:

23. DISTRIBUTION OF NET INCOME

Distribution of net income year 2024 set by the Annual Shareholders General Meeting for Fiscal Year 2024 dated May 14, 2025 as stated in notarial deed No.9 by Serlina Sari Darmawan, S.H., M.H.

Distribution of net income year 2023 set by the Annual Shareholders General Meeting for Fiscal Year 2023 dated May 8, 2024 as stated in notarial deed No.12 by Emmanuel Mali, S.H., M.H.

Based on the Shareholders' General Meeting decision on the above, net income in 2024 and 2023 is set as follows:

	2025	2024	
Pembagian dividen	154.731.973.785	96.382.440.859	*Distribution of dividends*
Pembentukan cadangan umum	22.104.567.684	13.768.920.123	*Establishment of general reserves*

Jumlah dividen yang diumumkan untuk masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

The amount of dividends declared for each year are as follows:

Periode	Jumlah / *Amount*	Per saham/ *Per shares*	*Period*
Distribusi pada 2025 untuk laba tahun 2024	154.731.973.785	744	*Distribution in 2025 for profit in 2024*
Distribusi pada 2024 untuk laba tahun 2023	96.382.440.859	475	*Distribution in 2024 for profit in 2023*

24. PENDAPATAN BUNGA

24. INTEREST INCOME

	2025	2024	
Kredit yang diberikan	1.502.917.330.803	1.454.498.737.798	*Loans*
Surat berharga	115.309.862.906	109.409.331.924	*Marketable securities*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	35.508.473.058	41.089.598.039	*Current accounts and placement with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	24.563.723.932	34.360.764.126	*Current accounts and placement with other banks*
Jumlah	**1.678.299.390.699**	**1.639.358.431.888**	***Total***

Jumlah pendapatan bunga yang diperoleh dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.205.980.286 dan Rp4.071.530.938 (Catatan 35).

Total interest income received from related parties as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp2,205,980,286 and Rp4,071,530,938 respectively (Note 35).

25. BEBAN BUNGA / *25. INTEREST EXPENSE*

	2025	2024	
Simpanan nasabah:			*Deposits from customers:*
Deposito berjangka	405.676.146.779	384.502.129.423	*Time deposits*
Tabungan	34.766.338.486	35.313.019.816	*Saving deposits*
Giro	24.337.338.343	26.916.031.927	*Current accounts*
Pinjaman yang diterima	59.736.282.181	30.801.313.311	*Borrowings*
Premi asuransi untuk program penjaminan dana nasabah (Catatan 40)	27.823.338.785	28.614.898.635	*Premium on deposit guarantee (Note 40)*
Obligasi yang diterbitkan	14.923.361.794	4.351.264.041	*Securities issued*
Simpanan dari bank lain	1.191.100.221	18.055.119.103	*Deposits from other banks*
Lain-lain	28.562.261.766	28.064.840.192	*Others*
Jumlah	**597.015.168.357**	**556.618.616.448**	***Total***

Jumlah beban bunga kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp31.659.392.312 dan Rp81.355.116.336 (Catatan 35).

Total interest expense to related parties as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp31,659,392,312 and Rp81,355,116,336 respectively (Note 35).

26. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *26. OTHER OPERATING INCOME*

	2025	2024	
Administrasi simpanan	49.943.672.705	46.857.346.349	*Saving administrations*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	6.807.348.614	2.405.700.674	*Collection of written-off loans*
Administrasi lainnya	762.332.017	1.487.327.823	*Other administrations*
Pendapatan ATM	538.874.166	553.366.900	*ATM revenues*
Administrasi jasa perbankan	240.847.800	257.095.000	*Banking services administrations*
Lain-lain	20.481.743.721	24.874.457.791	*Others*
Jumlah	**78.774.819.023**	**76.435.294.336**	***Total***

27. PENYISIHAN (PEMULIHAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *27. ALLOWANCE (REVERSAL) FOR IMPAIRMENT LOSSES OF ASSETS*

	2025	2024	
Kredit yang diberikan (Catatan 8)	159.043.237.984	112.852.553.892	*Loans (Note 8)*
Agunan yang diambil alih (Catatan 14)	25.802.380.932	23.560.791.635	*foreclosed assets (Note 14)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain (Catatan-7)	5.742.187	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)*
Giro pada bank lain (Catatan 6)	(581.936)	(22.560)	*Current accounts with other banks (Note 6)*
Surat berharga (Catatan 9)	(4.265.151)	(5.831.543)	*Marketable securities (Note 9)*
Rekening administratif (Catatan 21)	(116.409.759)	(542.139.645)	*Administrative account (Note 21)*
Jumlah	**184.730.104.257**	**135.865.351.780**	***Total***

28. BEBAN TENAGA KERJA / *28. PERSONNEL EXPENSES*

	2025	2024	
Gaji, upah dan honorarium	223.874.761.463	219.732.849.497	*Salaries, wages and honorarium*
Tunjangan karyawan	219.669.852.310	193.250.935.216	*Employee allowances*
Jasa produksi dan bonus	27.665.184.768	45.599.359.750	*Bonuses and other bonuses*
Imbalan kerja	48.048.501.372	67.691.360.070	*Employee benefits*
Pendidikan dan pelatihan	16.667.411.630	21.596.131.287	*Education and training*
Jumlah	**535.925.711.543**	**548.070.635.820**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

28. BEBAN TENAGA KERJA (lanjutan)

Jumlah gaji kotor, tunjangan dan bonus Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan pejabat eksekutif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

28. *PERSONNEL EXPENSES (continued)*

Total gross salaries, allowances and bonuses of the Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and executive officers respectively as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Komisaris			*Commissioners*
Gaji	698.118.400	1.107.172.150	*Salaries*
Tunjangan	1.459.919.100	4.693.470.369	*Allowances*
Bonus	1.647.308.361	1.985.607.297	*Bonuses*
Direksi			*Directors*
Gaji	3.551.841.900	2.985.207.097	*Salaries*
Tunjangan	8.628.221.829	10.968.163.242	*Allowances*
Bonus	6.945.193.095	4.477.276.775	*Bonuses*
Komite			*Committee*
Gaji	420.000.000	528.000.000	*Salaries*
Tunjangan	116.232.900	135.202.913	*Allowances*
Bonus	86.290.373	83.095.362	*Bonuses*
Pejabat Eksekutif Bank			*Executive Bank Officers*
Gaji	11.568.925.041	13.452.878.636	*Salaries*
Tunjangan	11.568.925.041	14.365.123.474	*Allowances*
Bonus	14.521.604.296	3.938.176.651	*Bonuses*
Jumlah	**61.212.580.335**	**58.719.373.966**	***Total***

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

29. *GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2025	2024	
Sewa	45.723.223.876	32.516.383.511	*Rent*
Tenaga kerja *outsourcing*	37.818.350.910	36.353.177.931	*Outsourcing labour*
Penyusutan aset hak guna (Catatan 13)	36.575.110.146	34.993.514.039	*Depreciation of right of use assets (Note 13)*
Perjalanan dinas	27.942.075.431	30.822.055.646	*Business trip*
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	26.472.795.436	26.307.104.345	*Depreciation of fixed assets (Note 11)*
Iklan dan promosi	18.897.219.359	14.893.054.639	*Advertisement and promotion*
Rumah tangga kantor	15.459.081.392	16.916.257.704	*Households office*
Pemeliharaan dan perbaikan	13.368.145.898	16.241.005.999	*Maintenance and repairs*
Alat tulis kantor	12.377.994.714	13.334.524.842	*Office stationery*
Jasa profesional	9.859.554.006	9.934.891.309	*Professional services*
Listrik, air dan gas	8.345.925.342	8.442.752.434	*Electricity, water and gas*
Iuran	8.050.680.140	9.207.899.205	*Fees*
Representasi	5.310.383.951	6.203.617.975	*Representations*
Premi asuransi	4.856.339.527	4.448.395.505	*Insurance premium*
Transportasi	4.651.919.272	5.894.768.561	*Transportation*
Komunikasi	3.620.305.438	3.161.984.917	*Communication*
Ekspedisi	1.262.273.415	1.898.412.556	*Expedition*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 12)	520.621.043	253.507.082	*Amortisation of Intangible assets (Note 12)*
Lain-lain	39.932.387.654	35.892.757.629	*Others*
Jumlah	**321.044.386.950**	**307.716.065.828**	***Total***

30. PENDAPATAN/BEBAN NON-OPERASIONAL / *30. NON-OPERATING INCOME/EXPENSE*

	2025	2024	
Pendapatan non-operasional			***Non-operating incomes***
Lain-lain	9.877.071.730	30.179.610.317	*Others*
Jumlah	**9.877.071.730**	**30.179.610.317**	***Total***
Beban non-operasional			***Non-operating expenses***
Hadiah, souvenir dan sumbangan	8.344.695.276	6.697.607.081	*Gifts, souvenir and donations*
Denda	36.617.149	11.700.000	*Penalties*
Lain-lain	13.271.282.421	16.078.914.363	*Others*
Jumlah	**21.654.594.846**	**24.788.221.444**	***Total***

Pendapatan non-operasional - lain-lain merupakan koreksi atas kelebihan pencadangan beban tahun sebelumnya.

Non-operating income - others is correction of the excess of expense allowances of the previous year.

31. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *31. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

	2025	2024	
KOMITMEN			***COMMITMENTS***
Liabilitas komitmen			***Commitment liabilities***
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan			*Unused loans commitments granted to debtors*
Pihak ketiga	(184.471.423.616)	(208.383.051.708)	*Third parties*
Jumlah liabilitas komitmen	(184.471.423.616)	(208.383.051.708)	***Total commitment liabilities***
JUMLAH LIABILITAS KOMITMEN - BERSIH	**(184.471.423.616)**	**(208.383.051.708)**	***TOTAL COMMITMENTS LIABILITIES - NET***
KONTINJENSI			***CONTINGENCIES***
Tagihan kontinjensi			***Contingent receivables***
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	155.148.072.398	123.142.133.514	*Past due interest receivables*
Jumlah tagihan kontinjensi	155.148.072.398	123.142.133.514	***Total contingent receivables***
Liabilitas kontinjensi			***Contingent liabilities***
Garansi yang diterbitkan			*Guarantees issued*
Pihak ketiga	(39.941.724.094)	(78.807.892.638)	*Third parties*
Jumlah liabilitas kontinjensi	(39.941.724.094)	(78.807.892.638)	***Total contingent liabilities***
JUMLAH LIABILITAS KONTINJENSI - BERSIH	**115.206.348.304**	**44.334.240.876**	***TOTAL CONTINGENT LIABILITIES NET***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

32. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Bank yang tercatat dalam laporan keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

32. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT

The table below presents comparison of the carrying value with the fair value of the Bank's financial instruments that recorded in the financial statements. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2025 and 2024 , and was not updated to reflect changes in market conditions that have occurred after this date.

	2025				
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*				
	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortised cost*	Liabilitas diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Jumlah nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Jumlah nilai wajar/ *Total fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas	687.295.642.009	-	687.295.642.009	687.295.642.009	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	997.936.030.834	-	997.936.030.834	997.936.030.834	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	16.066.886.094	-	16.066.886.094	16.066.886.094	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.137.844.407.782	-	3.137.844.407.782	3.137.844.407.782	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Kredit yang diberikan	13.479.112.676.817	-	13.479.112.676.817	13.479.112.676.817	*Loans*
Surat berharga	941.920.294.323	-	941.920.294.323	988.702.310.241	*Marketable securities*
Surat berharga yang dibeli dengan dengan janji dijual kembali	258.790.818.168	-	258.790.818.168	264.355.707.849	*Securities purchased under resale agreements*
Aset lain-lain	86.863.286.952,00	-	86.863.286.952	86.863.286.952	*Other assets*
	19.605.830.042.979	-	**19.347.039.224.811**	**19.658.176.948.578**	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Liabilitas segera	-	62.439.844.787	62.439.844.787	62.439.844.787	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	-	15.929.812.276.682	15.929.812.276.682	15.929.812.276.682	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	-	266.648.689.186	266.648.689.186	266.648.689.186	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	-	745.109.502.734	745.109.502.734	745.109.502.734	*Borrowings*
	-	**17.004.010.313.389**	**17.004.010.313.389**	**17.004.010.313.389**	

	2024				
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*				
	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortised cost*	Liabilitas diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Jumlah nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Jumlah nilai wajar/ *Total fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas	594.934.066.970	-	594.934.066.970	526.951.698.129	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	1.510.734.797.378	-	1.510.734.797.378	1.616.683.742.502	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	18.063.127.798	-	18.063.127.798	16.058.105.352	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	399.941.683.676	-	399.941.683.676	1.344.803.968.519	*Placements with Bank Indonesia and*
Kredit yang diberikan	12.418.640.352.913	-	12.418.640.352.913	12.211.521.150.431	*Loans*
Surat berharga	907.840.831.644	-	907.840.831.644	1.030.955.397.060	*Marketable securities*
Aset lain-lain	88.778.071.191	-	88.778.071.191	88.888.366.375	*Other assets*
	15.938.932.931.568	-	**15.938.932.931.568**	**16.835.862.428.368**	

32. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) / *32. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT (continued)*

	2024				
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*				
	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortised cost*	Liabilitas diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Jumlah nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Jumlah nilai wajar/ *Total fair value*	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Liabilitas segera	-	70.808.421.090	70.808.421.090	70.808.421.090	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	-	11.987.255.027.637	11.987.255.027.637	11.987.255.027.637	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	-	421.089.316.957	421.089.316.957	421.089.316.957	*Deposits from other banks*
Surat berharga yang diterbitkan	-	36.955.494.571	36.955.494.571	36.955.494.571	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	-	905.345.188.006	905.345.188.006	905.345.188.006	*Borrowings*
	-	13.421.453.448.261	13.421.453.448.261	13.421.453.448.261	

(i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga untuk tujuan investasi, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan aset lain-lain.

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro dan penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat berharga untuk tujuan investasi, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(i) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks, investment securities, securities purchased under resale agreements and other assets.

The carrying values of cash and cash equivalents, current accounts and placements with floating interest rate is a reasonable approximation of fair value.

Estimated fair value of placements with fixed interest rate, investment securities, securities purchased under resale agreements and other assets is based on discounted cash flows using money market interest rate applicable to the debt with credit risk and similar remaining maturity. Since the remaining maturity below one year, the carrying amount of placements with fixed interest rate and other assets is a reasonable approximation of fair value.

(ii) Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar, sedangkan nilai tercatat atas pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajarnya.

(ii) Loans

The Bank's loan portfolio generally consists of loans with floating interest rates. Loans are stated at carrying amount. The fair value of loans shows the discounted value of the estimated future cash flows expected to be received by the Bank. Estimated cash flows is discounted using market rates to determine fair value.

The carrying amounts of loans with floating interest rate is a reasonable approximation of fair value, while the carrying value of short-term loans with fixed interest rate is a reasonable approximation of fair value.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

32. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

(iii) Liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(iv) Surat berharga

Nilai wajar untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

(v) Surat berharga yang diterbitkan

Nilai wajar agregat dihitung berdasarkan harga pasar kuotasi. Jika informasi ini tidak tersedia, model diskonto arus kas digunakan berdasarkan kurva *yield* terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

33. IMBALAN KERJA

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun manfaat pasti, sumbangan kematian, pesangon dan uang pisah, cuti besar serta Penghargaan Masa Bhakti (PMB).

Penilaian aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dihitung oleh akturia independen Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Program pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank. Program dana pensiun manfaat pasti yang terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.67 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-174/KM.10/2008 tanggal 21 Agustus 2008.

Program PMB dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan program PMB yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.01.A Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Imbalan PMB berupa pembayaran yang jumlahnya sebesar masing-masing 3 kali, 4 kali, 5 kali dan 6 kali dari dasar pemberian penghargaan (DPP) kepada pegawai dengan masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 30 tahun dengan syarat-syarat tertentu.

32. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT (continued)

(iii) Liabilities immediately payable, deposits from customers, deposits from other banks and other liabilities

Estimated of fair value of liabilities immediately payable, deposits without maturity, including non-interest bearing deposits is the amount owed when the debt is paid.

Estimated fair value of deposits with fixed interest rate and other liabilities that are not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. Since the remaining maturity below one year, the carrying amount of deposits with fixed interest rates and other liabilities is a reasonable approximation of fair value.

(iv) Marketable securities

The fair value of held-to-maturity securities is determined based on market prices or intermediary quotations price (broker)/securities traders (dealers). If this information is not available, fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield.

(v) Securities issued

The aggregate fair values are calculated based on quoted market prices. If this information is not available, discounted cash flow model is used based on a current yield curve appropriate for the remaining term to maturity.

33. EMPLOYEE BENEFITS

Bank provides long-term employee benefits and other post-employment to employees who qualify consisting of defined benefit pension plan, mourning donation, severance and severance pay, long service leave and service pay benefits.

The actuarial valuation for long-term employee benefit liabilities and post-employment are calculated by independent actuary Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Agus Susanto using the projected unit credit method.

Bank's pension plan administered by Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Employee contribution is 5% of their pensionable earnings and the remaining amount required to fund the program is contributed by the Bank. Defined benefit pension plan that last set by the Decree of Directors No.67 Year 2007 dated September 12, 2007 which was approved by the Ministry of Finance Decree No.KEP-174/KM.10/2008 dated August 21, 2008.

Service pay benefits program managed by the Bank and regulated in the service pay benefits program regulation established by the Decree of Directors No.01.A Year 2007 January 2, 2007. Service pay benefits rewards form of payment amount for each 3 times, 4 times, 5 times and 6 times of the basic award (DPP) to employees with services of 15 years, 20 years, 25 years and 30 years with certain conditions.

33. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program Cuti Besar dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan untuk penggantian hak cuti besar.

Status aset (liabilitas) program imbalan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

33. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Long leave program managed by the Bank and an employee benefits program for employees to leave substantial compensation.

Status of assets (liabilities) employee benefits programs as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025				
	Program pensiun/ *Pension program*	Program pasca kerja lainnya/*Other post-employment program*	Program jangka panjang/ *Long-term program*	Program penghargaan pengurus/ *Management awards*	Jumlah/ *Total*
Nilai wajar aset/ *Fair value of assets*	1.062.236.113.462	-	-	-	1.062.236.113.462
Nilai kini liabilitas *Fair value of liabilities*	(1.157.668.344.710)	(4.760.037.194)	(58.629.459.425)	(212.990.171)	(1.221.270.831.500)
Jumlah/*Total*	**(95.432.231.248,00)**	**(4.760.037.194)**	**(58.629.459.425)**	**(212.990.171)**	**(159.034.718.038)**

	2024				
	Program pensiun/ *Pension program*	Program pasca kerja lainnya/*Other post-employment program*	Program jangka panjang/ *Long-term program*	Program penghargaan pengurus/ *Management awards*	Jumlah/ *Total*
Nilai wajar aset/ *Fair value of assets*	959.388.478.380	-	-	-	959.388.478.380
Nilai kini liabilitas *Fair value of liabilities*	(1.018.018.974.059)	(26.512.696.155)	(51.519.035.401)	(172.551.966)	(1.097.223.257.581)
Jumlah/*Total*	**(59.630.495.679)**	**(26.512.696.155)**	**(51.519.035.401)**	**(172.551.966)**	**(137.834.779.201)**

Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Reconciliation of changes in assets (liabilities) of employee benefits as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025				
	Program pensiun/ *Pension program*	Program pasca kerja lainnya/*Other post-employment program*	Program jangka panjang/ *Long-term program*	Program penghargaan pengurus/ *Management awards program*	Jumlah/ *Total*
Saldo awal/ *Beginning balance*	(59.630.495.679)	(26.512.696.155)	(51.519.035.401)	(172.551.966)	(137.834.779.201)
Beban periode berjalan/ *Expenses for the period*	(47.683.055.458)	21.707.925.645	(20.576.620.544)	(1.496.751.015)	(48.048.501.372)
Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	(24.770.540.947)	(10.476.530.049)	-	(96.568.857)	(35.343.639.853)
Kontribusi pemberi kerja/ *Employer contributions*	36.651.860.836	-	-	-	36.651.860.836
Imbalan yang dibayarkan/ *Payment of benefits*	-	10.521.283.365	13.466.196.520	1.552.881.667	25.540.341.552
Jumlah	(95.432.231.248)	(4.760.037.194)	(58.629.459.425)	(212.990.171)	(159.034.718.038)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

33. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

33. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Reconciliation of changes in assets (liabilities) of employee benefits as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

	2024				
	Program pensiun/ *Pension program*	Program pasca kerja lainnya/*Other post-employment program*	Program jangka panjang/ *Long-term program*	Program penghargaan pengurus/ *Management awards program*	Jumlah/ *Total*
Saldo awal/ *Beginning balance*	(60.196.032.727)	(24.298.225.600)	(45.547.233.911)	(2.154.122.536)	(132.195.614.774)
Beban tahun berjalan/ *Expenses for the year*	(44.326.144.147)	(4.279.030.859)	(19.012.890.873)	(273.294.191)	(67.891.360.070)
Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	8.701.619.782	(3.711.789.501)	-	(566.736.220)	4.423.094.061
Kontribusi pemberi kerja/ *Employer contributions*	36.190.061.413	-	-	-	36.190.061.413
Imbalan yang dibayarkan/ *Payment of benefits*	-	5.776.349.805	13.041.089.383	2.821.600.981	21.639.040.169
Jumlah	**(59.630.495.679)**	**(26.512.696.155)**	**(51.519.035.401)**	**(172.551.966)**	**(137.834.779.201)**

Biaya program imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The expense of employee benefits programs as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025				
	Program pensiun/ *Pension program*	Program pasca kerja lainnya/*Other post-employment program*	Program jangka panjang/ *Long-term program*	Program penghargaan pengurus/ *Management*	Jumlah/ *Total*
Biaya jasa kini/ *Current service cost*	(43.449.290.265)	(402.646.210)	(8.210.295.196)	(161.602.962)	(52.223.834.633)
Biaya bunga/ *Interest cost*	(72.350.347.158)	(1.882.401.427)	(3.657.851.513)	(12.078.638)	(77.902.678.736)
Rugi aktuaria/ *Actuarial loss*	-	-	(8.708.473.835)	-	(8.708.473.835)
Biaya jasa lalu / *Past service cost*	-	23.992.973.282	-	(1.323.069.415,00)	22.669.903.867
Hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun/ *Results are expected on pension fund assets*	68.116.581.965	-	-	-	68.116.581.965
Jumlah	**(47.683.055.458)**	**21.707.925.645**	**(20.576.620.544)**	**(1.496.751.015)**	**(48.048.501.372)**

33. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Biaya program imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

33. *EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

The expense of employee benefits programs as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

	2024				
	Program pensiun/ *Pension program*	Program pasca kerja lainnya/*Other post-employment program*	Program jangka panjang/ *Long-term program*	Program penghargaan pengurus/ *Management*	Jumlah/ *Total*
Biaya jasa kini/ *Current service cost*	(40.172.617.889)	(2.602.453.293)	(8.039.098.775)	(135.430.349)	(50.949.600.306)
Biaya bunga/ *Interest cost*	(66.806.485.903)	(1.676.577.568)	(3.142.756.140)	(137.863.842)	(71.763.686.351)
Rugi aktuaria/ *Actuarial loss*	-	-	(7.831.032.958)	-	(7.831.032.958)
Hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun/ *Results are expected on pension fund assets*	62.652.959.545	-	-	-	62.652.959.545
Jumlah	**(44.326.144.147)**	**(4.279.030.859)**	**(19.012.890.873)**	**(273.294.191)**	**(67.891.360.070)**

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria atas seluruh imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The main assumptions used in the actuarial calculation for all employee benefits as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Tingkat bunga per tahun			*Interest rate per annum*
- Liabilitas	6,80%	7,10%	*Liabilities -*
- Aset	0,00%	0,00%	*Assets -*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	5,00%	5,00%	*Basic salary increment rate per annum*
Tabel mortalitas	GAM-1971	GAM-1971	*Mortality table*
Tingkat cacat per tahun	0,01%	0,01%	*Disability rate per annum*
Tingkat pengunduran diri per tahun			*Resignation rate per annum*
Usia 18-45 tahun	0,10%	0,10%	*Age 18-45 years*
Usia 46-55 tahun	0,05%	0,05%	*Age 46-55 years*

Beban imbalan kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:

Employee benefits expense recognised in other comprehensive income:

	2025	2024	
Perubahan asumsi aktuarial	-	(475.780.227)	*Changes in actuarial assumption*
Penyesuaian	35.343.639.853	(3.947.313.834)	*Adjustments*
Total biaya yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**35.343.639.853**	**(4.423.094.061)**	***Total expense recognised in other comprehensive income***

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Remeasurement on liabilities (assets) post-employment benefits are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	87.466.927.902	91.890.021.963	*Beginning balance*
Kerugian (keuntungan) aktuaria	35.343.639.853	(4.423.094.061)	*Actuarial loss (gain)*
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	**122.810.567.755**	**87.466.927.902**	***Total remeasurement on defined benefit liabilites***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

33. IMBALAN KERJA (lanjutan) / 33. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

	PVBO			
	Nilai kini kewajiban manfaat kerja/ *Present value of employee benefit*	Penyesuaian historis (nilai)/ *Historically adjustments (value)*	Penyesuaian historis (%)/ *Historically adjustments (%)*	
31 Desember 2025	1.157.668.344.710	3.790.636.936	0,33%	*December 31, 2025*
31 Desember 2024	1.019.018.974.059	(84.252.837)	-0,01%	*December 31, 2024*

	PVA			
	Nilai wajar aset program/ *Fair value of program assets*	Penyesuaian historis (nilai)/ *Historically adjustments (value)*	Beban tahun(%) / *Expenses in the current year (%)*	
31 Desember 2025	1.062.236.113.462	32.823.133.470	3,09%	*December 31, 2025*
31 Desember 2024	959.388.478.380	(15.642.217.970)	-1,63%	*December 31, 2024*

34. LABA BERSIH PER SAHAM / 34. EARNINGS PER SHARE

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun bersangkutan. Jumlah saham yang beredar termasuk modal disetor lainnya selama tahun berjalan (Catatan 22).

Earnings per share is calculated by dividing net income to shareholders by the weighted average number of shares outstanding during the year. Number of outstanding shares including other paid-in capital during the year (Note 22).

	2025	2024	
Laba bersih	92.618.227.256	176.836.541.469	*Net income*
Rata-rata tertimbang jumlah saham	215.030.538	205.089.940	*Weighted average number of shares*
Laba bersih per saham	431	851	*Earnings per share*

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / 35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

In the normal course of business, the Bank entered into transactions with related parties for the relationship of ownership and/or management. All transactions with related parties have been conducted with the policies and requirements that have been agreed.

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transaction*
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemegang saham pengendali/ *Ultimate shareholder*	Kredit yang diberikan, simpanan, pendapatan dan beban bunga/ *Loans, deposits, interest income and expenses*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Pemegang saham pengendali/ *Ultimate shareholder*	Simpanan dan beban bunga/ *Deposits and interest expenses*
PT Flobamor	Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama/ *Under same ultimate shareholder*	Simpanan dan beban bunga/ *Deposits and interest expenses*
Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	PT Bank Pembangunan Daerah NTT sebagai pendiri/*as founder*	Simpanan dan beban bunga/ *Deposits and interest expenses*
Badan Kesejahteraan Karyawan	PT Bank Pembangunan Daerah NTT sebagai pendiri/*as founder*	Simpanan dan beban bunga/ *Deposits and interest expenses*
Karyawan kunci/ *Key employees*	Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang dan Kepala Divisi serta anggota keluarga dekat dengan orang-orang tersebut/ *Directors, Commissioners, Branch Managers and Division Heads and close family members*	Kredit yang diberikan, simpanan, pendapatan dan beban bunga/*Loans, deposits, interest income and expenses*

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

	2025	2024	
Aset			***Assets***
Kredit yang diberikan	31.708.303.575	9.662.299.094	*Loans*
Persentase terhadap jumlah aset			*Percentage of total assets*
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
Giro	1.447.558.491.534	243.521.378.038	*Current accounts*
Tabungan	15.482.322.706	7.709.797.250	*Saving deposits*
Deposito berjangka	105.145.751.697	9.004.801.338	*Time deposits*
Jumlah	1.568.184.565.937	260.235.976.626	*Total*
Persentase terhadap jumlah liabilitas			*Percentage of total liabilities*
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	15.975.075.720	18.417.296.013	*Allowance for long-term employee benefits*
Penyisihan imbalan pasca kerja	14.667.253.247	13.182.703.987	*Allowance for post-employment benefits*
Jumlah	30.642.328.967	31.600.000.000	*Total*
Persentase terhadap jumlah penyisihan imbalan kerja	19,27%	22,93%	*Percentage of total allowance for employee benefits*

	2025	2024	
Pendapatan bunga			***Interest income***
Kredit yang diberikan	2.205.980.286	4.071.530.938	*Loans*
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	0,13%	0,25%	*Percentage of total interest income*
Beban bunga			***Interest expenses***
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
Giro	9.408.350.151	9.642.660.733	*Current accounts*
Tabungan	251.042.162	372.518.017	*Saving deposits*
Deposito berjangka	22.000.000.000	71.339.937.585	*Time deposits*
Jumlah	31.659.392.312	81.355.116.336	*Total*
Persentase terhadap jumlah beban bunga	5,30%	14,62%	*Percentage of total interest expenses*
Kompensasi kepada personil manajemen kunci			***Compensation to the key management personnel***
Imbalan kerja jangka pendek	37.659.454.378	31.412.149.961	*Short-term employee benefits*
Imbalan kerja jangka panjang	1.875.113.800	344.028.800	*Long-term employee benefits*
Imbalan pasca kerja	812.752.807	-	*Post-employment benefits*
Jumlah	40.347.320.985	31.756.178.761	*Total*
Persentase terhadap jumlah beban tenaga kerja	7,53%	5,79%	*Percentage of total personnel expenses*

Komitmen dan Kontijensi

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontijensi kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Commitments and contingencies

There are no commitment and contingency balances with related parties as of December 31, 2025 and 2024.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Laporan Profil Risiko Bank disusun setiap triwulan sebagai salah satu parameter yang menggambarkan kondisi kegiatan operasional Bank terkait dengan pengelolaan risiko serta digunakan sebagai pemenuhan ketentuan regulator yaitu:

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk In The Banking Book*) Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Komitmen manajemen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko diwujudkan melalui penyusunan buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang mencakup kebijakan dan prosedur mengenai:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Selain itu, manajemen telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko, dengan harapan pengelolaan risiko secara keseluruhan dapat dilakukan secara terpadu, terarah, terkoordinir dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja usaha Bank.

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategik dan risiko reputasi.

Setiap triwulan, Bank telah menyusun profil risiko yang secara garis besar dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki oleh Bank.

Kerangka manajemen risiko
Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank.

36. RISK MANAGEMENT

Implementation of risk management in Bank accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and Bank Indonesia Circular Letter No.13/23/DPNP dated October 25, 2011 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks.

The Bank's Risk Profile Report is prepared quarterly as one of the parameters that describe the condition of the Bank's operational activities related to the risk management and is used as the fulfillment of regulatory provisions, as follows:

- *Circular Letter of Financial Service Authority No.12/SEOJK.03/2018 Dated August 21, 2018 regarding the Application of Risk Management and Risk Measurement Standard Approach for Interest Rate Risk in the Banking Book for Conventional Banks.*
- *Financial Services Authority Regulation (POJK) No.14/POJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding assessment of Bank Health Level.*
- *Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 22, 2016 regarding Risk Management for Commercial.*

Risk management is not merely related to monitoring, reporting, and evaluating the risks, but also detecting and to anticipate the possible risks. Management's commitment to enhance the quality of risk management is implemented by formulating the manual of Guidelines for Application of Risk Management which shall cover the policies and procedures as follows:

- *Active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors;*
- *Adequacy of policies, procedures, and establishment of limits;*
- *Adequacy of processes of identification, measurement, monitoring, and control of risks and the Risk Management information system; and*
- *Comprehensive internal control system.*

In addition, the management has been establishing the Risk Management Committee and Risk Management Division, where, the overall risk management will be integrated, coordinated, and continuously practice to improve operational performance of the Bank.

In accordance with the complexity of business, the Bank has managed 8 (eight) risks, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk and reputation risk.

In quarterly, the Bank has prepared the risks profile globally which reflected the Bank's risk rate.

Risk management framework
The Bank's risk management organization involves the supervision of the Board of Commissioners, Board of Directors and the Risk Oversight Committee. Risk Monitoring Committee is the highest risk supervisor at the Board of Commissioners. The Risk Oversight Committee approve and monitor the implementation of the framework and the Bank's risk management policies. The Board of Commissioners delegate authority to the Managing Director and the Board of Directors to implement risk management strategies. Risk Monitoring Committee formed by the Board of Directors and is responsible for managing risks in the Bank.

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)
Kebijakan manajemen risiko Bank ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Bank, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Bank, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Divisi Pengawasan dan SKAI. Divisi Pengawasan dan SKAI secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

Komite Pemantau Risiko mengawasi perkembangan kebijakan menajemen risiko dan menilai penerapannya. Komite juga memberikan nasihat mengenai strategi manajemen risiko yang harus digunakan oleh Bank. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Pemantau Risiko akan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Divisi Manajemen Risiko.

ALCO merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan dalam mengelola aset. Liabilitas dan modal sedemikian rupa dengan memperhatikan risiko terkait untuk tujuan penggunaan secara efisien dan optimum. Tujuan utama dari ALCO adalah:

(i) memberikan arahan dan menyakinkan penerapan strategi untuk mengelola komposisi posisi keuangan dan struktur pendanaan Bank pada kondisi normal dan *stress*;
(ii) memonitor risiko-risiko dan pengaruh dari kondisi pasar;
(iii) menyediakan sarana untuk mendiskusikan masalah ALCO;
(iv) memfasilitasi kerjasama antara bisnis/departemen yang berbeda;
(v) menyelesaikan isu antar departemen seperti alokasi sumber daya;
(vi) menelaah sumber dan alokasi pendanaan secara keseluruhan;
(vii) melakukan perencanaan ke depan dan menentukan lingkungan perbankan yang paling sesuai untuk perencanaan aset/liabilitas di masa depan dan menelaah skenario kontinjensi;
(viii) mengevaluasi skenario alternatif tingkat suku bunga, harga dan kombinasi portofolio; menelaah distribusi aset/liabilitas dan jatuh temponya.

35. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management framework (continued)
The Bank's risk management policies are esteblished to identify and analyze the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Division of Supervision and Internal Audit Task Force. Division of Supervision and Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank's Audit Committee.

The Risk Monitoring Committee supervises the development of risk management policies and assesses the implementation. The Committee also provides advice on the risk management strategy to be employed by the Bank. In conducting its oversight role, the Risk Monitoring Committee will also monitor and evaluate the performance of the Risk Management Division.

The ALCO is the primary vehicle for achieving the objectives of managing assets, liabilities and capital with the consideration of related risk for the purpose of efficient and optimum utilization. The main purposes of an ALCO are to:

(i) provide direction and ensure tactical follow-throught to manage the Bank's balance sheet composition and finding structure under normal and stressed conditions;
(ii) monitor the risk and market influences;
(iii) provide a forum for discussing ALCO issues;
(iv) facilitate teamwork between different businesses /departements;
(v) resolve departmental inter-face issues such as resource allocation;
(vi) review overall sources and funding allocations;
(vii) plan and determine the most appropriate banking environment for asset/liability forward planning and review contingency scenarios;
(viii) evaluate alternative scenarios of interest rates, pricing and portfolio combinations; examine the distribution of assets/liabilities and its maturity.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional Bank yaitu perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi serta operasional dan pelayanan.

Di dalam melakukan pengelolaan risiko kredit Bank berfokus pada beberapa unsur utama yang meliputi sumber daya manusia yang sadar risiko, proses persetujuan kredit yang transparan dan berjenjang oleh Komite Kredit, tata cara, kriteria dan alat ukur risiko yang jelas, administrasi dan dokumentasi yang lengkap serta pengawasan kredit secara berkesinambungan terhadap kualitas kredit yang diberikan.

Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individual maupun secara keseluruhan.

Sistem dan prosedur kredit Bank telah dibakukan untuk menjamin diterapkannya kebijakan dan pelaksanaan pemberian pinjaman secara konsisten. Untuk kredit produktif, Bank menggunakan model *Internal Credit Risk Rating* untuk menganalisis risiko bisnis dan finansial dari debitur secara obyektif dan memberikan rating kepada nasabahnya. Selain itu, Bank juga menggunakan *Credit Risk Capital Allocation and Pricing* untuk mengkuantifikasi risiko kredit dan menentukan harga yang sesuai berdasarkan risiko kredit.

Untuk kredit konsumtif, Bank menggunakan model *Internal Credit Scoring* untuk menganalisis dan menghitung risiko dari pemberian kredit konsumtif.

Dalam rangka menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat, Bank menerapkan prinsip *Four Eyes* (pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih) pada setiap kantor cabang dengan memisahkan fungsi analisis pemasaran dan analisis risiko kredit.

Upaya yang dilakukan Bank dalam memperbaiki profil risiko kredit adalah monitoring atas debitur dan mengambil tindakan yang diperlukan agar kualitas kreditnya tidak menjadi *non-performing loans* (NPL); melakukan penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah; melakukan kaji ulang dan mengevaluasi indikator aspek risiko dan aspek kepatuhan untuk mengevaluasi penerapan *four eyes principles* serta peratingan untuk pemberian kredit koperasi; mengintensifkan rapat Komite Pemutus Kredit untuk pemberian kredit dengan plafon besar; dan secara konsisten memantau kredit dalam rangka ekspansi kredit yang sehat dan berkualitas.

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Credit risk

Credit risk is the risk resulting from the default of counterparty in fulfilling its obligation. Credit risk can arise from various functional activities of the Bank such as credit (finance of fund), treasury and investment also operational and services.

In managing credit risk, the Bank focuses on several major, elements which are people's risk-awareness, transparent and layered credit process by Credit Committee, clear risk procedures, criteria and measurement tools, adequate credit administration and documentation also a continuous credit oversight on the loans portfolio quality.

According to their characteristics, existing loans in the current Bank is divided into productive and consumptive loans. To manage risk, the Bank measures the credit risk of the portfolio that is both quantitatively and qualitatively. This is to ensure the possibility of losses from unpaid loans to a minimum, both for individual and overall debtors.

Loans systems and procedures of the Bank have been standardized to ensure the application of lending policies and practices consistently. For a productive loan, the Bank uses the Internal Credit Risk Rating models to analyze business and financial risk of the debtor objectively and give ratings to its customers. In addition, the Bank also uses the Credit Risk Capital Allocation and Pricing for quantifying credit risk and determine an appropriate price based on credit risk.

For consumer loans, the Bank uses the Internal Credit Scoring models to analyze and calculate the risks of granting consumer loans.

In order to apply the principle of healthy lending, the Bank applies the principle of Four Eyes (making loans decisions made by two or more persons) in each branch office by separating the functions of marketing analysis and credit risk analysis.

Efforts by the Bank in improving credit risk profile are the monitoring of borrowers and taking necessary actions so that the credit quality does not become non-performing loans (NPL); conduct an intensive collection of problematic debtors; conducted a review and evaluating indicators of risk aspects and compliance aspects to evaluate the application of four eyes principles and rating for cooperatives credit; intensify the Credit Approval Committee meeting for credit approval with a large plafond, and consistently monitor the credit in order to make qualified and healthy loans expansion.

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Sistem pengelolaan manajemen risiko kredit Bank telah dibakukan dalam suatu Pedoman Perusahaan (PP) dan dikaji secara periodik.

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan kredit lainnya.
Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024	
Giro pada Bank Indonesia	997.936.030.834	1.510.734.797.378	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	16.069.608.774	18.091.833.276	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.137.850.149.969	399.941.683.676	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Kredit yang diberikan	13.945.702.305.190	12.766.585.447.510	*Loans*
Surat berharga	941.920.294.323	907.845.086.794	*Marketable securities*
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	258.790.818.168	-	*Securities purchased under resale agreements*
Jumlah - bruto	19.298.269.207.258	15.603.198.858.634	*Total - gross*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(466.592.351.053)	(347.978.065.226)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.831.676.856.205**	**15.255.220.793.408**	***Total - net***

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024	
Garansi yang diterbitkan	(39.941.724.094)	(78.807.892.638)	*Guarantees issued*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan			*Unused loans commitments granted to customers*
Pihak ketiga	(184.471.423.616)	(208.383.051.708)	*Third parties*
Jumlah	**(224.413.147.710)**	**(287.190.944.346)**	***Total***

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai
(i) Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian
(ii) Bank telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "early warning system" dan pemantauan yang disiplin.

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Credit risk (continued)

The Bank credit risk management system has been standarized in the Company's Guidelines (PP) and reviewed periodically.

(i) The maximum credit risk exposure without calculating the collateral and other credit.
Credit risk exposure to the assets in the statement of financial position as of December 31, 2025 and 2024:

Credit risk exposure on the administrative accounts as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

The above table shows the maximum exposure to credit risk for the Bank as of December 31, 2025 and 2024 without calculating the collateral or other credit support. For the statements of financial position assets, the exposure is determined based on net carrying value as disclosed in the financial statements.

Managements believes on the Bank's ability to control and maintain the its credit risk exposure arising from loans based on the following:
(i) The Bank has written guidelines regarding credit policies and processes that cover all aspects of loans granted. Each
(ii) The Bank has an early problem detection system through "early warning system" and disciplined monitoring.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki kegiatan usaha dalam wilayah geografis yang sama, atau memiliki karakteristik yang sejenis yang dapat menyebabkan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi ataupun kondisi lainnya.

a. Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis nasabah atau counterparty.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

a. Geographical sectors

The following tables break down Bank's credit exposure at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by geographical region as of December 31, 2025 and 2024. For these tables, Bank has allocated exposures to regions based on the customer or counterparty geographical area.

	2025				
	Nusa Tenggara Timur	Jawa Timur/ *East Java*	DKI Jakarta	*Lain-lain/ Others*	Jumlah/ *Total*
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	-	-	997.936.030.834	-	997.936.030.834
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	13.312.760.946	90.425.595	2.056.610.855	609.811.378	16.069.608.774
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	-	-	2.782.850.149.969	355.000.000.000	3.137.850.149.969
Kredit yang diberikan/ *Loans*	13.945.702.305.190	-	-	-	13.945.702.305.190
Surat berharga/ *Marketable securities*	-	-	941.920.294.323	-	941.920.294.323
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Securities purchased under resale agreements*	-	-	258.790.818.168	-	258.790.818.168
Jumlah - kotor/ *Total - gross*	13.959.015.066.136	90.425.595,00	4.983.553.904.149	355.609.811.378	19.298.269.207.258
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*					(466.592.351.053)
Jumlah - bersih/ *Total - net*					**18.831.676.856.205**
Rekening administratif/ *administrative accounts*					
Bank garansi yang diterbitkan/ *Bank guarantees issued*	39.941.724.094	-	-	-	39.941.724.094
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan/ *Unused loans facilities*	184.471.423.616	-	-	-	184.471.423.616
Jumlah/ *Total*	**224.413.147.710**	-	-	-	**224.413.147.710**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)
a. Sektor geografis (lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure (continued)
a. Geographical sectors (continued)

	2024				
	Nusa Tenggara Timur	Jawa Timur/ *East Java*	DKI Jakarta	*Lain-lain/ Others*	Jumlah/ *Total*
Aset/ Assets					
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	-	-	1.510.734.797.378	-	1.510.734.797.378
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	13.343.651.410,20	2.000.000,00	29.580.593,00	4.716.601.272,48	18.091.833.276
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	-	-	399.941.683.676	-	399.941.683.676
Kredit yang diberikan/ *Loans*	12.766.585.447.510	-	-	-	12.766.585.447.510
Surat berharga/ *Marketable securities*	-	-	907.845.096.794	-	907.845.096.794
Jumlah - kotor/ *Total - gross*	12.779.929.088.920	2.000.000,00	2.818.551.158.441	4.716.601.272,48	15.603.198.858.834
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*					(347.978.065.226)
Jumlah - bersih/ *Total - net*					15.255.220.793.408
Rekening administratif/ *administrative accounts*					
Bank garansi yang diterbitkan/ *Bank guarantees issued*	78.807.892.638	-	-	-	78.807.892.638
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan/ *Unused loans facilities*	208.383.051.708	-	-	-	208.383.051.708
Jumlah/ *Total*	287.190.944.346	-	-	-	287.190.944.346

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b. Sektor industri

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure (continued)

b. Industry sector

The following table describes the details of the Bank's credit exposure at the carrying amount (without calculating collateral or other credit support), which are categorized by industri sector.

	2025					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) / *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank / *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya / *Other companies*	Perseorangan / *Individuals*	Jumlah/ *Total*
Aset/ *Assets*						
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	997.936.030.834	-	-	-	-	997.936.030.834
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	-	16.069.608.774	-	-	-	16.069.608.774
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with *Bank Indonesia and other banks*	2.782.850.149.969	355.000.000.000	-	-	-	3.137.850.149.969
Kredit yang diberikan/ *Loans*	5.280.971.592	97.916.668	185.922.546.977	956.766.345.671	12.797.634.524.283	13.945.702.305.191
Surat berharga/ *Marketable securities*	941.920.294.323	-	-	-	-	941.920.294.323
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Securities purchased under resale agreements*	258.790.818.168	-	-	-	-	258.790.818.168
Jumlah - kotor/ *Total - gross*	**4.986.778.264.886**	**371.167.525.442**	**185.922.546.977**	**956.766.345.671**	**12.797.634.524.283**	**19.298.269.207.259**
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*						(466.592.351.053)
Jumlah - bersih/ *Total - net*						18.831.676.856.206

	2025					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) / *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank / *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya / *Other companies*	Perseorangan / *Individuals*	Jumlah/ *Total*
Rekening administratif/ *administrative accounts*						
Bank garansi yang diterbitkan/ *Bank guarantees issued*	-	-	-	39.941.724.094	-	39.941.724.094
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan/	23.394.587	400.000.000	79.595.954.178	52.169.982.493	52.282.092.358	184.471.423.616
Jumlah / *Total*	**23.394.587**	**400.000.000**	**79.595.954.178**	**92.111.706.587**	**52.282.092.358**	**224.413.147.710**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b. Sektor industri

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri. (lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure (continued)

b. Industry sector

The following table describes the details of the Bank's credit exposure at the carrying amount (without calculating collateral or other credit support), which are categorized by industri sector. (continued)

	2024					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) / *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank / *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya / *Other companies*	Perseorangan / *Individuals*	Jumlah/ *Total*
Aset/ *Assets*						
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	1.510.734.797.378	-	-	-	-	1.510.734.797.378
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	-	18.091.833.276	-	-	-	18.091.833.276
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with *Bank Indonesia and other banks*	399.941.683.676	-	-	-	-	399.941.683.676
Kredit yang diberikan/ *Loans*	-	-	95.765.958.074	462.610.791.171	12.208.208.698.265	12.766.585.447.510
Surat berharga/ *Marketable securities*	899.845.096.794	8.000.000.000	-	-	-	907.845.096.794
Jumlah - kotor/ *Total - gross*	**2.810.521.577.848**	**26.091.833.276**	**95.765.958.074**	**462.610.791.171**	**12.208.208.698.265**	**15.603.198.858.634**
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*						(347.978.065.226)
Jumlah - bersih/ *Total - net*						**15.255.220.793.408**

	2024					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) / *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank / *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya / *Other companies*	Perseorangan / *Individuals*	Jumlah/ *Total*
Rekening administratif/ *administrative accounts*						
Bank garansi yang diterbitkan/ *Bank guarantees issued*	-	-	-	78.807.892.638	-	78.807.892.638
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan/	-	-	-	114.672.822.734	93.710.228.974	208.383.051.708
Jumlah / *Total*	-	-	-	193.480.715.372	93.710.228.974	287.190.944.346

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iii) Kualitas kredit dari aset keuangan
Tabel berikut menyajikan aset keuangan berdasarkan stage dengan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap aset keuangan dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Credit risk (continued)

(iii) Credit quality of financial assets
The following table presents the financial assets by stage with the allowance for impairment losses against each financial assets under classification of amortised cost and fair value through other comprehensive income as of December 31, 2025 and 2024 :

	2025					
	Nilai tercatat/ Carrying amount				Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat bersih/ *Net carrying amount*
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Jumlah - kotor/ *Total - gross*		
Aset/ *Assets*						
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	997.936.030.834	-	-	997.936.030.834	-	997.936.030.834
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	16.069.608.774	-	-	16.069.608.774	(2.722.680)	16.066.886.094
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with *Bank Indonesia and other banks*	3.137.850.149.969	-	-	3.137.850.149.969	(5.742.187)	3.137.844.407.782
Kredit yang diberikan/ *Loans*	13.116.115.016.470	176.817.828.526	652.769.460.194	13.945.702.305.190	(466.589.628.373)	13.479.112.676.817
Surat berharga/ *Marketable securities*	941.920.294.323	-	-	941.920.294.323	-	941.920.294.323
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/ Securities *purchased under resale agreements*	258.790.818.168	-	-	258.790.818.168	-	258.790.818.168
Jumlah - kotor/ *Total - gross*	**18.468.681.918.538**	**176.817.828.526**	**652.769.460.194**	**19.298.269.207.258**	**(466.598.093.240)**	**18.831.671.114.018**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iii) Kualitas kredit dari aset keuangan
Tabel berikut menyajikan aset keuangan berdasarkan stage dengan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap aset keuangan dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iii) Credit quality of financial assets
The following table presents the financial assets by stage with the allowance for impairment losses against each financial assets under classification of amortised cost and fair value through other comprehensive income as of December 31, 2025 and 2024 : (continued)

	2024					
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*				Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat bersih/ *Net carrying amount*
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Jumlah - kotor/ *Total - gross*		
Aset/ *Assets*						
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	1.510.734.797.378	-	-	1.510.734.797.378	-	1.510.734.797.378
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	18.066.432.414	-	25.400.862	18.091.833.276	(28.705.478)	18.063.127.798
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with *Bank Indonesia and other banks*	399.941.683.678	-	-	399.941.683.678	-	399.941.683.678
Kredit yang diberikan/ *Loans*	12.158.696.964.375	136.401.750.936	471.484.732.199	12.766.585.447.510	(347.945.094.597)	12.418.640.352.913
Surat berharga/ *Marketable securities*	907.845.096.784	-	-	907.845.096.784	(4.265.151)	907.840.831.644
Jumlah - kotor/ *Total - gross*	**14.995.256.974.637**	**136.401.750.936**	**471.510.133.061**	**15.603.168.858.634**	**(347.978.065.226)**	**15.255.220.793.408**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iii) Kualitas kredit dari aset keuangan

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran kontraktual pada saat jatuh tempo, persyaratan kredit dapat dinegosiasikan kembali berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah.

Asumsi dan pertimbangan utama dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian

Variabel Makro Ekonomi (MEV)
Lingkungan ekonomi yang berkembang adalah penentu utama dari kemampuan nasabah Bank untuk memenuhi kewajiban mereka saat jatuh tempo. Ini adalah prinsip dasar PSAK 71 bahwa potensi kerugian kredit di masa depan harus bergantung tidak hanya pada kesehatan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan perubahan pada lingkungan ekonomi. Misalnya, jika Bank mengantisipasi perlambatan tajam dalam ekonomi dunia, Bank harus membentuk lebih banyak cadangan hari ini untuk menyerap kerugian kredit yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.

Untuk menangkap efek perubahan pada lingkungan ekonomi, model PD digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, dengan memasukkan informasi forward looking dalam bentuk perkiraan nilai-nilai variabel ekonomi yang kemungkinan akan berdampak pada kemampuan pembayaran kembali nasabah Bank.

Berbagai MEV digunakan untuk setiap model PD, tergantung pada hasil analisis statistik kesesuaian MEV dengan PD serta konsensus dari pakar kredit. Diantaranya adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat ke Rupiah dan suku bunga BI.

Bank menggunakan metode pemodelan untuk memproyeksikan MEV di masa depan. Bank menggunakan 3 skenario untuk pemodelan, yaitu normal, batas prediksi bawah dan batas prediksi atas. Bank akan memberikan bobot pada ketiga skenario tersebut untuk memperoleh proyeksi dasar untuk setiap MEV. Semua proyeksi diperbarui setiap satu tahun.

Sensitivitas MEV terhadap ECL
Perhitungan ECL bergantung pada beberapa variabel dan pada dasarnya tidak linier dan tergantung pada portofolio, yang menyiratkan bahwa tidak ada analisis tunggal yang dapat sepenuhnya menunjukkan sensitivitas kerugian kredit ekspektasian terhadap perubahan dalam MEV. Bank berkeyakinan bahwa sensitivitas harus dilakukan terhadap seluruh variabel, alih-alih variabel tunggal, karena hal ini sejalan dengan sifat multi-variabel dari perhitungan ECL.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iii) Credit quality of financial assets

Where there is doubt on the ability of the borrowers to meet contractual payments when due, the terms of the loans might be renegotiated based on mutual agreement between the Bank and the borrowers.

Key assumptions and judgments in determining expected credit loss

Macro Economic Variable (MEV)
The developing economic environment is the key determinant of the ability of a Bank's customer to meet their obligations as they fall due. It is a fundamental principle of PSAK 71 that the potential future credit losses should depend not just on the health of the economy today, but should also take into account potential changes to the economic environment. For example, if the Bank was to anticipate a sharp slowdown in the world economy, Bank should make more provisions today to absorb the credit losses likely to occur in the near future.

To capture the effect of changes to the economic environment, PD model is used to calculate expected credit loss, by incorporating forward-looking information in the form of forecasts of the values of economic variables that are likely to have an effect on the repayment ability of the Bank's customer.

Various of MEVs are used for each PD model, depending on the statistical analysis result of appropriateness of the MEV with PD as well as consensus from credit expert. Amongst others are USD to IDR exchange rate and BI rate.

The Banks uses modeling method to forecast the MEV in the future. The Bank uses 3 modeling scenarios, i.e. normal, lower prediction limit and upper prediction limit. The Bank will give weight to all three scenarios to obtain the base forecast for each MEV. All projections are updated on a yearly basis.

Sensitivity of MEV to ECL
The ECL calculation relies on multiple variables and is inherently non-linear and portfolio-dependent, which implies that no single analysis can fully demonstrate the sensitivity of the expected credit loss to changes in the MEVs. The Bank believes that sensitivity should be performed to all variables, instead of single variable, as this aligns with the multi-variable nature of the ECL calculation.

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan yang telah jatuh tempo dan menutup posisi di pasar. Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terpenting pada bank umum dan perlu dikelola secara berkesinambungan. Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Divisi *Treasury*.

Risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aset yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain:

(i) Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana;
(ii) Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana;
(iii) Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas; dan
(iv) Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya.

Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas.

Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Satuan Kerja Likuiditas sedangkan pengukuran serta analisa terhadap kondisi likuiditas menjadi tugas Divisi Manajemen Risiko diantaranya stress test likuiditas berdasarkan skenario dan pembuatan profil risiko yang terkait likuiditas.

Pengelolaan kelebihan dana likuiditas yang tidak terserap penyaluran kredit teroptimalisasi melalui pengelolaan treasury. Sebagian besar kelebihan dana likuiditas tersalurkan melalui instrumen-instrumen yang berjangka pendek dan aman. Umumnya, kondisi likuiditas bank terjaga baik dimana penarikan dana nasabah dapat terpenuhi sekaligus kelebihan dana teroptimalkan dengan imbal hasil yang optimal.

Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang idle dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that caused by the inability of the Bank in meeting obligations associated with financial liabilities that are due and closing positions in the market. The Bank's liquidity policy is intended to ensure that the funding requirements can be met, either to pay the deposit at maturity or to meet the unused loans facilities. Liquidity risk is the risk that the most important in commercial banks and need to be managed sustainably. Management and monitoring of the Bank's liquidity position is within the responsibility of the Treasury Division.

The risk of loss resulting from the gap between short-term funding and long term assets. The size of the liquidity risk is determined, i.e.:

(i) Accuracy in cash flow or flow of fund planning based on financing and fund growth prediction, include observe the fund rate volatility;
(ii) The precision in managing the fund structure, including the adequacy of funding;
(iii) To be availability of asset that is ready to be converted into cash; and
(iv) Ability to create access to the interbank market or other funding sources.

If the gap is large enough it will reduce it will reduce the Bank ability to meet its liabilities at maturity. Therefore, liquidity management is needed to anticipate liquidity risk, which is a part of the management liability.

The Bank's liquidity policies are aimed at ensuring that fund requirements can be fulfilled, either to pay deposits at maturity or to fulfill additional loans on request.

Maintaining and monitoring the Bank's liquidity position is the responsibility of the Liquidity Unit while measuring and analysing on liquidity condition is the responsibility of the Risk Management Division which among others include liquidity stress test based on scenarios and preparing risk profile related to liquidity risk.

Managing the excess of liquidity fund which are not absorbed by credits will be optimized thorugh managing treasury. Most of the excess of liquidity will be placed in short-term and secured instruments. In general, the Bank's liquidity condition is well maintained where the customers withdrawal can be fulfilled while the excess fund can be optimized with optimum return.

Sources of funds and maturity dates of deposits are managed to avoid idle funds and determine the appropriate liquidity level and liquid asset instrument to ensure a sustainable liquidity level.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan:

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Liquidity risk (continued)

The following table illustrates the maturity profile analysis of the Bank's assets and liabilities according to their remaining maturity period at the statement of financial position date:

Rp juta/*Rp million*

	2025								
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Lain-lain/ *Others*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	> 1-3 bulan/ *> 1-3 months*	> 3-6 bulan/ *> 3-6 months*	> 6-12 *> 6-12 months*	> 1-2 tahun/ *> 1-2 years*	> 2-5 tahun/ *> 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*
Aset/ *Assets*									
Kas/ Cash	687.296	687.296	-	-	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	997.936	-	997.936	-	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	16.070	-	16.070	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with* Bank Indonesia and other banks	3.137.850	-	3.137.850	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan/ *Loans*	13.945.702	-	331.700	133.706	142.833	673.582	657.386	4.107.096	7.899.399
Surat berharga/ *Marketable securities*	941.920	-	-	125.974	53.096	334.371	88.904	37.338	302.236
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Securities purchased under resale agreemets*	258.791	-	258.791	-	-	-	-	-	-
Aset tetap - bersih/ *Fixed assets - net*	280.173	280.173	-	-	-	-	-	-	-
Aset takberwujud - bersih/ *Intangible assets - net*	1.794	1.794	-	-	-	-	-	-	-
Aset hak guna/ *Right of use assets*	43.504	43.504	-	-	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan/ *Deferred tax assets*	51.623	51.623	-	-	-	-	-	-	-
Aset lain-lain/ *Other assets*	196.824	109.961	86.863	-	-	-	-	-	-
	20.559.482	**1.174.350**	**4.829.210**	**259.680**	**195.929**	**1.007.953**	**746.290**	**4.144.434**	**8.201.635**
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(466.598)								
	20.092.884								

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan:

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Liquidity risk (continued)

The following table illustrates the maturity profile analysis of the Bank's assets and liabilities according to their remaining maturity period at the statement of financial position date:

Rp juta/*Rp million*

	2025								
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Lain-lain/ *Others*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	> 1-3 bulan/ > 1-3 *months*	> 3-6 bulan/ > 3-6 *months*	> 6-12 > 6-12 *months*	> 1-2 tahun/ > 1-2 years	> 2-5 tahun/ > 2-5 years	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*
Liabilitas/ *Liabilities*									
Liabilitas segera/ *Liabilities immediately payable*	62.440	-	62.440	-	-	-	-	-	-
Simpanan nasabah/ *Deposits from cutomers*	15.929.812	-	6.856.431	59.364	244.792	1.617.208	7.125.678	26.339	-
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	266.649	-	13.330	6.166	115.900	-	48.693	82.560	-
Utang pajak/ *Taxes payable*	1.460	1.460	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	745.110	-	-	-	300.000	-	249.944	195.165	-
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	276.140	-	276.140	-	-	-	-	-	-
	17.281.610	1.460	7.208.341	65.530	660.692	1.617.208	7.424.315	304.064	-
Perbedaan jatuh tempo/ *Differences in maturity*	3.277.872	1.172.890	(2.379.131)	194.150	(464.763)	(609.255)	(6.678.025)	3.840.370	8.201.535
Posisi neto setelah penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Position net of allowance for impairment losses*	2.811.274								

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan:

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The following table illustrates the maturity profile analysis of the Bank's assets and liabilities according to their remaining maturity period at the statement of financial position date:

Rp juta/*Rp million*

	2024								
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Lain-lain/ *Others*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	> 1-3 bulan/ *> 1-3 months*	> 3-6 bulan/ *> 3-6 months*	> 6-12 *> 6-12 months*	> 1-2 tahun/ *> 1-2 years*	> 2-5 tahun/ *> 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*
Aset/ *Assets*									
Kas/ *Cash*	594.934	594.934	-	-	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	1.510.735	-	1.510.735	-	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	18.092	-	18.092	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	399.942	-	399.942	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan/ *Loans*	12.766.585	410.516	41.368	208.718	172.771	408.997	528.536	3.141.303	7.854.376
Surat berharga/ *Marketable securities*	907.845	-	-	-	30.000	242.969	179.160	105.000	350.716
Aset tetap - bersih/ *Fixed assets - net*	202.528	202.528	-	-	-	-	-	-	-
Aset takberwujud - bersih/ *Intangible assets - net*	1.998	1.998	-	-	-	-	-	-	-
Aset hak guna/ *Right of use assets*	57.760	57.760	-	-	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan/ *Deferred tax assets*	47.692	47.692	-	-	-	-	-	-	-
Aset lain-lain/ *Other assets*	274.330	185.551	88.779	-	-	-	-	-	-
	16.782.440	1.500.979	2.058.915	208.718	202.771	651.966	707.696	3.246.303	8.205.092
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(347.978)								
	16.434.462								

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan:

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The following table illustrates the maturity profile analysis of the Bank's assets and liabilities according to their remaining maturity period at the statement of financial position date:

Rp juta/*Rp million*

	2024								
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Lain-lain/ *Others*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	> 1-3 bulan/ *> 1-3 months*	> 3-6 bulan/ *> 3-6 months*	> 6-12 *> 6-12 months*	> 1-2 tahun/ *> 1-2 years*	> 2-5 tahun/ *> 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*
Liabilitas/ *Liabilities*									
Liabilitas segera/ *Liabilities immediately payable*	70.808	-	70.808	-	-	-	-	-	-
Simpanan nasabah/ *Deposits from cutomers*	11.987.255	-	201.486	141.544	6.732.977	4.870.122	41.125	-	-
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	421.089	-	405.000	-	10.649	5.440	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan/ *Securities issued*	36.955	-	-	-	-	-	-	36.955	-
Utang pajak/ *Taxes payable*	18.038	-	18.038	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	905.345	-	-	-	480.000	-	175.282	250.063	-
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	294.500	-	294.500	-	-	-	-	-	-
	13.733.992	-	989.833	141.544	7.223.627	4.875.562	216.387	287.039	-
Perbedaan jatuh tempo/ *Differences in maturity*	3.048.448	1.500.979	1.069.082	67.174	(7.020.656)	(4.223.595)	491.309	2.959.264	8.205.092
Posisi neto setelah penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Position net of allowance for impairment losses*	2.700.470								

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Bank telah membangun model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan liabilitas Bank, dan memberikan jaminan keamanan tambahan berdasarkan skenario terbaik (*best case*), terburuk (*worst case*) dan paling mungkin terjadi (*most probable case*) serta optimalisasi rapat *Asset-Liability Committee* (ALCO) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas Bank.

Untuk mengelola *maturity gap*, Bank mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan pemantauan terhadap adanya pencairan dan penempatan dana setiap hari;
b. Memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada nasabah utama;
c. Menjaga hubungan baik dengan para deposan agar tetap menambahkan dananya pada Bank;
d. Menerbitkan instrumen utang berupa obligasi;
e. Menetapkan batas maksimum dan minimum kas pada kantor cabang operasional;
f. Menetapkan batas maksimal giro antar bank.

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga.

Risiko suku bunga timbul dari berbagai layanan perbankan Bank bagi nasabah termasuk deposito, kredit yang diberikan dan fasilitas giro. Bank juga melakukan aktivitas investasi terbatas untuk kepentingan sendiri.

Bank melakukan pengukuran risiko suku bunga dengan menggunakan metodologi yang dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap Bank.

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Liquidity risk (continued)

Bank has built liquidity risk measurement model for measuring the liquidity risk of the portfolio of assets and liabilities of the Bank, and provide additional security guarantees based on the best-case scenario (best case), worst (worst case) and most likely to occur (most probable case) as well as the optimization of Asset-Liability Committee (ALCO) meeting which responsible for managing the Bank's liquidity.

To manage the maturity gap, the Bank take the following steps:

a. Monitor the presence and placement of disbursement of funds on a daily basis;
b. Provide higher interest rate to major customers;
c. Maintain good relations with the depositors to keep adding funds to the Bank;
d. Issue debt instruments in the form of bonds;
e. Set maximum and minimum cash at the branch office operations;
f. Setting a limit on inter-bank current accounts.

Market risk

Market risk is the risk arising from movement in market variables in portfolios held by the Bank that could incur losses for the Bank (adverse movement). Market variables is defined as interest rates.

Interest rate risk arising from the Bank's range of banking services for customers, including deposits, loans and current account facilities. The Bank also make limited investment activity for its own interests.

The Bank conducts the measurement of interest rate risk by using a methodology that can identify the interest rate risk of the portfolio of assets and liabilities that are sensitive to changes in interest rates and to determine the amount of risk to the bank.

The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024:

	2025	2024	
Aset			***Assets***
Giro pada bank lain	0,00% - 1,25%	0,00% - 0,18%	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3,75% - 4,80%	0,00% - 5,25%	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Kredit yang diberikan	4,00% - 26,00%	4,00% - 26,00%	*Loans*
Surat berharga	4,88% - 7,75%	4,00% - 7,75%	*Marketable securities*
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	4,75% - 4,78%	-	*Securities purchased under resale agreements*

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *36. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko pasar (lanjutan) / ***Market risk (continued)***

	2025	2024	
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
- Giro	0,00% - 2,50%	0,00% - 2,50%	*Current accounts -*
- Tabungan	0,00% - 2,50%	0,00% - 2,50%	*Saving deposits -*
- Deposito berjangka	2,25% - 7,65%	3,00% - 8,00%	*Time deposits -*
Simpanan dari bank lain			*Deposits from other banks*
- Giro	0,00% - 2,50%	0,00% - 2,50%	*Current accounts -*
- Tabungan	0,00% - 1,75%	0,00% - 1,00%	*Saving deposits -*
- Deposito berjangka	3,00% - 3,75%	6,75% - 7,25%	*Time deposits -*
- *Call money*	-	0,00% - 6,45%	*Call money -*
- *NCD*	1,49% - 9,00%	-	*NCD -*
Surat berharga yang diterbitkan	11,00%	10,75% - 11,00%	*Securities issued*

Rp juta/*Rp million*

	2025									
	Bunga mengambang/ *Floating interest*				Bunga tetap/*Fixed interest*					
	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 years*	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 ≤ 2 tahun/ *> 1 ≤ 2 years*	> 2 tahun/ *> 2 years*	Jumlah/ *Total*
Aset/ Assets										
Giro pada Bank Indonesia/ *Current account with Bank Indonesia*	997.936	-	-	-	-	-	-	-	-	997.936
Giro pada bank lain/ *Current account with other banks*	16.070	-	-	-	-	-	-	-	-	16.070
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	-	-	-	-	3.137.850	-	-	-	-	3.137.850
Kredit yang diberikan/ *Loans*	13.740.956	-	-	-	-	-	-	-	204.746	13.945.702
Surat berharga/ *Marketable securities*	-	-	-	-	-	125.974	387.467	88.904	37.338	639.684
Surat berharga yang dibeli dengan janji/ *Securities purchased under resale agreements*	-	-	-	-	258.791	-	-	-	-	258.791
Jumlah aset keuangan/ ***Total financial assets***	14.754.962	-	-	-	3.396.641	125.974	387.467	88.904	242.084	18.996.033

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko pasar (lanjutan) / *Market risk (continued)*

2025

	Bunga mengambang/ *Floating interest*				Bunga tetap/*Fixed interest*					
	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 years*	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 ≤ 2 tahun/ *> 1 ≤ 2 years*	> 2 tahun/ *> 2 years*	Jumlah/ *Total*
Liabilitas										
Simpanan nasabah/ *Deposits from customers*	-	-	-	-	6.856.431	59.364	1.862.000	7.125.678	26.339	15.929.812
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	-	-	-	-	13.330	6.166	115.901	48.693	82.560	266.650
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	-	-	-	-	-	-	549.944	-	195.165	745.110
	-	-	-	-	6.869.761	65.530	2.527.845	7.174.371	304.064	16.941.572
Jumlah gap repricing suku bunga/ *Total gap repricing interest rate*	14.754.962	-	-	-	(3.473.120)	60.444	(2.140.378)	(7.085.457)	(61.980)	2.054.461

2024

	Bunga mengambang/ *Floating interest*				Bunga tetap/*Fixed interest*					
	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 years*	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 ≤ 2 tahun/ *> 1 ≤ 2 years*	> 2 tahun/ *> 2 years*	Jumlah/ *Total*
Aset/ Assets										
Giro pada Bank Indonesia/ *Current account with Bank Indonesia*	1.510.735	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510.735
Giro pada bank lain/ *Current account with other banks*	18.092	-	-	-	-	-	-	-	-	18.092
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	-	-	-	-	399.942	-	-	-	-	399.942
Kredit yang diberikan/ *Loans*	-	-	-	-	-	-	-	-	12.766.585	12.766.585
Surat berharga/ *Marketable securities*	-	-	-	-	-	-	272.969	179.160	455.716	907.845
Jumlah aset keuangan/ *Total financial assets*	1.528.827	-	-	-	399.942	-	272.969	179.160	13.222.301	15.603.199

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko pasar (lanjutan) / *Market risk (continued)*

2024

	Bunga mengambang/ *Floating interest*				Bunga tetap/*Fixed interest*					
	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 years*	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 ≤ 2 tahun/ *> 1 ≤ 2 years*	> 2 tahun/ *> 2 years*	Jumlah/ *Total*
Liabilitas										
Simpanan nasabah/ *Deposits from customers*	6.576.161	-	-	-	201.468	141.544	159.119	4.908.925	-	11.987.255
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	415.649	-	-	-	440	-	5.000	-	-	421.089
Surat berharga yang diterbitkan/ *Securities issued*	-	-	-	-	-	-	-	36.955	-	36.955
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	-	-	-	-	-	-	-	655.262	250.083	905.345
	6.991.830	-	-	-	201.928	141.544	164.119	5.601.143	250.083	13.350.645
Jumlah gap repricing suku bunga/ *Total gap repricing interest rate*	(5.463.003)	-	-	-	199.015	(141.544)	108.850	(5.421.983)	12.972.218	2.252.554

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel di bawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Sensitivity analysis for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are in the following tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of profit or loss is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the floating rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of June 30, 2025 and December 31, 2024.

The table below demonstrates the sensitivity of the Bank's statement of profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of June 30, 2025 and December 31, 2024:

Perubahan basis poin/ *Change in basis point*	2025	2024
+1,00%	20.545	(52.977)
-1,00%	(20.545)	52.977

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)
Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pengelolaan eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian.

Pengelolaan risiko pasar *banking book* dilakukan dengan mengoptimalkan struktur laporan posisi keuangan Bank untuk mendapatkan imbal hasil yang maksimal sesuai tingkat risiko yang dapat diterima Bank. Pengendalian risiko pasar *banking book* dilakukan dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan regulator dan internal yang dimonitor secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Risiko operasional
Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal.

Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank, dari mulai Kantor Pusat sampai seluruh jaringan kantor. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian finansial, keselamatan karyawan dan reputasi Bank.

Untuk mengawasi risiko operasional yang mungkin terjadi, Bank telah mengembangkan suatu sistem dengan menggunakan metodologi pengukuran sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh masing-masing *risk owner*, sehingga dapat dibentuk suatu peta risiko yang mungkin terjadi di setiap unit kerja.

Dengan peta risiko, risiko operasional dapat diukur (*high, medium*, atau *low*), sehingga manajemen dapat melakukan pengendalian terhadap dampak risiko yang timbul. Untuk mengalokasikan kebutuhan modal risiko operasional, sesuai dengan *Basel Committee on Banking Supervision*, serta roadmap implementasi Basel II di Indonesia, pertama kali Bank akan menggunakan metodologi pendekatan *Basic Indicator* dan saat ini masih melakukan pengumpulan data risiko yang akan digunakan dalam aplikasi metodologi *Advanced Measurement Approach*.

Risiko hukum
Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis dalam bisnis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Bank mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum.

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Market risk (continued)
The objective of market risk management is to identify, measure, control and manage the market risk exposures within acceptable parameters, while maximizing returns.

Banking book market risk management is carried out by optimizing the structure of the Bank's financial position report to get maximum returns according to the level of risk that is acceptable to the Bank. Banking book market risk control is carried out by setting limits that refer to regulatory and internal provisions that are monitored regularly by the Risk Management Work Unit.

Operational risk
Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failure of internal processes, human factors and systems or from external events.

The risk is inherent in all business processes, operational activities, the Bank's systems and products, ranging from the Central Office to the entire office network. Failure to manage operational risk can result in financial losses, the safety of employees and the reputation of the Bank.

To oversee the operational risks that may occur, the Bank has developed a system using measurement methodology (self-assessment) conducted by each risk owner, which enables the Bank to develop a risk mapping system that could potentially be implemented at each work unit.

With map of risks, operational risks can be measured (high, medium, or low), so that management can exercise control over the impact of risks arising. To allocate the needs of operational risk capital, in accordance with the Basel Committee on Banking Supervision, as well as the roadmap for implementation of Basel II in Indonesia, the first time the Bank will use the methodology Basic Indicator Approach and currently still collecting risk data that will be used in the application methodology of the Advanced Measurement Approach.

Legal risk
Legal risk is the risk raised by weakness in juridicial aspects of the business, which could be caused by legal claims, non-existence of supported regulation or weaknesses in agreements, such a unfulfilled terms and conditions in contracts and binding collateral which is not complete.

Legal risks are managed by ensuring that all activities and business relationships between the Bank with third parties are based on rules and conditions which able to protecting the Bank's interests from a legal perspective.

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko reputasi
Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Bank mengelola risiko reputasi dengan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank bersama-sama dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.

Risiko strategis
Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko strategis yaitu visi Bank, rencana strategis, perubahan kepemilikan dan peluncuran produk baru.

Bank mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-komite yang telah dibentuk.

Risiko kepatuhan
Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Bank mengelola risiko kepatuhan dengan melakukan penelaahan secara komprehensif untuk memastikan kesesuaian kebijakan standar operasi dan prosedur serta pengembangan produk baru dengan peraturan eksternal.

Divisi Kepatuhan dan Sub Divisi Hukum Korporasi juga telah melaksanakan pengkajian sistem dan prosedur terhadap rencana kebijakan dan rancangan keputusan dalam rangka mencegah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Di samping itu, Bank juga melaksanakan fungsi kepatuhan meliputi tindakan untuk:

(i) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
(ii) Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; tindakan mengelola risiko kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
(iii) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
(iv) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Reputation risk
Reputational risk is the risk that is caused by negative publicity related to the business activity of the Bank or negative perception of the Bank.

The Bank manages its reputational risk by ensuring that its business activities are in conformity with its other activities, so as to maintain the Bank's reputation.

Strategic risk
Strategic risk is the risk that is caused by inappropriate determination and implementation of the Bank strategy, inappropriate business decisions or being unresponsive to external changes. Here are the factors that influence the strategic risk that the Bank's vision, strategic plan, changes in ownership and new product launches.

The Bank manages strategic risk through a consideration of, and decision making process regarding every strategic policy in a collective and comprehensive manner performed by the established Bank's Directors and Committees.

Compliance risk
Compliance risk is the risk caused by non-compliance with or non-application of prevailing regulations.

The Bank manages its compliance risk by performing comprehensive review to ensure that Bank's Standard Operating Procedures and new product development conform with external regulations.

Compliance Division and Corporate Law Sub Division have also evaluated systems and procedures relating to new or revised policies and decisions to ensure their compliance with the applicable regulations. Furthermore, the Bank has also perform compliance function including:

(i) To create compliance culture in all level of organization and Bank's business activities;
(ii) Manages compliance risk face by the Bank; managing compliance risk is based on Financial Services Authority's regulation about Risk Management for the Bank;
(iii) Ensure policy, regulation, system and procedure and bank business activities inline with Financial Services Authority's regulation and law; and
(iv) Ensure bank's compliance with comitments made by the Bank to Financial Services Authority and/or other monitoring authority.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. POSISI DEVISA NETO

Posisi Devisa Neto (PDN)

Perhitungan posisi devisa neto bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 dan Peraturan Bank Indonesia No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, mulai tanggal 1 Juli 2010, Bank hanya diwajibkan untuk menjaga posisi devisa neto secara keseluruhan maksimum 20% dari total modal diungkapkan pada catatan 43g.

PDN secara keseluruhan merupakan angka penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari (i) selisih bersih aset dan liabilitas untuk setiap valuta asing dan (ii) selisih bersih tagihan dan liabilitas, berupa komitmen dan kontinjensi di rekening administratif (transaksi rekening administratif) untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah. Sedangkan PDN untuk laporan posisi keuangan, merupakan angka penjumlahan dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

38. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama manajemen permodalan Bank adalah untuk memastikan bahwa permodalan telah memenuhi persyaratan permodalan eksternal dan mempertahankan peringkat kredit yang kuat dan rasio permodalan yang sehat dalam rangka menunjang bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan OJK yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Informasi tambahan manajemen modal yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada catatan 43h.

39. SEGMEN OPERASI

Seperti yang dijelaskan di Catatan 2ae, Bank pada saat ini dikelola sebagai segmen operasi tunggal. Pada saat ini, Bank hanya menganalisa segmen secara geografis dimana manajemen menelaah laporan internal manajemen secara bulanan untuk masing-masing area. Berikut adalah ringkasan yang menjelaskan tiap-tiap area geografis dalam Bank:

- Pulau Timor
  Kupang, Atambua, Kefamenanu, Soe, Betun.
- Pulau Flores
  Ende, Maumere, Kalabahi, Lewoleba, Larantuka, Bajawa, Ruteng, Labuan Bajo, Mbay, Borong.
- Lain-lain
  Rote, Waengapu, Waekabubak, Waetabula, Sabu, Anakalang.

37. NET OPEN POSITION

Net Open Position (NOP)

The calculation of the net open position of banks is based on Bank Indonesia Regulation No.12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010 and Bank Indonesia Regulation No.17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/ 2003 concerning the Net Open Position of Commercial Banks. Based on this regulation, starting on July 1, 2010, the Bank is only required to maintain a net open position as a whole at a maximum of 20% of total capital are disclosed in note 43g.

The aggregate NOP represents the sum of the absolute values of (i) the net difference between assets and liabilities denominated in each foreign currency and (ii) the net difference of receivables and liabilities of both commitments and contingencies recorded in the administrative account (administrative account transactions) denominated in each foreign currency, which are all stated in Rupiah. The NOP for statement of financial position represents the sum of the net differences of assets and liabilities on the statements of financial position for each foreign currency, which are all stated in Rupiah.

38. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of the Bank's capital management are to ensure that it complies with externally imposed capital requirements and it maintans strong credit ratings and healthy capital ratio in order to support its business and to maximize shareholders value.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing OJK regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by bank's strategic and organizational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial enviroment.

The Bank has complied with all regulatory imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

The following additional information capital management that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in note 43h.

39. OPERATION SEGMENTS

As described in Note 2ae, the Bank is currently managed as single operating segment. Currently, the Bank only analyzed geographically segment where management examines the internal management reports on monthly basis for each area. Here is summary that explains each geographical area in the Bank:

- *Island Timor*
  Kupang, Atambua, Kefamenanu, Soe, Betun.
- *Flores Island*
  Ende, Maumere, Kalabahi, Lewoleba, Larantuka, Bajawa, Ruteng, Labuan Bajo, Mbay, Borong.
- *Others*
  Rote, Waengapu, Waekabubak, Waetabula, Sabu, Anakalang.

39. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *39. OPERATION SEGMENTS (continued)*

	2025	2024	
Jumlah aset			*Total assets*
Pulau Timor	11.371.317.306.995	8.405.426.064.096	*Island Timor*
Pulau Flores	5.234.038.732.501	4.780.819.472.011	*Island Flores*
Lain-lain	3.487.528.470.207	3.248.215.991.902	*Others*
Jumlah	20.092.884.511.703	16.434.461.528.009	***Total***

	2025	2024	
Pendapatan operasional			*Operating income*
Pulau Timor	294.608.239.659	324.620.312.756	*Island Timor*
Pulau Flores	556.037.439.449	540.850.566.254	*Island Flores*
Lain-lain	374.662.785.671	351.898.435.309	*Others*
Jumlah	1.225.308.464.779	1.217.369.834.319	***Total***
Laba operasional			*Operating income*
Pulau Timor	(114.584.976.701)	(75.482.336.128)	*Island Timor*
Pulau Flores	189.113.056.123	197.129.617.585	*Island Flores*
Lain-lain	109.080.184.607	104.070.098.435	*Others*
Jumlah	183.608.262.029	225.717.280.892	***Total***
Laba sebelum pajak			*Income before tax*
Pulau Timor	(133.922.900.917)	(68.980.844.902)	*Island Timor*
Pulau Flores	188.227.682.622	196.576.703.029	*Island Flores*
Lain-lain	117.525.957.208	103.412.811.638	*Others*
Jumlah	171.830.738.913	231.108.669.765	***Total***

40. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No.84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tatacara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

40. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Article 8 of the Decision No.15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regrading the termination of the role and winding-up of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks, which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No.26 year 1998 and No.27 year 1998, shall be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Goverment Guarantee Implementation Unit (Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah/UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No.17 year 2004, which was futher regulated by the Decision No.84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amandement of Decision No.179/KMK.017/2000 of the Ministry of Finance of the Term, Implementing Guidelines and Conditions of the Goverment Guarantee on the obligations of commercial banks.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

40. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005.

Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen yaitu Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang No.24 tanggal 22 September 2004, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, LPS dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 3,5% untuk simpanan dalam Rupiah dan 2% untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: 4,25% dan 2,25%).

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No.3/2008 menjadi Undang-Undang.

40. *GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS (continued)*

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No.68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payment of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005.

To replace UP3, the Government was formed an independent institution there is the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjaminan Simpanan/LPS). Based on Law No.24 dated September 22, 2004, which have been amended Law No.4 Year 2023 dated January 12, 2023 regarding Development and Strengthening of Financial Sector, LPS was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, the amount of such guarantee is subject to change if the situation complies with certain valid criteria.

Based on Government Regulation No.66 year 2008 dated October 13, 2008 regarding the Amount of Deposit Guarantee by the Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposit covered by LPS is up to Rp2,000,000,000 per depositor per bank. Customer deposits are only covered if the rate of interest is equal to or below 3.5% for deposits denominated in Rupiah and 2% for deposits denominated in foreign currency as at December 31, 2025 (2024: 4.25% and 2.25%).

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia has enacted Government Regulation in Lieu of Law No.3/2008 to the Law.

41. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN

a. Pada tanggal 25 Juni 2025, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Mitra Edukasi Nusantara tentang Layanan *Virtual Account Online* atas Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah melalui *Marketplace*. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 2 (dua) tahun dan diperpanjang otomatis selama belum ada konfirmasi penghentian.

b. Pada tanggal 23 Januari 2025, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Kas Negara. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Januari 2027.

c. Pada tanggal 23 Desember 2024, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

d. Pada tanggal 24 Juni 2024, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Taspen (Persero) tentang penyelenggaraan produk asuransi kumpulan Taspen Save, untuk jaminan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening bank. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 24 Juni 2026.

41. *SIGNIFICANT AGREEMENTS*

a. *On June 25, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Mitra Edukasi Nusantara regarding Online Virtual Account Services for the Procurement of Goods/Services in Schools through Marketplace. This agreement is valid from the date of signing for a period of 2 (two) years and is automatically extended as long as there is no confirmation of termination.*

b. *On January 23, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia regarding State Cash Management. This agreement is valid from the date of signing until January 31, 2027.*

c. *On December 23, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the People's Housing Savings Management Agency regarding the Distribution of Housing Financing Liquidity Facility Funds through Credit for Low-Income Communities. This agreement is valid from January 1, 2025 to December 31, 2025.*

d. *On June 24, 2024, the Bank has signed a Cooperation Agreement with PT Taspen (Persero) regarding the implementation of the Taspen Save collection of insurance products, for old age insurance, pensions, work accident insurance and death insurance through bank accounts. This Agreement is valid from the time it is signed until June 24, 2026.*

42. MASALAH HUKUM

Bank menghadapi beberapa permasalahan hukum yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan, terdapat permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan. Namun demikian, manajemen Bank yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan atau likuiditas Bank.

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

a. Giro pada Bank Indonesia

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.31 tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No. 27/88/DKMP/Srt/B tanggal 28 Mei 2025 dan merujuk pada PBI No.11 tahun 2023 dan PADG No. 7 tahun 2025, pada tanggal 31 Desember 2025, Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM sebesar 3,8%.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No. 26/201/DKMP/Srt/B tanggal 2 Desember 2024 dan merujuk pada PBI No.11 tahun 2023 dan PADG No. 4 tahun 2024, pada tanggal 31 Desember 2024, Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM sebesar 4,0%.

Rasio PLM pada tanggal 31 Desember 2025 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/4/PBI/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No. 23 tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

42. LEGAL ISSUES

The Bank faces several legal issues related to the Bank's business activities. As of the completion date of the statement of financial position, there are legal issues that are still in the process of being resolved in court. However, the Bank's management believes that the outcome of the dispute resolution or lawsuit will not have a significant impact on the results of operations, financial position or liquidity of the Bank.

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards:

a. Current accounts with Bank Indonesia

The Bank is required to maintain statutory reserves in Rupiah currency in its activities as a commercial, and foreign statutory reserves in its activities in the conduct of foreign currency transactions. These statutory reserves are deposited in the form of current accounts with Bank Indonesia.

The statutory reserves ratio as of December 31, 2025 and 2024 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/3/PBI/2018 which have been amended with PBI No.24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 with PADG No.31 year 2025 dated Desember 23, 2025 regarding Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency, for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

Based on a letter from Bank Indonesia No. 27/88/DKMP/Srt/B dated May 28, 2025 and referring to PBI No.11 year 2023 and PADG No.7 year 2025, as of December 31, 2025, Bank has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 3.8%

Based on a letter from Bank Indonesia No. 26/201/DKMP/Srt/B dated December 2, 2024 and referring to PBI No.11 year 2023 and PADG No.4 year 2024, as of December 31, 2024, Bank has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 4.0%

The PLM ratio as of December 31, 2025 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/4/PBI/2018 which have been amended with PBI No.24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 and PADG No.23 year 2025 dated October 20, 2025 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA

a. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Rasio PLM pada tanggal 31 Desember 2024 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/4/PBI/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No. 18 tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

Rasio GWM dan PLM Bank pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS

a. Current accounts with Bank Indonesia (continued)

The PLM ratio as of December 31, 2024 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/4/PBI/2018 which have been amended with PBI No.24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 and PADG No.18 year 2023 dated November 29, 2023 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards:

As of December 31, 2025 and 2024, the GWM and PLM ratios of the Bank are as follows:

	2025		2024		
	Ketentuan/ *Provisions*	Realisasi/ *Realization*	Ketentuan/ *Provisions*	Realisasi/ *Realization*	
Rupiah					*Rupiah*
- Giro Wajib Minimum	9,00%	6,58%	9%	10,78%	*Minimum Statutory Reserves -*
PLM	4,00%	6,72%	5%	6,64%	*Buffer of Macroprudential Liquidity*
Mata uang asing	4,00%	366,11%	4,00%	386,04%	*Foreign currencies*

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah giro wajib minimum pada Bank Indonesia tersebut telah memadai dan memenuhi syarat.

The Bank's management believes that the amount of minimum legal reserves at Bank Indonesia is adequate and meet the requirements set forth by Bank Indonesia.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 5.

The further disclosures on current accounts with Bank Indonesia are presented in Note 5.

b. Giro pada bank lain

b. Current Account with other bank

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

By Financial Service Authority Rule collectibility

	2025	2024	
Lancar	16.069.608.774	18.066.432.414	*Current*
Macet	-	25.400.862	*Loss*
Jumlah	16.069.608.774	18.091.833.276	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.722.680)	(28.705.478)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**16.066.886.094,00**	**18.063.127.798**	***Total - net***

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 6.

The further disclosures on current accounts with other banks are presented in Note 6.

c. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

c. Placements with Bank Indonesia and other banks

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan lancar.

By Financial Service Authority Rule collectibility
All placements with Bank Indonesia and other banks are classified as current as of December 31, 2025 and 2024.

Pengungkapan lebih lanjut pada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diungkapkan pada Catatan 7.

The further disclosures on placements with Bank Indonesia and other banks are presented in Note 7.

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

d. Kredit yang diberikan

d. Loans

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

By Financial Service Authority Rule collectibility

Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas

By type, currency and collectibility

	2025					
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*
Rupiah/*Rupiah*:						
Pihak berelasi/ *Related parties*:						
Modal kerja/ *Working capital*	-	829.197.648	-	-	7.746.248.920	8.575.446.568
Investasi/ *Investment*	247.579.058	-	-	-	42.290.689	289.869.747
Konsumsi/ *Consumer*	22.173.854.432	416.294.123	-	-	262.838.705	22.852.987.260
Jumlah Rupiah/ *Total Rupiah*:	22.421.433.490	1.245.491.771	-	-	8.051.378.314	31.708.303.575
Rupiah/*Rupiah*:						
Pihak ketiga/ *Third parties*:						
Modal kerja/ *Working capital*	609.742.765.463	91.475.555.600	1.127.342.988	10.397.817.774	250.782.357.401	963.525.839.226
Investasi/ *Investment*	122.523.113.229	58.553.390.511	236.865.766	5.849.522.671	101.772.926.254	288.935.819.431
Konsumsi/ *Consumer*	11.567.562.287.406	131.366.233.498	5.071.970.071	6.667.342.111	69.086.111.992	11.799.753.945.078
Sindikasi/ *Syndication*	178.461.246.580	186.773.737.791	-	-	-	365.234.984.371
Karyawan/ *Employee*	487.743.695.469	5.209.398.878	345.645.078	68.926.198	3.175.545.888	496.643.413.509
	12.966.033.308.147	473.378.316.278	6.781.825.903	22.983.608.754	424.816.942.533	13.913.994.001.615
Jumlah/ *Total*	13.008.454.741.637	474.623.808.049	6.781.825.903	22.983.608.754	432.868.320.847	13.945.702.305.190
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(12.407.214.006)	(95.202.188.023)	(3.164.870.706)	(12.587.391.781)	(343.227.983.857)	(466.589.628.373)
Jumlah bersih/ *Total-net*	**12.996.047.527.631**	**379.421.620.026**	**3.616.955.197**	**10.396.216.973**	**89.630.356.990**	**13.479.112.676.817**

	2024					
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*
Rupiah/*Rupiah*:						
Pihak berelasi/ *Related parties*:						
Konsumsi/ *Consumer*	916.050.174	-	-	-	7.746.248.920	8.662.299.094
Jumlah Rupiah/ *Total Rupiah*:	916.050.174	-	-	-	7.746.248.920	8.662.299.094
Rupiah/*Rupiah*:						
Pihak ketiga/ *Third parties*:						
Modal kerja/ *Working capital*	896.182.298.509	18.287.877.545	25.091.347	2.187.678.741	23.624.984.857	940.307.930.999
Investasi/ *Investment*	124.131.234.109	3.868.626.638	38.575.863	-	1.396.014.638	129.434.551.248
Konsumsi/ *Consumer*	10.106.361.007.668	241.361.682.308	2.672.756.448	7.300.187.984	394.123.569.928	10.751.819.184.336
Sindikasi/ *Syndication*	275.863.228.230	186.747.562.941	-	-	-	462.610.791.171
Karyawan/ *Employee*	466.099.463.778	7.651.226.884	-	-	-	473.750.690.662
	11.868.637.232.294	457.916.976.316	2.736.523.658	9.487.866.725	419.144.569.423	12.757.923.148.416
Jumlah/ *Total*	11.869.553.282.468	457.916.976.316	2.736.523.658	9.487.866.725	426.890.818.343	12.766.585.447.510
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(9.574.308.804)	(53.169.024.034)	(1.252.343.444)	(4.235.230.767)	(279.714.187.548)	(347.945.094.597)
Jumlah bersih/ *Total-net*	**11.859.978.973.664**	**404.747.952.282**	**1.484.180.214**	**5.252.635.958**	**147.176.630.795**	**12.418.640.352.913**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

d. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah rasio kredit bermasalah dan rasio kualitas aset produktif Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024	
Rasio NPL - bruto	3,32%	3,44%	*NPL ratio - gross*
Rasio NPL - bersih	0,74%	1,21%	*NPL ratio - net*
Rasio kualitas aset produktif	2,61%	3,12%	*Earnings asset quality ratio*

Rasio NPL-bersih dihitung berdasarkan NPL setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, sesuai dengan peraturan terkait dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Pengungkapan lebih lanjut pada kredit yang diberikan diungkapkan pada Catatan 8.

e. Surat berharga

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, semua surat berharga diklasifikasikan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada surat berharga diungkapkan pada Catatan 9.

f. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, semua Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali diklasifikasikan lancar.
Pengungkapan lebih lanjut pada surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali diungkapkan pada Catatan 10.

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (contiued)

d. Loans (continued)

The following are the non performing loans (NPL) ratio and the earnings asset quality ratio of the Bank As of December 31, 2025 and 2024:

NPL Ratio-net is calculated based on NPL less the minimum allowance for impairment losses, accordance with Bank Indonesia Regulations divided by the total loans.

As of December 31, 2025 and 2024 there were no violations for the provisions of Lending Limit (LLL), respectively.

The further disclosures on loans are presented in Note 8.

e. Marketable securities

By Financial Service Authority Rule collectibility
All placements marketable securities are classified as current as of December 31, 2025 and 2024.

The further disclosures on marketable securities are presented in Note 9.

f. Marketable securities purchased with agreements to resell

By Financial Service Authority Rule collectibility
All marketable securities purchased under resell agreements are classified as current as of December 31, 2025 and 2024.

The further disclosures on marketable securities purchased under resell agreements are presented in Note 10.

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

g. Posisi Devisa Neto (PDN)

g. Net Open Position (NOP)

Berikut adalah Posisi Devisa Neto Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dalam mata uang (ekuivalen Rupiah). Nilai ini adalah yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai bagian dari laporan harian.

Below is the Net Open Position of Bank as of December 31, 2025 and 2024 in currency (Rupiah equivalent). These amounts are reported to Bank Indonesia on the statement of financial position's date as part of daily reporting.

2025

(dalam jutaan Rupiah / *in million* Rupiah)

	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Nilai absolut bersih/ *Net absolute value*	*Currencies*
Posisi keuangan				***Financial position***
Dolar Amerika Serikat	19.972	1.788	18.184	*United States Dollar*
Dolar Australia	1.299	-	1.299	*Australian Dollar*
Euro	178	-	178	*Euro*
Dolar Singapura	430	-	430	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	5	-	5	*Japan Yen*
Yuan China	10	-	10	*China Yuan*
Ringgit Malaysia	37	-	37	*Malaysian Ringgit*
	21.930	1.788	20.142	
Rekening administrasi				***Administrative accounts***
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	*United States Dollar*
	-	-	-	
Jumlah			20.142	***Total***
Jumlah modal			2.757.903,82	*Total capital*
Rasio Posisi Devisa Neto (PDN)			0,73%	***Net Open Position (NOP) ratio***

2024

(dalam jutaan Rupiah / *in million* Rupiah)

	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Nilai absolut bersih/ *Net absolute value*	*Currencies*
Posisi keuangan				***Financial position***
Dolar Amerika Serikat	18.859	1487	17.372	*United States Dollar*
Dolar Australia	785		785	*Australian Dollar*
Euro	192		192	*Euro*
Dolar Singapura	596		596	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	5		5	*Japanese Yen*
Yuan Tiongkok	7		7	*Chinese Yuan*
Ringgit Malaysia	13		13	*Malaysian Ringgit*
	20.458	1.487	18.971	
Rekening administrasi				***Administrative accounts***
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	*United States Dollar*
	-	-	-	
Jumlah			18.971	***Total***
Jumlah modal			2.571.717	*Total capital*
Rasio Posisi Devisa Neto (PDN)			0,74%	***Net Open Position (NOP) ratio***

Pengungkapan lebih lanjut pada risiko pasar diungkapkan pada Catatan 37.

The further disclosures on market risk are presented in Note 37.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

h. Manajemen modal

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional", dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisa dalam dua tier sebagai berikut:

- Modal inti (*tier* 1), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai asset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak tangguhan, aset takberwujud (termasuk *goodwill*) dan penyertaan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama. Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham preferen, surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.
- Modal pelengkap (*tier* 2) antara lain meliputi surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi serta penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (contiued)

h. Capital Management

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has complied with all capital requirements.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by bank's strategic and organisational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial environment.

Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Bank calculates its capital requirements in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 27 Year 2022 about Minimum Capital Reserve or Commercial Bank"and OJK Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 about "Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report", where the regulatory capital is analysed into two tiers as follows:

- *Tier 1 capital, which consists of core and additional core capital. Core capital includes issued and fully paid-up capital, additional paid-in capital, general reserve, specific reserve, retained earnings and profit for the period/year (100%), other comprehensive income deriving from potential gain/loss from the changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale, shortfall between allowable amount of allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline and allowance for impairment losses on productive assets. Deferred tax assets, intangible assets (including goodwill) and share investments (100%) are deducted from core capital. Additional core capital includes non-cumulative preference shares, subordinated securities and subordinated debts net of buyback portion.*
- *Supplementary capital (tier 2), which includes subordinated securities and subordin ated debts and allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline.*

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

h. Manajemen modal (lanjutan)

Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Bank wajib menyediakan modal inti (*tier* 1) paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity tier* 1) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR.

- Modal *tier* 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan laba tahun berjalan.
- Modal *tier* 2, meliputi penyisihan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

Bank tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal *tier* 3 sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal *tier* 1; 100 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan dapat diperhitungkan dalam modal *tier* 1; dan modal *tier* 2 tidak boleh melebihi modal *tier* 1. Terdapat juga batasan jumlah penyisihan kolektif penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal *tier* 2.

Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR") Bank ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan OJK, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan gearing yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risk*) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai kepada pemegang saham.

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (contiued)

h. Capital Management (continued)

Various limits have been set to elements of the regulatory capital, such as Banks are required to provide core capital (tier 1) at a minimum of 6% from Risk Weighted Assets and Common Equity tier 1 at a minimum of 4.5% from Risk Weighted Assets, both individually and consolidated level with subsidiary.

- *Tier 1 capital, which includes issued and fully paid share capital, general reserve, retained earnings and profit for the period.*
- *Tier 2 capital, which includes the eligible amount of allowance for impairment losses.*

The Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 capital under prevailing OJK regulation.

Various limits are applied to elements of the regulatory capital. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital; 100 percent of the profit for the period before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There is also a restriction on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

The Bank's risk weighted assets ("ATMR") are determined according to spesified requirements that seek to reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures not recognized in the statement of financial position. Based on OJK regulations, the Bank needs to take into consideration its credit risk, market risk and operational risk in measuring the ATMR.

The Bank's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of business. The impact of the level of capital on shareholders' return is also recognized and the Banks also recognize the need to maintain a balance between the higher return that might be possible with greater gearing and the advantages and security level afforded by a strong capital position.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. OJK's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the Bank's risk profile with the available capital. The Bank is required to provide minimum capital based on the risk profile.

The Bank actively manages its capital accordance with the applicable regulations. The primary objective is to ensure the Bank, at any time, can maintain adequate its capital adequacy to cover inherent risk to its banking activityies without reducing the optimizing of shareholder's value.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (contiued)

h. Manajemen modal (lanjutan)

h. Capital Management (continued)

Posisi modal yang diwajibkan regulator Bank sesuai peraturan OJK yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The Bank's regulatory capital position under prevailing Financial Services Authority regulation as of December 31, 2025 and 2024 was as follows:

	2025	2024	
Modal *tier* 1			***Tier 1 capital***
Modal inti utama (CET 1)			*Common core capital (CET 1)*
Modal saham	2.209.537	2.114.551	*Share capital*
Modal sumbangan	247	247	*Donation capital*
Dana setoran modal	5.000	11.500	*Additional paid-in capital*
Agio saham	28.571	-	*Share premium*
Cadangan umum	487.664	465.559	*General reserves*
Laba tahun berjalan	92.618	176.837	*Current year income*
Pendapatan komprehensif lainnya	(27.568)	-	*Other comprehensif income*
Surplus revaluasi aset tetap	83.429	-	*Revaluation surplus of fixed assets*
Selisih kurang antara penyisihan diwajibkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	(136.704)	(226.765)	*Less difference between the allowance required and allowance for impairment losses on earning assets*
Penyisihan penghapusan aset non produktif	(29.687)	(12.007)	*Allowance for losses on non-earning assets*
Perhitungan pajak tangguhan	(51.623)	(47.692)	*Deferred assets calculations*
Aset takberwujud	(1.794)	(1.998)	*Intangible assets*
Modal inti tambahan (AT 1)	2.659.690,83	2.480.232	*Additional core capital (AT 1)*
Modal *tier* 2			***Tier 2 capital***
Cadangan umum aset produktif	98.213	91.485,00	*General reserve of earning assets*
	98.213	91.485	
Jumlah modal	**2.757.904**	**2.571.717**	***Total capital***
Aset Tertimbang Menurut Risiko			*Risk Weighted Asset*
Risiko kredit	7.857.039	7.318.818	*Credit risk*
Risiko pasar	110.339	-	*Market risk*
Risiko operasional	2.317.683	2.186.950	*Operational risk*
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	**10.285.061**	**9.505.768**	*Total Risk Weighted Asset*
Rasio kecukupan modal			*Capital Adequacy Ratio*
Rasio CET 1	25,86%	26,09%	*CET 1 Ratio*
Rasio *tier* 1	25,86%	26,09%	*Tier 1 Ratio*
Rasio tier 2	0,95%	0,96%	*Tier 2 Ratio*
Rasio modal terhadap ATMR	26,81%	27,05%	*Ratio of capital to ATMR*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9%-<10%	9%-<10%	*Required Capital Adequacy Ratio*

Berdasarkan self-assessment Bank, profil risiko Bank dinilai berada pada peringkat 2. Oleh karena itu, Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 10% sampai dengan kurang dari 11%. Pada tanggal 31 Desember 2024, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 26,81%.

Based on its self-assessment, the Bank risk profile is assessed to be in rating 2. Therefore, the Bank is required to provide a minimum capital of 10% to less than 11%. As of December 31, 2024, the Bank Capital Adequate Ratio was 26.81%, which was higher than the required minimum provision of capital.

44. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan yang berakhir pada tahun 31 Desember 2024 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan 31 Desember 2025 untuk tujuan perbandingan.

44. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2024 have been reclassified to the preparation of financial statements as December 31, 2025 for comparative purposes.

	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Sesudah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	
31 Desember 2024				***December 31, 2024***
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				***Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
BEBAN TENAGA KERJA				***PERSONNEL EXPENSES***
Iuran pensiun	44.326.144.147	(44.326.144.147)	-	*Pension contribution*
Imbalan kerja	23.565.215.923	44.326.144.147	67.891.360.070	*Employee benefits*

45. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk Bank dan Entitas Anak, namun belum berlaku efektif untuk pelaporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

- PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107 "Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan".

  Amandemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur non-recource dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche. Amandemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu dan jumlah arus kas kontraktual.

Saat ini Bank sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian.

45. STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) WHICH ISSUED AND REVISED

The following is a summary of PSAK and ISAK issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) and Sharia Accounting Standards Board (DSAS) - IAI that are relevant to the Bank and its Subsidiaries, but not yet effective for consolidated financial reporting as of December 31, 2025:

Effective on or after January 1, 2026

- *PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107 "Financial Instruments" Disclosures about the Classification and Measurement of Financial Instrument".*

  The amendment adds and clarifies provisions in PSAK 109 related to derecognition of financial liabilities, and clarifies the assessment of cash flow characteristics for financial assets with non-recourse features and contractually binding instruments such as tranches. The amendment also amends the provisions of PSAK 107 related to the disclosure requirements for investments in equity instruments at fair value through other comprehensive income and adds provisions related to financial instruments with contractual terms that change the timing and amount of contractual cash flows.

The Bank is currently evaluating the above standards and has not yet determined the impact of these standard on the consolidated financial statement.

LAPORAN KEUANGAN PT FLOBAMOR

FLOBAMOR

Kupang, 19 Januari 2026

Nomor : 011/L/DIR/FMB/I/2026
Lampiran : 1 (Satu) set
Perihal : Penyampaian Laporan Unaudited Tahun Buku 2025

KepadaYth;

Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
di -
Kupang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor: 900.1.3.10/020/BKUD4.1 tanggal 5 Januari 2026, perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 (Unaudited), Maka bersama dengan surat ini PT. Flobamor menyampaikan Laporan Unaudited Tahun 2025.

Demikian Laporan Unaudited ini disampaikan untuk dapat diterima, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

PT. Flobamor

FLOBAMOR

Yufridus Irawan Rayon
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Komisaris PT. Flobamor di Kupang
4. Arsip

PT. FLOBAMO
Jl. Teratai No. 5 RT. 20 RW. 06
Kel. Naikoten Kec. Maulafa Kota Kupang
Nusa Tenggara Timur
NPWP. 01.220.626.4-924.000
(0380) 832651
flobamor.ntt@gmail.com

FLOBAMOR

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2025

(UNAUDITED)

FLOBAMOR

LAPORAN KEUANGAN

PT FLOBAMOR

PER 31 DESEMBER 2025

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Keuangan

Neraca
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024(AUDITED)..... 1
Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024(AUDITED)..... 2
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024(AUDITED)..... 3
Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024(AUDITED)..... 4

Catatan atas Laporan Keuangan..... 5-20

Lembar Persetujuan Direksi..... 21

PT FLOBAMOR
NERACA
31 Desember 2025 (UNAUDITED)

	2025 Rp	2024 Rp
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	112,724,801	321,855,129
Piutang usaha - pihak ketiga	1,629,243,138	1,629,243,138
Piutang lain - lain - hubungan istimewa	278,099,385	278,099,385
Piutang lain - lain pihak ketiga	-	-
Persediaan	1,158,944,400	512,020,301
Uang muka	1,403,029,881	1,237,406,474
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap		
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan	9,245,720,224	9,441,862,916
Rp (3.084.891.607) per 31 Desember 2025)		
Uang muka penyertaan kas daerah	961,552,039	961,552,039
Jumlah Aset	**14,789,313,868**	**14,382,039,382**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Lancar		
Utang usaha	14,593,431,104	9,482,918,036
Utang pajak	547,773,746	453,226,962
Utang bank yang jatuh tempo dalam 1 tahun	586,049,643	586,049,643
Uang muka penjualan	650,000,000	650,000,000
Biaya yang masih harus dibayar	6,686,949,320	1,818,328,494
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	23,064,203,813	12,990,523,135
Kewajiban Tidak Lancar		
Utang bank	7,160,209,449	7,160,209,449
Utang lain-lain - pihak ketiga	1,437,453,050	56,942,760
Utang lain-lain - hubungan istimewa	381,853,513	381,853,513
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	8,979,516,013	7,599,005,723
Ekuitas		
Modal disetor	25,036,265,942	25,036,265,943
Saldo laba	(42,290,671,900)	(31,243,755,418)
Jumlah	(17,254,405,958)	(6,207,489,475)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**14,789,313,868**	**14,382,039,382**

PT FLOBAMOR
LAPORAN LABA RUGI
31 Desember 2025 (UNAUDITED)

	2025	2024
	Rp	Rp
PENDAPATAN		
Pendapatan usaha	2,927,573,435	16,996,730,530
Pendapatan (beban) usaha lainnya	385,710	(183,188,634)
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(10,782,937,927)	(18,068,199,629)
LABA (RUGI) KOTOR	**(7,854,978,782)**	**(1,254,657,733)**
Beban penjualan dan pemasaran	3,700,000	250,000
Beban umum dan administrasi	3,738,789,036	3,737,120,452
LABA (RUGI) OPERASIONAL	**(11,597,467,818)**	**(4,992,028,185)**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN	585,673,773	109,921,810
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	**(11,011,794,045)**	**(4,882,106,375)**
Beban pajak penghasilan	(35,122,437)	(201,683,069)
LABA (RUGI) BERSIH	**(11,046,916,482)**	**(5,083,789,444)**

PT FLOBAMOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Desember 2025 (UNAUDITED)

Keterangan	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Tambahan Surplus Revaluasi Tanah dan Bangunan	Saldo laba	Total
Saldo per 1 Januari 2024	**2,000,000,000**	**17,426,813,000**	**5,609,452,943**	**(26,159,960,976)**	**(1,123,695,033)**
Koreksi saldo tahun lalu	-	-	-	-	-
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	(5,083,789,444)	(5,083,789,444)
Saldo per 31 Desember 2024	**2,000,000,000**	**17,426,813,000**	**5,609,452,943**	**(31,243,750,420)**	**(6,207,484,477)**
Tambahan modal disetor	-	-	-	-	-
Koreksi saldo tahun lalu	-	-	-	-	-
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	(11,046,916,482)	(11,046,916,482)
Saldo per 31 Desember 2025	**2,000,000,000**	**17,426,813,000**	**5,609,452,943**	**(42,290,666,902)**	**(17,254,400,959)**

UNAUDITED
LAPORAN ARUS KAS
31 Desember 2025 (UNAUDITED)

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (rugi) tahun berjalan	(11,046,916,482)	(5,083,789,444)
Penyusutan/amortisasi aset tidak lancar	196,142,692	159,647,653
Keuntungan pelepasan aset tetap	-	-
Koreksi Saldo Laba (Rugi)	-	-
Pelepasan Aset Tetap dan Aset Lain - Lain	-	-
Penyesuaian Untuk Rekonsiliasi Laba Bersih Menjadi Kas Bersih Untuk Aktivitas Operasi		
Penurunan (Kenaikan)		
Piutang usaha	(0)	(44,999,999)
Piutang lain - lain	-	60,530,000
Persediaan	(646,924,099)	(381,653,705)
Uang muka	(165,623,407)	(214,471,000)
Utang usaha	5,110,513,068	608,321,869
Utang pajak	94,546,784	37,893,153
Uang muka penjualan	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	4,868,620,826	4,959,116,734
Utang lain - Lain	1,380,510,290	96,608,915
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi	(209,130,328)	197,204,176
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
(Kenaikan) penurunan		
Pembelian aset tetap	-	-
Pelepasan aset tetap	-	-
Arus kas diperoleh dari aktivitas investasi	-	-
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (penurunan) utang bank	-	-
Arus kas dari aktivitas pendanaan	-	-
Jumlah (a+b+c)	(209,130,328)	197,204,176
Kas dan setara kas awal periode	321,855,128	124,650,952
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	**112,724,800**	**321,855,128**

PT FLOBAMOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 (UNAUDITED)

1. UMUM

a. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1981 tanggal 30 Oktober 1981 didirikan Perusahaan Daerah yang diberi nama PD. Flobamor, yang kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 152/HUK/Tahun 1982, tanggal 21 September 1982 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1981 tentang pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor; dan pada Tahun 2008 dirubah dengan Nomor 12 Tanggal 9 Juni 2008.

Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah kemudian dirubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2009. Perubahan Badan Hukum tersebut dilakukan melalui Akte Notaris No.78 yang dibuat oleh Notaris Silvester Manbaitfeto, SH pada tanggal 21 September 2010 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-53348.AH.01.01.Tahun 2010. Dan perubahannya melalui Akte Nomor 41 tanggal 24 Oktober 2014 yang disyahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-10672.40.20.2014 tanggal 6 Nopember 2014.

b. Prinsip, Maksud, dan Tujuan

Pengelolaan PT. Flobamor didasarkan atas prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik (Good Corporate Governance) dan sesuai ketentuan UU serta peraturan yang berlaku.

c. Modal Dasar Perusahaan

Berdasarkan Akte Pendirian Perseroan, Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah), berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari APBD Provinsi NTT. Jumlah Penyertaan Modal sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.19.238.288.738 (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Penyertaan Modal Tunai	: Rp	19.218.288.000
Modal Tunai Koperasi Praja Mukti	: Rp	20.000.000
Mobil Fuso (Nilai Buku)	: Rp	738
Jumlah Penyertaan Modal	Rp	19.238.288.738

d. Susunan Pengurus

Susunan pengurus Perseroan berdasarkan Akta perubahan terakhir adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris
- Komisaris : Semuel Halundaka

Direksi
- Direktur Utama : Yufridus Irawan Rayon
- Direktur Operasional : Kretisana Jagi

e. Tempat Kedudukan (Domisili)

Perusahaan berkedudukan di Jalan Teratai No. 5, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

f. Izin - izin Usaha yang Dimiliki :

Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 0220105700124, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 02 Juli 2020.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan disajikan berdasarkan konsep akrual (accrual basis), Konsep harga historis (historical basis).

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (indirect method) dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktiva operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari saldo kas (cash on road) dan rekening giro. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kas dan bank.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah tagihan kepada pihak pemberi kerja/penerima kredit dari PT. Flobamor.

d. Persediaan

Persediaan adalah merupakan persediaan barang jadi yang siap untuk dijual.

e. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan sebesar harga perolehan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double declining method) berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk Dalam Kelompok Masa Manfaat Untuk keperluan Penyusutan, seperti terlihat sebagai berikut :

Golongan	Presentase	Masa Manfaat
I	50%	4 tahun
II	25%	8 tahun
III	6,25%	16 tahun
IV	5%	20 tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi saat terjadinya pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aktiva atau yang memberikan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan.

Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutasnnya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba-rugi pada tahun yang bersangkutan.

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terdiri dari:

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Kas di tangan	7,008,682	99,748,065
Jumlah kas di tangan	**7,008,682**	**99,748,065**
Bank (Rupiah):		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	56,932,381	4,647,329
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-
PT BPD Nusa Tenggara Timur	48,746,563	49,133,480
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37,175	26,042,588
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	-	131,175,572
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk	-	-
Bank USD:		
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk	-	11,108,096
Jumlah bank	**105,716,119**	**222,107,064**
Jumlah kas dan setara kas	**112,724,801**	**321,855,129**

4. PIUTANG USAHA

Piutang usaha per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terdiri dari:

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
a. Piutang usaha - Pihak ketiga		
Piutang Alat Tulis Kantor	288,396,918	288,396,918
Piutang Non Alat Tulis	101,142,040	101,142,040
Piutang Triplek	99,000,000	99,000,000
Piutang Proyek Jambu Mente	96,769,257	96,769,257
Piutang Batako	77,584,950	77,584,950
Lainnya	55,384,602	55,384,602
Piutang Komputer dan Inventaris Komputer	47,600,000	47,600,000
Piutang Jasa Fotocopy	33,734,900	33,734,900
Piutang Proyek Kimpraswil dan Perindag	20,082,000	20,082,000
Piutang Korda PPIT TVRI	9,577,760	9,577,760
Piutang Proyek Pengadaan Buku SD-MI	4,902,800	4,902,800
Piutang Travel	486,000	486,000
Sub jumlah	834,661,227	834,661,227
Penyisian piutang tak tertagih	(834,661,227)	(834,661,227)

a. Piutang usaha - Pihak ketiga (lanjutan)

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Dirjen Perhubungan Darat BPTD Prov. NTT	1,049,924,938	1,049,924,938
PT Salam Bajo Indonesia	500,000,000	500,000,000
CV Mutis Indotama (Jagung)	163,503,900	163,503,900
CV Mutis Indotama (Rumput Laut)	128,000,000	128,000,000
Anwar	63,510,000	63,510,000
PT Rote Karaginan Nusantara	83,322,600	83,322,600
Perumda Dharma Jaya	7,597,900	7,597,900
Sub jumlah	1,995,859,338	1,995,859,338
Penyisian piutang tak tertagih	(366,616,200)	(366,616,200)
	1,629,243,138	1,629,243,138
Jumlah piutang usaha pihak ketiga	2,830,520,565	2,830,520,565
Jumlah penyisihan piutang usaha pihak ketiga	(1,201,277,427)	(1,201,277,427)
Jumlah piutang usaha pihak ketiga (neto)	**1,629,243,138**	**1,629,243,138**

5. PIUTANG LAIN - LAIN

Piutang lain - lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terdiri dari:

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
a. Pihak Hubungan Istimewa ;		
PT Flobamor Mandiri Jaya	1,441,400,000	1,441,400,000
PT Flobamor Daya Perkasa	334,000,000	334,000,000
PT Flobamor Karya Sejahtera	99,800,000	99,800,000
PT Flobamor Petro Eksis	80,000,000	80,000,000
PT Flobamor Energi	10,000,000	10,000,000
Sub jumlah	1,965,200,000	1,965,200,000
Penyisihan piutang tak tertagih - pihak berelasi	(1,965,200,000)	(1,965,200,000)
PT Flobamor Nusa Bangkit	550,149,274	550,149,274
PT Flobamorata Bangkit International	81,108,946	81,108,946
Piutang Penjualan Cafetaria KMP Sirung	-	-
Sub jumlah	631,258,220	631,258,220
Penyisihan piutang tak tertagih - pihak berelasi	(353,158,835)	(353,158,835)
	278,099,385	278,099,385
Jumlah piutang lain - lain hubungan istimewa	2,596,458,220	2,596,458,220
Jumlah penyisihan piutang lain - lain pihak hubungan istimewa	(2,318,358,835)	(2,318,358,835)
Jumlah piutang lain-lain pihak berelasi-neto	278,099,385	278,099,385

Piutang berelasi (hubungan istimewa) tidak didukung dengan surat perjanjian tertulis terkait jatuh tempo dan

bunga.

b. Pihak Ketiga ;

Agus Suhermana	819,229,923	819,229,923
Piutang Uang Muka Tanah	25,000,000	25,000,000
Uli Nuhan	7,000,000	10,000,000
Syamsudin H. Abdullahi, SE	22,200,000	22,200,000
Jumlah dipindahkan	873,429,923	876,429,923

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Jumlah dari pindahan	873,429,923	876,429,923
Piutang Koperasi Karyawan dan Eks Karyawan	59,365,157	59,365,157
Koperasi Alekot	18,000,000	18,000,000
Koperasi Lintas Nusa	12,000,000	12,000,000
Travel	10,000,000	10,000,000
Sub jumlah	972,795,080	975,795,080
Penyisihan piutang tak tertagih - pihak ketiga	(972,795,080)	(975,795,080)
	-	-
Piutang Purna Jabatan Direksi Lama	835,977,500	835,977,500
Piutang Karyawan TNK	27,650,000	27,650,000
Sub jumlah	863,627,500	863,627,500
Penyisihan piutang tak tertagih	(863,627,500)	(863,627,500)
	-	-
Jumlah piutang lain-lain pihak ketiga	1,836,422,580	1,839,422,580
Penyisihan piutang tak tertagih pihak ketiga	(1,836,422,580)	(1,839,422,580)
Jumlah piutang lain-lain pihak ketiga-neto	-	-

c. Piutang lain-lain keseluruhan

Piutang pihak hubungan istimewa	2,596,458,220	2,596,458,220
Piutang pihak ketiga	1,836,422,580	1,839,422,580
Jumlah piutang lain-lain	4,432,880,800	4,435,880,800
Penyisihan piutang pihak hubungan istimewa tak tertagih	(2,318,358,835)	(2,318,358,835)
Penyisihan piutang pihak ketiga tak tertagih	(1,836,422,580)	(1,839,422,580)
Jumlah penyisihan piutang lain-lain tak tertagih	(4,154,781,415)	(4,157,781,415)
Jumlah piutang lain-lain - neto	**278,099,385**	**278,099,385**

6. PERSEDIAAN

Rincian persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
- Alat Tulis Kantor	239,139,668	239,139,668
- Barang Minimart	191,592,371	191,592,371
- Komputer dan Inventaris Kantor	85,005,000	85,005,000
- Sarana Perlengkapan Lainnya	83,000,000	83,000,000
- Non Alat Tulis Kantor	34,420,000	34,420,000
Jumlah persediaan	633,157,039	633,157,039
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(633,157,039)	(633,157,039)
Jumlah persediaan	-	-

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
BBM Subsidi	109,101,341	20,242
BBM Industri	1,016,027,660	478,522,660
Rumput Laut	18,198,880	18,198,880
Jagung	5,567,040	5,567,040
Persediaan Cafetaria	7,044,579	7,216,579
Air Tawar :		
- KMP Sirung	180,000	920,000
- KMP Sabu	1,350,000	100,000
- KMP Ile Boleng	-	-
Tiket TNK	1,474,900	1,474,900
Jumlah persediaan	1,158,944,400	512,020,301
Jumlah persediaan	**1,792,101,439**	**1,145,177,340**
Penurunan nilai persediaan	(633,157,039)	(633,157,039)
Jumlah persediaan setelah penurunan nilai	1,158,944,400	512,020,301

7. UANG MUKA

Rincian uang muka, uang muka pajak, dan beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, sebagai berikut :

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
a. Biaya		
Biaya docking	-	-
Uang Muka Petemakan	585,000,000	585,000,000
Uang Muka Usaha Kawasan Wisata Komodo	69,686,000	69,686,000
Advance Biaya Ops	338,334,000	230,388,000
Advance Rumah Tangga	9,055,000	-
Advance Cafetaria KMP Sirung	200,000	200,000
	1,002,275,000	885,274,000
b. Perpajakan		
PPN Masukan	400,754,881	352,132,474
Jumlah	1,403,029,881	1,237,406,474

8. ASET TETAP

Rincian aset tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dalah sebagai berikut:

Harga Perolehan:	
Tanah	8,050,000,000
Bangunan	2,666,564,984
Bangunan Semi Permanen	712,100,625
Peralatan	2,000,000
Kendaraan	376,881,421
Inventaris Kantor	664,267,301
Jumlah	12,471,814,331

Akumulasi penyusutan:	
Bangunan	1,393,837,007
Bangunan Semi Permanen	585,505,966
Peralatan	1,625,000
Kendaraan	393,169,728
Inventaris Kantor	655,813,714
Jumlah	3,029,951,415

Pada tahun 2016, tanah seluas 9.470 m^2 dengan HGB No. 1318 beserta dengan bangunan dan sarana perlengkapannya di Jl. Mohammad Dahlan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan nilai buku sebesar Rp4.147.547.057 telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan dengan laporannya tertanggal 25 Januari 2016 dan dinilai dengan nilai pasar aset sebesar Rp9.757.000.000. Selisih atas nilai buku dengan nilai pasar tersebut dibukukan sebagai Surplus Revaluasi Tanah dan Bangunan. Pada Tahun 2018 Perusahaan melakukan reklasifikasi atas aset tanah dan bangunan beserta sarana perlengkapannya ini dari persediaan menjadi aset tetap.

Tanah dan bangunan ini dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diterima oleh Perusahaan dari PT Bank NTT berupa Kredit Modal Kerja (KMK) *Revolving Credit,* dengan perubahan terakhir Nomor Adendum : 26 /DPKrKM/KMK-JP/V/2020 untuk perubahan perjanjian kredit (PPPK) No. 8 Tanggal 08 Agustus 2016, Addendum No. 70 tanggal 30 Agustus 2019 dan addendum perubahan terakhir No. 22/DPKrKM/KMK-JP/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang restrukturisasi kredit KMK-JP atas nama PT. Flobamor.

9. ASET LAINNYA

Rincian aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Uang Muka Penyertaan Kas Daerah	961,552,039	961,552,039
Jumlah aset lain-lain	**961,552,039**	**961,552,039**

Saldo uang muka penyertaan kepada Kas Daerah berupa setoran laba ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat Perusahaan masih berbentuk Perusahaan Daerah (PD), setoran tersebut dilakukan bertahap sejak Perusahaan berdiri dan berakhir di tahun 2006.

10. UTANG USAHA

Rincian utang usaha per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, sebagai berikut :

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Utang Usaha ;		
Utang Pekerjaan (Docking)	11,291,205,565	6,813,396,173
Utang Operasional TNK	1,435,524,803	1,434,524,803
Utang Umum	203,714,612	315,448,240
Utang Peternakan	505,903,956	505,903,956
Utang BBM Industri	454,000,000	249,000,000
Utang Operasional	571,712,168	95,689,864
Utang Beras	51,990,000	64,790,000
Utang Profesional Fee	38,840,000	19,805,000
Utang Air Tawar	14,800,000	21,500,000
Utang BBM Subsidi	25,740,000	162,860,000
Jumlah utang usaha	**14,593,431,104**	**9,482,918,036**

11. UTANG PAJAK

Rincian saldo utang pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, sebagai berikut :

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Utang Pajak - PPh Pasal 21	190,345,320	190,345,320
Utang Pajak - PPh Pasal 23	323,622,222	229,291,441
Utang Pajak - PPN Keluaran	33,550,000	33,550,000
Utang Pajak - PPh final pasal 15	256,204	-
Utang Pajak - PPh Psl 4(2)	-	40,201
Jumlah utang pajak	**547,773,746**	**453,226,962**

12. UTANG BANK

Rincian saldo utang bank per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, sebagai berikut :

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	7,746,259,092	7,746,259,092
Bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun	586,049,643	586,049,643
Jumlah	7,160,209,449	7,160,209,449

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Merupakan fasilitas pinjaman yang diterima dari PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving Credit berdasarkan Perjanjian No. 8 tanggal 8 Agustus 2016 antara PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan PT Flobamor yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH,M.Kn. Akta tersebut diaddendumkan terakhir berdasarkan Nomor adendum : 26/DPKrKM/KMK-JP/V/2020 tentang persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) No. 8 tanggal 08 Agustus 2016, addendum No. 70 tanggal 30 Agustus 2019 dan addendum perubahan terakhir No. 22 /DPKrKM/KMK-JP/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang restrukturisasi kredit KMK-JP atas Nama PT Flobamor.

Fasilitas Kredit

1. Pinjaman Kredit Modal Kerja *Revolving Credit (KMK-RC)* menjadi Pinjaman Kredit Modal Kerja Jadwal Pembayaran (KMK-JP)

- Plafond : Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) menjadi Rp9.400.000.000 (sembilan milyar empat ratus juta Rupiah)
- Suku Bunga : 12% per tahun menjadi 11% per tahun
- *Commitment Fee* : 0,5% sebesar Rp47.000.000
- Jangka waktu 12 bulan menjadi 120 bulan terhitung 08-08-2019 sampai dengan 08-08-2029

Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah HGB No. 1318/Desa Oebufu seluas 9.470 m^2 terdaftat atas nama Perusahaan dengan hak tanggungan sebesar Rp15.489.180.000, berdasarkan Berita Acara Taksasi Jaminan yang dibuat oleh PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

13. UANG MUKA PENJUALAN

Rincian uang muka penjualan per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Koperasi HKTI	650,000,000	650,000,000
Jumlah uang muka penjualan	**650,000,000**	**650,000,000**

14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Utang Gaji;		
Gaji Karyawan TNK	183,432,613	183,432,613
Gaji Direksi dan Komisaris	1,167,640,423	338,800,000
Gaji Karyawan Office	156,445,000	-
Gaji Karyawan ABK KMP Sabu	1,556,614,454	-
Gaji Karyawan ABK KMP Ile Boleng	-	-
Gaji Karyawan Peternakan	37,000,000	37,000,000
Gaji Karyawan Usaha Lainnya	80,622,000	80,622,000
Gaji Karyawan ABK KMP Sirung	1,455,347,777	-
Utang THR ;		
Thr Karyawan	783,270,750	289,568,750
Thr Direksi dan Komisaris	274,120,000	160,020,000
Thr Karyawan TNK	148,824,970	148,824,970
Thr Karyawan Usaha Lainnya	33,508,333	33,508,333
Thr Karyawan Peternakan	18,500,000	18,500,000
Bonus Kinerja ;		
Kinerja Direksi dan Komisaris	136,115,268	136,115,268
BPJS ;		
Bpjs Tenaga Kerja (Juni 2024)	485,162,135	254,425,318
Perjalanan Dinas;		
Perjalanan Dinas	1,500,000	1,500,000
Asuransi ;		
Asuransi Purna Jabatan Direksi & Komisaris	136,011,242	136,011,242
Asuransi YMH Dibayar	491,040	-
Pass Pelabuhan Ymh Dibayar	89,000	-
Mitra Jasa Pratama (Asuransi)	-	-
TNK PNPB YMH Dibayar	-	-
Klaim Kesehatan;		
Bpjs Kesehatan	32,254,315	-
Jumlah biaya yang masih harus dibayar	**6,686,949,320**	**1,818,328,494**

15. UTANG LAIN - LAIN

Rincian saldo utang lain - lain per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Utang kepada Pihak Hubungan Istimewa :		
Yetjolia Huma	125,000,000	125,000,000
Yulius Opat	100,000,000	100,000,000
Pemprov NTT	150,804,513	150,804,513
Flobamorata Bangkit Internasional (Sasando)	6,049,000	6,049,000
Jumlah utang pihak hubungan istimewa	**381,853,513**	**381,853,513**

Merupakan utang kepada pegawai perusahaan yang diikat dengan Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Hironimus Soriwutun dan Pata Vinsensius, masing - masing merupakan Direktur Utama dan Komisaris Perusahaan pada masa periode masa jabatan tahun 2014 - 2018.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 5% per tahun dan bunga akan dibayarkan pada saat jatuh tempo, yaitu masing - masing pada tanggal 23 September 2018 dan 22 September 2018. Pinjaman ini diterima secara tunai dan dipergunakan untuk keperluan operasional, yaitu untuk pengisian bahan bakar kapal Perusahaan, sampai dengan 2019 utang kepada Yetjolia Huma dan Yulius Opat yang belum terselesaikan, hingga sekarang belum ada penyelesaian atas utang tersebut tanpa surat perpanjangan.

Utang hubungan istimewa pada Flobamorata Bangkit Internasional tidak didukung dengan surat perjanjian tertulis terkait jatuh tempo dan bunga.

Utang kepada Pihak Ketiga :		
PHK Karyawan	1,433,134,350	51,494,850
Deposit Agen Roland	4,318,700	4,318,700
Deposit Agen Karya Rate Wati	-	1,129,210
Jumlah utang kepada pihak ketiga	**1,437,453,050**	**56,942,760**
Jumlah utang lain - lain	**1,819,306,563**	**438,796,273**

16. MODAL

	UNAUDITED	AUDITED
Modal Disetor :		
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur	1,980,000,000	1,980,000,000
Koperasi Praja Mukti	20,000,000	20,000,000
Jumlah modal disetor	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**
Modal yang belum diaktekkan	17,426,812,999	17,426,813,000
Surplus revaluasi tanah dan bangunan	5,609,452,943	5,609,452,943
Jumlah modal	**25,036,265,942**	**25,036,265,943**

Berdasarkan Pasal 3 Akta Notaris No.78 yang dibuat oleh Notaris Silvester Manbaitfeto, S.H., notaris di Kupang pada tanggal 21 September 2010 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-53348.AH.01.01.Tahun 2010, Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyard rupiah), Dan terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan di setor 25% (dua puluh limapersen) atau sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta sebelum penutup akta, Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS.

Berdasarkan Akta tersebut di atas, disebutkan bahwa modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai ke kas perusahaan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Saham
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur	19,800	99.00%	1,980,000,000
Koperasi Praja Mukti	200	1.00%	20,000,000
Jumlah	**20,000**	**100.00%**	**2,000,000,000**

Tambahan Modal Disetor
Merupakan tambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur berupa setoran tunai sejak tahun 1988 sampai dengan 2012 sebesar Rp.17.426.813.000, setoran tersebut belum diakta kan sebagai tambahan modal.

18. PENDAPATAN

Rincian pendapatan 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Pendapatan Usaha:		
Pendapatan Subsidi	2,905,519,425	15,310,253,607
Pendapatan Tiket	21,606,500	1,650,990,500
Pendapatan Cafetaria Kmp	380,000	24,080,000
Pendapatan Lain-Lain Kmp	67,510	11,406,423
Jumlah pendapatan	**2,927,573,435**	**16,996,730,530**

Pendapatan subsidi untuk tahun 2023 merupakan pendapatan subsidi kapal berdasarkan Kontrak Subsidi Kapal.

Pendapatan penjualan tiket merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi biaya jasa tambat atas penjualan tiket kapal pengangkutan penumpang yang terdiri dari atas 2 (dua) armada kapal motor penyebrangan, yaitu :

1. KMP Sirung
2. KMP Sabu

19. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Docking Kapal	4,843,239,551	11,078,211,236
BBM Kapal	14,521,502	2,078,993,013
Gaji, dan THR Karyawan KMP	4,745,292,000	2,679,542,337
Biaya Maintenance KMP	68,435,000	546,969,353
Uang Makan Karyawan KMP	557,673,600	891,195,200
BPJS	276,368,021	248,350,924
Biaya Asuransi KMP dan Tiket	208,720,004	210,025,045
Biaya Pelabuhan Kmp	35,699,249	187,359,486
Air Tawar	1,040,000	47,560,000
Biaya Rumah Tangga Kmp	22,704,000	3,956,500
Biaya Surat-Surat Kmp	4,450,000	9,790,000
Biaya Cafetaria Kmp	1,395,000	11,025,092
Biaya Stationary Kmp	3,250,000	28,638,668
Biaya Materi Cetakan Kmp	150,000	0
Biaya Lain-Lain Kmp	0	46,582,775
Jumlah beban pokok pendapatan	**10,782,937,927**	**18,068,199,629**

20. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

Rincian beban penjualan dan pemasaran untuk tahun 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Biaya Sponsorship / Csr	1,200,000	250,000
Biaya Promosi / Iklan	2,500,000	-
Jumlah beban penjualan dan pemasaran	**3,700,000**	**250,000**

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi untuk tahun 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Biaya Gaji Karyawan	326,312,934	1,374,980,947
Biaya Gaji Direksi	947,489,898	282,000,000
Bunga Pinjaman Bank	-	154,188,463
Biaya Sewa	56,500,000	222,402,257
Biaya Gaji Komisaris	201,000,000	258,800,000
Biaya Manajemen Lainnya	-	46,105,572
Biaya Thr Manajemen	114,100,000	21,100,000
Biaya Perjalanan Dinas	68,369,293	181,783,695
Biaya Uang Makan Karyawan	40,747,350	-
Biaya Thr Karyawan	27,800,000	123,408,333
Biaya Konsultan	20,090,090	194,000,000
Biaya Penyusutan Bangunan	95,202,195	87,268,679
Biaya Bpjs TK JHT & JP	11,333,325	80,151,270
Biaya Penyusutan Bangunan Semi Permanen	23,737,787	21,759,638
Biaya Rawat Jalan	24,965,079	57,851,018
Biaya Hosting / Website	15,375,000	61,500,000
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	24,512,183	33,872,697
Biaya Operasional Manajemen	11,700,000	13,254,450
Biaya Akuntan Publik	45,000,000	7,473,580
Biaya Bpjs TK JHT & JP Direksi	25,721,814	-
Biaya Bpjs Kesehatan Company	24,418,324	36,400,566
Biaya Stationary Kantor	22,716,600	56,305,000
Biaya Rumah Tangga Kantor	39,239,790	42,280,164
Biaya Air Telepon Listrik	16,656,782	24,390,000
Biaya Legal	6,000,000	60,000,000
Biaya Konsumsi	8,073,600	15,927,120
Biaya Bpjs Tenaga Kerja	-	27,488,219
Biaya Notaris	3,000,000	3,500,000
Biaya Bpjs TK JKK & JKM	2,732,240	16,978,920
Biaya Langganan Internet	12,546,560	13,157,750
Biaya Entertaiment	3,541,000	38,498,950
Biaya Bpjs TK JKK & JKM Direksi	5,593,000	-
Biaya Pengembangan Dan Pelatihan	-	-
Biaya Suka Duka	2,900,000	4,500,000
Jumlah dipindahkan	2,227,374,844	3,561,327,288

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjuan)

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Jumlah dari pindahan	2,227,374,844	3,561,327,288
Biaya Bpjs Kesehatan Employee	4,474,142	-
Biaya Bbm Kendaraan	2,912,100	11,765,100
Biaya STNK, KIR dan Pajak Daerah	-	4,299,112
Biaya Pajak STP/SKPKB	50,993,352	1,000,000
Biaya Perawatan Inventaris Kantor	-	175,000
Biaya Pakaian Seragam	-	120,260,000
Biaya Penyusutan Kendaraan	4,442,266	16,288,307
Biaya PPh Vendor	-	482,412
Biaya Fotocopy / Cetakan	5,519,500	2,479,900
Biaya Perawatan Kendaraan Ops	-	1,215,000
Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan	333,333	458,333
Bpjs Kes Company Direksi	-	2,496,000
Biaya Bpjs Kes Employee Direksi	-	624,000
Biaya PHK Karyawan	1,431,239,500	14,250,000
Biaya Lain - Lain	11,500,000	-
Jumlah biaya umum dan administrasi	**3,738,789,036**	**3,737,120,452**

22. PENDAPATAN DAN (BEBAN) USAHA LAINNYA

Rincian pendapatan usaha lainnya dan beban pokoknya untuk tahun 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Pendapatan Usaha Lainnya		
Pendapatan Usaha Kawasan Wisata Komodo	-	1,327,950,000
Jumlah pendapatan usaha lainnya	-	1,327,950,000
Beban Pokok Usaha Lain		
Biaya Usaha Kawasan Wisata Komodo	-	1,369,814,732
Biaya Usaha Peternakan	-	22,100,975
Biaya Usaha Lainnya	(385,710)	-
Biaya Usaha Beras	-	119,222,927
Jumlah pendapatan usaha lainnya	(385,710)	1,511,138,634
Jumlah pendapatan dan (beban pokok) usaha lainnya	**385,710**	**(183,188,634)**

23. PENDAPATAN DAN (BEBAN) LAIN - LAIN

Rincian pendapatan (biaya) lain - lain untuk tahun 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Pendapatan Lain - Lain		
Pendapatan Lainnya	554,569,080	118,069,623
Pendapatan Jasa Giro	1,351,264	2,973,403
Keuntungan pelepasan aset tetap	-	-
Jumlah pendapatan lain - lain	555,920,344	121,043,026

	31 Desember 25 UNAUDITED	31 Desember 24 AUDITED
Beban Lain - Lain		
Biaya Adm. Bank & Buku Cek/Giro	5,971,760	9,052,465
Beban Lain -Lain	10,000,000	1,366,044
Pajak Atas Jasa Giro	409,889	702,707
Penjualan Aset & Inventory	(46,135,078)	-
Jumlah beban lain - lain	(29,753,429)	11,121,216
Jumlah pendapatan (beban) lain - lain	**585,673,773**	**109,921,810**

24. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

a. Transaksi dan saldo hubungan istimewa

Transaksi	Saldo (Rp)	% dari aset
Piutang Lain - Lain	2,596,458,220	18%
Utang Lain - Lain	381,853,513	2.6%

b. Sifat hubungan istimewa

Pihak hubungan istimewa	Sifat hubungan	Transaksi
Piutang Lain - Lain ;		
PT Flobamor Mandiri Jaya	Anak perusahaan	Piutang Pendanaan
PT Flobamor Daya Perkasa	Anak perusahaan	Piutang Pendanaan
PT Flobamor Nusa Bangkit	Anak perusahaan	Piutang Pendanaan
PT Flobamor Karya Sejahtera	Anak perusahaan	Piutang Pendanaan
PT Flobamor Petro Eksis	Anak perusahaan	Piutang Pendanaan
PT Flobamor Energi	Anak perusahaan	Piutang Pendanaan
PT Flobamorata Bangkit Internasional	Anak perusahaan	Piutang Pendanaan
Utang Lain - Lain ;		
Yetjolia Huma	Karyawan Perusahaan	Utang Pendanaan
Yulius Opat	Karyawan Perusahaan	Utang Pendanaan
Flobamorata Bangkit Internasional (Sasando)	Anak perusahaan	Utang Pendanaan
Pemprov NTT	Pemegang Saham	Utang Penggunaan Lahan

PT FLOBAMOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 (UNAUDITED)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : Yufridus Irawan Rayon
Alamat : Jalan Teratai No. 5 Naikolan, Kupang
Jabatan : Direktur Utama

2 Nama : Kretisana Jagi
Alamat : Jalan Teratai No. 5 Naikolan, Kupang
Jabatan : Direktur Keuangan & Operasi

Demikian Laporan Unaudited ini di buat dengan sebenarnya.

Kupang, 16 Januari 2026

FLOBAMOR

Yufridus Irawan Rayon
Direktur Utama

Kretisana Jagi
Direktur Keuangan & Operasi

LAPORAN KEUANGAN

PT PENJAMIN KREDIT DAERAH

NUSA TENGGARA TIMUR

Kupang, 27 April 2026

Nomor : **09544/JNTT/IV/2026**
Perihal : **Penyampaian Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2025 PT Jamkrida NTT (Perseroda)**
Lampiran : **1 Berkas**

Kepada Yth.
Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Permintaan Data yang disampaikan terkait permintaan Laporan Keuangan Audited PT. Jamkrida NTT (Perseroda) untuk melengkapi dokumen pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, berikut kami sampaikan dimaksud berupa Laporan Keuangan Audited PT Jamkrida NTT (Perseroda) Tahun Buku 2025.

Demikian dapat kami sampaikan,atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT Penjaminan Kredit Daerah
Nusa Tenggara Timur

Hendrik Oscar Fanggidae
Plt. Direktur Utama

Tembusan :
1. Arsip.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

DAFTAR ISI

KETERANGAN	HALAMAN
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	i
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	ii - iii
LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	1
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	3
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5 - 28

JAMKRIDA NTT

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Frits Oscar Fanggidae
   Alamat Kantor : Jalan R. Suprapto No. 15, RT 005/002 Kel. Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
   Jabatan : Plt. Direktur Utama

2. Nama : Ferdinand Lerrick
   Alamat Kantor : Jalan R. Suprapto No. 15, RT 005/002 Kel. Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
   Jabatan : Plt. Direktur Operasional

Untuk dan atas nama Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) dan Entitas Anak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) dan Entitas Anak menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda);

2. Laporan Keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan Keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Kupang, 12 Februari 2026

Frits Oscar Fanggidae | **Ferdinand Lerrick**
Plt. Direktur Utama | Plt. Direktur Operasional

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
Certified Public Accountants
License No. : 1011 / km.1 / 2010
Jl. Muding Indah I No. 5 Denpasar - 80361, Bali - Indonesia
Tel./Fax : (62-361) 434-884
E-mail : jmbali@johanmalonda.com www.johanmalonda.com
With Offices in Jakarta, Surabaya and Medan

bakertilly
NETWORK MEMBER
www.bakertilly.global

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00010/3.0225/AU.1/09/1756-1/1/II/2026

Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi

PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda)

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, kecuali untuk kemungkinan dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 7, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp12.361.021.020,- merupakan hak setelah membayar klaim penjaminan kepada penerima jaminan (Bank/Lembaga Keuangan), sehingga hak tagih kreditur beralih ke pemberi jaminan terhadap debitur terjamin. Pembayaran klaim timbul karena debitur macet (wanprestasi). Telah dibentuk cadangan penurunan nilai sebesar Rp122.714.643,- atau 0,99%. Namun demikian, cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Instrumen Keuangan sehingga penyajian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima lebih besar dari yang seharusnya.

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 8, Investasi Tidak Lancar - Reksadana Terproteksi Danareksa Proteksi 59, terdapat Reksadana yang dikelola PT Narada Aset Manajemen yang telah jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2021, belum dapat diketahui secara pasti kapan penyelesaian investasi tersebut. Penempatan dana investasi pada PT Narada Aset Manajemen tersebut telah masuk dalam proses peradilan dan sampai dengan saat ini belum ada pengembalian atas dana investasi yang ditempatkan. Telah dibentuk cadangan penurunan nilai sebesar Rp1.187.500.000,- atau 25%. Namun demikian, cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Instrumen Keuangan sehingga penyajian investasi tidak lancar lebih besar dari yang seharusnya.

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 28, Beban Gaji dan Pegawai. Perusahaan mencatat Beban Gaji dan Pegawai Lainnya - Cadangan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) untuk Pengurus sebesar Rp1.134.118.260,-. Dalam jumlah ini termasuk beban UMPK untuk komisaris yang telah ditransfer ke rekening blokir penerima sebesar Rp503.467.219,-. Pembentukan Cadangan Uang Penghargaan Masa Kerja untuk Komisaris tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan 1 atas Laporan Keuangan, yang mengungkapkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2025, Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terkait dengan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan saat ini masih dalam proses peradilan. Sebagai akibatnya, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Mei 2025, operasional Perusahaan saat ini dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direksi yang telah ditunjuk secara sah. Proses hukum terhadap para tersangka masih berlangsung dan belum dapat diprediksi dampak akhirnya terhadap Perusahaan. Manajemen telah mengungkapkan hal tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal Lain

Laporan Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan Opini Wajar atas Laporan Keuangan tersebut pada tanggal 24 Januari 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai, kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
NIU-KAP: KEP-1011/KM.1/2010

I Wayan Wirawan, S.E., M.M., CPA
NRAP AP. 1756

Denpasar, 12 Februari 2026

00010

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	2025	2024
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	*2f,4*	9.550.719.868	2.484.970.625
Investasi Lancar	*5*	101.000.000.000	103.600.000.000
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(84.800.000)	(104.820.000)
Piutang Penjaminan Ulang	*2g,6*	39.196.523.776	27.643.062.713
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(1.858.624.223)	(138.215.314)
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	*2e,7*	12.361.021.020	8.955.670.807
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(122.714.643)	(89.556.708)
Biaya Dibayar Dimuka	*9*	536.894.218	612.990.119
Jumlah Aset Lancar		**160.679.020.016**	**142.964.102.242**
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi Tidak Lancar	*8*	31.618.585.000	31.618.585.000
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(1.332.740.717)	(261.760.897)
Biaya Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar	*9*	79.554.788.920	67.932.196.766
Aset Tetap dan Inventaris	*2i,10*	18.329.234.656	18.210.420.656
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(4.505.708.748)	(3.397.250.367)
Aset Tidak Lancar Lain-Lain	*2j,12*	806.250.000	647.750.000
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(560.512.521)	(463.720.851)
Aset Tidak Lancar Lain-Lain (Fasilitas UPP)	*2j,12*	650.362.725	882.334.520
Aset Pajak Tangguhan	*2o,11*	778.952.345	188.071.614
Dana Imbalan Pasca Kerja		-	2.702.211.549
Jumlah Aset Tidak Lancar		**125.339.211.660**	**118.058.837.990**
JUMLAH ASET		**285.918.231.676**	**261.022.940.232**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Penampungan IJP	*2p,13*	3.325.777.194	2.707.418.005
Utang Pajak	*2o,14*	1.206.066.327	1.344.948.772
Dana Cadangan Klaim	*2t,15*	2.683.829.906	1.825.634.445
Pendapatan Diterima Dimuka - IJP Ditangguhkan	*2r,16*	33.909.248.729	25.586.952.569
Utang Lain-Lain	*18*	800.054.223	482.743.166
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**41.924.976.379**	**31.947.696.957**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima di Muka - IJP Ditangguhkan Bagian Jangka Panjang	*2r, 16*	82.650.085.419	65.196.751.918
Liabilitas Imbalan Pascakerja	*2l, 17*	141.812.896	2.804.734.975
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**82.791.898.315**	**68.001.486.893**
JUMLAH LIABILITAS		**124.716.874.694**	**99.949.183.850**
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebanyak 129.100 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham	*19*	129.100.000.000	125.100.000.000
Uang Muka Setoran Modal	*19*	-	4.000.000.000
Cadangan Umum	*19*	19.459.541.798	15.714.623.333
Cadangan Tujuan	*19*	1.279.459.184	1.279.459.184
Saldo Laba	*19*	11.362.356.000	14.979.673.865
JUMLAH EKUITAS		**161.201.356.982**	**161.073.756.382**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**285.918.231.676**	**261.022.940.232**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN PENJAMINAN	*2m*		
Pendapatan IJP	*20*	52.441.387.009	38.767.142.039
Pendapatan Komisi Penjaminan	*21*	1.990.612.214	1.582.277.007
JUMLAH		**54.431.999.223**	**40.349.419.046**
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Investasi	*22*	7.154.642.033	4.490.185.128
Pendapatan Operasional Lainnya	*23*	8.394.225.980	16.622.823.123
JUMLAH		**15.548.868.013**	**21.113.008.251**
BEBAN IJP CO-GUARANTEE/ IJPU/ PREMI REASURANSI	*2m*		
Beban IJP Co-Guarantee/ IJPU/ Premi Reasuransi	*25*	(13.973.165.717)	(12.542.119.632)
Beban Komisi Penjaminan	*26*	(8.425.104.124)	(6.728.176.230)
JUMLAH		**(22.398.269.841)**	**(19.270.295.862)**
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	*27*	(13.323.992.501)	(7.950.122.669)
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Gaji dan Pegawai	*28*	(10.279.202.821)	(11.391.943.579)
Beban Depresiasi	*29*	(1.108.458.381)	(1.156.086.468)
Beban Amortisasi	*30*	(96.791.670)	(94.175.004)
Beban Umum dan Administrasi	*31*	(6.116.736.721)	(3.167.834.388)
JUMLAH		**(17.601.189.593)**	**(15.812.039.439)**
TOTAL PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH		**18.709.736.881**	**13.129.000.515**
LABA BRUTO		**16.657.415.301**	**18.429.969.327**
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Bunga	*24*	35.747.384	63.410.217
Pendapatan Lain-Lain	*32*	328.622.720	94.166.091
JUMLAH		**364.370.104**	**157.576.308**
BEBAN LAIN-LAIN			
Beban Lain-Lain	*33*	(2.914.193.396)	(343.504.051)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**14.107.592.009**	**18.244.041.584**
Beban Pajak Penghasilan Kini		3.336.116.740	3.264.367.719
Manfaat Pajak Tangguhan		590.880.731	-
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		**11.362.356.000**	**14.979.673.865**
Pendapatan Komprehensif Lainnya		-	-
LABA BERSIH KOMPREHENSIF		**11.362.356.000**	**14.979.673.865**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Uang Muka Setoran Modal	Cadangan Umum	Saldo Laba/ (Rugi)	Jumlah
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**125.250.000.000**	**4.000.000.000**	**13.589.724.426**	**13.617.432.362**	**156.457.156.788**
Pengembalian Modal	(150.000.000)	-	-	-	(150.000.000)
Penambahan Modal Disetor	-	-	-	-	-
Pembagian Dividen	-		-	(6.808.716.181)	(6.808.716.181)
Pembentukan Cadangan Umum	-	-	3.404.358.090	(3.404.358.090)	-
Pembentukan Cadangan Tujuan	-		-	-	-
Dana Representatif	-	-	-	(340.435.808)	(340.435.808)
Tantiem	-	-	-	(1.361.743.238)	(1.361.743.238)
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	(340.435.808)	(340.435.808)
Jasa Produksi	-	-	-	(680.871.618)	(680.871.618)
Dana Kesejahteraan Karyawan	-	-	-	(680.871.618)	(680.871.618)
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	14.979.673.865	14.979.673.865
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**125.100.000.000**	**4.000.000.000**	**16.994.082.516**	**14.979.673.866**	**161.073.756.382**
Pengembalian Modal	-	-	-	-	-
Penambahan Modal Disetor	4.000.000.000	-	-	-	-
Pembagian Dividen	-	-	-	(7.489.836.933)	(7.489.836.933)
Pembentukan Cadangan Umum	-	-	3.744.918.466	(3.744.918.466)	-
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	-	-	-
Dana Representatif	-	-	-	(374.491.847)	(374.491.847)
Tantiem	-	-	-	(1.497.967.387)	(1.497.967.387)
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	(374.491.847)	(374.491.847)
Jasa Produksi	-	-	-	(748.983.693)	(748.983.693)
Dana Kesejahteraan Karyawan	-	-	-	(748.983.693)	(748.983.693)
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	11.362.356.000	11.362.356.000
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	**129.100.000.000**	**-**	**20.739.000.982**	**11.362.356.000**	**161.201.356.982**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan	75.027.139.922	53.498.449.000
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	2.336.480.302	4.262.488.557
Pembayaran IJP Co-guarantee/IJPU/Premi Reasuransi	(9.414.801.755)	(8.719.369.391)
Pembayaran Klaim Kepada Terjamin	(39.504.335.606)	(28.912.811.648)
Pembayaran Biaya-Biaya	(50.457.157.748)	(52.727.382.818)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**(22.012.674.885)**	**(32.598.446.300)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dari Investasi	7.198.296.488	4.656.853.696
Penempatan Investasi Yang Diperkenankan	227.862.228.364	113.089.339.948
Pembayaran Aktivitas Investasi Lainnya	(198.492.263.881)	(85.918.585.546)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**36.568.260.971**	**31.827.608.098**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari Setoran Modal	-	-
Pembayaran Dividen	(7.489.836.843)	(6.808.716.181)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**(7.489.836.843)**	**(6.808.716.181)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**7.065.749.243**	**(7.579.554.383)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**2.484.970.625**	**10.064.525.008**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**9.550.719.868**	**2.484.970.625**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Terdiri Dari:		
Kas	11.257.786	237.151.946
Giro	2.651.565.094	1.982.751.992
Tabungan	887.896.988	265.066.687
Deposito Berjangka	6.000.000.000	-
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**9.550.719.868**	**2.484.970.625**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

1. UMUM

PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut "Perusahaan" didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 24 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH., Notaris di Kupang dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-33170.04.10.2014 tertanggal 6 November 2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur. Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan anggaran dasar, dengan perubahan terakhir pada tanggal 29 April 2024 dengan Akta Pernyataan Penegasan Direksi Perseroan Terbatas "PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) nomor 52 dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss Tomasowa, SH., M.Kn.

Berdasarkan Akta Nomor 15 tertanggal 16 Mei 2025 Berita Acara RUPS Tahun Buku 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, Notaris di Kupang terkait Laporan Tahunan Perseroan Terbatas PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Buku 2024, Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Tahun Buku 2025, serta Penetapan Penyisihan Penggunaan Laba.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Akta No. 16 tertanggal 16 Mei 2025 menyatakan keputusan menyetujui dan mengesahkan perangkapan tugas Komisaris Independen sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama dan juga menyetujui dan mengesahkan perangkapan tugas Kepala Divisi Akunting dan Teknologi Informasi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional. Dalam rapat juga menyetujui penambahan Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan dan 1 (satu) orang Komisaris Independen Masa Bakti Tahun 2025 - 2030.

Dalam rapat juga menyetujui usulan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan 2 (dua) Komisaris Independen, Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Direktur Utama, Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Direktur Operasional, Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Direktur Umum dan Keuangan untuk Periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

Perubahan terakhir Berdasarkan Berita Acara RUPS LB Akta Nomor 7 tanggal 10 November 2025 menyatakan menyetujui perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Operasional selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 10 November 2025 sampai dengan 10 Mei 2026.

Dalam melaksanakan kegiatannya, PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur bekerja berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas penjaminan untuk bersikap hati-hati. Sebagai lembaga yang turut menunjang kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan melakukan kegiatan usaha penjaminan atas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan atau bukan perbankan, dan badan usaha lain, disamping memberikan bantuan konsultasi manajemen dan melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

Ijin-ijin yang dimiliki Perusahaan yaitu sebagai berikut:

1) Akta Pendirian Nomor 52 Tanggal 24 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., notaris di Kupang;
2) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-33170.04.10.2024 Tanggal 6 November 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.
3) Akta Pendirian Nomor 120 tanggal 30 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto, SH.,MH.
4) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33170.40.10.2014 tahun 2014 tertanggal 6 November 2014, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
3) NIB Nomor 129000521386 tanggal 18 Mei 2021 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
6) Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 71.132.088.7-922.000 tanggal 16 Juni 2015
7) Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-144/D.05/2014 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.

Tempat dan Kedudukan PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) berkedudukan di Jl. R. Suprapto No. 15, Oebobo, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) Akta No. 16 tertanggal 16 Mei 2025 menyatakan keputusan menyetujui dan mengesahkan penetapan Tuan Doktor Frits Oscar Fanggidae, M.Si sebagai Komisaris Independen melaksanakan tugas rangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama dan menyetujui dan mengesahkan penetapan Tuan Ferdinand Lerrick sebagai Kepala Divisi Akunting dan Tekhnologi Informasi melaksanakan tugas rangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Operasional sampai ditunjuknya pengganti definitif melalui RUPS berikutnya.

Sesuai Keputusan RUPS LB Tanggal 16 Mei 2025, susunan pengurus perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Flouri Rita Wuisan
Komisaris Independen	: Dr. Frits Oscar Fanggidae
Direktur Utama	: Dr. Frits Oscar Fanggidae
Direktur	: Ferdinand Lerrick

Sesuai Keputusan Akta Pernyataan Penegasan Direksi tanggal 29 April 2024, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Flouri Rita Wuisan
Komisaris	: Dr. Frits Oscar Fanggidae
Direktur Utama	: Ibrahim Imang
Direktur	: Octaviana Ferdiana Mae

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda)" Nomor 26 Tanggal 22 Juli 2025. Para Pemegang Saham dengan suara bulat mengambil keputusan yang berbunyi sebagai berikut:

Menyetujui pemberhentian Saudara Ibrahim Imang dalam Jabatan selaku Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) Periode Tahun 2024 sampai dengan 2029 sehubungan dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan telah ditahan berdasarkan Keputusan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-1851/N.3.Fd.1/05/2025 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-267/N.3.5/Fd.1/05/2025 keduanya tertanggal 9 Mei 2025 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penyertaan modal pada PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) senilai Rp25.000.000.000,- tahun 2017, serta menyetujui segala hak dan kewajiban yang melekat dalam jabatannya sebagai Direktur Utama periode Tahun 2024 sampai dengan bulan Juli 2025 akan diselesaikan sesuai dengan amanat ketentuan perundang-undangan.

Menyetujui pemberhentian Saudari Octaviana Ferdiana Mae selaku Direktur Operasional sehubungan dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan ditahan berdasarkan Keputusan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-1853/N.3/Fd.1/05/2025 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-269/N.3.5/Fd.1/05/2025 keduanya tertanggal 9 Mei 2025 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penyertaan modal senilai Rp25.000.000.000,- tahun 2017, serta menyetujui segala hak dan kewajiban yang melekat dalam jabatannya sebagai Direktur Operasional periode Tahun 2024 sampai dengan bulan Juli 2025 akan diselesaikan sesuai dengan amanat ketentuan perundang-undangan.

Jumlah sumber daya manusia perusahaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing 52 dan 48 orang dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dewan Komisaris	2 (Dua) Orang	2 (Dua) Orang
Direksi	2 (Dua) Orang	2 (Dua) Orang
Karyawan Tetap	38 (Tiga Puluh Delapan) Orang	34 (Tiga Puluh Empat) Orang
Karyawan Outsourcing	10 (Sepuluh) Orang	10 (Sepuluh) Orang

Maksud dan tujuan dari pendirian perusahaan adalah Perusahaan Penjaminan dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Penjaminan Kredit yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan;
2) Penjaminan Kredit yang disalurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada anggotanya;
3) Penjaminan Kredit Program Kemitraan yang disalurkan oleh BUMN dalam rangka kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
4) Penjaminan atas surat utang;
5) Penjaminan transaksi dagang;
6) Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa *(surety bond)*;
7) Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi);
8) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
9) Penjaminan *Letter of Credit* (LC);
10) Penjaminan Kepabeanan *(Custom Bond);*
11) Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12) Jasa konsultasi manajemen terkait dengan usaha penjaminan;
13) Penyediaan informasi/*database* terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur adalah Badan Usaha Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur sudah menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk bagian *Accounting* sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur secara rinci sebagai berikut:

a. *Pernyataan Ketaatan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan*

Laporan Keuangan Perusahaan di susun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia.

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan *accrual basis* menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait. Pendapatan imbal jasa penjaminan dicatat secara *accrual basis* mulai awal tahun 2019. Seluruh biaya diakui sebagai beban pada saat perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dan disajikan berdasarkan kas dan setara kas. Laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

c. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen Perusahaan untuk menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan, revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

d. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Standar baru, amandemen, dan interpretasi yang telah diterbitkan dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya, sebagai berikut:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi.
- Amandemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.
- Amandemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran.

Standar baru, amandemen, dan interpretasi yang telah diterbitkan, berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2025 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 109 "Instrumen keuangan" dan PSAK 107 "Instrumen keuangan: pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan.
- Penyesuaian tahunan 2024 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- PSAK 118: "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan" yang akan menggantikan PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan".

e. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan *(financial instruments)* adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan *(financing assets)* entitas dan liabilitas keuangan *(financing liability)* atau instrumen ekuitas *(equity instruments)* entitas lain. Aset keuangan meliputi setiap aset yang menimbulkan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya. Liabilitas keuangan meliputi setiap kewajiban kontrak untuk membayar kas atau aset keuangan. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari saldo Kas dan Bank dan semua investasi yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dan bukan sebagai jaminan dan penggunaannya tidak dibatasi.

g. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan piutang kepada pihak ketiga atau mitra re/co-guarantee, pengakuan piutang dilakukan setiap terjadinya pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee/reasuransi/penjaminan ulang dicatat sebagai piutang co-guarantee. Piutang Usaha disajikan sebesar nilai bersihnya setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan tiap-tiap piutang pada akhir tahun.

h. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan; dan
- Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(a) Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

1). Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual;

2). Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

(b) Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi tersebut dipenuhi:

1). Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.

2). Persyaratan kontraktual aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada tanggal 31 Desember 2025 Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

(c) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif. Akan tetapi perusahaan dapat menetapkan pilihan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajar disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Pada saat pengakuan awal perusahaan dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeleminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

Pada tanggal 31 Desember 2025 Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya. Kategori ini meliputi utang penjaminan ulang, utang penjaminan bersama, beban akrual, cadangan klaim, liabilitas lain-lain dalam penyelesaian yang dimiliki oleh Perusahaan.

Perusahaan mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.

b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.

c) Kontrak jaminan keuangan setelah pengakuan awal, penerbitan kontrak selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara: Jumlah penyisihan kerugian yang telah ditentukan dengan jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan (PSAK 115).

d) Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar. Penerbitan komitmen selanjutnya mengukur komitmen tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan bagian penurunan nilai dengan jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan kumulatif penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan (PSAK 115).

e) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika kombinasi bisnis diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi.

Opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yaitu, saat pengakuan awal perusahaan dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi jika sesuai dengan ketentuan, atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan karena:

a) Mengeleminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang dapat timbul dari liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci.

Pengukuran Awal

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam hal ini aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Setelah pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, biaya perolehan diamortisasi atau biaya perolehan tergantung klasifikasi apakah nilai wajar dapat ditentukan dengan andal. Pengukuran awal *(initial measurement)* dan pengukuran berikutnya *(subsequent measurement)* atas instrumen keuangan dan perlakuan akuntansi atas perubahan nilai wajar.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasi seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Perusahaan. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Perusahaan menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat *desk* yang lebih granular (misalnya subportofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

a) Bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;

b) Risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan

c) Bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan)

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Perusahaan dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Perseroan untuk berlaku ketika aset dialkul, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 109 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Perusahaan dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian (ECL) 12 bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (ECL *lifetime*). Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan gagal bayar selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sedangkan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Perusahaan mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur kecuali untuk instrumen berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

a) Instrumen keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan

b) Instrumen keuangan yang risiko kreditnya tidak mengalami peningkatan signifikan sejak pengakuan awal

Perusahaan menentukan bahwa instrumen keuangan memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan berdasarkan peringkat risiko kredit internal dan penilaian eksternal berupa *investment grade*.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit Signifikan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali jika instrumen keuangan tersebut merupakan:

a) Bagian dari hubungan lindung nilai.

b) Investasi dalam instrumen ekuitas dan entitas telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain.

c) Liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan entitas disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain.

d) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan entitas disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

b) Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

c) Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluwarsa.

i. **Aset Tetap**

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan sedangkan penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Penyusutan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009. Nilai penyusutan tahunan aset tetap adalah sebagai berikut:

Kelompok	Prosentase Penyusutan	Umur Ekonomis
Bangunan		
Permanen	5,00%	20 Tahun
Bukan Permanen	10,00%	10 Tahun
Bukan Bangunan		
Kelompok 1	25,00%	4 Tahun
Kelompok 2	12,50%	8 Tahun
Kelompok 3	6,25%	16 Tahun
Kelompok 4	5,00%	20 Tahun

Pengakuan beban penyusutan dihitung sejak tanggal perolehan aset tetap dengan ketentuan, jika perolehan sebelum atau pada tanggal 15 maka beban penyusutan akan diakui pada bulan perolehan tersebut, namun jika perolehan setelah tanggal 15 maka beban penyusutan diakui pada bulan berikutnya.

Untuk perolehan aset tetap baru kapitalisasinya ditentukan berdasarkan daftar aset yang dapat dikapitalisasi yang ditetapkan dengan SK Direksi tersendiri. Biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat transaksi pembelian aset tetap dapat dikapitalisasi dan menambah harga perolehan aset sepanjang biaya tersebut relevan dan terkait langsung dengan aset tetap yang bersangkutan.

j. **Aset Lain-Lain**

1). *Standard Operating Procedure* (SOP)

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan aset yang diperoleh pada tahun 2015. Biaya diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya yaitu 5 tahun.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

j. Aset Lain-Lain (Lanjutan)

2). Fasilitas Uang Panjar Pegawai (UPP)

Fasilitas Uang Panjar (UPP) merupakan aset yang dibentuk sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, vide penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Huruf a yang berbunyi "Yang dimaksud dengan "memberikan pinjaman" adalah bentuk kegiatan pemberian pinjaman yang mengakibatkan Lembaga Penjamin memiliki lini bisnis sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dengan orientasi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan dimaksud. Pemberian pinjaman kepada karyawan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan *(employee benefit)* serta aset ini dibentuk atas persetujuan Surat Keputusan Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 068/SK-Dir/X/2016 tentang Pemberian Fasilitas Uang Panjar Pegawai (UPP) PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur. Syarat dan ketentuan khusus diatur lebih lanjut dalam surat keputusan tersebut.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

l. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Karyawan Jangka Pendek

Manfaat jangka pendek karyawan diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual. Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tidak terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Jangka Panjang dan Imbalan Pascakerja

Manfaat jangka panjang dan pasca kerja, seperti pensiun, uang pesangon, uang jasa dan imbalan lainnya, dihitung berdasarkan "Peraturan Perusahaan" yang sejalan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

Kewajiban untuk imbalan pascakerja yang diakui dalam Laporan Posisi Keuangan dihitung dengan nilai sekarang dari estimasi manfaat bahwa karyawan telah mendapatkan imbalan untuk jasa mereka dalam tahun berjalan dan sebelumnya, dikurangi dengan aset program. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Proyeksi Kredit Unit.

Ketika manfaat dari rencana berubah, porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa masa lalu karyawan dibebankan atau dikreditkan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain pada metode Garis Lurus selama periode rata-rata atas layanan yang tersisa sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan tersebut. Untuk segera memperpanjang hak atas manfaat yang diterima tersebut, pengakuan atas beban harus segera dibuat di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Perusahaan menyediakan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti sebagai penghargaan yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Perkiraan biaya imbalan ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimal sekali setahun oleh aktuaris independen. Imbalan kerja jangka panjang lainnya yang jatuh tempo segera diakui sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Seluruh pendapatan dicatat dan diakui atas dasar akrual *(accrual basis)* kecuali untuk imbal hasil atas penempatan dana dicatat dan diakui atas dasar kas *(cash basis)*. Perusahaan menerapkan PSAK No. 115 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

a) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;

b) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

c) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

d) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;

e) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Setusuh beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya. Pada tahun bersangkutan (accrual basis) pengajuan klaim dianggap sebagai beban klaim setelah komite klaim menyetujui untuk melakukan pembayaran dan setelah diterbitkannya surat persetujuan klaim kepada pihak penerima jaminan.

n. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan. Tidak terdapat transaksi dalam mata uang asing untuk periode 31 Desember 2025.

o. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 212, "Pajak Penghasilan". PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perusahaan diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku dan secara substansial berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain di tahun berjalan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut Laporan Keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan waktu kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan waktu yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

p. Imbal Jasa Penjaminan, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Co-Guarantee

Pendapatan imbal jasa penjaminan, *fee based income* bank pelaksana dan beban co-guarantee diakui pada saat Sertifikat Penjaminan diterbitkan dan diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP). Batas waktu maksimal pengakuan adalah sesuai dengan jangka waktu penjaminan. Pendapatan imbal jasa penjaminan disajikan secara bruto. Imbal jasa penjaminan yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai IJP/IJK ditangguhkan. *Fee based income* bank pelaksana dan beban co-guarantee yang sudah dibayarkan namun belum dibebankan langsung.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

q. Utang Klaim

Utang klaim merupakan utang perusahaan kepada Bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh perusahaan. Utang klaim merupakan utang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar, utang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debet pinjaman yang macet.

Estimasi atas klaim yang terjadi baik sudah dilaporkan maupun belum dilaporkan diakui sebagai cadangan klaim. Pengukuran cadangan klaim mengacu pada konsep perhitungan penurunan nilai dalam PSAK 109 Instrumen Keuangan yang dihitung dengan melakukan estimasi variabel makro yang terkorelasi dengan probabilitas klaim dan didasari total saldo penjaminan bruto.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Hak subrogasi atas klaim diakui sebagai pendapatan subrogasi pada saat hak subrogasi dapat direalisasi.

r. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas tetapi belum menjadi hak karena masih terdapat kewajiban.

s. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perusahaan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (sebagai entitas pelapor), yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
   (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   (ii) Memilikl pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

Orang yang diidentifikasikan dalam huruf (a) (i) yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

Orang yang diidentifikasikan dalam huruf (a) (i) yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

t. Cadangan Klaim

Cadangan klaim ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut cadangan klaim yang wajib dibentuk minimal sebesar 0,01% dari total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri atau penjumlahan dari 100% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan *(incurred but not reported)*.

3. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi 24 kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

3. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umumnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan.

Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

4. KAS DAN SETARA KAS

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Kas dan Setara Kas		
Kas	11.257.786	237.151.946
Giro	2.651.565.094	1.982.751.992
Tabungan	887.896.988	265.066.687
Deposito Berjangka	6.000.000.000	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	**9.550.719.868**	**2.484.970.625**

Rincian penempatan setara kas pada bank berdasarkan pihak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Bank	2025	2024
Giro		
Giro Bank Mandiri - 1610010002801	38.801.482	1.093.974.069
Giro Bank NTT - 1610010002801	2.462.092.994	721.212.195
Giro Bank BNI 46	825.000	-
Giro Bank Bukopin - 1001160185	11.706.652	23.709.674
Giro Bank BRI - 3901002670307	69.505.585	106.384.302
Giro Bank Artha Graha	1.532.717	2.042.717
Giro Bank CIMB Niaga	67.100.664	35.429.035
Jumlah Giro	**2.651.565.094**	**1.982.751.992**
Tabungan		
Tabungan Koperasi NTT Sejahtera	8.039.353	8.039.353
Tabungan BPR Tanaoba Lais Manekat	200.023.076	147.388.365
Tabungan BPR Central Pitoby	195.419.185	18.723.990
Tabungan BPR Tanjung Pratama	83.640.681	38.513.037
Tabungan BPR Danamas Beli	1.460.302	1.418.058
Tabungan BPR Nam	305.948.949	40.614.726
Tabungan BPR Bina Usaha Dana	93.365.442	10.369.158
Jumlah Tabungan	**887.896.988**	**265.066.687**
Deposito < 3 Bulan		
Deposito Bank BRI	1.000.000.000	-
Deposito Bank CIMB Niaga	5.000.000.000	-
Jumlah Deposito < 3 Bulan	**6.000.000.000**	**-**

Pada tahun 2025 diketahui dari nilai kas dan setara kas tersebut, terdapat penempatan pada lembaga keuangan yang sudah tidak beroperasi dan bersifat tidak likuid yaitu pada Koperasi NTT Sejahtera. Pada tanggal 12 Februari 2026, Koperasi NTT Sejahtera telah mengembalikan dana tabungan ke rekening perusahaan dengan menyetorkan ke rekening no 016.01.08.0000.135 atas nama PT Jamkrida NTT sebesar Rp8.039.353,-.

Tingkat suku bunga giro dan tabungan pada 31 Desember 2025 rata-rata 1% - 2,5% per tahun dan untuk tingkat suku bunga deposito <3 bulan rata-rata 3% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

5. PENEMPATAN INVESTASI

INVESTASI LANCAR	2025	2024
Deposito		
Deposito Berjangka	101.000.000.000	103.600.000.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Deposito	(84.800.000)	(104.820.000)
Jumlah Investasi Lancar	**100.915.200.000**	**103.495.180.000**

Rincian penempatan investasi lancar pada bank berdasarkan pihak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Deposito Berjangka	2025	2024
Deposito PT Bank NTT	84.500.000.000	84.000.000.000
Deposito PT Bank Bukopin	2.000.000.000	4.100.000.000
Deposito PT BPR Tanaoba Lais Manekat	4.000.000.000	5.000.000.000
Deposito PT BPR Central Pitoby	2.500.000.000	2.500.000.000
Deposito PT BPR NAM	500.000.000	500.000.000
Deposito PT BPR Sari Dinar Kencana	2.500.000.000	2.500.000.000
Deposito PT BPR Bina Usaha Dana	4.000.000.000	4.000.000.000
Deposito PT BPR Modern Express	-	1.000.000.000
Deposito PT BPR Tanjung Pratama	1.000.000.000	-
Jumlah Investasi Lancar	**101.000.000.000**	**103.600.000.000**

Perhitungan CKPN Investasi Deposito tahun 2025:	
Deposito pada Bank Umum (0,02%)	17.300.000
Deposito pada BPR (0,50%)	67.500.000
Jumlah	**84.800.000**

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Deposito adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal	104.820.000	86.710.000
Penambahan (Pengurangan)	(20.020.000)	18.110.000
Jumlah	**84.800.000**	**104.820.000**

Manajemen berpendapat jumlah cadangan kerugian penurunan nilai investasi lancar deposito cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai deposito berjangka.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun atas penempatan deposito tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berkisar antara 3,75% - 6,75% dan 3,75% - 6,75% p.a.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat deposito yang dibatasi penggunaannya dan tidak terdapat penempatan deposito pada lembaga keuangan yang sedang dalam proses likuidasi.

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:	2025	2024
Piutang Reasuransi AJB Bumiputera	3.594.465.276	5.782.286.320
Piutang Reasuransi PT. Igna Asia	2.371.885.087	2.560.864.527
Piutang Reasuransi PT. Ass. Jasindo	63.421.665	63.421.665
Piutang Reasuransi PT. Paragon	33.166.751.748	19.236.490.201
Jumlah Piutang Penjaminan Ulang	**39.196.523.776**	**27.643.062.713**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(1.858.624.223)	(138.215.314)
Jumlah	**37.337.899.553**	**27.504.847.399**

Penjelasan mengenai piutang penjaminan ulang adalah sebagai berikut:

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912
Penurunan jumlah piutang reasuransi AJB Bumiputera sebesar Rp2.187.821.044 pada tahun 2025, berdasarkan surat balasan AJB Bumiputera dengan Nomor Surat 171/PT Jamkrida NTT/QDP/XI/2025 tanggal 25 November 2025 disampaikan bahwa AJB Bumiputera 1912 melalui Kantor Cabang Askum Denpasar mengakui bahwa sampai tanggal laporan, jumlah Piutang Klaim AJB Bumiputera terhadap PT Jamkrida NTT sebesar Rp3.594.465.276,- untuk 69 terjamin PT Jamkirda NTT yang meninggal dunia. Dalam surat tersebut, AJB Bumiputera juga meminta kelonggaran waktu untuk penyelesaian pembayaran klaim.

Dalam rangka memitigasi risiko, sejak tahun 2016 perusahaan telah memberhentikan pengajuan penjaminan ulang kepada AJB Bumiputera. Pembayaran piutang reasuransi dilakukan melalui pemotongan langsung pembayaran IJP penjaminan ulang, sehingga dari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2025 tidak terdapat IJP Penjaminan ulang yang dipotong langsung untuk pembayaran klaim.

Pada 31 Desember 2025, atas piutang reasuransi AJB Bumiputera telah dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp1.617.509.374,- (sebesar 45% dari saldo tercatat)

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan)

Penjelasan mengenai piutang penjaminan ulang adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

PT Igna Asia

Pada 31 Desember 2025 dalam rangka memitigasi risiko, sejak tahun 2020 perusahaan telah memberhentikan pengajuan penjaminan ulang kepada PT Igna Asia. Pembayaran piutang reasuransi dilakukan melalui pemotongan langsung pembayaran IJP penjaminan ulang, sehingga dari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2025 tidak terdapat IJP Penjaminan ulang yang dipotong langsung untuk pembayaran klaim.

Pada 31 Desember 2025, atas Piutang Reasuransi PT Igna Asia telah dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp11.859.425,- (sebesar 0,5% dari saldo tercatat)

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

Dalam rangka memitigasi risiko, sejak tahun 2016 perusahaan telah memberhentikan pengajuan penjaminan ulang kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Pembayaran piutang reasuransi dilakukan melalui pemotongan langsung pembayaran IJP penjaminan ulang, sehingga dari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2025 tidak terdapat IJP penjaminan ulang yang dipotong langsung untuk pembayaran klaim. Pada 31 Desember 2025, perusahaan telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang reasuransi sebesar 100% dari total nilai piutang reasuransi Jasindo.

PT Paragon Reinsurance Brokers

Pada 31 Desember 2025 terdapat peningkatan pada piutang reasuransi pada PT Paragon karena peningkatan jumlah klaim yang terjadi dan pada tahun 2025 perusahaan hanya melakukan penjaminan ulang kepada PT Paragon Reinsurance Brokers.

Pada 31 Desember 2025, atas piutang reasuransi PT Paragon Reinsurance Brokers telah dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp.165.833.759,- (sebesar 0,5% dari saldo tercatat)

Perhitungan pembentukan CKPN Reasuransi Tahun 2025 sebagai berikut:

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Piutang Reasuransi	%	CKPN Dibentuk
CKPN Piutang Reass AJB Bumiputera	3.594.465.276	45%	1.617.509.374
CKPN Piutang Reass Igna Asia	2.371.885.087	0,5%	11.859.425
CKPN Piutang Reass Jasindo	63.421.665	100%	63.421.665
CKPN Piutang Reass Paragon	33.166.751.748	0,5%	165.833.759
	39.196.523.776		**1.858.624.223**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas penurunan nilai Piutang Reasuransi.

Rencana manajemen terkait pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Reasuransi AJB Bumiputera *(Lihat Catatan 35)*.

7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	2025	2024
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	12.361.021.020	8.955.670.807
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(122.714.643)	(89.556.708)
Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	**12.238.306.377**	**8.866.114.099**

Mutasi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, sebagai berikut:

	2025
Saldo Awal	8.955.670.807
Penambahan dari Klaim	3.471.686.525
Realisasi Penagihan	66.336.312
Penghapusan	-
Saldo Akhir	**12.361.021.020**

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan pengakuan pendapatan subrogasi atas kredit terjamin tergolong macet yang memiliki agunan. Pedoman pengakuan pendapatan subrogasi dan *recovery* dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 017/SK-Dir/IX/2024 tertanggal 23 September 2024. Perusahaan telah membentuk komite subrogasi yang bertugas melakukan penilaian atas usulan pengakuan pendapatan subrogasi yang disampaikan divisi penjaminan, yang selanjutnya komite subrogasi membuat nota usulan kepada direksi untuk memutuskan pengakuan pendapatan subrogasi. Pembentukan komite subrogasi tertuang dalam SK Direksi Nomor 018/SK-Dir/IX/2024 tertanggal 23 September 2024. Perusahaan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 010/SK-Dir/VII/2023 tentang Penetapan *Team* Subrogasi PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Juli 2023 yang terdiri dari 5 (lima) orang.

Mutasi Cadangan Penurunan Nilai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal	89.556.708	-
Penambahan (Pengurangan) (Catatan 33)	33.157.935	89.556.708
Jumlah	**122.714.643**	**89.556.708**

7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (Lanjutan)

Tagihan subrogasi memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, proses penagihan berlangsung lama. Hak subrogasi memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi dalam hal *recoverable amount*, serta proses penagihan sering melibatkan litigasi yang panjang dengan *outcome* yang tidak pasti. Tagihan subrogasi tidak memenuhi kriteria pengakuan aset karena *probable* (kemungkinan besar) manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh, nilai dapat diukur dengan *reliable* (andal), entitas memiliki kontrol atas aset tersebut tidak terpenuhi, sehinga penyajian tagihan subrogasi sebagai aset dapat mengakibatkan penyajian aset lancar yang *overstatement*. Tagihan subrogasi dicatat *off balance sheet* merupakan penerapan prinsip konservatisme dan kehati-hatian.

8. INVESTASI TIDAK LANCAR

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Obligasi Pemerintah		
SBNFR56	5.553.585.000	10.553.585.000
Nilai Tercatat	**5.553.585.000**	**10.553.585.000**
Reksadana		
Reksadana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat	5.000.000.000	-
Reksadana Terproteksi Danareksa Proteksi 59	21.065.000.000	21.065.000.000
Nilai Tercatat	**26.065.000.000**	**21.065.000.000**
Jumlah Penempatan Investasi	**31.618.585.000**	**31.618.585.000**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.332.740.717)	(261.760.897)
Jumlah	**30.285.844.283**	**31.356.824.103**

	Kupon	Pemeringkatan	Peringkat	Jatuh Tempo
Obligasi Pemerintah*				
Surat Berharga Negara FR56	**8,375%**	-	-	6 Juli 2026

*) Obligasi pemerintah tidak dirating oleh lembaga pemeringkat efek

Reksadana Terproteksi Danareksa Proteksi 59 terdiri dari:

Nama Surat Berharga	Nama Manajer Investasi/ Broker	Nominal
Danareksa Gebyar Indonesia II	PT BRI Manajemen Investasi	3.000.000.000
Danareksa Gebyar Indonesia II	PT BRI Manajemen Investasi	2.500.000.000
PNM Reksa Dana Pendapatan Tetap (Surat Berharga Negara II)	PT PNM Investment Management	1.500.000.000
Melati Pendapatan Utama	PT Danareksa Investmen	6.300.000.000
MIDU (Mandiri Investa Dana Utama Kelas A)	PT Mandiri Manajemen Investasi	3.015.000.000
Narada Adikara Indonesia	PT Narada Aset Manajemen	4.750.000.000
Jumlah Reksadana Terproteksi Danareksa Proteksi 59		**21.065.000.000**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat investasi pada obligasi SBN atau reksadana yang dijadikan agunan.

Kegiatan penempatan dana investasi yang dilakukan oleh PT Penjaminan Kredit Daerah pada PT Narada Aset Manajemen (NAM) tertuang dalam kontrak No.040/KPA-NAM/VIII/2029, tertanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp5.000.000.000,- jangka waktu 36 bulan dengan keuntungan 16% per tahun. Pada akhir masa kontrak, yaitu 15 Agustus 2021, PT Jamkrida NTT baru mendapatkan pengembalian dana sebesar 5% dari nilai investasi yaitu Rp.250.000.000,- dan tidak memperoleh keuntungan dari investasi sesuai yang tertuang dalam kontrak tersebut. Upaya penyelesaian investasi ini dilanjutkan PT Jamkrida NTT dengan meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan Tinggi NTT melalui surat No.13398/NTT/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023, perihel Permohonan Bantuan Hukum. Tanggal 10 Oktober 2024 telah dilakukan pertemuan antara PT NAM dengan PT Jamkrida NTT yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT, dan pada saat itu Kejaksaan Tinggi NTT memberikan waktu kepada PT NAM untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PT Jamkrida NTT paling lambat tanggal 24 Oktober 2024. Penempatan Dana Investasi pada PT Narada Aset Manajemen tersebut telah masuk dalam proses peradilan dan sampai dengan saat ini belum ada pengembalian atas dana investasi yang ditempatkan.

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Investasi adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal	261.760.897	99.839.968
Penambahan (Pengurangan) (Catatan 33)	1.070.979.820	161.920.929
Jumlah	**1.332.740.717**	**261.760.897**

8. INVESTASI TIDAK LANCAR (Lanjutan)

Pembentukan CKPN atas Investasi tahun 2025 sebesar Rp1.070.979.820,- dengan rincian sebagai berikut:

Penurunan CKPN Investasi Deposito	(20.020.000)
Investasi SBN 0,02% x Rp.10.553.585.000)	2.110.717
Reksadana PT NAM (25% x Rp.4.750.000.000)	1.187.500.000
Reksadana Lainnya (1% x Rp.16.315.000.000)	163.150.000
Saldo Awal CKPN	261.760.897
Saldo Akhir CKPN Investasi	**1.070.979.820**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada investasi obligasi SBN dan reksadana cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas penurunan nilai investasi.

Rencana manajemen terkait pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan dana investasi pada PT Narada Aset Manajemen *(Lihat Catatan 35)*.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2025	2024
Biaya Dibayar Dimuka Lancar		
BDD - Reasuransi	291.807.193	388.723.094
BDD - Diluar Beban Premi Reasuransi - Co Guarantee	245.087.025	224.267.025
Jumlah	**536.894.218**	**612.990.119**

Biaya Dibayar Dimuka Reasuransi merupakan pembayaran imbalan jasa yang dilakukan oleh perusahaan kepada Perusahaan Reasuransi atas *sharing risk* penjaminan khusus untuk masa penjaminan <1 tahun dan pengakuan beban diakui dengan *accrual basis*. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp291.807.193,- dan Rp388.723.094,- dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
BDD - Reasuransi PT Paragon	240.054.114	388.723.094
BDD - Reasuransi JakRe	51.753.079	-
Jumlah	**291.807.193**	**388.723.094**

Biaya Dibayar Dimuka Diluar Beban Premi Reasuransi - Co Guarantee merupakan pengeluaran Perusahaan yang manfaat ekonominya akan diperoleh pada periode berikutnya. Biaya dibayar dimuka tersebut akan diamortisasi atau dibebankan sebagai beban seiring dengan masa manfaatnya. Rincian penjelasan sebagai berikut:

1) **Biaya Sewa Tanah Gedung Kantor**

Berdasarkan perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT Jamkrida NTT Nomor 014/PKS-JNTT/XII/2022 tentang pemanfaatan Tanah milik Pemerintah Provinsi NTT dalam bentuk Sewa dengan jangka waktu sewa 30 (tiga puluh) tahun dimulai tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 21 Desember 2051. Biaya Dibayar Dimuka yang telah dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp127.572.300,- dengan amortisasi per bulannya Rp10.631.025,-.

2) **Uang Muka Seragam Kantor**

Perusahaan melakukan pengadaan seragam kantor karyawan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 048/PKS-JNTT/XI/2025 dengan CV Moko dengan biaya pengerjaan sebesar Rp41.640.000,- dengan jadwal waktu pengerjaan ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender dimulai sejak pembayaran uang muka. Mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

a). Pembayaran Uang Muka/DP sebesar 50% dibayarkan saat penandatanganan perjanjian ini atau sebesar Rp20.820.000,-.

b). Pelunasan dibayarkan setelah seragam selesai dikerjakan dan siap dikirim.

Biaya Dibayar Dimuka Tidak Lancar

	2025	2024
BDD - Reasuransi AJB Bumiputera	492.559.017	580.955.501
BDD - Reasuransi PT. Asuransi Jasa Indonesia	11.628.650	13.704.755
BDD - Reasuransi PT. Igna Asia	7.867.072.670	10.109.764.987
BDD - Reasuransi PT. Paragon	70.374.732.112	56.640.850.210
BDD - Reasuransi Co-Guarantee	293.460.669	586.921.333
BDD - Reasuransi JakRe	495.335.802	-
Jumlah	**79.554.788.920**	**67.932.196.766**
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	**80.091.683.138**	**68.545.186.885**

Biaya Dibayar Dimuka Tidak Lancar merupakan premi asuransi yang dibayar kepada mitra reasuransi dalam rangka *sharing risk* penjaminan khusus untuk masa penjaminan diatas 1 tahun. Pengakuan beban diakui dengan metode *accrual basis*. Pada tahun 2025, perusahaan melakukan perjanjian reasuransi sebagai berikut:

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JakRe)

Pada tahun 2025, perusahaan melakukan perjanjian kerjasama tentang Jasa Konsultan dan Keperantaraan Penjaminan Ulang & Asuransi Jiwa. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama PT Jamkrida NTT dengan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JakRe) Nomor:015/PKS-JNTT/VIII/2025 / 014/JakRe/VIII/2025.

10. ASET TETAP DAN INVENTARIS

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan :				
Gedung Kantor	13.986.635.873	-	-	13.986.635.873
Kendaraan	2.095.015.000	-	-	2.095.015.000
Inventaris Kantor	2.128.769.783	118.814.000	-	2.247.583.783
Jumlah Biaya Perolehan	**18.210.420.656**	**118.814.000**	**-**	**16.329.234.656**
Akumulasi Penyusutan				
Gedung Kantor	734.298.390	629.398.620	-	1.363.697.010
Kendaraan	1.609.499.000	184.068.000	-	1.793.567.000
Inventaris Kantor	1.053.452.977	294.991.762	-	1.348.444.738
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**3.397.250.367**	**1.108.458.382**	**-**	**4.505.708.748**
Nilai Buku	**14.813.170.289**			**13.823.525.908**

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan :				
Gedung Kantor	13.986.635.873	-	-	13.986.635.873
Kendaraan	2.095.015.000	-	-	2.095.015.000
Inventaris Kantor	2.003.678.263	125.091.520	-	2.128.769.783
Jumlah Perolehan	**18.085.329.136**	**125.091.520**	**-**	**18.210.420.656**
Akumulasi Penyusutan				
Gedung Kantor	104.899.770	629.398.620	-	734.298.390
Kendaraan	1.377.425.000	232.074.000	-	1.609.499.000
Inventaris Kantor	756.869.879	296.613.848	30.750	1.053.452.977
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**2.239.194.649**	**1.158.086.468**	**30.750**	**3.397.250.367**
Nilai Buku	**15.846.134.487**			**14.813.170.289**

Beban penyusutan aset tetap dan inventaris untuk 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.108.458.382,- dan Rp1.158.086.468,- *(Lihat Catatan 29)*.

Aset Tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan nilai pertanggungan untuk Gedung Bangunan Kantor sebesar Rp12.800.000.000,- serta Inventaris dan Lain-Lain sebesar Rp1.928.526.663,- per 31 Desember 2025 yang menurut manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari risiko yang mungkin dialami.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atas nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

11. ASET PAJAK TANGGUHAN

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Aset Pajak Tangguhan	778.952.345	188.071.614
Jumlah	**778.952.345**	**188.071.614**

Aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan *(recovered)* pada periode masa depan yang timbut dari perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan.

12. ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
SOP dan Aplikasi Penjaminan	245.737.479	184.029.149
Fasilitas UPP	650.362.725	882.334.520
Jumlah	**650.362.725**	**882.334.520**

	31 Desember 2025			
SOP dan Aplikasi Penjaminan 2025	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan :				
SOP	66.500.000	-	-	66.500.000
Aplikasi Penjaminan	581.250.000	158.500.000	-	739.750.000
Jumlah Perolehan	**647.750.000**	**158.500.000**	**-**	**806.250.000**

12. ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN (Lanjutan)

SOP dan Aplikasi Penjaminan 2025	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Amortisasi				
SOP	66.500.000	-	-	66.500.000
Aplikasi Penjaminan	397.220.851	96.791.670	-	494.012.521
Jumlah Akumulasi Amortisasi	**463.720.851**	**96.791.670**	-	**560.512.521**
Nilai Buku	**184.029.149**			**245.737.479**

SOP dan Aplikasi Penjaminan 2024	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan :				
SOP	66.500.000	-	-	66.500.000
Aplikasi Penjaminan	551.250.000	30.000.000	-	581.250.000
Jumlah Perolehan	**617.750.000**	**30.000.000**	-	**647.750.000**
Akumulasi Amortisasi				
SOP	66.500.000	-	-	66.500.000
Aplikasi Penjaminan	303.045.847	94.175.004	-	397.220.851
Jumlah Akumulasi Amortisasi	**369.545.847**	**94.175.004**	-	**463.720.851**
Nilai Buku	**248.204.153**			**184.029.149**

Rincian penjelasan atas Sistem dan Aplikasi PT Jamkrida NTT sebagai berikut:

1) **Pengembangan Aplikasi Jeans**

Perusahaan melakukan pengembangan aplikasi untuk kegiatan operasional berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Project IT Talent Nomor 026/PKS-JNTT/IX/2025 tentang Pengembangan Aplikasi Jeans untuk Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025, dengan biaya pekerjaan sesuai perjanjian sebesar Rp48.500.000,- dengan mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

a). Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp19.400.000,- yang telah dibayarkan oleh perusahaan setelah perjanjian ditandatangani.

b). Tahap II sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp29.100.000,- yang telah dibayarkan oleh perusahaan setelah seluruh pekerjaan selesai dan dilakukan uji terima serta BAST.

2) **Pengembangan Aplikasi Host to Host Reasuransi**

Pekerjaan Pengembangan aplikasi Host to Host Reasuransi yang dilakukan perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Project IT Talent tentang Pembuatan Aplikasi Web Service Host to Host Reasuransi Nomor: 061/PKS-JNTT/XII/2025, dengan nilai pekerjaan sesuai perjanjian sebesar Rp45.000.000,- dengan mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

a). Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp18.000.000,- yang dibayarkan setelah perjanjian ditandatangani.

b). Tahap II sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp27.000.000,- dibayarkan setelah seluruh pekerjaan selesai, dilakukan uji terima, serta BAST.

Fasilitas UPP 2025	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Johanis E. De Fretes	213.808.745	-	52.236.551	161.572.194
Ferdinand Lerrick	184.719.685	-	47.247.348	137.472.337
Nicky Laurens	205.244.095	-	52.497.053	152.747.042
Joice E. Marthinus	205.244.095	-	52.497.053	152.747.042
Fransiskus XK. Roman	61.573.226	-	15.749.116	45.824.110
Carolina E.Kape	11.744.674	-	11.744.673	1
Saldo Fasilitas UPP	**882.334.520**	-	**231.971.794**	**650.362.725**

Fasilitas UPP 2024	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Quirinus Mario Kleden	52.084.500	-	52.084.500	-
Johanis E. De Fretes	264.119.620	-	50.310.875	213.808.745
Ferdinand Lerrick	230.572.380	-	45.852.695	184.719.685
Nicky Laurens	256.191.533	-	50.947.438	205.244.095
Joice E. Marthinus	256.191.533	-	50.947.438	205.244.095
Fransiskus XK. Roman	76.857.459	-	15.284.233	61.573.226
Stanislaus Y. Roman	11.569.888	-	11.569.888	-
Aser Ellut Missa	4.464.591	-	4.464.591	-
Carolina E.Kape	26.999.270	-	15.254.596	11.744.674
Saldo Fasilitas UPP	**1.179.030.774**	-	**296.696.254**	**882.334.520**

Fasilitas Uang Panjar Pegawai (UPP) merupakan aset yang dibentuk sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017. Aset ini dapat memberikan manfaat ekonomis di masa mendatang dan dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini dipertegas dengan Surat Keputusan Direksi PT Jamkrida NTT Nomor 068/SK-Dir/X/2016 tentang pemberian Fasilitas Uang Panjar Pegawai (UPP).

13. PENAMPUNGAN IMBALAN JASA PENJAMINAN

	2025	2024
Penampungan IJP Mitra Bank NTT	2.481.689.153	1.936.455.444
Penampungan IJP Mitra BPR Central Pitoby	22.288.369	17.627.800
Penampungan IJP Koperasi Mitra NTT Sejahtera	21.039.200	21.039.200
Penampungan IJP Mitra BPR TLM	113.787.290	120.855.984
Penampungan IJP Mitra BPR Tanjung Pratama	7.080.649	7.062.649
Penampungan IJP Mitra BPR Danamas	2.298.249	2.298.249
Penampungan IJP Mitra BPR NAM	7.265.579	-
Penampungan IJP Mitra BPR Sari Dinar Kencana	6.051.191	5.295.880
Penampungan IJP Mitra BPR Bina Usaha Dana	199.345.996	220.206.196
Penampungan IJP Mitra Perbarindo NTT	1.691.834	1.691.833
Penampungan IJP Mitra Surety Bond	76.603.310	77.958.196
Penampungan IJP Mitra Bank Garansi	76.243.996	-
Penampungan IJP Mitra Koperasi Marieta	2.747.760	1.357.980
Penampungan IJP Mitra PT BPR Timor Raya Makmur	91.557.039	79.527.644
Penampungan IJP Mitra PT BRI Ventura Investama	87.579	40.950
Penampungan IJP Mitra Koperasi Suka Damai	216.000.000	216.000.000
Jumlah Penampungan Imbalan Jasa Penjaminan	**3.325.777.194**	**2.707.416.005**

Penampungan IJP merupakan bagian penerimaan IJP dari mitra/rekanan yang belum dilengkapi dokumen syarat-syarat penjaminan namun hasil penerimaan IJP telah diterima oleh PT Jamkrida NTT dalam bulan yang bersangkutan.

14. UTANG PAJAK

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Utang Pajak		
Utang PPh Pasal 21	481.286.018	431.411.944
Utang PPh Pasal 25	-	237.394.221
Utang PPh Pasal 29	724.780.309	676.142.607
Jumlah	**1.206.066.327**	**1.344.948.772**
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan		
Beban Pajak Masa Kini	3.336.116.740	3.264.367.719
Jumlah	**3.336.116.740**	**3.264.367.719**

Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2025 sebesar Rp.481.286.018 merupakan utang PPh pasal 21 untuk masa Desember 2025 dan telah dibayarkan tanggal 15 Januari 2026 dengan nomor NTPN 545C93IRRRUFK5QA.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komersial dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	**14.107.592.009**	**18.244.041.584**
Koreksi Fiskal Positif		
Beban PPh21	1.165.287.495	1.679.007.975
Beban Pajak Lain-lain	3.509.972.697	273.837.459
Beban Sumbangan	-	173.960.000
Beban CKPN	2.804.526.664	-
Beban Imbalan Pascakerja	668.357.142	-
Beban Pemeliharaan kendaraan yang dibawa pulang (50%)	3.343.226	-
Beban Pajak kendaraan yang dibawa pulang (50%)	3.154.665	-
Beban Representatif	92.322.612	-
Jumlah	**8.246.964.500**	**2.126.805.434**
Koreksi Fiskal Negatif		
Pendapatan Bunga Investasi	7.154.642.033	4.490.185.128
Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Tabungan	35.747.384	63.410.217
Jumlah	**7.190.389.417**	**4.553.595.345**
Laba (Rugi) Fiskal	**15.164.167.092**	**15.817.251.673**
Laba (Rugi) Fiskal Pembulatan	**15.164.167.000**	**15.817.251.000**

Perhitungan beban pajak, utang pajak, dan pajak dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

PPh Fasilitas:	-	215.427.501
PPh Non Fasilitas	3.336.116.740	3.048.940.218
Jumlah Pajak Penghasilan	**3.336.116.740**	**3.264.367.719**
Dikurangi Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka:		
PPh Pasal 25	2.611.336.431	2.588.225.112
Estimasi Kurang (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan	**724.780.309**	**676.142.607**

15. DANA CADANGAN KLAIM

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Cadangan Klaim	2.683.829.906	1.825.634.445
Jumlah	**2.683.829.906**	**1.825.634.445**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2025 Pasal 29 yang menyatakan Lembaga Penjamin wajib memiliki cadangan Klaim dan cadangan umum. Selanjutnya, Pasal 30 ayat 1 menyatakan perhitungan cadangan Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, dan pasal 30 ayat 2 menyatakan Lembaga Penjamin juga memperhitungkan Cadangan Klaim dengan membandingkan antara: (a). 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri; dan (b). penjumlahan dari 100% (seratus persen) dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dan Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, mana yang lebih banyak. Berikut perhitungan dana cadangan klaim yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2025.

Tahun 2025

Berdasarkan informasi keuangan per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

a). Perhitungan 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri

Nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri	Cadangan Klaim yang Sudah Dibentuk	%	Cadangan Klaim Minimal Yang Dibentuk (0,01% dari Nilai Penjaminan)
3.627.075.820.155	2.683.829.906	0,1%	362.707.582

b). Perhitungan penjumlahan rata-rata klaim 3 (tiga) periode sebelumnya dengan klaim diproses

Periode	Nilai Klaim	Rata-Rata Klaim 3 Periode Terakhir	Jumlah Cadangan Minimal yang Dibentuk	Cadangan Klaim yang Sudah Dibentuk
Sep-25	4.354.743.737			
Okt-25	1.968.137.888			
Nov-25	1.728.608.092	2.683.829.906		
Des-25			**2.683.829.906**	**2.683.829.906**

16. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Pendek		
Produk Penjaminan Kredit Produktif	2.772.785.132	4.071.359.037
Produk Penjaminan Kredit Non Produktif	31.136.463.597	21.515.593.532
Jumlah	**33.909.248.729**	**25.586.952.569**
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Panjang		
Produk Penjaminan Kredit Produktif	3.227.007.679	4.242.852.052
Produk Penjaminan Kredit Non Produktif	79.423.077.740	60.953.899.866
Jumlah	**82.650.085.419**	**65.196.751.918**
Jumlah Pedapatan Diterima Dimuka	**116.559.334.148**	**90.783.704.487**

Pendapatan diterima dimuka merupakan bagian penerimaan IJP kegiatan usaha penjaminan yang belum merupakan hak pendapatan PT Jamkrida NTT dan masih merupakan beban/kewajiban kepada mitra sampai dengan jatuh tempo haknya berlaku.

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

Liabilitas Imbal Pasca Kerja

	2025	2024
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja - UPMK	89.986.276	102.523.426
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja - Pegawai DPLK BNI	-	680.405.494
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja - Pegawai DPLK BNTT	-	123.588.827
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja - BPJS TK	-	1.898.217.229
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja - Pajak UPMK	51.826.620	-
Jumlah	**141.812.896**	**2.804.734.975**

Pada tahun 2025 dan 2024, perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam Program BNI Simponi yang merupakan Layanan Program Pensiunan Iuran Pasti dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan juga membentuk Imbalan Pasca Kerja - Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) untuk Pengurus dan komisaris. Berdasarkan Akta Notaris No. 66 Tanggal 15 April 2016 Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto S.H., M.Kn Vide 2.5 Agenda V "Untuk pemberian Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 30 (tiga puluh) kali gaji kotor pada bulan berakhirnya dengan mempertimbangkan...". Pembentukan Cadangan Uang Penghargaan Masa Kerja dilakukan secara bulanan dan akan disetorkan ke masing-masing rekening blokir pada bulan berikutnya.

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, pembentukan cadangan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) untuk Komisaris tidak memenuhi apa yang diamanatkan dalam peraturan ini. Uang penghargaan masa kerja diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (3) PP 35/2021 sebagai salah satu kompensasi yang diterima pekerja/buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Definisi Pekerja/Buruh menurut UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) - Pasal 1 angka 3: "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."
Definisi Pekerja/Buruh menurut UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) - Pasal 1 angka 3: "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."

Berdasarkan UU PT (UU No. 40 Tahun 2007): Pasal 1 angka 6: "Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi."
Pasal 108 ayat (1): "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komisaris memiliki karakteristik yang secara fundamental berbeda dengan pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam peraturan ketenagakerjaan. Komisaris merupakan organ perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan melalui perjanjian kerja dengan perusahaan, sehingga tidak terdapat hubungan subordinasi atau perintah antara komisaris dengan perusahaan sebagaimana layaknya hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja. Kompensasi yang diterima komisaris adalah dalam bentuk honorarium atau tantiem yang ditetapkan oleh RUPS, bukan upah yang merupakan hak pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Oleh karena itu, komisaris tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksanaannya termasuk PP Nomor 35 Tahun 2021, melainkan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hubungan antara komisaris dengan perusahaan adalah hubungan fiduciary duty atau hubungan kepercayaan, dimana komisaris berkewajiban melaksanakan tugas pengawasan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan, bukan hubungan kerja yang bersifat subordinatif sebagaimana dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan.

Pada saat membentuk cadangan imbalan pasca kerja - uang penghargaan masa kerja perusahaan mencatat dengan mendebet akun beban gaji dan pegawai - lainnya (kode akun IV-1.3.1.1) dan mengkredit akun utang imbal pasca kerja (kode akun B-2.4.1.1), sedangkan pada saat penyetoran ke rekening blokir penerima dicatat dengan mendebet akun utang imbal pasca kerja (kode akun B-2.4.1.1) dan mengkredit Kas/setara kas.

Lihat catatan 28 Beban Gaji dan Pegawai.

18. UTANG LAIN-LAIN

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Utang Lain-lain Jangka Pendek		
Cadangan PPh Pasal 21 UPMK	-	91.138.894
Liabilitas Lain-lain	800.054.223	391.604.272
Jumlah	**800.054.223**	**482.743.166**

Pada periode sebelumnya, perusahaan mencatat Cadangan PPh Pasal 21 UPMK pada Utang Lain-Lain. Peruntukan cadangan ini adalah untuk risiko pajak atas UPMK yang muncul pada saat UMPK dibayarkan, yaitu pada saat penerima memasuki masa purna jabatan. Pada tahun 2024 dana sudah dibayarkan/disetorkan ke rekening diblokir namun belum diakui sebagai beban.

Liabilitas Lain-Lain terdiri dari utang pajak yang timbul sehubungan dengan pajak atas bunga penempatan deposito, giro, tabungan, serta pajak atas jasa lainnya yang bersifat jangka pendek.

19. EKUITAS

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Modal Ditempatkan dan Disetor	129.100.000.000	125.100.000.000
Uang Muka Setoran Modal	-	4.000.000.000
Cadangan Umum	19.459.541.798	15.714.623.333
Cadangan Tujuan	1.279.459.184	1.279.459.184
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	11.362.358.000	14.979.673.865
Jumlah	**161.201.358.982**	**161.073.756.382**

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Perseroan Terbatas "PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) Nomor: 15 tanggal 16 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H, Notaris di Kota Kupang menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp14.979.673.865,- sebagai berikut:

1). Dividen sebesar 50% atau sebesar Rp7.489.836.933,-
2). Cadangan Umum sebesar 25% atau sebesar Rp3.744.918.465,-
3). Dana *Corporate Social Responsibility* sebesar 2,5% atau sebesar Rp374.491.847,-
4). Dana Representatif Direktur Utama sebesar 2,5% atau sebesar Rp374.491.847,-
5). Dana Kesejahteraan Karyawan sebesar 5% atau sebesar Rp748.983.693,-
6). Tantiem Pengurus sebesar 10% atau sebesar Rp1.497.967.387,-
7). Jasa Produksi Karyawan sebesar 5% atau sebesar Rp748.983.693,-

19. EKUITAS (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Penegasan Direksi Nomor 52 tanggal 29 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss Tomasowa, SH., M.Kn., modal dasar PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Milyar Rupiah). Adapun Setoran Modal terakhir sebesar Rp4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) oleh Pemerintah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2025, perusahaan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas setoran modal tersebut, berdasarkan Surat Nomor S-275/KO.181/2025 Perihal Perubahan Modal Dasar dan Komposisi Kepemilikan Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda). Berikut Komposisi Pemegang Saham Per 31 Desember 2025.

Nama Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Modal Saham (Rp)
Modal Dasar	100%	500.000	500.000.000.000
Nominal Per Lembar Saham			1.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	99,92%	129.000	129.000.000.000
GKPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,08%	100	100.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25,82%**	**129.100**	**129.100.000.000**
Jumlah Modal Yang Belum Disetorkan	**74,18%**	**370.900**	**370.900.000.000**

Berdasarkan Akta Pernyataan Penegasan Direksi Nomor 52 tanggal 29 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss Tomasowa, SH., M.Kn., modal dasar PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Milyar Rupiah). Adapun Setoran Modal terakhir sebesar Rp4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) oleh Pemerintah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Timur dianggap masih sebagai uang muka setoran modal karena belum mendapatkan persetujuan OJK. Berikut Komposisi Pemegang Saham Per 31 Desember 2024.

Nama Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Modal Saham (Rp)
Modal Dasar	100%	500.000	500.000.000.000
Nominal Per Lembar Saham			1.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	25,80%	129.000	129.000.000.000
GKPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,02%	100	100.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25,82%**	**129.100**	**129.100.000.000**
Jumlah Modal Yang Belum Disetorkan	**74,18%**	**370.900**	**370.900.000.000**

20. PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN

PENDAPATAN IMBALAN JASA PENJAMINAN BRUTO

Rincian per 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan IJP Bruto-Penjaminan Kredit	49.421.507.262	34.619.979.686
Pendapatan IJP Bruto-Surenty Bond	2.673.204.797	3.296.514.578
Pendapatan IJP Bruto-Kontra Bank Garansi	346.674.950	850.647.775
Jumlah	**52.441.387.009**	**38.767.142.039**

Pendapatan IJP Bruto merupakan seluruh komponen pendapatan IJP Bruto (sebelum dipotong fee/komisi untuk mitra) atas penjaminan kredit cash loan dan non cash loan yang diakui dengan menggunakan metode *accrual basis* sesuai jangka waktu penjaminan.

Pada tahun 2025, perusahaan menyajikan pendapatan sebesar nilai bruto yang menjadi hak perusahaan sebelum dikurangkan dengan beban atau biaya terkait termasuk namun tidak terbatas pada beban klaim, beban penjaminan ulang, atau beban lain yang timbul sehubungan dengan transaksi tersebut.

21. PENDAPATAN KOMISI PENJAMINAN

	2025	2024
Pendapatan Komisi Penjaminan	1.990.612.214	1.582.277.007
Jumlah	**1.990.612.214**	**1.582.277.007**

22. PENDAPATAN INVESTASI

	2025	2024
Pendapatan Deposito	3.867.483.080	3.521.434.009
Pendapatan Investasi Surat Berharga	3.287.158.953	968.751.119
Jumlah	**7.154.642.033**	**4.490.185.128**

22. PENDAPATAN INVESTASI (Lanjutan)

Rincian Pendapatan Investasi Deposito dan Obligasi periode 1 Januari sampai 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Deposito		
Pendapatan Bunga Deposito Bank Mandiri	12.885.475	4.813.282
Pendapatan Bunga Deposito Bank NTT	2.986.447.076	2.759.844.378
Pendapatan Bunga Deposito Bank Bukopin	120.309.584	193.438.345
Pendapatan Bunga Deposito BPR Tanaoba Lais Manekat	167.857.518	164.596.668
Pendapatan Bunga Deposito BPR Central Pitoby	137.507.297	-
Pendapatan Bunga Deposito BPR Tanjung Pratama	8.021.917	77.128.770
Pendapatan Bunga Deposito BPR NAM	19.995.356	17.249.848
Pendapatan Bunga Deposito Bank BRI	6.684.917	-
Pendapatan Bunga Deposito BPR Sari Dinar Kencana	123.331.404	122.955.410
Pendapatan Bunga Deposito Bina Usaha Dana	200.333.340	154.333.334
Pendapatan Bunga Deposito BPR Modern Expers	53.128.770	27.073.974
Pendapatan Bunga Deposito Bank CIMB Niaga	30.980.426	-
Jumlah	**3.867.483.080**	**3.521.434.009**
Surat Berharga		
Pendapatan Investasi Obligasi SBN	430.869.078	968.751.119
Pendapatan Surat Berharga Danareksa - Reksadana	2.856.289.875	-
Jumlah	**3.287.158.953**	**968.751.119**

23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Rincian periode 1 Januari sampai 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan Biaya Admin Fasilitas UPP	23.253.250	31.012.358
Pendapatan Kelebihan IJP Mitra	814.000	3.073.210.194
Pendapatan Admin Surety Bond dan Kontra Bank Garansi	48.545.000	67.365.000
Pendapatan Hasil Penagihan Subrogasi	4.742.800.914	11.303.113.747
Pendapatan Biaya Penjaminan	3.578.812.816	2.148.121.824
Jumlah	**8.394.225.980**	**16.622.823.123**

24. PENDAPATAN BUNGA

	2025	2024
Pendapatan Jasa Giro	13.733.245	15.823.716
Pendapatan Bunga Tabungan	22.014.139	47.586.501
Jumlah	**35.747.384**	**63.410.217**

25. BEBAN IJP CO-GUARANTEE / IJPU / PREMI REASURANSI

Rincian periode 1 Januari sampai 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Co - Guarantee	293.460.664	293.460.664
Beban Premi Reasuransi	13.679.705.053	12.248.658.968
Jumlah	**13.973.165.717**	**12.542.119.632**

Beban IJP Co-Guarantee / IJPU / Premi Reasuransi adalah beban yang harus dikeluarkan dari komponen pendapatan IJP bruto, rincian beban premi reasuransi yang dibayarkan kepada mitra diakui dengan menggunakan metode *accrual basis* dengan rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024
Premi Reasuransi AJB Bumiputera	88.396.484	88.396.485
Premi Reasuransi PT Ass. Jasindo	2.075.892	7.266.367
Premi Reasuransi PT Igna Asia	2.222.692.297	2.558.166.416
Premi Reasuransi PT Paragon	11.288.077.969	9.594.829.700
Premi Reasuransi PT JakRe	78.462.411	-
Jumlah	**13.679.705.053**	**12.248.658.968**

26. BEBAN KOMISI PENJAMINAN

Rincian periode 1 Januari sampai 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Komisi Penjaminan-Mitra	4.646.876.100	3.072.884.705
Beban Komisi Penjaminan-Agen	2.695.838.014	3.221.671.392
Biaya Penjaminan	1.082.390.010	433.620.133
Jumlah	**8.425.104.124**	**6.728.176.230**

27. BEBAN KLAIM

Rincian periode 1 Januari sampai 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Klaim Penjaminan Kredit	39.110.866.204	28.584.607.386
Klaim Reasuransi	(28.832.890.208)	(19.842.532.960)
Penurunan/Kenaikan Cadangan Klaim	858.195.461	(791.951.757)
Beban Klaim Lainnya s	2.187.821.044	-
Jumlah	**13.323.992.501**	**7.950.122.669**

Beban Klaim adalah klaim yang diajukan oleh penerima jaminan yang disebabkan karena terjamin macet atau wanprestasi kepada penerima jaminan dan/atau dikategorikan kredit macet oleh sebab terjamin meninggal dunia. Rincian beban klaim periode 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Klaim Penjaminan Kredit		
Klaim Kredit Macet/Wanprestasi	13.185.377.347	11.138.782.315
Klaim Meninggal Dunia	25.925.488.857	17.445.825.071
Jumlah Beban Klaim Penjaminan Kredit	**39.110.866.204**	**28.584.607.386**

Jumlah terjamin untuk klaim kredit macet dan klaim meninggal dunia pada 31 Desember 2025 adalah masing-masing 385 dan 266 terjamin. Periode 31 Desember 2024 masing-masing 953 dan 192 terjamin.

Beban Klaim Lainnya sebesar Rp2.187.821.044,- merupakan beban klaim lainnya yang timbul sebagai akibat penyesuaian atas selisih pengakuan piutang kepada AJB Bumiputera yang dibebankan pada tahun berjalan.

Beban Klaim Reasuransi adalah beban klaim yang menjadi bagian tanggungan dari mitra reasuransi. Rincian beban klaim reasuransi periode 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024
Klaim Reasuransi		
Klaim Reasuransi PT Igna Asia	1.688.224.036	2.284.364.806
Klaim Reasuransi PT Paragon	27.144.666.172	17.558.168.154
Jumlah Beban Klaim Reasuransi	**28.832.890.208**	**19.842.532.960**

Jumlah terjamin untuk klaim reasuransi pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 612 dan 1.145 terjamin.

28. BEBAN GAJI DAN PEGAWAI

Rincian periode 1 Januari sampai 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Honorarium Komisaris	824.412.234	740.432.478
Beban Gaji Pokok	2.280.106.353	2.528.300.378
Beban Tunjangan Jabatan	335.500.000	327.000.000
Beban Tunjangan Keluarga	174.800.706	153.557.086
Beban Tunjangan Perumahan	378.200.000	372.000.000
Beban Tunjangan Komunikasi	98.380.000	94.800.000
Beban Tunjangan Transportasi	191.305.000	189.200.000
Beban Tunjangan Konsumsi	189.990.000	187.500.000
Beban Bonus	997.540.449	1.020.678.000
Beban Tunjangan Hari Raya	1.111.284.251	778.900.000
Beban Tunjangan Cuti	356.847.832	376.638.729
Beban Pemeliharaan Kesehatan	1.500.000	16.479.650
Beban BPJS Kesehatan	127.240.295	130.124.575
Beban Imbal Pasca Kerja-BPJS Ketenagakerjaan	285.092.293	330.904.841
Beban Gaji & Pegawai Lainnya - Cadangan Uang Penghargaan Masa Kerja Pengurus	1.134.118.260	1.861.191.029
Beban Tunjangan Pensiun	223.289.047	223.232.054
Beban Pajak PPh21	1.165.287.495	1.679.007.975
Beban Honorarium Tenaga Outsourcing	406.308.606	382.596.784
Jumlah	**10.279.202.821**	**11.391.943.579**

Beban Gaji dan Pegawai Lainnya - Cadangan Uang Muka Penghargaan Masa Kerja Pengurus merupakan pengeluaran kas/setara kas perusahaan ke rekening blokir penerima yang akan dicairkan sebagai uang penghargaan masa kerja pengurus setelah penerima pensiun. Dalam jumlah Rp1.134.118.260,- termasuk jumlah yang telah disetor ke rekening blokir penerima atas nama komisaris utama dan komisaris independen sebesar Rp503.467.219,- dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Nomor Rekening	Tanggal Transfer	Jumlah Disetorkan	Keterangan
Flouri Rita Wuisan	2511209601	10/11/2025	246.055.408	UPMK Agustus 2024 s.d Agustus 2025
Frits Oscar Fanggidae	2511209688	10/11/2025	221.449.867	UPMK Agustus 2024 s.d Agustus 2025
Flouri Rita Wuisan	2511209601	10/11/2025	18.927.339	UPMK September 2025
Frits Oscar Fanggidae	2511209688	10/11/2025	17.034.605	UPMK September 2025
Jumlah			**503.467.219**	

29. BEBAN DEPRESIASI

Rincian periode 1 Januari sampai 31 Desember sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Depresiasi Gedung	629.398.620	629.398.620
Beban Depresiasi Inventaris	90.256.113	296.613.848
Beban Depresiasi Kendaraan	388.803.648	232.074.000
Jumlah	**1.108.458.381**	**1.158.086.468**

30. BEBAN AMORTISASI

	2025	2024
Beban Amortisasi Aplikasi Penjaminan	96.791.670	94.175.004
Jumlah	**96.791.670**	**94.175.004**

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2025	2024
Beban Pendidikan dan Pelatihan	86.418.320	56.674.340
Beban Bea Materai	9.582.000	3.867.000
Beban Pajak Lain-lain	3.534.673.215	273.837.459
Beban Bahan Bakar Kendaraan Dinas	83.751.819	78.424.585
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	38.668.678	21.340.602
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	54.615.914	29.786.617
Beban Listrik, Air dan Telepon	257.275.880	271.701.819
Beban Alat Tulis Kantor	78.342.025	79.739.650
Beban Kebutuhan Kantor	57.977.624	92.517.132
Beban Perjalanan Dinas	679.137.648	597.952.256
Beban Pengembangan TI	3.262.068	-
Beban Sewa	127.572.300	127.572.300
Beban Promosi	270.582.053	649.009.570
Beban Barang dan Jasa	343.248.760	130.490.000
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	491.408.227	754.921.058
Jumlah	**6.116.736.721**	**3.187.834.388**

32. PENDAPATAN LAIN-LAIN

	2025	2024
Pendapatan Lain-lain	328.622.720	94.166.091
Jumlah	**328.622.720**	**94.166.091**

33. BEBAN LAIN-LAIN

	2025	2024
Beban Representatif	92.322.612	137.415.359
Beban Administrasi Bank	17.344.120	16.841.100
Beban CKPN Piutang Reasuransi	1.720.408.909	38.375.346
Beban CKPN Piutang Investasi	1.050.959.820	61.315.538
Beban CKPN PYMHD Pendapatan Subrogasi	33.157.935	89.556.708
Beban CKPN Kas Setara Kas	-	-
Jumlah	**2.914.193.396**	**343.504.051**

34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak terdapat peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

35 RENCANA MANAJEMEN

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 6, Piutang Reasuransi AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp3.594.465.276,-, telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.617.509.374,- atau 45%, sehingga nilai neto piutang reasuransi AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp1.976.955.902,-.

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 8, penempatan dana Investasi pada PT Narada Aset Manajemen tersebut telah masuk dalam proses peradilan dan sampai dengan saat ini belum ada pengembalian atas dana Investasi yang ditempatkan. Atas sisa penempatan sebesar Rp4.750.000.000,-, telah dibentuk cadangan penurunan nilai sebesar Rp1.187.500.000,- atau 25%, dengan nilai neto penempatan dana Investasi pada PT Narada Aset Manajemen sebesar Rp3.562.500.000,-.

Tanggal 12 Februari 2026, Direksi mengeluarkan memo internal Nomor 041/MI-Dir/II/2026 perihal Jurnal CKPN atas piutang reasuransi AJB Bumiputera dan Investasi Reksadana PT Narada Aset Manajemen. Direksi memutuskan pembentukan CKPN atas nilai neto Piutang Reasuransi AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp1.976.955.902,- dibentuk CKPN sebesar 100% dan dialokasikan perbulan terhitung sejak bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Juni 2026 atau perbulannya sebesar Rp329.492.650,-. Untuk sisa investasi reksadana pada PT NAM dengan nilai neto sebesar Rp3.562.500.000,-, dibentuk CKPN sebesar 100% dan dialokasikan perbulan terhitung sejak bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Juni 2026 atau perbulannya sebesar Rp593.750.000,-.

36 REKLASIFIKASI AKUN

Tidak terdapat reklasifikasi akun Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

37 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan yang diselesaikan pada tanggal 12 Februari 2026.

LAPORAN KEUANGAN

PT KAWASAN INDUSTRI BOLOK

NUSA TENGGARA TIMUR

PT KAWASAN INDUSTRI BOLOK

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK
Jl. Helong Raya, Ds. Bolok, Kec. Kupang Barat, Kabupaten Kupang - NTT

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Johny Ericson Ataupah
Alamat Kantor	: Jalan Helong Raya, Desa Bolok, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur
Alamat Domisili	: Jalan Kian Kelaki Labat RT 012 RW 004 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
No Telepon	: +62822-3712-4970
Jabatan	: Plt. Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Kawasan Industri Bolok ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar
   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kupang, 08 April 2026
Atas nama dan mewakili Direksi
PT. Kawasan Industri Bolok

METERAI TEMPEL 10000 ECAB9ANX327369023

Johny Ericson Ataupah
PLT. Direktur Utama

Dipindai dengan CamScanner

SCEF

KANTOR AKUNTAN PUBLIK SENDY CAHYADI & ERRY FEBRIANTO SAPUTRA (SCEF)
Registered Public Accountants No. 1251/KM.1/2017
Financial Services Authority License No. STTD.KAP-039/PM.223/2019
Audit Board of Republic Indonesia No. STT 410/STT/XII/2020

No: 00012/2.1168/AU.8/10/1246-1/1/IV/2026

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT KAWASAN INDUSTRI BOLOK

Opini Kualifikasian

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Kawasan Industri Bolok ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan pada paragraf Basis untuk Opini Kualifikasian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.

Basis untuk Opini Kualifikasian

Perusahaan belum membentuk perhitungan imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat Bab 28 "Imbalan Kerja" dan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat menentukan dampak atas belum dibentuknya perhitungan imbalan pasca kerja tersebut terhadap laporan keuangan.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kualifikasian kami.

Tel : 0341-5023115 | 0821-8888-7023
Web : www.scef.co.id
Mail : kap.scef@gmail.com
Address : Austinville G-01, Jl. Dieng Atas, Malang, Jawa Timur

Dipindai dengan CamScanner

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Dipindai dengan CamScanner

SCEF

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

SENDY CAHYADI & ERRY FEBRIANTO SAPUTRA

00012

Erry Febrianto Saputra, CPA.
Izin Akuntan Publik No. AP.1246
8 April 2026

KANTOR AKUNTAN PUBLIK SENDY CAHYADI
& ERRY FEBRIANTO SAPUTRA
Austinville G-01, Jl. Dieng Atas, Malang, Jawa Timur

Izin Kemenkeu : 1251/KM.1/2017
Izin OJK : STTD.KAP-039/PM.223/2019
Izin BPK : STT No. 410/STT/XII/2020

Tel : 0341-5023115
Web : www.scef.co.id
Mail : kap.scef@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

PT KAWASAN INDUSTRI BOLOK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024 *)	31 Desember 2023 / 1 Januari 2024 *)
ASET				
Aset lancar				
Kas dan bank	2b, 5	6.587.885.802	7.990.972.920	8.673.712.846
Piutang usaha	2c, 6	664.914.700	47.956.500	-
Jumlah aset lancar		**7.252.800.502**	**8.038.929.420**	**8.673.712.846**
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - bersih	2d, 7	5.133.340.468	5.571.524.412	6.023.727.426
Aset lain-lain	2e, 8	-	179.570.000	179.570.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		**5.133.340.468**	**5.751.094.412**	**6.203.297.426**
JUMLAH ASET		**12.386.140.970**	**13.790.023.832**	**14.877.010.272**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Pendapatan diterima dimuka	2f, 9	519.796.392	182.834.750	636.718.836
Utang pajak	2m, 16a	19.520.150	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	10	-	101.493.750	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**539.316.542**	**284.328.500**	**636.718.836**
JUMLAH LIABILITAS		**539.316.542**	**284.328.500**	**636.718.836**
Ekuitas				
Modal saham	2i, 11	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000
Modal sumbangan	12	80.680.002	80.680.002	80.680.002
Saldo rugi	2j	(10.233.855.574)	(8.574.984.670)	(7.840.388.566)
Jumlah Ekuitas		**11.846.824.428**	**13.505.695.332**	**14.240.291.436**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**12.386.140.970**	**13.790.023.832**	**14.877.010.272**

**) Disajikan kembali, lihat Catatan 4*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Dipindai dengan CamScanner

PT KAWASAN INDUSTRI BOLOK
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024 *)
Pendapatan bersih	2k, 13	1.028.559.013	975.274.011
Beban usaha			
Beban pegawai	2k, 14	1.503.655.250	930.333.550
Beban umum dan administrasi	2k, 15	1.218.796.278	809.574.548
Jumlah beban usaha		**2.722.451.528**	**1.739.908.098**
Rugi usaha		**(1.693.892.515)**	**(764.634.087)**
Pendapatan (beban) lain-lain			
Pendapatan jasa giro		35.414.511	30.295.983
Lain-lain -bersih		(392.900)	(258.000)
Jumlah beban lain-lain - bersih		**35.021.611**	**30.037.983**
Rugi sebelum pajak penghasilan		**(1.658.870.904)**	**(734.596.104)**
Beban pajak penghasilan	2m, 16b	-	-
Rugi tahun berjalan		**(1.658.870.904)**	**(734.596.104)**

**) Disajikan kembali, lihat Catatan 4*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Dipindai dengan CamScanner

PT KAWASAN INDUSTRI BOLOK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham disetor	Modal sumbangan	Saldo rugi	Jumlah ekuitas
Saldo 31 Desember 2023 sebelum penyajian kembali	**22.000.000.000**	**80.680.002**	**(7.793.949.704)**	**14.286.730.298**
Dampak penyajian kembali laporan keuangan *)	-	-	(46.438.862)	(46.438.862)
Saldo 31 Desember 2023 sesudah penyajian kembali	**22.000.000.000**	**80.680.002**	**(7.840.388.566)**	**14.240.291.436**
Rugi tahun berjalan *)		-	(734.596.104)	(734.596.104)
Saldo 31 Desember 2024 *)	**22.000.000.000**	**80.680.002**	**(8.574.984.670)**	**13.505.695.332**
Rugi tahun berjalan	-	-	(1.658.870.904)	(1.658.870.904)
Saldo 31 Desember 2025	**22.000.000.000**	**80.680.002**	**(10.233.855.574)**	**11.846.824.428**

**) Disajikan kembali, lihat Catatan 4*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Dipindai dengan CamScanner

PT KAWASAN INDUSTRI BOLOK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024 *)
Arus kas dari aktivitas operasi		
Rugi sebelum pajak penghasilan	(1.658.870.904)	(734.596.104)
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan aset tetap (Catatan 15)	460.042.944	468.548.014
Rugi sebelum perubahan modal kerja	**(1.198.827.960)**	**(266.048.090)**
Perubahan modal kerja		
Penurunan (kenaikan)		
Piutang usaha	(616.958.200)	(47.956.500)
Aset lain-lain	179.570.000	-
Kenaikan (penurunan)		
Pendapatan diterima dimuka	336.961.642	(453.884.086)
Utang pajak	19.520.150	-
Biaya yang masih harus dibayar	(101.493.750)	101.493.750
Jumlah	**(1.381.228.118)**	**(666.394.926)**
Beban pajak penghasilan	-	-
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	**(1.381.228.118)**	**(666.394.926)**
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian aset tetap (Catatan 7)	(21.859.000)	(16.345.000)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(21.859.000)**	**(16.345.000)**
Penurunan bersih kas	**(1.403.087.118)**	**(682.739.926)**
Kas awal tahun	7.990.972.920	8.673.712.846
Kas akhir tahun	**6.587.885.802**	**7.990.972.920**

**) Disajikan kembali*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Dipindai dengan CamScanner

PT KAWASAN INDUSTRI BOLOK

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN KEUANGAN

BLUD RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

Jl. Dr. Moch. Hatta No. 19, Telp. (0380) 833614

Fax. (0380) 832892

E-mail: rsudjohannes@gmail.com

Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Kupang – Nusa Tenggara Timur

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
SURAT PERNYATAAN PEJABAT PENGELOLA BLUD		1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		3
LAPORAN KEUANGAN POKOK		
1.	Laporan Realisasi Anggaran	6
2.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	7
3.	Laporan Neraca	8
4.	Laporan Operasional	9
5.	Laporan Arus Kas	10
6.	Laporan Perubahan Ekuitas	12
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
1.	Umum	13
2.	Pernyataan Kepatuhan terhadap PSAP BLU	20
3.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	21
4.	Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	50
5.	Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	55
6.	Penjelasan Pos-pos Neraca	56
7.	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	65
8.	Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas	70
9.	Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	71
10.	Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan	72
RESUME HASIL PEMERIKSAAN SPI DAN KEPATUHAN		73

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
Jl. Dr.Moch Hatta No. 19 Kupang – NTT Telp/Fax : (0380) 832892
Kupang –Kode Pos 85011
Website:www.rsudwzjohannes.nttprof.go.id email:rsudjohannes@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Stefanus Dhe Soka, Sp.B, M.K.M.
   Alamat Kantor : Jl. Dr. Moch. Hatta No.19, Kupang – Nusa Tenggara Timur
   NIP : 19730722 200112 1 004
   Jabatan : Direktur

2. Nama : dr. Y.T. Kusumawardhani
   Alamat Kantor : Jl. Dr. Moch. Hatta No.19, Kupang – Nusa Tenggara Timur
   NIP : 19690904 200312 2 004
   Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan

3. Nama : dr. Theresia Sarlyn Ralo, MPH
   Alamat Kantor : Jl. Dr. Moch. Hatta No.19, Kupang – Nusa Tenggara Timur
   NIP : 19700430 200212 2 004
   Jabatan : Wakil Direktur Penunjang Pelayanan

4. Nama : Dr. Nikolaus N. Kewuan, S.Kep.Ns.MPH
   Alamat Kantor : Jl. Dr. Moch. Hatta No.19, Kupang – Nusa Tenggara Timur
   NIP : 19741110 199803 1 011
   Jabatan : Wakil Direktur Keuangan dan Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Direksi/Pejabat Pengelola BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Nama	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Pengelola BLUD	Tanda Tangan
dr. Stefanus Dhe Soka, Sp.B, M.K.M NIP. 19730722 200112 1 004	Direktur	Pemimpin BLUD	.....
dr. Y.T. Kusumawardhani NIP. 19690904 200312 2 004	Wakil Direktur Pelayanan	Pejabat Teknis	.....
dr. Theresia Sarlyn Ralo, MPH NIP. 19700430 200212 2 004	Wakil Direktur Penunjang Pelayanan	Pejabat Teknis	.....
Dr. Nikolaus N. Kewuan, S.Kep.Ns.MPH NIP. 19741110 199803 1 011	Wakil Direktur Keuangan dan Umum	Pejabat Keuangan	.....

Kupang, 20 April 2026

Laporan No.: 00070/2.1516/AU.5/11/0463-2/1/IV/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan

auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00070/ML/KAP.IGOR/1/IV/2026 tanggal 20 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan

00070

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 20 April 2026

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan**	*4.1*				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*4.1.1)*	135.818.996.000,00	126.884.299.047,00	93,42%	115.016.368.541,44
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*4.1.2)*	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	*4.1.3)*	1.413.667.503,00	1.555.054.160,00	110,00%	1.131.970.999,00
5	Pendapatan Hibah	*4.1.4)*	-	76.672.085	-	-
6	Pendapatan APBD	*4.1.5)*	39.107.252.842,00	30.194.424.132,00	77,21%	141.761.254.650,00
7	Pendapatan Lainnya	*4.1.6)*	1.917.336.497,00	851.022.236,48	44,39%	2.009.755.807,15
8	**Jumlah Pendapatan**		**178.257.252.842,00**	**159.561.471.660,48**	**89,51%**	**259.919.349.997,59**
9	**Belanja**					
10	**Belanja Operasi**	*4.2*				
11	Belanja Pegawai	*4.2.1)*	5.000.000.000,00	3.784.261.004,20	75,69%	97.276.125.552,00
12	Belanja Barang dan Jasa	*4.2.2)*	172.008.689.074,00	147.120.798.290,11	85,53%	141.424.602.796,43
13	Bunga	*4.2.3)*	-	-	-	-
14	Belanja Lain-lain	*4.2.4)*	-	-	-	
15	**Jumlah Belanja Operasi**		**177.008.689.074,00**	**150.905.059.294,31**		**238.700.728.348,43**
16	**Belanja Modal**	*4.3*				
17	Belanja Modal Tanah	*4.3.1)*				
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	*4.3.2)*	14.309.044.218,00	9.407.883.813,46	65,75%	33.762.273.637,55
19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	*4.3.3)*	5.121.510.000,00	1.174.300.360,00	22,93%	4.649.195.342,00
20	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	*4.3.4)*	-	-	-	-
21	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	*4.3.5)*	-	-	-	-
22	Belanja Modal Aset Lainnya	*4.3.6)*	-	-	-	-
23	**Jumlah Belanja Modal**		**19.430.554.218,00**	**10.582.184.173,46**	**54,46%**	**38.411.468.979,55**
24	**Jumlah Belanja**		**196.439.243.292,00**	**161.487.243.467,77**	**82,21%**	**277.112.197.327,98**
25	**Surplus (Defisit)**		**(18.181.990.450,00)**	**(1.925.771.807,29)**	**10,59%**	**(17.192.847.330,39)**
26	**Pembiayaan**					
27	**Penerimaan Pembiayaan**					
28	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
29	Penerimaan dari Divestasi		-	-	-	-
30	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-	-	-
31	**Jumlah Penerimaan**		-	-	-	-
32	**Pengeluaran Pembiayaan**					
33	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
34	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-	-	-
35	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
36	**Jumlah Pengeluaran**		-	-	-	-
37	**Pembiayaan Neto**		-	-	-	-
38	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**		**(18.181.990.450,00)**	**(1.925.771.807,29)**	**10,59%**	**(17.192.847.330,39)**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 20 April 2026
Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

dr. Stefanus Dhae Soka, Sp.B, M.K.M
NIP. 19730722 200112 1 004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.1*	**17.163.575.639,20**	**34.561.044.085,59**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.2*	-	-
3	**Sub Total**		**17.163.575.639,20**	**34.561.044.085,59**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	*5.3*	(1.925.771.807,29)	(17.192.847.330,39)
5	**Sub Total**		**15.237.803.831,91**	**17.368.196.755,20**
6	Setoran ke Kas Daerah	*5.4*	(170.607.450,00)	(204.621.116,00)
7	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	*5.5*	1.946.395.881,16	-
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	*5.6*	**17.013.592.263,07**	**17.163.575.639,20**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 20 April 2026
Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

dr. Stefanus Die Soka, Sp.B, M.K.M
NIP. 19730722 200112 1 004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	*6.1*	-	-
4	Kas pada BLUD	*6.2*	17.013.592.263,07	17.163.575.639,20
5	Piutang Operasional BLUD	*6.3*	17.239.096.097,00	3.773.990.877,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*6.3*	(4.370.167.777,78)	(2.943.605.364,69)
7	Persediaan BLUD	*6.4*	16.119.319.549,47	18.632.992.266,94
8	**Jumlah Aset Lancar**		**46.001.840.131,75**	**36.626.953.418,45**
9	**Aset Tetap**	*6.5*		
10	Tanah	*6.5.1)*	35.061.700.000,00	35.061.700.000,00
11	Peralatan dan Mesin	*6.5.2)*	336.404.207.148,61	326.956.721.133,15
12	Gedung dan Bangunan	*6.5.3)*	115.813.851.554,00	114.779.509.194,00
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	*6.5.4)*	8.379.083.858,00	8.379.083.858,00
14	Aset Tetap Lainnya	*6.5.5)*	92.490.480,40	92.490.480,40
15	Konstruksi dalam Pengerjaan	*6.5.6)*	1.717.639.825,00	1.619.761.825,00
16	**Jumlah Harga Perolehan**		**497.468.972.866,01**	**486.889.266.490,55**
17	*Akumulasi Penyusutan*		(309.557.304.418,91)	(278.123.060.470,42)
18	**Jumlah Nilai Buku**		**187.911.668.447,10**	**208.766.206.020,13**
19	**Aset Lainnya**	*6.6*		
20	Aset Tak Berwujud	*6.6.1)*	6.802.017.500,00	6.795.017.500,00
21	Aset Lain-lain	*6.6.2)*	19.518.472.784,00	22.649.624.423,37
22	**Jumlah Harga Perolehan**		**26.320.490.284,00**	**29.444.641.923,37**
23	*Akumulasi Penyusutan*		(25.902.364.145,00)	(25.899.564.145,00)
24	**Jumlah Nilai Buku**		**418.126.139,00**	**3.545.077.778,37**
25	**Jumlah Aset**		**234.331.634.717,85**	**248.938.237.216,95**
26	**Kewajiban**			
27	**Kewajiban Jangka Pendek**			
28	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*6.7*	1.946.395.881,16	-
29	Belanja Yang Masih Harus Di bayar	*6.8*	22.595.736.226,34	23.292.358.490,64
30	Pendapatan Diterima Dimuka	*6.9*	-	-
31	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		**24.542.132.107,50**	**23.292.358.490,64**
32	**Kewajiban Jangka Panjang**			
33	Utang Jangka Panjang		-	-
34	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**		**-**	**-**
35	**Jumlah Kewajiban**		**24.542.132.107,50**	**23.292.358.490,64**
36	**Ekuitas**			
37	Ekuitas	*6.10*	209.789.502.610,35	225.645.878.726,31
38	**Jumlah Kewajiban dan Ekuitas**		**234.331.634.717,85**	**248.938.237.216,95**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 20 April 2026
Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

dr. Stefanus Dhe Soka, Sp.B, M.K.M
NIP. 19730722 200112 1 004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Kegiatan Operasional**					
2	**Pendapatan**	*7.1*				
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*7.1.1)*	121.167.052.562,00	95.269.238.702,44	25.897.813.859,56	27,18%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*7.1.2)*	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	*7.1.3)*	1.524.570.164,00	1.371.566.899,00	153.003.265,00	11,16%
6	Pendapatan Hibah	*7.1.4)*	1.487.050.569,70	1.845.914.872,34	(358.864.302,64)	-19,44%
7	Pendapatan Lainnya	*7.1.5)*	851.022.236,48	2.009.755.807,15	(1.158.733.570,67)	-57,66%
8	Pendapatan APBD	*7.1.6)*	30.194.424.132,00	141.761.254.650,00	(111.566.830.518,00)	-78,70%
9	**Jumlah Pendapatan**		**155.224.119.664,18**	**242.257.730.930,93**	**(87.033.611.266,75)**	**-35,93%**
10	**Beban**	*7.2*				
11	Beban Pegawai	*7.2.1)*	3.784.261.004,20	92.575.497.155,00	(88.791.236.150,80)	-95,91%
12	Beban Barang dan Jasa	*7.2.2)*	150.138.279.056,88	152.547.314.565,62	(2.409.035.508,74)	-1,58%
13	Beban Bunga		-	-	-	-
14	Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi	*7.2.4)*	31.647.717.588,49	37.465.858.163,12	(5.818.140.574,63)	-15,53%
15	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	*7.2.5)*	2.346.074.255,43	765.001.707,09	1.581.072.548,34	-
16	Beban Operasional Lainnya	*7.2.9)*	-	-	-	-
17	**Jumlah Beban**		**187.916.331.905,00**	**283.353.671.590,83**	**(95.437.339.685,83)**	**-33,68%**
18	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**(32.692.212.240,82)**	**(41.095.940.659,90)**	**8.403.728.419,08**	**-20,45%**
19	**Kegiatan Non Operasional**	*7.3*				
20	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
22	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		573.101.804,49	459.617.918,26	113.483.886,23	24,69%
23	**Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional**		**573.101.804,49**	**459.617.918,26**	**113.483.886,23**	**24,69%**
24	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**(32.119.110.436,33)**	**(40.636.322.741,64)**	**8.517.212.305,31**	**-20,96%**
25	**Pos Luar Biasa**					
26	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
27	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
28	**Jumlah Pos Luar Biasa**		-	-	-	-
29	**Surplus (Defisit)-LO**		**(32.119.110.436,33)**	**(40.636.322.741,64)**	**8.517.212.305,31**	**-20,96%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 20 April 2026
Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

dr. Stefanus Obe Soka, Sp.B, M.K.M
NIP. 19730722 200112 1 004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	*8.1*		
2	**Arus Masuk Kas**	*8.1.a.*		
3	Pendapatan dari APBD		30.194.424.132,00	141.761.254.650,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		126.884.299.047,00	115.016.368.541,44
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		1.555.054.160,00	1.131.970.999,00
7	Pendapatan Hibah		76.672.085,00	-
8	Pendapatan Lainnya		851.022.236,48	2.009.755.807,15
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**	*8.1.b.*	**159.561.471.660,48**	**259.919.349.997,59**
10	**Arus Keluar Kas**			
11	Pembayaran Pegawai		3.784.261.004,20	97.276.125.552,00
12	Pembayaran Barang dan Jasa		147.120.798.290,11	141.424.602.796,43
13	Pembayaran Bunga		-	-
14	Pembayaran Lain-lain		-	-
15	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**150.905.059.294,31**	**238.700.728.348,43**
16	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**8.656.412.366,17**	**21.218.621.649,16**
17	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	*8.2*		
18	**Arus Masuk Kas**	*8.2.a*		
19	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
21	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
22	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi		-	-
23	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
24	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
25	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
26	**Arus Keluar Kas**	*8.2.b*		
27	Perolehan Tanah		-	-
28	Perolehan Peralatan dan Mesin		9.407.883.813,46	33.762.273.637,55
29	Perolehan Gedung dan Bangunan		1.174.300.360,00	4.649.195.342,00
30	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		-	-
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
32	Perolehan Aset Lainnya		-	-
33	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**10.582.184.173,46**	**38.411.468.979,55**
34	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**	*8.3*	**(10.582.184.173,46)**	**(38.411.468.979,55)**
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	*8.3.a*		
36	**Arus Masuk Kas**			
37	Penerimaan Pinjaman		-	-
38	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
39	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
40	**Arus Keluar Kas**	*8.3.b*		
41	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
42	Setoran ke Kas Daerah		170.607.450,00	204.621.116,00
43	Pemberian Pinjaman		-	-
44	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**170.607.450,00**	**204.621.116,00**
45	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		**(170.607.450,00)**	**(204.621.116,00)**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
46	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	*8.4.*		
47	**Arus Masuk Kas**	*8.4.a*		
48	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		8.949.074.496,50	12.406.407.284,00
49	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**8.949.074.496,50**	**12.406.407.284,00**
50	**Arus Keluar Kas**	*8.4.b*		
51	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		7.002.678.615,34	12.406.407.284,00
52	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**7.002.678.615,34**	**12.406.407.284,00**
53	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**1.946.395.881,16**	**-**
54	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**		**(149.983.376,13)**	**(17.397.468.446,39)**
55	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**		**17.163.575.639,20**	**34.561.044.085,59**
56	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**		**17.013.592.263,07**	**17.163.575.639,20**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 20 April 2026
Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

dr. Stefanus Olie Soka, Sp.B, M.K.M
NIP. 19730722 200112 1 004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Ekuitas Awal**	*9.1*	**225.645.878.726,31**	**275.366.791.186,18**
2	**Surplus (Defisit) LO**	*9.2*	**(32.119.110.436,33)**	**(40.636.322.741,64)**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	*9.3*	**16.262.734.320,37**	**(9.084.589.718,24)**
	Koreksi Saldo Awal Piutang		19.212.835.701,00	3.451.725.143,00
	Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang Tak Tertagih		346.410.037,85	(237.843.027,40)
	Koreksi Saldo Awal Persediaan		-	(762.275.108,02)
	Koreksi Saldo Awal Harga Perolehan Aset Tetap		-	6.526.156.120,00
	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		212.073.640,00	(24.039.410.646,29)
	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud		(1.400.000,00)	-
	Koreksi Saldo Awal Harga Perolehan Aset Tidak Berwujud		7.000.000,00	-
	Koreski Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi		(3.131.151.639,37)	3.034.996.789,37
	Koreksi Saldo Awal Utang		(170.345.969,11)	3.146.682.127,09
	Setor ke Kas Daerah		(170.607.450,00)	(204.621.116,00)
	Koreksi Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan		(42.080.000,00)	-
4	**Ekuitas Akhir**	*9.4*	**209.789.502.610,35**	**225.645.878.726,31**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 20 April 2026
Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

dr. Stefanus Dhae Soka, Sp.B, M.K.M
NIP. 19730722 200112 1 004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025

1. Umum

a. Sejarah, Perkembangan, dan Dasar Hukum RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang awalnya didirikan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1941 dengan nama Rumah Sakit Darurat Kecil yang berlokasi di Bakunase, dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Kupang maupun Pemerintah Penjajah. Pada tahun 1952 atas prakarsa Residen Mr. Amalo, rumah sakit darurat kecil dipindahkan ke bekas gedung Kesatuan Brigadir Mobil (Brimob) yang terletak di Oetete dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Kuanino. Seiring dengan peralihan kekuasaan dari Pemerintah Penjajah ke Pemerintah Indonesia, maka segala kegiatan Rumah Sakit Kuanino diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tingkat I NTT dengan mendapat bantuan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nama rumah sakit diganti dengan nama pahlawan nasional Bangsa Indonesia asal Rote yang berkecimpung di bidang kedokteran yaitu Prof. Dr. W. Z. Johannes atas persetujuan DPRD Tingkat I NTT pada tanggal 12 November 1970, kemudian dikenal dengan nama "RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang".

RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang adalah Rumah Sakit Sakit Tipe B berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 94 Tahun 1995.

RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 433/KEP/HK/2010 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sebagai Lembaga Teknis Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tanggal 20 April 2016, RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 02.03/I/0765/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z Johannes Kupang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada tanggal 22 November 2016, setelah dinilai oleh Tim Surveyor Komite Akreditasi Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z Johannes Kupang dinyatakan lulus akreditasi rumah sakit versi 2012 dengan status tingkat madya rating bintang tiga. Kemudian dinilai kembali oleh surveyor pada Maret 2017 dan dinyatakan lulus kembali dengan predikat Paripurna Bintang Lima.

Nama-nama yang pernah menjabat Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang adalah:

1) Dr. Habel (1941-1952),
2) Dr. Ouster Heeg (1952-1955).
3) Dr. De Yongen (1955-1960).
4) Dr. Medle Cop (1960-1963).

5) Dr. Hadi Triyadi (1962-1971).
6) Dr. Ben Mboi, MPH (1971-1974).
7) Drg. Ny. B. Widya (1974-1978).
8) Dr. H. Fernandez (1978-1979).
9) Dr. Hamid Malewa (1979-1985).
10) Dr. Hendrik Roman Klaran (1985-1988).
11) Dr. Husein Pancratius R. (1988-2001).
12) Dr. E. H. J. Mooy (2001-2006).
13) Dr. Y. A. Mitak, MPH (2006-2008).
14) Dr. Alphonsius Anapaku, Sp.OG (2008- Agustus 2015).
15) drg. Dominikus Minggu, M.Kes (Agustus 2015-Januari 2019).
16) Dr. drg. Mindo E. Sinaga, M. Kes (Februari 2019-Maret 2024).
17) dr. Stefanus Dhe Soka, Sp.B, M.K.M (Mei 2025-sekarang)

b. Tempat Kedudukan

RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang berkedudukan di Jl. Moch. Hatta No. 19 Kupang Nusa Tenggara Timur, Telp. (0380) 833614, fax: (0380) 832892, website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id.

RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang berdiri di atas tanah seluas 51.670 m^2, bangunan seluas 42.418 m^2, dan kapasitas 344 tempat tidur.

c. Dasar Hukum Pelaksanaan PPK BLUD

Untuk mendukung penerapan PPK BLUD telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pedoman Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang;
13) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang;
14) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pengadaan Barang atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang;
15) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Pelaksanaannya pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang;
16) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang;
17) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
18) Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang;
19) Peraturan Gubernur Nomor 43a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
20) Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang;
21) Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pedoman Pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang;
22) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;

23) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 038 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;

24) Peraturan Direktur Nomor 90 Tahun 2024 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;

25) Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang Nomor 172 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang;

26) Peraturan Direktur Nomor 173 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang.

27) Peraturan Direktur Nomor 232 Tahun 2024 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;

d. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan

1) Visi dari RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang adalah "RUMAH SAKIT MANDIRI DAN TERDEPAN MENUJU MASYARAKAT NTT SEJAHTERA".

2) Misi RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang adalah:

   a) Menciptakan inovasi produk layanan dengan keunggulan kompetitif yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

   b) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna yang berorientasi pada keselamatan pasien *(patient safety)*, berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

   c) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan yang inovatif untuk pengembangan IPTEK kesehatan.

3) Maksud didirikannya RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang adalah untuk melaksanakan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan perorangan.

4) Tujuan:

   a) Meningkatkan kualitas kinerja unit pelayanan langsung, penunjang, administrasi dan manajemen rumah sakit.

   b) Meningkatkan jumlah, jenis dan kualitas sumber daya manusia rumah sakit.

   c) Meningkatkan kepercayaan pelanggan eksternal dan internal.

   d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang mutu pelayanan.

e. Kegiatan atau Produk Layanan

1) Pelayanan Gawat Darurat 24 jam

2) Pelayanan Rawat Jalan

3) Pelayanan Rawat Inap

4) Pelayanan Rawat Intensif

5) Pelayanan Penunjang Medik/Poliklinik

6) Pelayanan Penunjang Non Klinik
7) Pelayanan Terintegrasi

f. Prinsip Dasar

1) Keyakinan Dasar:
   a) Penilaian Pelanggan *(Customer value)*
   b) Perbaikan Berkelanjutan *(Continuous improvement)*
   c) Tim Lintas Fungsional *(Cross functional team)*
2) Nilai Dasar:
   a) Kepedulian, yaitu **mendengar keluhan pelanggan dan responsif terhadap** kebutuhan mereka.
   b) Akuntabel, yaitu mengedepankan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.
   c) Santun, yaitu ramah, tulus dan ikhlas dalam melayani pelanggan.
   d) Integritas, yaitu kesesuaian ucapan dan tindakan serta bekerja secara profesional.
   e) Handal, yaitu dapat dipercaya dan diandalkan.

g. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Rumah Sakit

1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSUD Prof. dr. W. Z. Johannes Kupang berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang adalah sebagai berikut.

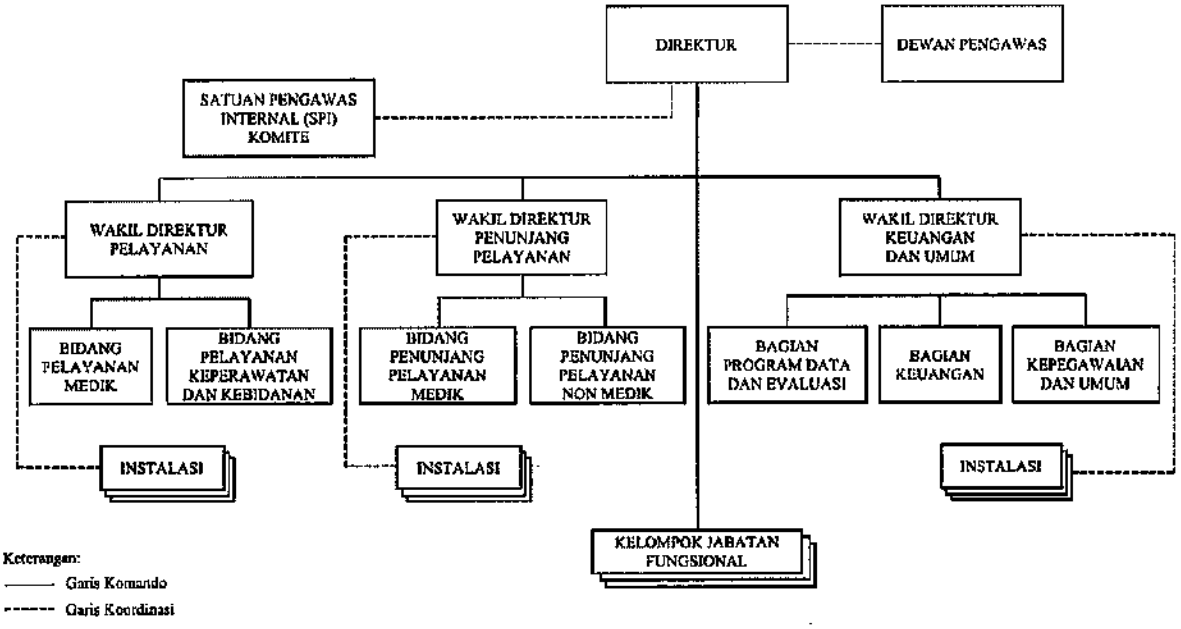

2) Susunan Pejabat Struktural Rumah Sakit

Direktur : dr. Stefanus Dhe Soka, Sp.B, M.K.M
NIP. : 19730722 200112 1 004
Pangkat/Golongan : IV/c
Berdasarkan Keputusam Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 816.2.1/48/BKD.3.2 tanggal 19 Mei 2025

Wakil Direktur Pelayanan : dr. Y.T. Kusumawardhani
NIP. : 19690904 200312 2 004
Pangkat/Golongan : IV/b
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 816.2.1/145/BKD.3.2 tanggal 06 Oktober 2025

Wakil Direktur Penunjang Pelayanan : dr. Theresia Sarlyn Ralo, MPH
NIP : 19700430 200212 2 004
Pangkat/Golongan : IV/b
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 816.2.1/145/BKD.3.2 tanggal 06 Oktober 2025

Wakil Direktur Keuangan dan Umum : Dr. Nikolaus N. Kewuan, S.Kep.Ns.MPH
NIP. : 19741110 199803 1 011
Pangkat/Golongan : IV/b
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 816.2.1/145/BKD.3.2 tanggal 06 Oktober 2025

3) Susunan Dewan Pengawas

a. Periode Januari s/d Mei 2025

Susunan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 75A/KEP/HK/2025 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang Periode 2025-2028 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan Dalam Dewan	Unsur	Honorarium (dalam setahun)
1	Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si.	Ketua	Pemerintah Daerah sebagai pemilik Rumah Sakit	14.993.920,00
2	dr. Rita Enny, S.M.Kes.	Anggota	Organisasi Profesi	13.715.910,00
3	Drs. Zakarias Moruk, MM	Anggota	Tokoh Masyarakat	13.715.910,00

b. Periode Juni s/d Desember 2025

Susunan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 187/KEP/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 75A/KEP/HK/2025 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang periode 2025-2028 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan Dalam Dewan	Unsur	Honorarium (dalam setahun)
1	Dr. Yudith M. Kota, M.Kes	Ketua	Organisasi Profesi	22.210.944,00
2	Maria Yasintha Dewi Maku Djawa	Anggota	Tokoh Masyarakat	19.989.849,60
3	Drs. Nikodemus Stefanus Turwewi	Anggota	Tokoh Masyarakat	19.989.849,60

4) Susunan Satuan Pemeriksa Internal

No	Kedudukan	Nama
1	Ketua	drg. Andi Gunawan Sihombing NIP. 19810403 201402 1 002
2	Anggota	Maria Karolina Naru, SST NIP. 19740119 200212 2 005
3	Anggota	Irma Linda Yuanita, SKM NIP. 19860315 201101 2 011

5) Susunan Pegawai

Berikut ini rincian pegawai RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	
		2025	2024
1	Laki-laki	329	354
2	Perempuan	848	861
	Jumlah Pegawai	**1.177**	**1.215**

b. Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

No	Pendidikan	Status					Jumlah
		PNS	CPNS	P3K	Kontrak APBD	Kontrak BLUD	
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SMP	5	-	-	-	-	5
3	SMA	86	-	48	2	1	137
4	D1	427	48	12	-	12	499
5	D3	51	1	-	-	-	52
6	S1	332	37	12	-	4	385
7	S2	93	-	-	-	6	99

No	Pendidikan	Status					Jumlah
		PNS	CPNS	P3K	Kontrak APBD	Kontrak BLUD	
8	S3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		994	86	72	2	23	1.177

c. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan

No.	Jenis	2025	2024
1	Dokter Struktural	3	1
2	Dokter Fungsional	109	107
3	Perawat Struktural	3	4
4	Perawat Fungsional	364	381
5	Tenaga Medis Fungsional Selain Dokter dan Perawat	412	389
6	Tenaga Non Medis	227	277
7	Pejabat Fungsional Lainnya	23	25
8	Pejabat Struktural Lainnya	4	4
9	Pegawai dalam Masa Tugas Belajar	32	27
	Jumlah Pegawai	**1.177**	**1.215**

h. Jumlah Kunjungan

Jumlah Kunjungan pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johnannes Kupang tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Layanan	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Rawat Inap	10.332	10.857	-5%
Klinik Jiwa	4.453	312	1327%
Klinik Neurologi	6.400	5.384	19%
Klinik Napza (IWPL)	4.341	365	1089%
Klinik Forensik	-	-	-
Klinik Anak dan Remaja	541	432	25%
Klinik Geriatri	-	2	-
Klinik Interna	8.590	9.448	-9%
IGD	15.591	16.144	-3%
Klinik Psikologi	-	-	-
Klinik Gigi dan Mulut	4.191	3.037	38%
Klinik Fisioterapi	6.544	4.721	39%
Klinik VCT	4.036	5.551	-27%
Jumlah Kunjungan	**65.019**	**56.253**	**16%**

i. Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan

Berikut disajikan capaian indikator pelayanan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Indikator Pelayanan Kesehatan	2025	2024	Satuan
BOR	51,7	53,1	%
LOS	6	5	hari
TOI	5	4	hari
BTO	31	46	%/tahun
NDR	71	59	%
GDR	91	80	%
Jml Kunj Rawat Jalan	101.981	99.725	Orang
Jml Kunj Rawat Inap	10.331	10.857	Orang
Jml Kunj IGD	14.391	16.144	Orang

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (PSAP No. 13), dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara PSAP No. 13 dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014, maka yang dipakai dasar penyajian adalah PSAP No. 13.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014 dan Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Nomor 172 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.

2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

3) Laporan Keuangan terdiri dari:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional;
   e) Laporan Arus Kas;
   f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g) Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Periode akuntansi Rumah Sakit adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;
   d) Penerimaan pembiayaan;
   e) Pengeluaran pembiayaan;
   f) Pembiayaan neto; dan
   g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;

b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;

e) Lain-lain; dan

f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a) kas dan setara kas;

b) Investasi jangka pendek;

c) piutang dari kegiatan BLUD;

d) persediaan;

e) investasi jangka panjang;

f) aset tetap;

g) aset lainnya;

h) kewajiban jangka pendek;

i) kewajiban jangka panjang; dan

j) ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO;

b) Beban;

c) Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional;

d) Kegiatan Non Operasional;

e) Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa;

f) Pos Luar Biasa; dan

g) Surplus/Defisit-LO.

3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.
4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan *metode langsung*, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

   Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
   f) Pendapatan BLUD lainnya.

   Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
   a) Pembayaran Pegawai;
   b) Pembayaran Barang;
   c) Pembayaran Bunga; dan
   d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa,

2) Aktivitas Investasi

   Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;

b) Penjualan Aset Lainnya;

c) Penerimaan dari Divestasi; dari

d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;

b) Perolehan Aset Lainnya;

c) Penyertaan Modal;

d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan

e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.
Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan

b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3) Koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.

d) Ekuitas akhir.

h. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

2) Pendapatan yang bersumber dari Kas Daerah melalui penerbitan SP2D atau pendapatan APBD tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA.

3) Pendapatan dari APBD dicatat sebagai penerimaan dalam LP-SAL.

4) Pendapatan-LRA yang bersumber dari Pendapatan BLUD diakui pada saat pengesahan pendapatan yaitu saat terbitnya SP2B oleh PPKD sesuai dengan SP3B dan Pernyataan Tanggung Jawab Pendapatan dan Belanja yang disampaikan oleh Direktur.

5) Seluruh sisa kas dan sisa bank di BLUD diakui sebagai Pendapatan-LRA sepanjang sudah termasuk dalam SP2B dan SP3B.

6) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

7) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

8) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.

9) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

10) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

11) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

12) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

13) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:

    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;

    c) Pendapatan hasil kerja sama;

    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan

    e) Pendapatan BLUD lainnya.

14) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

15) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.

16) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

17) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

18) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:

a) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

b) Jasa giro;

c) pendapatan bunga;

d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/ atau

e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD.

19) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

20) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah BLUD memperoleh pendapatan dari pelayanan masyarakat terlantar yang didanai dari anggaran Perangkat Daerah (PD)

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja, organisasi, dan fungsi.

3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

5) Belanja yang bersumber dari Pendapatan APBD diakui pada saat pencairan SP2D di Kas Daerah sesuai SP2D yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.

6) Khusus pada akhir tahun atau akhir kegiatan dalam hal pengajuan SPM yang tidak diikuti dengan penerbitan SP2D, maka belanja diakui pada saat terbitnya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SPJ Administratif yang disampaikan oleh Direktur dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.

7) Belanja yang bersumber dari Pendapatan BLUD diakui pada saat pengesahan belanja yaitu saat terbitnya SP2B oleh BUD/Kuasa BUD sesuai dengan SP3B dan Pernyataan Tanggung Jawab Pendapatan dan Belanja yang disampaikan oleh Direktur kepada BUD/Kuasa BUD.

i. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

2) Piutang

a) Piutang RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang terdiri dari Piutang Pasien dan Piutang Pasien Program BPJS.

b) Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Kategori	Umur Piutang	Cadangan Penyisihan
Lancar	s.d. 1 tahun	0,5%
Kurang Lancar	di atas 1 s.d. 2 tahun	10%
Diragukan	di atas 2 s.d. 5 tahun	50%
Macet	lebih dari 5 tahun	100%

c) Kualitas piutang retribusi daerah dikelompokkan menjadi 4 (empat) berdasarkan umur jatuh temponya, yaitu:

Kategori	Umur Piutang	Cadangan Penyisihan
Lancar	s.d. 1 bulan	0,5%
Kurang Lancar	di atas 2 s.d. 3 bulan	10%
Diragukan	di atas 3 s.d. 12 bulan	50%
Macet	lebih dari 12 tahun	100%

d) Saldo piutang yang dibuat penyisihan dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah lebih dari 5 tahun.

e) Pengungkapan

(1) Piutang diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum diterima pembayaran dari penyerahan tersebut.

(2) Pengakuan piutang pendapatan terjadi pada akhir periode ketika akan disusun laporan posisi keuangan dan diakui sebesar piutang yang belum dilunasi, atau pada saat surat ketetapan piutang.

(3) Piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.

f) Pengukuran

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi.

g) Penyajian dan Pengungkapan

(1) Piutang disajikan pada kelompok aset lancar dalam laporan posisi keuangan.

(2) Piutang disajikan sebesar jumlah seluruh tagihan.

(3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih ada di BLUD atau sudah diserahkan pengurusannya kepada Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan dilaporkan kepada BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3) Persediaan

a) Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Persediaan diakui pada saat barang diterima atau dihasilkan. Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluwarsa dan rusak. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau FIFO) .

c) Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual. Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, pajak dan biaya lainnya yang secara langsung didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

d) Berikut adalah Persediaan yang ada di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur:

(1) Persediaan Bahan Pakai Habis

(2) Persediaan Bahan/Material

(3) Persediaan Barang Lainnya

4) Aset Tetap dan Penyusutan

a) Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan/operasional dan pelayanan. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

b) Kriteria Pengakuan Aset Tetap:

(1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual dan/atau tidak diberikan kepada masyarakat.

(3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

c) Nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap meliputi:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	
2	**Peralatan dan Mesin, terdiri atas:**	
2.1	Alat-alat Berat	100.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Keamanan	500.000
3	**Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:**	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Bangunan Monumen	20.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:**	
4.1	Jalan dan Jembatan	20.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20.000.000
4.3	Instalasi	10.000.000
4.4	Jaringan	10.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:**	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	500.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	500.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.00.000

d) Aset tetap RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Harga perolehan meliputi harga barang ditambah dengan biaya terkait dengan perolehan barang tersebut.

e) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak.

f) Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus *(straight line method)* dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sedangkan Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

g) Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan dua hari.

h) Daftar jenis aset tetap, masa manfaat dan prosentase penyusutan aset tetap:

No		Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1		**ALAT BESAR**	
	a	Alat Besar Darat	10
	b	Alat Besar Apung	8
	c	Alat Bantu	7
2		**ALAT ANGKUTAN**	
	a	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
	b	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
	c	Alat Angkutan Apung Bermotor	10

No		Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	d	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
	e	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
3		**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**	
	a	Alat Bengkel Bermesin	10
	b	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
	c	Alat Ukur	5
4		**ALAT PERTANIAN**	
		Alat Pengolahan	4
5		**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	
	a	Alat Kantor	5
	b	Alat Rumah Tangga	5
	c	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
6		**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**	
		Alat Studio	5
		Alat Komunikasi	5
		Peralatan Pemancar	10
		Alat Komunikasi Navigasi	15
7		**ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**	
	a	Alat Kedokteran	5
	b	Alat Kesehatan Umum	5
8		**ALAT LABORATORIUM**	
	a	Unit Alat Laboratorium	8
	b	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
	c	Alat Peraga Praktik Sekolah	10
	d	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
	e	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
	f	Radian Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
	g	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
	h	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
	i	Alat Laboratorium Standarisasi Klibrasi & Instrumental	
9		**ALAT PERSENJATAAN**	
	a	Senjata Api	10
	b	Persenjataan Non Api	3
	c	Senjata Sinar	5
	d	Alat Khusus Kepolisian	4
10		**KOMPUTER**	

No		Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	a	Komputer Unit	4
	b	Peralatan Komputer	4
11		**ALAT EKSPLORASI**	
		Alat Eksplorasi Topografi	5
		Alat Eksplorasi Geofisika	10
12		**ALAT PENGEBORAN**	
		Alat Pengeboran Mesin	10
		Alat Pengeboran Non Mesin	10
13		**ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**	
		Peralatan Sumur	10
		Peralatan Produksi	10
		Pengolahan dan Pemurnian	15
14		**ALAT BANTU EKSPLORASI**	
		Alat Bantu Eksplorasi	10
		Alat Bantu Produksi	10
15		**ALAT KESELAMATAN KERJA**	
	a	Alat Deteksi	5
	b	Alat Pelindung	5
	c	Alat SAR	2
	d	Alat Kerja Penerbangan	10
16		**ALAT PERAGA**	
	a	Alat Peragaan Pelatihan dan Percontohan	10
17		**ALAT PERALATAN/PRODUKSI**	
	a	Unit Alat Peralatan/Produksi	8
18		**Rambu-Rambu**	
	a	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
	b	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
	c	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
19		**PERALATAN OLAHRAGA**	
	a	Peralatan Olahraga	3
		GEDUNG DAN BANGUNAN	
20		**BANGUNAN GEDUNG**	
	a	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
	b	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
21		**MONUMEN**	
	a	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50

No		Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
22		**BANGUNAN MENARA**	
	a	Bangunan Menara Perambuan	40
23		**TUGU TITIK KONTROL/PASTI**	
	a	Tugu Tanda Batas	50
		JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	
24		**JALAN DAN JEMBATAN**	
	a	Jalan	10
	b	Jembatan	50
25		**BANGUNAN AIR**	
	a	Bangunan Air Irigasi	50
	b	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
	c	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
	d	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
	e	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
	f	Bangunan Air Bersih/Baku	40
	g	Bangunan Air Kotor	40
26		**INSTALASI**	
	a	Instalasi Air Bersih	30
	b	Instalasi Air Kotor	30
	c	Instalasi Pengelolaan Sampah	10
	d	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
	e	Instalasi Pembangkit Listrik	40
	f	Instalasi Gardu Listrik	40
	g	Instalasi Pertahanan	30
	h	Instalasi Gas	30
	i	Instalasi Pangaman	20
	j	Instalasi Lain	20
27		**JARINGAN**	
	a	Jaringan Air Minum	30
	b	Jaringan Listrik	40
	c	Jaringan Telepon	20
	d	Jaringan Gas	30

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	3			**ASET TETAP**					
1	3	2		**Peralatan dan Mesin**					
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10	0	3	4	5
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8	0	2	3	4
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7	0	2	2	4
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	2	2	4
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	0	1	1	1
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10	0	3	3	5
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	0	1	1	2
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20	0	5	7	10
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10	0	3	3	6
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	1	1	2
1	3	2	11	Alat Ukur	5	0	1	1	2
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4	0	1	1	2
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	0	1	1	2
1	3	2	14	Alat Kantor	5	0	1	1	2
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5	0	1	1	2
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4	0	1	1	2
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	0	1	1	2
1	3	2	18	Alat Studio	5	0	1	1	2
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5	0	1	1	2
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10	0	3	3	5
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5	0	1	1	2
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5	0	1	1	2
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8	0	2	3	4
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	0	3	3	5
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	0	4	5	7
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	0	4	5	7
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	0	3	4	5
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive	10	0	3	4	5

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
				Testing Laboratory (BATAM)					
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	0	2	2	3
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	0	4	5	7
1	3	2	31	Senjata Api	10	0	3	4	5
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3	0	1	1	1
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	0	1	1	2
1	**3**	**3**		**Gedung dan Bangunan**					
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	10	15	25
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	10	15	25
1	3	3	3	Bangunan Menara	40	0	10	15	20
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50	0	10	15	25
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50	0	10	15	25
1	3	3	6	Candi	50	0	10	15	25
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	0	10	15	25
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50	0	10	15	25
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	0	10	15	25
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50	0	10	15	25
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	0	10	15	25
1	**3**	**4**		**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**					
1	3	4	1	Jalan	10	0	2	3	5
1	3	4	2	Jembatan	50	0	10	15	25
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50	0	10	15	25
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50	0	10	15	25
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25	0	4	8	12
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	0	2	3	5
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	0	5	10	15
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40	0	10	15	20
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40	0	10	15	20
1	3	4	10	Bangunan Air	40	0	10	15	20

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	0	5	10	15
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30	0	5	10	15
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	0	2	3	5
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	0	2	3	5
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30	0	5	10	15
1	3	4	18	Instalasi Gas	30	0	5	10	15
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20	0	5	10	10
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30	0	5	10	15
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20	0	10	15	10
1	3	4	23	Jaringan Gas	30	0	5	10	15
1	**3**	**5**		**Aset Tetap Lainnya**					
1	3	5	1	Buku	-	-	-	-	-
1	3	5	2	Terbitan	-	-	-	-	-
1	3	5	3	Barang Perpustakan	-	-	-	-	-
1	3	5	4	Barang Bercorak Kebudayaan	5	-	-	-	-
1	3	5	5	Alat Olahraga Lainnya	5	-	-	-	-
1	3	5	6	Hewan	-	-	-	-	-
1	3	5	8	Aset Renovasi	10	-	-	-	-

No		Uraian	Jenis	% Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku (diluar penyusutan)	Masa Manfaat
		PERALATAN DAN MESIN			
1		**ALAT BESAR**			
	a	Alat Besar Darat	Overhaul	>0% sd 30%	1
				>30% sd 45%	3
				>45% sd 65%	5
	b.	Alat Besar Apung	Overhaul	>0% sd 30%	1
				>30% sd 45%	2
				>45% sd 65%	4
	c.	Alat Bantu	Overhaul	>0% sd 30%	1
				>30% sd 45%	2
				>45% sd 65%	4
2		**ALAT ANGKUTAN**			
	a.	Alat Angkut Darat Bermotor	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	2

No		Uraian	Jenis	% Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku (diluar penyusutan)	Masa Manfaat
				>50% sd 75%	3
				>75% sd 100%	4
	b.	Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% sd 25%	0
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	1
				>75% sd 100%	1
	c.	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	3
				>50% sd 75%	4
				>75% sd 100%	6
	d.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	1
				>75% sd 100%	2
	e.	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% sd 25%	3
				>25% sd 50%	6
				>50% sd 75%	9
				>75% sd 100%	12
3		**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**			
	a	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	2
				>50% sd 75%	3
				>75% sd 100%	4
	b	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% sd 25%	0
				>25% sd 50%	0
				>50% sd 75%	1
				>75% sd 100%	1
	c	Alat Ukur	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	2
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	3
4		**ALAT PERTANIAN**			
	a	Alat Pengolahan	Overhaul	>0% sd 20%	1
				>21% sd 40%	2
				>51% sd 75%	5
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
	a	Alat Kantor	Overhaul	>0% sd 25%	0
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	3
	b	Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% sd 25%	0
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	3

No		Uraian	Jenis	% Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku (diluar penyusutan)	Masa Manfaat
6		**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**			
		Alat Studio	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	2
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	3
		Alat Komunikasi	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	3
		Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	3
				>50% sd 75%	4
				>75% sd 100%	5
7		**ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**			
		Alat Kedokteran	Overhaul	>0% sd 25%	0
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	3
		Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% sd 25%	0
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	3
8		**ALAT LABORATORIUM**			
	a	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	3
				>50% sd 75%	4
				>75% sd 100%	4
	b	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% sd 25%	4
				>25% sd 50%	4
				>50% sd 75%	5
				>75% sd 100%	7
	c	Alat Peraga Praktik Sekolah	Overhaul	>0% sd 25%	3
				>25% sd 50%	3
				>50% sd 75%	3
				>75% sd 100%	2
	d	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	4
				>50% sd 75%	5
				>75% sd 100%	5
	e	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	4
				>50% sd 75%	5

No		Uraian	Jenis	% Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku (diluar penyusutan)	Masa Manfaat
				>75% sd 100%	5
	f	Radition Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	4
				>50% sd 75%	5
				>75% sd 100%	5
	g	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	2
				>50% sd 75%	3
				>75% sd 100%	4
	h	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	>0% sd 25%	3
				>25% sd 50%	5
				>50% sd 75%	7
				>75% sd 100%	8
10		**KOMPUTER**			
	a.	Komputer Unit	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	2
	b	Peralatan Komputer	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	2
11		**ALAT EKSPLORASI**			
	a	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	2
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	3
	b	Alat Eksplorasi GeofjSika	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	4
				>50% sd 75%	6
				>75% sd 100%	7
12		**ALAT PENGEBORAN**			
	a	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	4
				>50% sd 75%	6
				>75% sd 100%	7
	b	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% sd 25%	0
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	1
				>75% sd 100%	2
13		**ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PERMUNIAN**			
	a	Peralatan Sumur	Renovasi	>0% sd 25%	0

No		Uraian	Jenis	% Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku (diluar penyusutan)	Masa Manfaat
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	1
				>75% sd 100%	2
	b	Peralatan Produksi	Renovasi	>0% sd 25%	0
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	1
				>75% sd 100%	2
	c	Pengolahan dan Permunian	Overhaul	>0% sd 25%	3
				>25% sd 50%	5
				>50% sd 75%	7
				>75% sd 100%	8
14		**ALAT BANTU EKSPLORASI**			
	a	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	4
				>50% sd 75%	6
				>75% sd 100%	7
	b	Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	4
				>50% sd 75%	6
				>75% sd 100%	7
15		**ALAT KESELAMATAN KERJA**			
	a	Alat Deteksi	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	2
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	3
	b	Alat Pelindung	Renovasi	>0% sd 25%	0
				>25% sd 50%	0
				>50% sd 75%	1
				>75% sd 100%	2
	c	Alat SAR	Renovasi	>0% sd 25%	0
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	1
				>75% sd 100%	1
	d	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	3
				>50% sd 75%	4
				>75% sd 100%	6
16		**ALAT PERAGA**			
	a	Alat Peragaan Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	4
				>50% sd 75%	5
				>75% sd 100%	5
17		**ALAT PERALATAN/PRODUKSI**			
	a	Alat Peralatan/Produksi	Overhaul	>0% sd 25%	2

No		Uraian	Jenis	% Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Buku (diluar penyusutan)	Masa Manfaat
				>25% sd 50%	3
				>50% sd 75%	4
				>75% sd 100%	4
18		RAMBU-RAMBU			
	a	Rambu-rambu lalu lintas Darat	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	2
				>50% sd 75%	3
				>75% sd 100%	4
	b	Rambu-rambu lalu lintas udara	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	2
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	4
	c	Rambu-Rambu lalu lintas laut	Overhaul	>0% sd 25%	2
				>25% sd 50%	5
				>50% sd 75%	7
				>75% sd 100%	9
19		PERALATAN OLAHRAGA			
	a	Peralatan Olahraga	Renovasi	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	3
		GEDUNG DAN BANGUNAN			
20		BANGUNAN GEDUNG			
	a	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% sd 25%	5
				>25% sd 50%	10
				>50% sd 75%	15
				>75% sd 100%	50
	b	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% sd 30%	5
				>30% sd 45%	10
				>45% sd 65%	15
21		MONUMEN			
	a	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% sd 30%	5
				>30% sd 45%	10
				>45% sd 65%	15
22		BANGUNAN MENARA			
	a	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% sd 30%	5
				>30% sd 45%	10
				>45% sd 65%	15
23		TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
	a	Tugu Tanda Batas	Renovasi	>0% sd 30%	5
				>30% sd 45%	10
				>45% sd 65%	15

No		Uraian	Jenis	% Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Buku (diluar penyusutan)	Masa Manfaat
		JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
24		**JALAN DAN JEMBATAN**			
	a	Jalan	Renovasi	>0% sd 30%	2
				>30% sd 60%	5
				>60% sd 100%	10
	b	Jembatan	Renovasi	>0% sd 30%	2
				>30% sd 45%	10
				>45% sd 65%	15
25		**BANGUNAN AIR**			
	a	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% sd 5%	2
				>5% sd 10%	5
				>10% sd 20%	10
	b	Bangunan Air Pasang Surut	Renovasi	>0% sd 5%	2
				>5% sd 10%	5
				>10% sd 20%	10
	c	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% sd 5%	1
				>5% sd 10%	3
				>10% sd 20%	5
	d	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% sd 5%	1
				>5% sd 10%	2
				>10% sd 20%	3
	f	Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	>0% sd 30%	5
				>30% sd 45%	10
				>45% sd 65%	15
	g	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% sd 30%	5
				>30% sd 45%	10
				>45% sd 65%	15
26		**INSTALASI**			
	a	Instalasi Air Bersih	Renovasi	>0% sd 30%	2
				>30% sd 45%	7
				>45% sd 65%	10
	b	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% sd 30%	2
				>30% sd 45%	7
				>45% sd 65%	10
	c	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% sd 30%	1
				>30% sd 45%	3
				>45% sd 65%	5
	d	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% sd 30%	1
				>30% sd 45%	3
				>45% sd 65%	5
	e	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% sd 30%	5
				>30% sd 45%	10
				>45% sd 65%	15
	f	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% sd 30%	5

No		Uraian	Jenis	% Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku (diluar penyusutan)	Masa Manfaat
				>30% sd 45%	10
				>45% sd 65%	15
		Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% sd 30%	1
				>30% sd 45%	3
				>45% sd 65%	5
		Instalasi Gas	Renovasi	>0% sd 30%	5
				>30% sd 45%	10
				>45% sd 65%	15
		Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% sd 30%	1
				>30% sd 45%	1
				>45% sd 65%	3
		Instalasi Lain	Renovasi	>0% sd 30%	1
				>30% sd 45%	1
				>45% sd 65%	3
27		**JARINGAN**			
	a	Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% sd 30%	2
				>30% sd 45%	7
				>45% sd 65%	10
	b	Jaringan Listrik	Overhaul	>0% sd 30%	5
				>30% sd 45%	10
				>45% sd 65%	15
	c	Jaringan Telepon	Overhaul	>0% sd 30%	2
				>30% sd 45%	5
				>45% sd 65%	10
	d	Jaringan Gas	Overhaul	>0% sd 30%	2
				>30% sd 45%	7
				>45% sd 65%	10
28		**ALAT MUSIK MODERN/BAND**			
	a	Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% sd 25%	1
				>25% sd 50%	1
				>50% sd 75%	2
				>75% sd 100%	2
29		**ASET TETAP DALAM RENOVASI**			
	a	Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% sd 100%	2
	b	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	>0% sd 30%	5
				>30% sd 45%	10
				>45% sd 65%	15
	c	Jalan Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% sd 30%	5

5) Aset Tidak Berwujud.

a) Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik secara nyata.

b) Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.

(2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, sedangkan metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat aset tak berwujud selama 5 (lima) tahun.

6) Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang

a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.

b) Dalam entitas rumah sakit, Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan dan entitas pemerintah.

c) Kewajiban dikelompokkan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok Kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

7) Ekuitas

a) Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban atau utang;

b) Ekuitas rumah sakit meliputi:

(1) Ekuitas Awal

Merupakan hak residual awal rumah sakit yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali rumah sakit ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

(2) Koreksi Saldo Awal

Merupakan koreksi atas ekuitas/saldo awal periode sebelumnya.

(3) Surplus & Defisit Tahun Berjalan

Berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

(4) Ekuitas Donasi

Merupakan sumber daya yang diperoleh dari pemda namun tidak melalui DPA/RBA rumah sakit.

j. Pos-pos Laporan Operasional

1) Pendapatan

a) Klasifikasi

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

(1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

(a) Pendapatan usaha rawat jalan.

(b) Pendapatan usaha rawat darurat.

(c) Pendapatan usaha rawat inap.

(2) Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLUD rumah sakit untuk menyerahkan barang/jasa.

(3) Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA BLUD rumah sakit untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi BLUD rumah sakit.

(4) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD rumah sakit.

(5) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

b) Pengakuan

(1) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

a. Pendapatan dari alokasi APBD;

b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;

d. Pendapatan hasil kerja sama;

e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan

f. Pendapatan BLUD lainnya.

(2) Pendapatan yang bersumber dari Kas Daerah diakui pada saat SP2D dicairkan dari Rekening Kasda.

(3) Pendapatan yang bersumber dari BLUD diakui pada saat hak tagih sudah terjadi yaitu pada saat RSUD sudah memberikan barang/jasa kepada pihak ketiga.

(4) Dalam hal RSUD sudah memberikan barang/jasa kepada pihak ketiga sedangkan nominal pendapatan belum definitif sehubungan masih memerlukan waktu verifikasi pihak ketiga/independen, maka pendapatan dicatat dengan tarif sementara yang paling relevan untuk selanjutnya dilakukan koreksi pada saat nominal pendapatan diketahui secara definitif.

(5) Batas waktu penyesuaian nominal pendapatan dilakukan sampai dengan saat penerbitan Laporan Keuangan yaitu pada saat penyelesaian audit oleh pemeriksa eksternal dengan melakukan koreksi terhadap nilai pendapatan dan piutang.

(6) Koreksi yang terjadi setelah batas waktu penerbitan Laporan Keuangan dicatat dengan melakukan koreksi atas akun Ekuitas dan akun Piutang.

(7) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(8) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(9) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

c) Pengukuran

(1) Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

(2) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS dan SPJ untuk yang bukan LS.

(3) Pendapatan Hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima.

(4) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan azas bruto.

d) Pengungkapan

(1) Pendapatan disajikan terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.

(2) Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2) Beban

a) Klasifikasi

Beban rumah sakit diklasifikasikan ke dalam:

(1) Beban Pegawai

Merupakan beban yang terkait kompensasi kepada pegawai, baik kepada pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun yang berstatus Non-ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses bisnis Entitas.

(2) Beban Persediaan

Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

(3) Beban Jasa

Merupakan beban yang terkait dengan pemanfaatan jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

(4) Beban Pemeliharaan

Merupakan beban yang terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.

(5) Beban Langganan Daya/Jasa

Merupakan beban yang terdiri dari beban penggunaan listrik, air, telepon, internet, serta jasa-jasa yang dimanfaatkan secara teratur dan berulang oleh Entitas.

(6) Beban Perjalanan Dinas

Merupakan beban yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.

(7) Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain

Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.

(8) Beban Penyusutan Aset

Merupakan beban yang timbul akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

(9) Beban Penyisihan Piutang

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait potensi ketertagihannya.

(10) Beban Operasional Lainnya

Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kadaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

(11) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar

Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus,

(12) Kerugian Penurunan Nilai Aset

Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

(13) Kerugian Lainnya

Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

b) Pengakuan

(1) Beban pada BLUD diakui pada saat:

(a) timbulnya kewajiban;

(b) terjadinya konsumsi aset; dan/atau

(c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

(2) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

(3) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.

(4) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

c) Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

(1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

(2) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

(3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

(4) Jumlah kerugian yang terjadi.

d) Pengungkapan

(1) Beban disajikan terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis dan rincian beban.

(2) Jenis dan rincian beban diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

k. Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang yang merupakan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah.

RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang terdaftar sebagai wajib pungut perpajakan di KPP Pratama Kupang dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 00.299.191.7-922.000 atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Provinsi Kupang dengan alamat Jl. Moch Hatta No. 19 Fontein Kota Raja.

4. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1 Penjelasan Pos-pos Pendapatan

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp159.561.471.660,48 atau 89,51% dari anggaran sebesar Rp178.257.252.842,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp259.919.349.997,59, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	135.818.996.000,00	126.884.299.047,00	93,42%	115.016.368.541,44
2)	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas	-	-	-	-
3)	Pendapatan Hasil Kerjasama	1.413.667.503,00	1.555.054.160,00	110,00%	1.131.970.999,00
4)	Pendapatan Hibah	-	76.672.085	-	-
5)	Pendapatan APBD	39.107.252.842,00	30.194.424.132,00	77,21%	141.761.254.650,00
6)	Pendapatan Lainnya	1.917.336.497,00	851.022.236,48	44,39%	2.009.755.807,15
Jumlah		**178.257.252.842,00**	**159.561.471.660,48**	**89,51%**	**259.919.349.997,59**

Rincian Pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp126.884.299.047,00 atau 93,42% dari anggaran sebesar Rp135.818.996.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.016.368.541,44 dengan rincian sebagai

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Rawat Jalan Umum	401.500.000,00	625.936.628,00	155,90%	346.802.000,00
2	Rawat Darurat	810.047.903,00	452.039.644,00	55,80%	483.176.687,00
3	Rawat Inap Umum	1.039.637.817,00	513.022.143,00	49,35%	747.801.847,44
4	Perawatan Intensif (ICU/NICU/PICU)	41.703.200,00	76.451.281,00	183,32%	40.161.000,00
5	Rawat Inap Eksekutif	262.760.312,00	777.764.161,00	296,00%	124.681.078,00
6	Pendapatan Tindakan Medik	888.420.530,00	709.266.673,00	79,83%	290.819.572,00
7	Persalinan	45.323.300,00	5.212.000,00	11,50%	49.061.000,00
8	Pelayanan Medik Gigi & Mulut	238.672.930,00	65.965.000,00	27,64%	79.700.000,00
9	Fisiotherapi	10.103.500,00	4.586.000,00	45,39%	6.918.000,00
10	Pelayanan Penunjang Diagnostik	2.613.674.974,00	1.792.887.884,00	68,60%	1.440.044.316,00
11	Jasa Konsultasi Medika	11.330.000,00	5.950.000,00	52,52%	6.350.000,00
12	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan	1.134.752.600,00	1.652.110.440,00	145,59%	224.198.000,00
13	Medico legal	199.386.000,00	255.095.000,00	127,94%	122.983.479,00
14	Farmasi/Obat-obatan	412.811.666,00	255.453.397,00	61,88%	310.120.466,00
15	Penerimaan Dari Hasil Klaim Inhelt Asuransi	500.000.000,00	84.823.762,00	16,96%	388.974.372,00
16	Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan	200.000.000,00	5.811.900,00	2,91%	452.366.470,00
17	IOM Rudenim Migrasi Kupang	-	-	-	-
18	Asuransi Jasa Rahardja Cabang Kupang	2.000.000.000,00	970.962.561,00	48,55%	809.782.246,00
19	Jaminan Kesehatan Nasional	118.185.381.868,00	117.572.651.291,00	99,48%	108.790.609.732,00
20	Dinas Kesehatan Prov. NTT (Dana Pengaman)	5.000.000.000,00	906.722.410,00	18,13%	-
21	Dinas Kesehatan Kab. Kupang (Jamkesda)	1.000.000.000,00	86.068.872,00	8,61%	252.976.276,00
22	Dinas Kesehatan Kab. TTS (Jamkesda)	800.000.000,00	-	-	-
23	Dinas Kesehatan Kab. Malaka	-	-	-	-
24	Pelayanan Pemulasan/Perawatan Jenazah	9.787.800,00	11.900.000,00	121,58%	8.408.000,00
25	Pelayanan Ambulance/Mobil Jenasah	13.701.600,00	53.618.000,00	391,33%	40.434.000,00
Jumlah		**135.818.996.000,00**	**126.884.299.047,00**	**93,42%**	**115.016.368.541,44**

2) Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024.

3) Pendapatan Hasil Kerjasama

Jumlah realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.555.054.160,00 atau 110,00% dari anggaran sebesar Rp1.413.667.503,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.131.970.999,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana	329.931.586,00	694.670.160,00	210,55%	68.510.500,00
2	Apotik Kimia Farma (Bagi Hasil)	-	-	-	31.491.000,00
3	Sewa Ruangan (Jasa Apotik Pelengkap)	119.957.547,00	-	-	55.000.000,00
4	Sewa Lahan Parkir	104.922.287,00	89.482.000,00	85,28%	80.014.000,00
5	Sewa Ruangan (Kantin)	-	110.000.000,00	-	68.500.000,00
6	Sewa Ruangan (Fotocopy)	-	-	-	13.000.000,00
7	Sewa Ruangan (Kinder)	-	-	-	2.850.000,00
8	Penyewaan Sarana dan Prasarana/Aula	6.215.000,00	7.000.000,00	112,63%	37.524.000,00
9	Jasa Pelayanan Diklat	852.641.083,00	653.902.000,00	76,69%	775.081.499,00
Jumlah		**1.413.667.503,00**	**1.555.054.160,00**	**110,00%**	**1.131.970.999,00**

4) Pendapatan Hibah

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.672.085,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Hibah Terikat	-	-	-	-
2	Hibah Tidak Terikat	-	76.672.085,00	-	-
Jumlah		-	**76.672.085,00**	-	-

5) Pendapatan APBD

Jumlah realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30.194.424.132,00 atau 77,21% dari anggaran sebesar Rp39.107.252.842,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp141.761.254.650,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Pendapatan APBD				
1	Belanja Pegawai	-	-	-	92.575.497.155,00
2	Belanja Barang dan Jasa	30.324.808.624,00	24.268.703.496,00	80,03%	20.581.276.962,00
3	Belanja Modal	8.782.444.218,00	5.925.720.636,00	67,47%	28.604.480.533,00
Jumlah		**39.107.252.842,00**	**30.194.424.132,00**	77,21%	**141.761.254.650,00**

6) Pendapatan Lainnya

Jumlah realisasi Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp851.022.236,48 atau 44,39% dari anggaran sebesar Rp1.917.336.497,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.009.755.807,15, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	**Pendapatan Usaha Lainnya**	**417.336.497,00**	**535.266.573,00**	**128,26%**	**645.506.992,46**
	- Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah:	417.336.497,00	535.266.573,00	128,26%	645.506.992,46
2	**Pendapatan Non Usaha**	**1.500.000.000,00**	**315.755.663,48**	**21,05%**	**1.364.248.814,69**
	- Jasa Giro	400.000.000,00	315.755.663,48	78,94%	162.164.716,10
	- Lainnya (Deposito)	1.100.000.000,00	-	-	1.202.084.098,59
Jumlah		**1.917.336.497,00**	**851.022.236,48**	**44,39%**	**2.009.755.807,15**

4.2 Penjelasan Pos-pos Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.784.261.004,20 atau 75,69% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesarRp97.276.125.552,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
A.	**Sumber Dana APBD**	-	-	-	**92.575.497.155,00**
1)	**Gaji dan Tunjangan ASN**	-	-	-	**74.304.969.352,00**
	- Gaji Pokok PNS	-	-	-	55.319.390.279,00
	- Tunjangan Keluarga PNS	-	-	-	4.191.302.716,00
	- Tunjangan Jabatan PNS	-	-	-	143.740.000,00
	- Tunjangan Fungsional PNS	-	-	-	6.334.594.940,00
	- Tunjangan Fungsional Umum PNS	-	-	-	496.165.000,00
	- Tunjangan Beras PNS	-	-	-	4.225.176.820,00
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	-	-	-	157.288.040,00
	- Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	686.251,00
	- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	-	-	-	2.982.025.274,00
	- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-	-	-	113.649.533,00
	- Iuran Jaminan Kematian PNS	-	-	-	340.950.499,00
2)	**Tambahan Penghasilan Pegawai**	-	-	-	**18.270.527.803,00**
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	-	-	8.206.258.493,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	-	-	459.674.671,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	-	-	-	371.110.671,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	-	-	-	9.233.483.968,00

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
B.	**Sumber Dana BLUD**	**5.000.000.000,00**	**3.784.261.004,20**	75,69%	**4.700.628.397,00**
	- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.121.760.000,00	3.229.895.369,00	78,36%	4.049.795.899,00
	- Insentif Tenaga Rumah Sakit	486.000.000,00	435.750.000,00	89,66%	488.000.000,00
	- Honorarium Dewan Pengawas	129.775.080,00	117.515.635,20	90,55%	102.158.098,00
	- Honor dll	262.464.920,00	1.100.000,00	0,42%	60.674.400,00
	Jumlah	**5.000.000.000,00**	**3.784.261.004,20**	75,69%	**97.276.125.552,00**

2) Belanja Barang dan Jasa

Total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp147.120.798.290,11 atau 85,53% dari anggaran Rp172.008.689.074,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp141.424.602.796,43, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
A.	**Sumber Dana APBD**	**30.324.808.624,00**	**24.098.096.046,00**	79,47%	**20.376.655.846,00**
1	**Belanja Barang**	**17.313.691.679,00**	**15.096.758.635,00**	87,20%	**12.263.659.485,00**
	- Belanja Obat-Obatan	6.049.981.824,00	4.554.182.230,00	75,28%	3.479.981.546,00
	- Belanja Obat-Obatan Lainnya	9.229.524.987,00	8.523.827.514,00	92,35%	7.299.862.844,00
	- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.999.993.959,00	1.987.089.704,00	99,35%	1.411.026.467,00
	- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	3.794.500,00
	- Belanja Bahan Cetak	29.135.609,00	26.659.187,00	91,50%	18.407.228,00
	- Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-	8.924.400,00
	- Belanja Alat Listrik	-	-	-	36.662.500,00
	- Belanja Benda Pos	5.055.300,00	5.000.000,00	98,91%	5.000.000,00
2	**Belanja Jasa**	**12.886.453.945,00**	**8.967.332.359,00**	69,59%	**7.997.322.621,00**
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.872.000.000,00	1.252.800.000,00	66,92%	2.481.600.000,00
	- Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	-	-	-	3.780.000,00
	- Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan diluar Cakupan Layanan BPJS	3.000.000.000,00	906.722.410,00	30,22%	-
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	1.840.000,00	76,67%	1.980.000,00
	- Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-	40.560.000,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	74.880.000,00	50.112.000,00	66,92%	99.264.000,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.492.800,00	3.006.720,00	66,92%	5.955.840,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.616.000,00	3.758.400,00	66,92%	7.444.800,00
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	90.100.000,00	75.458.494,00	83,75%	71.155.688,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-	-	81.000.000,00
	- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.749.600.000,00	867.235.706,00	49,57%	977.799.893,00
	- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.388.307.000,00	1.117.750.339,00	80,51%	125.500.000,00
	- Belanja Tagihan Telepon	205.200.000,00	194.790.145,00	94,93%	137.600.000,00
	- Belanja Tagihan Air	1.257.648.000,00	1.257.648.000,00	100,00%	978.468.000,00
	- Belanja Tagihan Listrik	3.236.210.145,00	3.236.210.145,00	100,00%	2.985.214.400,00
3	**Belanja Perjalanan Dinas**	**124.663.000,00**	**34.005.052,00**	27,28%	**104.173.740,00**
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	-	-	10.000.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	-	-	-	94.173.740,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.663.000,00	34.005.052,00	28,18%	-
4	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	-	-		11.500.000,00
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	11.500.000,00
B.	**Sumber Dana BLUD**	**141.683.880.450,00**	**123.022.702.244,11**	86,83%	**121.047.946.950,43**
1	**Belanja Barang**	**76.879.671.234,00**	**62.224.636.010,24**	80,94%	**56.546.985.339,75**
	- Belanja Obat-Obatan	26.595.669.770,00	22.200.453.794,84	83,47%	18.374.849.826,98
	- Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Ruangan	6.231.726.122,00	5.921.671.908,97	95,02%	6.622.702.642,83
	- Belanja Bahan Medis Habis Pakai Ruangan	3.890.217.201,00	3.659.882.921,50	94,08%	4.073.073.195,62
	- Belanja Bahan HD	8.097.036.985,00	6.261.836.165,00	77,33%	5.196.067.583,23
	- Belanja Bahan dan Alat Laboratorium	6.419.625.018,00	5.508.442.372,00	85,81%	4.851.117.107,97
	- Belanja Bahan dan Alat Radiologi	422.571.459,00	352.578.959,00	83,44%	1.417.930.037,00

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	- Belanja Bahan CSSD	2.980.013.194,00	2.130.699.782,00	71,50%	1.721.417.673,51
	- Belanja Penggantian Pengelolaan Darah	7.621.739.000,00	6.618.322.682,00	86,83%	4.048.160.000,00
	- Belanja Gas Medis	3.865.283.450,00	2.578.540.223,45	66,71%	2.104.949.726,95
	- Belanja Makanan dan Minuman Pasien	3.376.128.250,00	2.367.955.976,49	70,14%	3.069.653.374,90
	- Belanja Perlengkapan Rumah Sakit	250.000.000,00	195.712.963,00	78,29%	234.652.775,00
	- Belanja Linen	300.000.000,00	199.947.028,00	66,65%	234.922.165,59
	- Belanja Bahan dan Alat Dapur/Pentry	50.000.000,00	6.399.000,00	12,80%	-
	- Belanja Cetakan Rumah Sakit	450.000.000,00	531.182.581,99	118,04%	729.575.424,50
	- Belanja Penggandaan dan Foto Copy dan Jilid	240.000.000,00	186.231.900,00	77,60%	158.939.000,00
	- Belanja Alat Tulis Kantor	1.251.681.913,00	773.568.686,00	61,80%	927.183.402,00
	- Belanja Makan Minum Rapat/Lembur/Kegiatan	300.000.000,00	295.396.433,00	98,47%	507.949.434,00
	- Belanja Makan Minum Tamu	70.000.000,00	63.182.422,00	90,26%	14.050.337,68
	- Belanja Sanitasi	25.000.000,00	10.795.000,00	43,18%	36.448.000,00
	- Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan	1.375.078.872,00	1.382.638.953,00	100,55%	1.326.404.658,00
	- Belanja Bahan Bakar/Utang BBM dr. Ahli	350.000.000,00	285.000.000,00	81,43%	496.450.000,00
	- Belanja Bahan Gas Untuk Dapur	171.900.000,00	188.011.800,00	109,37%	212.552.517,00
	- Belanja Bahan Persediaan Alat Listrik/Elektronik	111.000.000,00	118.654.750,00	106,90%	93.678.457,00
	- Belanja Persediaan Jaringan Air Bersih	60.000.000,00	41.343.000,00	68,91%	24.988.500,00
	- Belanja Alat Pendukung Kerja IPRS	20.000.000,00	-	-	32.326.500,00
	- Belanja Benda Pos	25.000.000,00	27.500.000,00	110,00%	20.200.000,00
	- Belanja Pengisian Tabung Tabung Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	-	-	-
	- Belanja Souvenir/Cendramata	25.000.000,00	7.890.000,00	31,56%	16.743.000,00
	- Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai Cathlab	2.300.000.000,00	310.796.708,00	13,51%	-
2	**Belanja Jasa**	**60.236.344.216,00**	**56.889.162.332,31**	**94,44%**	**58.771.509.791,00**
	- Belanja Jasa Pelayanan	49.108.533.723,00	48.950.547.208,80	99,68%	50.773.010.349,00
	- Belanja Paket/Pengiriman	10.489.000;00	965.899,00	9,21%	1.751.500,00
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	300.000.000,00	199.800.000,00	66,60%	659.746.672,00
	- Belanja Jasa Pengolahan Sampah		-	-	26.100.000,00
	- Belanja Pendidikan dan Pelatihan	250.000.000,00	118.323.051,00	47,33%	686.868.662,00
	- Belanja Jasa Pemeriksaan/Rujukan Partial/Mutu Lab Patologi Klinik, Anatomi, (PME)	157.200.000,00	97.906.029,00	62,28%	136.455.339,00
	- Belanja Sewa	10.000.000,00	5.750.000,00	57,50%	1.610.000,00
	- Belanja Jasa Kebersihan	2.127.840.000,00	2.114.200.000,00	99,36%	1.943.700.000,00
	- Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator/Tenaga Rohaniawan/Konsultan Audit Lap.Keuangan	400.000.000,00	217.810.000,00	54,45%	279.367.295,00
	- Belanja Penataan Taman/Dekorasi Ruangan	17.000.000,00	16.320.000,00	96,00%	7.025.000,00
	- Belanja Jasa Listrik/Air/Telp Internet	2.433.100.165,00	2.102.914.271,50	86,43%	3.200.841.045,00
	- Belanja Jasa Sampah	402.099.984,00	396.000.021,00	98,48%	-
	- Belanja Pameran/Peringatan HUT RI	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	-
	- Belanja Jasa Pengamanan/Security	842.244.696,00	793.449.791,00	94,21%	737.488.951,00
	- Belanja Penelitian Kesehatan di Rumah Sakit	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	-
	- Belanja Iuran Persi	2.000.000,00	-	-	500.000,00
	- Belanja Jasa Instruktur Senam	5.000.000,00	-	-	2.000.000,00
	- Belanja Jasa Sosial	20.000.000,00	-	-	1.602.100,00
	- Belanja Jasa Pengemudi	119.373.264,00	108.285.946,00	90,71%	115.236.000,00
	- Belanja Lain-lain	1.018.414.811,00	8.249.010,01	0,81%	1.347.398,00
	- Belanja Jasa Pencucian Linen	38.016.000,00	38.016.000,00	100,00%	-
	- Belanja Promosi	45.500.000,00	24.687.500,00	54,26%	68.999.000,00
	- Biaya Pendampingan Konsultan Hukum	55.080.000,00	59.400.000,00	107,84%	-
	- Premi Asuransi	2.754.452.573,00	1.523.497.605,00	55,31%	127.860.480,00
	- Belanja Jasa Angkut	65.000.000,00	63.040.000,00	96,98%	-
	- Belanja Ekstensifikasi Pelayanan	5.000.000,00	-	-	-

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
3	**Belanja Pemeliharaan**	**4.237.865.000,00**	**3.585.245.891,56**	**84,60%**	**4.971.492.450,68**
	- Belanja Kalibrasi Alat Kesehatan	287.865.000,00	250.973.829,00	87,18%	326.037.100,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan	1.900.000.000,00	1.294.172.662,04	68,11%	2.807.806.313,68
	- Belanja Pemeliharaan Alat Transportasi	150.000.000,00	148.819.955,68	99,21%	121.061.317,00
	- Belanja Pemeliharaan Teknologi Infomasi	100.000.000,00	2.150.000,00	2,15%	21.461.500,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Rumah Sakit	750.000.000,00	1.030.568.158,00	137,41%	416.076.687,00
	- Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung	1.000.000.000,00	858.561.286,84	85,86%	1.262.065.533,00
	- Belanja Pemeliharaan Instalasi / Jaringan / Air Limbah HD	50.000.000,00	-	-	16.984.000,00
4	**Belanja Perjalanan Dinas**	**330.000.000,00**	**323.658.010,00**	**98,08%**	**757.959.369,00**
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	170.000.000,00	140.144.300,00	82,44%	80.505.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	160.000.000,00	183.513.710,00	114,70%	677.454.369,00
	Jumlah	**172.008.689.074,00**	**147.120.798.290,11**	**85,53%**	**141.424.602.796,43**

3) Bunga
Tidak terdapat realisasi Bunga pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

4) Belanja Lain-lain
Tidak terdapat realisasi Belanja Lain-lain Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024.

4.3 Penjelasan Pos-pos Belanja Modal
Total realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.582.184.173,46 atau 54,46% dari anggaran sebesar Rp19.430.554.218,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.411.468.979,55, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.309.044.218,00	9.407.883.813,46	65,75%	33.762.273.637,55
3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.121.510.000,00	1.174.300.360,00	22,93%	4.649.195.342,00
4)	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6)	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	**19.430.554.218,00**	**10.582.184.173,46**	**54,46%**	**38.411.468.979,55**

Rincian Belanja Modal menurut sumber dana adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Sumber Dana APBD	8.782.444.218,00	5.925.720.636,00	67,47%	28.604.480.533
2	Sumber Dana BLUD	10.648.110.000,00	4.656.463.537,46	43,73%	9.806.988.446,55
	Jumlah	**19.430.554.218,00**	**10.582.184.173,46**	**54,46%**	**38.411.468.979,55**

Rincian belanja modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah
Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.407.883.813,46 atau 65,75% dari anggaran Rp14.309.044.218,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp33.762.273.637,55 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
A	**Sumber Dana APBD**	**6.309.044.218,00**	**5.387.132.776,00**	**85,39%**	**27.905.230.533,00**
1	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	391.950.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Komputer				
	- Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	47.175.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Mebeuler				
	- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	-	-	7.200.000,00
	- Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	30.106.000,00	28.985.000,00	96,28%	2.400.000,00
	- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	31.442.000,00	28.380.000,00	90,26%	2.625.000,00
	- Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-	-	3.600.000,00
	- Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	-	-	-	3.500.000,00

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran				
	- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.898.438.090,00	1.669.038.494,00	87,92%	16.056.897.972,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.036.500.000,00	1.027.760.000,00	99,16%	5.732.110.643,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.962.076.128,00	2.353.947.282,00	79,47%	5.607.544.418,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	350.482.000,00	279.022.000,00	79,61%	-
5	Belanja Modal Kesehatan Lainnya				
	- Belanja Modal Alat Reproduksi	-	-	-	8.325.000,00
	- Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	41.902.500,00
B	**Sumber Dana BLUD**	**8.000.000.000,00**	**4.020.751.037,46**	**50,26%**	**5.857.043.104,55**
1	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				
	- Pengeluaran Komputer/Printer/SIM RS	1.000.000.000,00	878.807.645,00	87,88%	809.644.500,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran				
	- Belanja Modal Alat Kedokteran/Kesehatan	2.975.610.000,00	658.455.794,46	22,13%	3.852.585.780,55
3	Pengeluaran Alat Perlengkapan RS				
	- Pengeluaran Alat Perlengkapan RS	4.000.000.000,00	2.459.097.598,00	61,48%	1.194.812.824,00
4	Belanja Modal Kendaraan Dinas	24.390.000,00	24.390.000,00	100,00%	-
	Jumlah	**14.309.044.218,00**	**9.407.883.813,46**	**65,75%**	**33.762.273.637,55**

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.174.300.360,00 atau 22,93% dari anggaran Rp5.121.510.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.649.195.342,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
A	**Sumber Dana APBD**	**2.473.400.000,00**	**538.587.860,00**	**21,78%**	**699.250.000**
1	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.000.000.000,00	139.958.000,00	7,00%	699.250.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Renovasi Gedung	473.400.000,00	398.629.860	84,21%	-
B	**Sumber Dana BLUD**	**2.648.110.000,00**	**635.712.500,00**	**24,01%**	**3.949.945.342,00**
1	Belanja Gedung dan Bangunan	2.648.110.000,00	635.712.500,00	24,01%	3.949.945.342,00
	Jumlah	**5.121.510.000,00**	**1.174.300.360,00**	**22,93%**	**4.649.195.342,00**

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024.

6) Belanja Modal Aset Lainnya

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Lainnya untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024.

5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.163.575.639,20 dan

5.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tidak terdapat Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3 SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan

Jumlah Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.925.771.807,29 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.192.847.330,39.

No	Keterangan	2025	2024
1)	Realisasi Pendapatan-LRA	159.561.471.660,48	259.919.349.997,59
2)	Realisasi Belanja	(161.487.243.467,77)	(277.112.197.327,98)
	Jumlah	**(1.925.771.807,29)**	**(17.192.847.330,39)**

5.4 Setoran ke Kas Daerah

Jumlah Setoran ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp170.607.450,00 dan Rp204.621.116,00.

5.5 Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.946.395.881,16 dan Rp0,00.

5.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.013.592.263,07 dan Rp17.163.575.639,20.

6. Penjelasan Pos-pos Neraca

6.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan APBD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	**2025**	**2024**
- Penerimaan APBD	-	-
- Beban Sumber Dana APBD	-	-
Sisa Saldo	-	-
- Disetor Ke Kas Daerah Prov. NTT	-	-
Jumlah	-	-

6.2 Kas pada BLUD

Kas pada BLUD terdiri dari saldo kas pada bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD. Jumlah Kas pada BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp17.013.592.263,07 dan Rp17.163.575.639,20 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	**2024**
1) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD		
- PT Bank NTT KCU Kupang, No.Rek. 00101.03.007491-1	57.009.532,47	1.575.408.122,77
- PT Bank Mandiri, No. Rek. 161-00-8333999-9	13.195.538.177,64	14.881.987.825,08
- PT Bank Mandiri Taspen, No. Rek. 1214443915187	272.783.890,81	266.372.376,89
- PT Bank BRI, No. Rek. 217601000442302	267.734.507,00	265.456.540,00
- PT. Bank BNI No. Rek. 1933105698	5.927.154,00	-
- *Cash in Transit*	-	18.326.961,00
Jumlah	**13.798.993.261,92**	**17.007.551.825,74**
2) Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD		
- PT Bank NTT KCU Kupang, No.Rek. 00101.03.007490-9	4.162.266.285,24	1.244.767.076,44
- Kas di Bendahara Pengeluaran	74.922.882,91	23.066.591,02
- Cek Beredar	(1.022.590.167,00)	(1.111.809.854,00)
Jumlah	**3.214.599.001,15**	**156.023.813,46**
Jumlah Kas di BLUD	**17.013.592.263,07**	**17.163.575.639,20**

Cek Beredar sebesar Rp1.022.590.167,00 terdiri dari 133 transaksi yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2025 akan tetapi belum dicairkan oleh rekanan.

6.3 Piutang Operasional BLUD

Piutang Operasional BLUD merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Jumlah Piutang Operasional BLUD neto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.868.928.319,22 dan sebesar Rp830.385.512,31 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	**2024**
1) Piutang Jasa Raharja	198.384.871,00	56.262.019,00
2) Piutang IOM	1.631.024,00	1.631.024,00
3) Piutang In-Health	21.122.494,00	33.014.910,00
4) Piutang JKN	12.443.212.480,00	748.257.725,00
5) Piutang Obat Kronis	1.174.529.399,00	798.688.414,00
6) Piutang Obat Kemoterapi	1.690.237.233,00	705.783.979,00
7) Piutang Gigi Palsu	52.800.000,00	52.800.000,00
8) Piutang CAPD	104.500.000,00	-
9) Piutang Covid-19	15.742.000,00	-
10) Piutang Jamkesda	-	594.539.904,00
11) Piutang Dana Pengaman	527.759.464,00	119.012.178,00
12) Piutang Jamkesda Kab. Kupang	35.874.757,00	252.243.109,00
13) Piutang Jamkesda Kab. TTS*	252.243.109,00	245.690,00
14) Piutang Kab. Malaka	52.824.699,00	57.742.425,00
15) Parkir	18.004,00	15.742.000,00
16) BPJS Tenaga Kerja	225.727.263,00	-
17) Pasien Umum	-	7.502.000,00
18) Kantin	10.500.000,00	32.500.000,00
19) RS Bhayangkara	30.033.500,00	12.188.500,00
20) Rumah Sakit Siloam	4.539.000,00	16.552.000,00
21) Rumah Sakit SK Lerik	58.146.000,00	36.546.000,00
22) RSUD Gabriel Manek Atambua	40.845.000,00	-
24) RSUD SoE	26.531.000,00	1.660.000,00
25) RS Boromeus	79.690.800,00	51.300.000,00
26) RS Dedari	6.225.000,00	6.225.000,00
27) Fotokopi	-	1.000.000,00
28) Imunohistokimia	25.740.000,00	15.210.000,00
29) RSUP BEN MBOI	31.833.000,00	114.699.000,00
30) RS LEONA KUPANG	1.245.000,00	1.245.000,00
31) DINKES Prov NTT	-	41.400.000,00
Saldo Dipindahkan	***17.111.935.097,00***	***3.773.990.877,00***

	2025	2024
Jumlah Halaman Sebelumnya	*17.111.935.097,00*	*3.773.990.877,00*
32) RSUD Lewoleba	42.229.000,00	-
33) RSU Penyangga Perbatasan	72.972.000,00	-
34) RS Wirasakti	11.960.000,00	-
Jumlah Piutang Pelayanan (Bruto)	**17.239.096.097,00**	**3.773.990.877,00**
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Piutang	(4.370.167.777,78)	(2.943.605.364,69)
Jumlah Piutang Pelayanan (Netto)	**12.868.928.319,22**	**830.385.512,31**

Rincian mutasi Piutang adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01 Jan 2025	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31 Des 2025
			Penambahan	Pengurangan	
1)	Piutang Jasa Raharja	56.262.019,00	197.649.638,00	55.526.786,00	198.384.871,00
2)	Piutang IOM	1.631.024,00	-	-	1.631.024,00
3)	Piutang In-Health	33.014.910,00	19.923.584,00	31.816.000,00	21.122.494,00
4)	Piutang JKN	16.313.004.343,00	11.694.954.755,00	15.564.746.618,00	12.443.212.480,00
5)	Piutang Obat Kronis	1.849.908.149,00	570.628.595,00	1.246.007.345,00	1.174.529.399,00
6)	Piutang Obat Kemoterapi	3.380.726.767,00	1.690.237.233,00	3.380.726.767,00	1.690.237.233,00
7)	Piutang Gigi Palsu	52.800.000,00	-	-	52.800.000,00
8)	Piutang CAPD	-	104.500.000,00	-	104.500.000,00
9)	Piutang Covid-19	15.742.000,00	-	-	15.742.000,00
10)	Piutang Jamkesda	-	-	-	-
11)	Piutang Dana Pengaman	527.759.464,00	-	-	527.759.464,00
12)	Piutang Jamkesda Kab. Kupang	119.012.178,00	-	83.137.421,00	35.874.757,00
13)	Piutang Jamkesda Kab. TTS*	252.243.109,00	-	-	252.243.109,00
14)	Piutang Kab. Malaka	245.690,00	52.579.009,00	-	52.824.699,00
15)	Parkir	7.502.000,00	18.004,00	7.502.000,00	18.004,00
16)	BPJS Tenaga Kerja	57.742.425,00	167.984.838,00	-	225.727.263,00
17)	Pasien Umum	-	-	-	-
18)	Kantin	32.500.000,00	10.500.000,00	32.500.000,00	10.500.000,00
19)	RS Bhayangkara	12.188.500,00	29.990.000,00	12.145.000,00	30.033.500,00
20)	Rumah Sakit Siloam	16.552.000,00	1.975.000,00	13.988.000,00	4.539.000,00
21)	Rumah Sakit SK Lerik	71.736.000,00	21.600.000,00	35.190.000,00	58.146.000,00
22)	RSUD Gabriel Manek Atambua	-	40.845.000,00	-	40.845.000,00
23)	RSUD Kefamenanu	-	-	-	-
24)	RSUD SoE	1.660.000,00	26.531.000,00	1.660.000,00	26.531.000,00
25)	RS Boromeus	51.300.000,00	76.370.800,00	47.980.000,00	79.690.800,00
26)	RS Dedari	6.225.000,00	-	-	6.225.000,00
27)	Fotokopi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
28)	Imunohistokimia	15.210.000,00	46.800.000,00	36.270.000,00	25.740.000,00
29)	RSUP Ben Mboi	109.616.000,00	9.125.000,00	86.908.000,00	31.833.000,00
30)	RS Leona Kupang	1.245.000,00	-	-	1.245.000,00
31)	DINKES Prov NTT	-	-	-	-
32)	RSUD Lewoleba	-	42.229.000,00	-	42.229.000,00
33)	RSU Penyangga Perbatasan	-	72.972.000,00	-	72.972.000,00
34)	RS Wirasakti	-	11.960.000,00	-	11.960.000,00
	Jumlah Bruto	**22.986.826.578,00**	**14.889.373.456,00**	**20.637.103.937,00**	**17.239.096.097,00**

Selama Tahun Berjalan 2025 terdapat koreksi saldo awal Piutang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 31 Des 2024	Penyesuaian		Saldo 1 Jan 2025
			Debet	Kredit	
1)	Piutang Jasa Raharja	56.262.019,00	-	-	56.262.019,00
2)	Piutang IOM	1.631.024,00	-	-	1.631.024,00
3)	Piutang In-Health	33.014.910,00	-	-	33.014.910,00
4)	Piutang JKN	748.257.725,00	15.564.746.618,00	-	16.313.004.343,00
5)	Piutang Obat Kronis	798.688.414,00	1.051.219.735,00	-	1.849.908.149,00
6)	Piutang Obat Kemoterapi	705.783.979,00	2.674.942.788,00	-	3.380.726.767,00
7)	Piutang Gigi Palsu	52.800.000,00	-	-	52.800.000,00
8)	Piutang CAPD	-	-	-	-
9)	Piutang Covid-19	15.742.000,00	-	-	15.742.000,00
10)	Piutang Jamkesda	-	-	-	-
11)	Piutang Dana Pengaman	594.539.904,00	-	66.780.440,00	527.759.464,00
12)	Piutang Jamkesda Kab. Kupang	119.012.178,00	-	-	119.012.178,00
13)	Piutang Jamkesda Kab. TTS*	252.243.109,00	-	-	252.243.109,00
14)	Piutang Kab. Malaka	245.690,00	-	-	245.690,00
15)	Parkir	7.502.000,00	-	-	7.502.000,00
16)	BPJS Tenaga Kerja	57.742.425,00	-	-	57.742.425,00
17)	Pasien Umum	-	-	-	-

No.	Uraian	Saldo 31-Dec-24	Penyesuaian		Saldo 1 Jan 2025
			Debet	Kredit	
18)	Kantin	32.500.000,00	-	-	32.500.000,00
19)	RS Bhayangkara	12.188.500,00	-	-	12.188.500,00
20)	Rumah Sakit Siloam	16.552.000,00	-	-	16.552.000,00
21)	Rumah Sakit SK Lerik	36.546.000,00	35.190.000	-	71.736.000,00
22)	RSUD Gabriel Manek Atambua	-	-	-	-
23)	RSUD Kefamenanu	-	-	-	-
24)	RSUD SoE	1.660.000,00	-	-	1.660.000,00
25)	RS Boromeus	51.300.000,00	-	-	51.300.000,00
26)	RS Dedari	6.225.000,00	-	-	6.225.000,00
27)	Fotokopi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
28)	Imunohistokimia	15.210.000,00	-	-	15.210.000,00
29)	RSUP Ben Mboi	114.699.000,00	-	5.083.000,00	109.616.000,00
30)	RS Leona Kupang	1.245.000,00	-	-	1.245.000,00
31)	DINKES Prov NTT	41.400.000,00	-	41.400.000,00	-
	Jumlah	**3.774.036.534,00**	**19.326.099.141,00**	**113.263.440,00**	**22.986.826.578,00**

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Kualitas Piutang			
		Lancar 0-1 Bulan	Kurang Lancar 1-3 Bulan	Diragukan 3-12 Bulan	Macet >12 Bulan
1)	Piutang Jasa Raharja	12.598.799,00	70.382.487,00	114.668.352,00	735.233,00
2)	Piutang IOM	-	-	-	1.631.024,00
3)	Piutang In-Health	-	19.766.340,00	23.706,00	1.332.448,00
4)	Piutang JKN	6.409.991.800,00	2.461.028.955,00	2.823.934.000,00	748.257.725,00
5)	Piutang Obat Kronis	296.615.883,00	274.012.712,00	-	603.900.804,00
6)	Piutang Obat Kemoterapi	815.042.840,00	875.194.393,00	-	-
7)	Piutang Gigi Palsu	-	-	-	52.800.000,00
8)	Piutang CAPD	48.000.000,00	56.500.000,00	-	-
9)	Piutang Covid-19	-	-	-	15.742.000,00
10)	Piutang Jamkesda	-	-	-	-
11)	Piutang Dana Pengaman	-	-	-	527.759.464,00
12)	Piutang Jamkesda Kab. Kupang	-	-	-	35.874.757,00
13)	Piutang Jamkesda Kab. TTS*	-	-	-	252.243.109,00
14)	Piutang Kab. Malaka	-	52.579.009,00	-	245.690,00
15)	Parkir	-	18.004,00	-	-
16)	BPJS Tenaga Kerja	46.251.314,00	64.500.476,00	57.233.048,00	57.742.425,00
17)	Pasien Umum	-	-	-	-
18)	Kantin	4.000.000,00	6.500.000,00	-	-
19)	RS Bhayangkara	29.990.000,00	2.900,00	-	40.600,00
20)	Rumah Sakit Siloam	1.150.000,00	275.000,00	550.000,00	2.564.000,00
21)	Rumah Sakit SK Lerik	900.000,00	9.965.000,00	10.735.000,00	36.546.000,00
22)	RSUD Gabriel Manek Atambua	12.502.000,00	17.885.000,00	10.458.000,00	-
23)	RSUD Kefamenanu	-	-	-	-
24)	RSUD SoE	14.471.000,00	12.060.000,00	-	-
25)	RS Boromeus	22.490.000,00	15.280.000,00	26.575.800,00	15.345.000,00
26)	RS Dedari	-	-	-	6.225.000,00
27)	Fotokopi	-	-	-	-
28)	Imunohistokimia	11.700.000,00	14.040.000,00	-	-
29)	RSUP Ben Mboi	-	-	9.125.000,00	22.708.000,00
30)	RS Leona Kupang	-	-	-	1.245.000,00
31)	DINKES Prov NTT	-	-	-	-
32)	RSUD Lewoleba	4.920.000,00	8.954.000,00	28.355.000,00	-
33)	RSU Penyangga Perbatasan	14.500.000,00	45.559.000,00	12.913.000,00	-
34)	RS Wirasakti	9.620.000,00	1.125.000,00	1.215.000,00	-
Jumlah Bruto		**7.754.743.636,00**	**4.005.628.276,00**	**3.095.785.906,00**	**2.382.938.279,00**
% Penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan		**38.773.718,18**	**400.562.827,60**	**1.547.892.953,00**	**2.382.938.279,00**

Ikhtisar perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo awal periode	**2.943.605.364,69**	**2.400.378.548,47**
Koreksi Saldo Awal	(346.410.037,85)	237.843.027,40
Saldo Awal Setelah Koreksi	**2.597.195.326,84**	**2.638.221.575,86**
Pembalikan Penyisihan Piutang	(573.101.804,49)	(459.617.918,26)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.346.074.255,43	765.001.707,09
Saldo akhir periode	**4.370.167.777,78**	**2.943.605.364,69**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2025 sebesar Rp4.370.167.777,78, Koreksi Saldo Awal sebesar Rp346.410.037,85 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp2.346.074.255,43 yang dapat dilihat pada catatan 7.2 angka 5. dan Pembalikan Penyisihan Piutang Sebesar Rp573.101.804,49 yang dapat dilihat pada catatan 7.3 angka 1

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2024 sebesar Rp2.943.605.364,69, terdiri dari koreksi saldo awal sebesar Rp237.843.027,40, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp765.001.707,09 yang dapat dilihat pada catatan 7.2 angka 5, dan Pembalikan Penyisihan Piutang sebesar Rp459.617.918,26 yang dapat dilihat pada catatan 7.3 angka 1.

6.4 Persediaan BLUD

Persediaan merupakan persediaan barang/bahan pakai habis RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp16.119.319.549,47 dan Rp18.632.992.266,94 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Farmasi	15.515.076.531,73	17.905.075.064,89
2) Gizi	6.368.904,35	146.629.126,79
3) Benda Pos	-	-
4) Bhn Konstruksi	-	-
5) Sanitasi	58.928.522,93	40.483.490,63
6) ATK	332.447.750,48	227.537.219,80
7) Pembersih	103.625.474,07	108.665.476,93
8) Bahan Perlengkapan Farmasi	12.175.838,79	17.276.860,99
9) Linen	6.062.492,16	147.449.741,94
10) Bahan Cetak	84.634.034,96	39.875.284,96
11) Tabung Gas Elpiji	-	-
12) Listrik	-	-
13) Air	-	-
Jumlah	**16.119.319.549,47**	**18.632.992.266,94**

Rincian mutasi Persediaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01 Jan 2025	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31 Des 2025
			Penambahan	Pengurangan	
1)	Farmasi	17.905.075.064,89	62.396.486.080,27	64.786.484.613,43	15.515.076.531,73
2)	Gizi	146.629.126,79	889.566.268,82	1.029.826.491,26	6.368.904,35
3)	Benda Pos	-	-	-	-
4)	Bhn Konstruksi	-	-	-	-
5)	Sanitasi	40.483.490,63	445.109.007,20	426.663.974,90	58.928.522,93
6)	ATK	227.537.219,80	724.592.910,02	619.682.379,34	332.447.750,48
7)	Pembersih	108.665.476,93	665.531.964,41	670.571.967,27	103.625.474,07
8)	Bahan Perlengkapan Farmasi	17.276.860,99	63.025.000,00	68.126.022,20	12.175.838,79
9)	Linen	147.449.741,94	80.327.542,00	221.714.791,78	6.062.492,16
10)	Bahan Cetak	39.875.284,96	170.825.000,00	126.066.250,00	84.634.034,96
11)	Tabung Gas Elpiji	-	170.485.750,00	170.485.750,00	-
12)	Listrik	-	122.528.750	122.528.750,00	-
13)	Air	-	41.001.000	41.001.000,00	-
Jumlah		**18.632.992.266,94**	**65.769.479.272,72**	**68.283.151.990,18**	**16.119.319.549,47**

Dalam mutasi pengurangan persediaan Tahun 2025 terdapat pengurangan sebesar Rp357.433.558,00 yang merupakan persediaan kedaluwarsa berupa obat-obatan dan telah dibebankan pada Beban Barang.

6.5 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp187.911.668.447,10 dan Rp208.766.206.020,13 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Tanah	35.061.700.000,00	35.061.700.000,00
2) Peralatan dan Mesin	336.404.207.148,61	326.956.721.133,15
3) Gedung dan Bangunan	115.813.851.554,00	114.779.509.194,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.379.083.858,00	8.379.083.858,00
5) Aset Tetap Lainya	92.490.480,40	92.490.480,40
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.717.639.825,00	1.619.761.825,00
Jumlah Harga Perolehan	**497.468.972.866,01**	**486.889.266.490,55**
Akumulasi Penyusutan	(309.557.304.418,91)	(278.123.060.470,42)
Nilai Buku	**187.911.668.447,10**	**208.766.206.020,13**

Rincian mutasi Aset Tetap Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Jan 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2025
Harga Perolehan				
1) Tanah	35.061.700.000,00	-	-	35.061.700.000,00
2) Peralatan dan Mesin	326.956.721.133,15	9.526.116.308,46	78.630.293,00	336.404.207.148,61
3) Gedung dan Bangunan	114.779.509.194,00	1.174.300.360,00	139.958.000,00	115.813.851.554,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.379.083.858,00	-	-	8.379.083.858,00
5) Aset Tetap Lainnya	92.490.480,40	-	-	92.490.480,40
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	1.577.681.825,00	139.958.000,00	-	1.717.639.825,00
Jumlah	**486.847.186.490,55**	**10.840.374.668,46**	**218.588.293,00**	**497.468.972.866,01**

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Jan 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2025
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	253.785.150.434,41	29.095.329.978,28	-	282.880.480.412,69
3) Gedung dan Bangunan	21.536.122.737,88	2.263.252.031,08	212.073.639,40	23.587.301.129,56
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.801.787.298,13	287.735.579,13	-	3.089.522.877,26
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**278.123.060.470,42**	**31.646.317.588,49**	**212.073.639,40**	**309.557.304.418,91**
Nilai Buku				
1) Tanah	35.061.700.000,00			35.061.700.000,00
2) Peralatan dan Mesin	73.171.570.698,74			53.523.726.735,92
3) Gedung dan Bangunan	93.243.386.456,12			92.226.550.424,44
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.577.296.559,87			5.289.560.980,74
5) Aset Tetap Lainnya	92.490.480,40			92.490.480,40
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	1.577.681.825,00			1.717.639.825,00
Jumlah	**208.724.126.020,13**			**187.911.668.446,50**

Selama Tahun 2025 terdapat koreksi saldo awal Harga Perolehan dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Awal	Penyesuaian		Saldo
	31 Des 2024	Debet	Kredit	1 Jan 2025
Harga Perolehan				
1) Konstruksi dalam Pengerjaan	1.619.761.825,00	-	42.080.000,00	1.577.681.825,00
Jumlah	**1.619.761.825,00**	-	**42.080.000,00**	**1.577.681.825,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo
	1 Jan 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024
Harga Perolehan				
1) Tanah	35.061.700.000,00	-	-	35.061.700.000,00
2) Peralatan dan Mesin	293.574.449.045,60	33.805.250.437,55	422.978.350,00	326.956.721.133,15
3) Gedung dan Bangunan	110.084.393.852,00	4.730.195.342,00	35.080.000,00	114.779.509.194,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.379.083.858,00	-	-	8.379.083.858,00
5) Aset Tetap Lainnya	92.490.480,40	-	-	92.490.480,40
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	1.577.681.825,00	42.080.000,00	-	1.619.761.825,00
Jumlah	**448.769.799.061,00**	**38.577.525.779,55**	**458.058.350,00**	**486.889.266.490,55**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	223.480.859.200,97	30.304.291.233,44	-	253.785.150.434,41
3) Gedung dan Bangunan	19.275.557.554,00	2.260.565.183,88	-	21.536.122.737,88
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.514.051.719,00	287.735.579,13	-	2.801.787.298,13
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**245.270.468.473,97**	**32.852.591.996,45**	-	**278.123.060.470,42**
Nilai Buku				
1) Tanah	35.061.700.000,00			35.061.700.000,00
2) Peralatan dan Mesin	70.093.589.844,63			73.171.570.698,74
3) Gedung dan Bangunan	90.808.836.298,00			93.243.386.456,12
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.865.032.139,00			5.577.296.559,87
5) Aset Tetap Lainnya	92.490.480,40			92.490.480,40
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	1.577.681.825,00			1.619.761.825,00
Jumlah	**203.499.330.587,04**			**208.766.206.020,13**

Selama Tahun 2024 terdapat koreksi saldo awal Harga Perolehan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Awal	Penyesuaian		Saldo
	31 Des 2023	Debet	Kredit	1 Jan 2024
Harga Perolehan				
1) Gedung dan Bangunan	103.566.036.932,00	6.518.356.920,00	-	110.084.393.852,00
2) Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.371.284.658,00	7.799.200,00	-	8.379.083.858,00
Jumlah	**111.937.321.590,00**	**6.526.156.120,00**	-	**118.463.477.710,00**
Akumulasi Penyusutan				
1) Peralatan dan Mesin	196.879.923.011,41	-	26.600.936.189,56	223.480.859.200,97
2) Gedung dan Bangunan	22.117.033.081,41	2.841.475.527,41	-	19.275.557.554,00
3) Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.234.101.734,86	-	279.949.984,14	2.514.051.719,00
Jumlah	**221.231.057.827,68**	**2.841.475.527,41**	**26.880.886.173,70**	**245.270.468.473,97**

Ikhtisar perubahan harga perolehan dan akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1) Tanah	**31 Desember 2025**
Harga Perolehan:	
Saldo Awal	**35.061.700.000,00**
Penambahan:	-
Pengurangan:	-
Saldo Akhir	**35.061.700.000,00**

2) Peralatan dan Mesin	**31 Desember 2025**
a. Harga Perolehan	
Saldo Awal	**326.956.721.133,15**
Penambahan:	
- Belanja Modal	9.407.883.813,46
- Utang	
- Utang 2025	118.232.495,00
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
- Reklasifikasi ke Aset Ekstrakompatibel	-
- Utang 2023	-
- Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	35.653.493,00
- Utang 2024	42.976.800,00
Saldo Akhir	**336.404.207.148,61**
b. Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	**253.785.150.434,41**
Koreksi Saldo Awal	
Saldo Awal Setelah Koreksi	**253.785.150.434,41**
Penambahan:	
- Beban Penyusutan	29.095.329.978,28
Pengurangan	
- Penghapusan Aset Tetap	-
Saldo Akhir	**282.880.480.412,69**
c. Nilai Buku	**53.523.726.735,92**

3) Gedung dan Bangunan	**31 Desember 2025**
a. Harga Perolehan	
Saldo Awal Harga Perolehan	**114.779.509.194,00**
Koreksi Saldo Awal	
Saldo Awal Setelah Koreksi	**114.779.509.194,00**
Penambahan:	
- Belanja Modal	1.174.300.360,00
- Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	139.958.000,00
Saldo Akhir	**115.813.851.554,00**

	31 Desember 2025
b. Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	**21.536.122.737,88**
Koreksi Saldo Awal	
Saldo Awal Setelah Koreksi	**21.536.122.737,88**
Penambahan:	
- Beban Penyusutan	2.263.252.031,08
Pengurangan:	
- Reklas	212.073.639,40
Saldo Akhir	**23.587.301.129,56**
c. Nilai Buku	**92.226.550.424,44**

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2025
a. Harga Perolehan	
Saldo Awal Harga Perolehan	**8.379.083.858,00**
Koreksi Saldo Awal	
Saldo Awal Setelah Koreksi	**8.379.083.858,00**
Penambahan:	
Pengurangan:	
Saldo Akhir	**8.379.083.858,00**
b. Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	**2.801.787.298,13**
Koreksi Saldo Awal	
Saldo Awal Setelah Koreksi	**2.801.787.298,13**
Penambahan:	
- Beban Penyusutan	287.735.579,13
Pengurangan	
- Penghapusan Aset Tetap	-
Saldo Akhir	**3.089.522.877,26**
c. Nilai Buku	**5.289.560.980,74**

5) Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025
a. Harga Perolehan	
Saldo Awal	**92.490.480,40**
Penambahan:	-
Pengurangan:	-
Saldo Akhir	**92.490.480,40**
b. Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal	-
Penambahan:	-
Pengurangan:	-
Saldo Akhir	-
c. Nilai Buku	**92.490.480,40**

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	31 Desember 2025
a. Harga Perolehan	
Saldo Awal	**1.577.681.825,00**
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	139.958.000,00
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
Saldo Akhir	**1.717.639.825,00**
b. Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal	
Penambahan:	-
Pengurangan:	-
Saldo Akhir	-
c. Nilai Buku	**1.717.639.825,00**

Perubahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo awal tahun	278.123.060.470,42	221.231.057.827,68
Koreksi Penyajian Akumulasi	(212.073.639,40)	24.039.410.646,29
Penyusutan tahun berjalan	31.646.317.588,49	32.852.591.996,45
Saldo akhir tahun	**309.557.304.418,91**	**278.123.060.470,42**

6.6 Aset Lainnya

Nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp418.126.139,00 dan Rp3.545.077.778,37 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Aset Tak Berwujud	6.802.017.500,00	6.795.017.500,00
2) Aset Rusak Berat	19.518.472.784,00	19.518.472.784,00
3) Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	-	3.131.151.639
Jumlah Harga Perolehan	**26.320.490.284,00**	**29.444.641.923,37**
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	(6.797.817.500,00)	(6.795.017.500,00)
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(19.104.546.645,00)	(19.104.546.645,00)
Jumlah Akumulasi Amortisasi	**(25.902.364.145,00)**	**(25.899.564.145,00)**
Nilai Buku	**418.126.139,00**	**3.545.077.778,37**

Rincian mutasi Aset Lainnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo
	1 Jan 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2025
Harga Perolehan				
1) Aset Tak Berwujud	6.802.017.500,00	-	-	6.802.017.500,00
2) Aset Rusak Berat	19.518.472.784,00	-	-	19.518.472.784,00
3) Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	-	-	-	-
Jumlah	**26.320.490.284,00**	-	-	**26.320.490.284,00**

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo
	1 Jan 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2025
Akumulasi Penyusutan				
1) Aset Tak Berwujud	6.796.417.500,00	1.400.000,00	-	6.797.817.500,00
2) Aset Rusak Berat	19.104.546.645,00	-	-	19.104.546.645,00
3) Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	-	-	-	-
Jumlah	**25.900.964.145,00**	**1.400.000,00**	-	**25.902.364.145,00**
Nilai Buku				
1) Aset Tak Berwujud	5.600.000,00			4.200.000,00
2) Aset Rusak Berat	413.926.139,00			413.926.139,00
3) Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	-			-
Jumlah	**419.526.139,00**			**418.126.139,00**

Selama Tahun 2025 terdapat koreksi terhadap saldo awal Harga Perolehan dan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo	Penyesuaian		Saldo
	31 Des 2024	Debet	Kredit	1 Jan 2025
Harga Perolehan				
1) Aset Tak Berwujud	6.795.017.500,00	7.000.000,00		6.802.017.500,00
2) Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	3.131.151.639,37		3.131.151.639,37	-
Jumlah	**6.795.017.500,00**	**7.000.000,00**	-	**6.802.017.500,00**
Akumulasi Penyusutan Amortisasi				
1) Aset Tak Berwujud	6.795.017.500,00		1.400.000,00	6.796.417.500,00
Jumlah	**6.795.017.500,00**	-	**1.400.000,00**	**6.796.417.500,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo
	1 Jan 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024
Harga Perolehan				
1) Aset Tak Berwujud	6.795.017.500,00	-	-	6.795.017.500,00
2) Aset Rusak Berat	19.518.472.784,00	-	-	19.518.472.784,00
3) Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	3.131.151.639,37	-	-	3.131.151.639,37
Jumlah	**29.444.641.923,37**	-	-	**29.444.641.923,37**
Akumulasi Penyusutan				
1) Aset Tak Berwujud	6.795.017.500,00		-	6.795.017.500,00
2) Aset Rusak Berat	19.104.546.645,00	-	-	19.104.546.645,00
3) Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	-	-	-	-
Jumlah	**25.899.564.145,00**	-	-	**25.899.564.145,00**
Nilai Buku				
1) Aset Tak Berwujud	-			-
2) Aset Rusak Berat	413.926.139,00			413.926.139,00
3) Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	3.131.151.639,37			3.131.151.639,37
Jumlah	**3.545.077.778,37**			**3.545.077.778,37**

Ikhtisar perubahan harga perolehan dan akumulasi penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1) Aset Tak Berwujud	**31 Desember 2025**
a. Harga Perolehan	
Saldo Awal Sebelum Penyesuaian	**6.795.017.500,00**
Koreksi Saldo Awal	7.000.000,00
Saldo Awal Setelah Penyesuaian	**6.802.017.500,00**
Penambahan:	-
Pengurangan:	-
Saldo Akhir	**6.802.017.500,00**

1) Aset Tak Berwujud	31 Desember 2025
b. Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal Sebelum Penyesuaian	**6.795.017.500,00**
Koreksi Saldo Awal	1.400.000,00
Saldo Awal Setelah Penyesuaian	**6.796.417.500,00**
Penambahan:	
Beban Penyusutan'	1.400.000,00
Pengurangan:	-
Saldo Akhir	**6.797.817.500,00**
c. Nilai Buku	**4.200.000,00**

2) Aset Rusak Berat	31 Desember 2025
a. Harga Perolehan	
Saldo Awal	19.518.472.784,00
Penambahan:	-
Pengurangan:	-
Saldo Akhir	**19.518.472.784,00**
b. Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal	19.104.546.645,00
Penambahan:	-
Pengurangan:	-
Saldo Akhir	**19.104.546.645,00**
c. Nilai Buku	**413.926.139,00**

3) Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	31 Desember 2025
a. Harga Perolehan	
Saldo Awal Sebelum Penyesuaian	-
Koreksi Saldo Awal	-
Saldo Awal Setelah Penyesuaian	-
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	-
Pengurangan:	-
Saldo Akhir	-
b. Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal	-
Penambahan:	-
Pengurangan	-
Saldo Akhir	-
Nilai Buku	-

Perubahan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo awal tahun	25.899.564.145,00	25.899.564.145,00
Koreksi saldo awal	1.400.000,00	-
Penyisihan tahun berjalan	1.400.000,00	-
Saldo akhir tahun	**25.902.364.145,00**	**25.899.564.145,00**

6.7 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.946.395.881,16 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Utang Pajak	1.946.395.881,16	
Jumlah	**1.946.395.881,16**	-

Pada bulan Januari 2026 Utang Perhitungan Fihak Ketiga yang sudah terbayar adalah sebesar Rp1.315.945.601 dan yang belum terbayarkan sebesar Rp630.450.280,16.

6.8 Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.595.736.226,34 dan Rp23.292.358.490,64 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Utang Belanja Barang Habis Pakai		
1) Obat	4.518.057.207,00	7.075.300.822,00
2) Bahan Habis Pakai	396.818.560,00	4.051.930.549,66
3) Alat Habis Pakai	639.755.042,86	3.921.838.143,00
4) Gas Medis	1.415.403.616,00	1.241.762.720,00
5) CSSD	957.198.047,00	677.361.033,00
6) Bag. Darah	911.390.000,00	2.716.090.000,00
Saldo Dipindahkan	***8.838.622.472,86***	***19.684.283.267,66***

	2025	2024
Jumlah Halaman Sebelumnya	*8.838.622.472,86*	*19.684.283.267,66*
7) Pemeliharaan Alat Kesehatan	-	190.431.600,00
8) Jasa Pembakaran Limbah Bahan	-	149.999.983,20
9) Peralatan dan Mesin SIM-RS	118.232.495,00	42.976.800,00
10) Belanja Bahan dan Alat Laboratorium	1.293.215.837,00	-
11) Utang Belanja Habis Pakai Hemodialisa	1.787.861.075,00	-
12) Utang Belanja Habis Pakai Radiologi	21.090.000,00	-
13) Utang Belanja Habis Pakai CATHLAB	1.636.053.216,00	-
14) Utang Belanja ATK	153.211.500,00	-
15) Utang Belanja Bahan Alat Kebersihan	150.435.500,00	-
16) Utang Belanja Bahan Cetak	27.180.459,00	-
17) Utang Belanja Gas LPG	19.846.800,00	-
18) Utang Belanja Bahan Makanan Pasien	247.782.465,00	-
Utang Belanja Jasa		
1) Jasa Pelayanan	5.135.780.302,00	2.461.994.387,78
2) Rekening Listrik	454.353.328,00	425.343.773,00
3) Rekening Air	351.428.810,00	258.344.400,00
4) Rekening Internet	9.578.105,00	5.531.150,00
5) Biaya Rujukan Parsial di Rumah Sakit Siloam	83.274.000,00	73.453.129,00
6) Utang Jasa Iuran BPJS 4%	1.294.695.874,49	-
7) Rekening Telepon	16.776.500,00	-
8) Utang Belanja Iuran Sampah	42.000.000,00	-
9) Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	857.150.627,00	-
10) Utang Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Kesehatan	1.728.000,00	-
11) Pemeliharaan Kalibrasi Pengujian TLD	5.700.000,00	-
12) Utang Belanja Jasa Pengaman	49.738.860,00	-
Jumlah	**22.595.736.226,34**	**23.292.358.490,64**

6.9 Pendapatan Diterima Dimuka

Tidak terdapat Pendapatan Diterima Dimuka RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang per 31 Desember 2025 dan 2024.

6.10 Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp209.789.502.610,35 dan Rp225.645.878.726,31, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Ekuitas Awal	225.645.878.726,31	275.366.791.186,18
2) Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(32.119.110.436,33)	(40.636.322.741,64)
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Saldo Awal Piutang	19.212.835.701,00	3.451.725.143,00
- Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang Tak Tertagih	346.410.037,85	(237.843.027,40)
- Koreksi Saldo Awal Persediaan	-	(762.275.108,02)
- Koreksi Saldo Awal Harga Perolehan Aset Tetap	-	6.526.156.120,00
- Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	212.073.640,00	(24.039.410.646,29)
- Koreksi Aset Tetap di bawah Kapitalisasi	(3.131.151.639,37)	3.034.996.789,37
- Koreksi Saldo Awal Utang	(170.345.969,11)	3.146.682.127,09
- Setor ke Kas Daerah	(170.607.450,00)	(204.621.116,00)
- Koreksi Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan	(42.080.000,00)	-
- Koreksi Saldo Awal Harga Perolehan Aset Tidak Berwujud	7.000.000,00	-
- Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	(1.400.000,00)	-
4) Ekuitas akhir	**209.789.502.610,35**	**225.645.878.726,31**

7. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

7.1 Pendapatan

Pendapatan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp155.224.119.664,18 dan Rp242.257.730.930,93 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	121.167.052.562,00	95.269.238.702,44
2) Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-
3) Pendapatan Hasil Kerjasama	1.524.570.164,00	1.371.566.899,00
4) Pendapatan Hibah	1.487.050.569,70	1.845.914.872,34
5) Pendapatan Lainnya	851.022.236,48	2.009.755.807,15
6) Pendapatan APBD	30.194.424.132,00	141.761.254.650,00
Jumlah	**155.224.119.664,18**	**242.257.730.930,93**

Rincian Pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp121.167.052.562,00 dan sebesar Rp95.269.238.702,44 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Rawat Jalan Umum	625.936.628,00	346.802.000,00
- Rawat Darurat	452.039.644,00	483.176.687,00
- Rawat Inap Umum	513.022.143,00	747.801.847,44
- Perawatan Intensif (ICU/NICU/PICU)	76.451.281,00	40.161.000,00
- Rawat Inap Eksekutif	777.764.161,00	124.681.078,00
- Pendapatan Tindakan Medik	709.266.673,00	290.819.572,00
- Persalinan	5.212.000,00	49.061.000,00
- Pelayanan Medik Gigi & Mulut	65.965.000,00	79.700.000,00
- Fisiotherapi	4.586.000,00	6.918.000,00
- Pelayanan Penunjang Diagnostik	1.928.614.684,00	1.344.392.416,00
- Jasa Konsultasi Medika	5.950.000,00	6.350.000,00
- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan	1.652.110.440,00	224.198.000,00
- Medico legal	255.095.000,00	122.983.479,00
- Farmasi/Obat-obatan	255.453.397,00	310.120.466,00
- Penerimaan Dari Hasil Klaim Inhelt Asuransi	72.931.346,00	308.011.826,00
- Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan	173.796.738,00	391.217.667,00
- Asuransi Jasa Rahardja Cabang Kupang	1.113.085.413,00	794.087.571,00
- Jaminan Kesehatan Nasional	111.452.021.144,00	89.296.937.817,00
- Dinas Kesehatan Prov. NTT (Dana Pengaman)	906.722.410,00	-
- Dinas Kesehatan Kab. Kupang (Jamkesda)	2.931.451,00	252.976.276,00
- Dinas Kesehatan Kab. Malaka	52.579.009,00	-
- Pelayanan Pemulasan/Perawatan Jenazah	11.900.000,00	8.408.000,00
- Pelayanan Ambulance/Mobil Jenasah	53.618.000,00	40.434.000,00
Jumlah	**121.167.052.562,00**	**95.269.238.702,44**

2) Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Tidak terdapat Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang per 31 Desember 2025 dan

3) Pendapatan Hasil Kerjasama

Pendapatan Hasil Kerjasama RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.524.570.164,00 dan sebesar Rp1.371.566.899,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Apotik Kimia Farma (Bagi Hasil)	-	31.491.000,00
- Sewa Ruangan (Jasa Apotik Pelengkap)	-	55.000.000,00
- Tempat Parkir	81.998.004,00	72.516.000,00
- Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana	694.670.160,00	68.510.500,00
- Sewa Lahan Kantin	87.000.000,00	78.000.000,00
- Tempat Penitipan Anak (Kinder)	-	2.850.000,00
- Tempat Fotocopy (RSU)	-	12.000.000,00
- Penyewaan Sarana dan Prasarana/Aula	7.000.000,00	37.524.000,00
- Diklat	653.902.000,00	775.081.499,00
- RS Bhayangkara	-	12.176.900,00
- Rumah Sakit Siloam	-	13.988.000,00
- Rumah Sakit SK Lerik	-	8.235.000,00
- RSUD Soe	-	1.660.000,00
- RS Boromeus	-	40.625.000,00
- RS Dedari	-	4.565.000,00
- RSUP Ben Mboi	-	114.699.000,00
- RS Leona Kupang	-	1.245.000,00
- Dinas Kesehatan Provinsi NTT	-	41.400.000,00
Jumlah	**1.524.570.164,00**	**1.371.566.899,00**

4) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.487.050.569,70 dan sebesar Rp1.845.914.872,34 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Hibah Obat	608.720.303,70	1.140.914.666,14
- Hibah Alkes/BMHP	-	17.002.800,00
- Hibah Reagen	-	687.997.406,20
- Hibah Tidak Terikat	76.672.085,00	-
- Hibah Obat Lainnya	801.658.181,00	-
Jumlah	**1.487.050.569,70**	**1.845.914.872,34**

5) Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp851.022.236,48 dan sebesar Rp2.009.755.807,15 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Pendapatan Usaha Lainnya		
- Retur Obat	-	26.750.000,00
- Bunga Deposito	-	1.202.084.098,59
- Pendapatan Lain-lain	535.266.573,00	618.756.992,46
b. Pendapatan Non Usaha		
- Jasa Giro	315.755.663,48	162.164.716,10
Jumlah	**851.022.236,48**	**2.009.755.807,15**

6) Pendapatan APBD

Pendapatan APBD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp30.194.424.132,00 dan sebesar Rp141.761.254.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan APBD		
a. Pendapatan Operasional		
- Beban Pegawai	-	92.575.497.155,00
- Beban Barang dan Jasa	24.268.703.496,00	20.581.276.962,00
b. Pendapatan Investasi		
- Belanja Modal	5.925.720.636,00	28.604.480.533,00
Jumlah	**30.194.424.132,00**	**141.761.254.650,00**

7.2 Beban

Beban RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp187.916.331.905,00 dan Rp283.353.671.590,83 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Beban Pegawai	3.784.261.004,20	92.575.497.155,00
2) Beban Barang dan Jasa	150.138.279.056,88	152.547.314.565,62
3) Beban Bunga	-	-
4) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi	31.647.717.588,49	37.465.858.163,12
5) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.346.074.255,43	765.001.707,09
6) Beban Operasional Lainnya	-	-
Jumlah Beban Operasional	**187.916.331.905,00**	**283.353.671.590,83**

Rincian Beban adalah sebagai berikut:

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.784.261.004,20 dan sebesar Rp92.575.497.155,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Gaji dan Tunjangan ASN		-
- Gaji Pokok ASN	-	55.319.390.279,00
- Tunjangan keluarga-pelayanan	-	4.191.302.716,00
- Tunjangan Jabatan-pelayanan	-	143.740.000,00
- Tunjangan Fungsional-pelayanan	-	6.334.594.940,00
- Tunjangan umum-pelayanan	-	496.165.000,00
- Tunjangan Beras-pelayanan	-	4.225.176.820,00
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-pelayanan	-	157.288.040,00
- Pembulatan Gaji-Pelayanan	-	686.251,00
- Iuran Jaminan Kesehatan Asn	-	2.982.025.274,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	-	113.649.533,00
- Iuran Jaminan Kematian	-	340.950.499,00
Jumlah	**-**	**74.304.969.352,00**

	2025	2024
b. Tambahan Penghasilan		-
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	8.206.258.493,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	459.674.671,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	-	371.110.671,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	-	9.233.483.968,00
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.229.895.369,00	-
- Insentif Tenaga Rumah Sakit	435.750.000,00	-
- Honorarium Dewan Pengawas	117.515.635,20	-
- Honorarium Lainnya	1.100.000,00	-
Jumlah	**3.784.261.004,20**	**18.270.527.803,00**
Jumlah Beban Pegawai	**3.784.261.004,20**	**92.575.497.155,00**

2) **Belanja Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp150.138.279.056,88 dan sebesar Rp152.547.314.565,62 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Beban Barang		
- Belanja Obat-Obatan	25.354.988.593,47	26.446.750.576,61
- Belanja Obat-Obatan Lainnya	11.342.688.761,53	6.394.956.030,80
- Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Ruangan	4.056.089.045,97	9.692.472.763,83
- Belanja Bahan Medis Habis Pakai Ruangan	2.511.013.607,00	5.078.446.871,20
- Belanja Bahan HD	3.876.495.253,00	5.752.206.216,29
- Belanja Bahan dan Alat Laboratorium	5.572.803.519,00	5.109.374.695,74
- Belanja Bahan dan Alat Radiologi	144.705.150,00	1.300.831.087,00
- Belanja Bahan CSSD	2.424.399.215,00	2.295.543.112,51
- Belanja Penggantian Pengelolaan Darah	6.618.322.682,00	4.686.160.000,00
- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.006.936.504,00	1.411.026.467,00
- Belanja Gas Medis	2.767.400.659,54	2.887.714.121,00
- Belanja Makanan dan Minuman Pasien	2.755.998.663,93	2.958.208.553,44
- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	3.794.500,00
- Belanja Perlengkapan Rumah Sakit	195.712.963,00	217.375.914,01
- Belanja Linen	341.334.277,78	132.834.933,04
- Belanja Bahan dan Alat Dapur/Pentry	6.399.000,00	-
- Belanja Bahan Cetak	26.659.187,00	18.407.228,00
- Belanja Cetakan Rumah Sakit	513.604.290,99	733.187.862,14
- Belanja Penggandaan dan Foto Copy dan Jilid	186.231.900,00	158.939.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor	591.291.759,32	822.012.471,46
- Belanja Alat Listrik	-	36.662.500,00
- Belanja Makan Minum Rapat/Lembur/Kegiatan	295.396.433,00	507.949.434,00
- Belanja Makan Minum Tamu	63.182.422,00	14.050.337,68
- Belanja Sanitasi	10.795.000,00	45.847.109,42
- Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan	1.408.691.573,78	1.179.418.836,79
- Belanja Bahan Bakar/utang bbm dr.ahli	285.000.000,00	487.250.000,00
- Belanja Bahan Gas Untuk Dapur	188.011.800,00	212.552.517,00
- Belanja bahan persediaan alat listrik/elektronik	118.654.750,00	93.678.457,00
- Belanja persediaan jaringan air bersih	41.343.000,00	24.988.500,00
- Belanja Alat Pendukung Kerja IPRS	-	32.326.500,00
- Belanja Benda Pos	32.500.000,00	25.200.000,00
- Belanja Pengisian Tabung Tabung Pemadam Kebakaran	-	16.743.000,00
- Belanja Souvenir/Cendramata	7.890.000,00	1.980.000,00
- Belanja Bahan dan Alat Keschatan Habis Pakai Cathlab	1.946.849.924,00	-
Jumlah	**75.691.389.935,30**	**78.778.889.595,96**
b. Beban Jasa		
- Belanja Jasa Pelayanan	51.624.333.123,02	49.460.758.179,78
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.252.800.000,00	2.481.600.000,00
- Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	-	3.780.000,00
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.840.000,00	-
- Belanja Paket/Pengiriman	965.899,00	42.311.500,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	50.112.000,00	99.264.000,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.006.720,00	5.955.840,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.758.400,00	7.444.800,00
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	275.258.494,00	730.902.360,00
- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	867.235.706,00	1.153.899.876,20
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.117.750.339,00	125.500.000,00
- Belanja Pendidikan dan Pelatihan	118.323.051,00	686.868.662,00
- Belanja Jasa Pemeriksaan/Rujukan Partial/Mutu Lab Patologi Klinik, Anatomi, (PME)	24.452.900,00	150.215.968,00
- Belanja Sewa	5.750.000,00	1.610.000,00
- Belanja Jasa Kebersihan	2.114.200.000,00	1.943.700.000,00
- Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Tenaga Rohaniawan/Konsultan Audit Lap.Keuangan	217.810.000,00	279.367.295,00
- Belanja Penataan Taman/Dekorasi Ruangan	16.320.000,00	7.025.000,00
- Belanja Tagihan Telepon	211.566.645,00	137.600.000,00
- Belanja Tagihan Air	1.350.732.410,00	1.108.494.600,00
- Belanja Tagihan Listrik	3.265.219.700,00	3.094.597.576,00
- Belanja Jasa Listrik/Air/Telp/Internet	2.106.961.226,50	3.202.309.594,00
- Belanja Jasa Sampah	246.000.038,00	-
- Belanja Pameran/Peringatan HUT RI	30.000.000,00	-
- Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan diluar Cakupan Layanan BPJS	906.722.410,00	
- Belanja Jasa Pengamanan/Security	843.188.651,00	737.488.951,00
Saldo Dipindahkan	***66.654.307.712,52***	***65.460.694.201,98***

	2025	2024
Jumlah Halaman Sebelumnya	*66.654.307.712,52*	*65.460.694.201,98*
- Belanja Penelitian Kesehatan di Rumah Sakit	20.000.000,00	-
- Belanja Iuran Persi	-	500.000,00
- Belanja Jasa Instruktur Senam	-	2.000.000,00
- Belanja Jasa Sosial	-	1.602.100,00
- Belanja Jasa Pengemudi	108.285.946,00	115.236.000,00
- Belanja Lain-lain	8.249.010,01	1.347.398,00
- Belanja Jasa Pencucian Linen	38.016.000,00	-
- Belanja Promosi	24.687.500,00	67.999.000,00
- Biaya Pendampingan Konsultan Hukum	59.400.000,00	-
- Premi Asuransi	2.818.193.479,49	127.860.480,00
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	4.049.795.899,00
- Insentif Tenaga Rumah Sakit	-	488.000.000,00
- Honorarium Dewan Pengawas	-	102.158.098,00
- Honorarium Lainnya	-	60.674.400,00
- Jasa Angkut	63.040.000,00	-
Jumlah	**69.794.179.648,02**	**70.477.867.576,98**
c. Beban Pemeliharaan		
- Belanja Kalibrasi Alat Kesehatan	925.120.856,00	189.609.100,00
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-
- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan	1.294.172.662,04	1.632.297.646,68
- Belanja Pemeliharaan Alat Transportasi	148.819.955,68	121.061.317,00
- Belanja Pemeliharaan Teknologi Infomasi	2.150.000,00	21.461.500,00
- Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan RS	1.030.568.158,00	416.076.687,00
- Belanja Pemeliharaan Software	-	-
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-
- Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung	858.561.286,84	19.434.033,00
- Belanja Pemeliharaan Taman	-	-
- Belanja Pemeliharaan Instalasi/Jaringan/Air Limbah HD	-	16.984.000,00
Jumlah	**4.259.392.918,56**	**2.416.924.283,68**
d. Beban Perjalanan Dinas		
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	140.144.300,00	90.505.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	183.513.710,00	771.628.109,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.005.052,00	
Jumlah	**357.663.062,00**	**862.133.109,00**
e. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		
- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		11.500.000,00
Jumlah	**-**	**11.500.000,00**
f. Belanja Lain - Lain		
- Kapitalisasi Belan	35.653.493,00	-
Jumlah	**35.653.493,00**	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**150.138.279.056,88**	**152.547.314.565,62**

3) **Beban Bunga**

Tidak Terdapat Beban Bunga RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2025 dan 2024.

4) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp31.647.717.588,49 dan Rp37.465.858.163,12 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a) Beban Penyusutan		
- Peralatan dan Mesin	29.095.329.978,28	30.304.291.233,44
- Gedung dan Bangunan	2.263.252.031,08	2.260.565.183,88
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	287.735.579,13	287.735.579,13
Jumlah	**31.646.317.588,49**	**32.852.591.996,45**
b) Beban Amortisasi		
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.400.000,00	-
- Beban Amortisasi Aset Yang Dihapus	-	-
- Beban Amortisasi Aset Rusak Berat	-	4.613.266.166,67
Jumlah Beban Amortisasi	**1.400.000,00**	**4.613.266.166,67**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**31.647.717.588,49**	**37.465.858.163,12**

5) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.346.074.255,43 dan Rp765.001.707,09 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Beban Penyisihan Piutang Operasional BLUD	2.346.074.255,43	765.001.707,09
Jumlah	**2.346.074.255,43**	**765.001.707,09**

6) Beban Lain-lain

Tidak Terdapat Beban Lain -Lain RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2025 dan 2024.

7.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp573.101.804,49 dan Rp459.617.918,26 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Pendapatan Non Operasional		
- Pembalikan Penyisihan Piutang	573.101.804,49	459.617.918,26
- Penurunan Penyisihan Piutang Layanan	-	-
Jumlah	**573.101.804,49**	**459.617.918,26**
2) Beban Non Operasional		
- Beban Kerugian Penghapusan Aset Lain-lain	-	-
Jumlah	-	-
Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	**573.101.804,49**	**459.617.918,26**

8. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

8.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2025	2024
a. Arus Masuk Kas		
Arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar terdiri dari:		
1) Pendapatan dari APBD	30.194.424.132,00	141.761.254.650,00
2) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	126.884.299.047,00	115.016.368.541,44
3) Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-
4) Pendapatan Hasil Kerjasama	1.555.054.160,00	1.131.970.999,00
5) Pendapatan Hibah	76.672.085	-
6) Pendapatan Lainnya	851.022.236,48	2.009.755.807,15
Jumlah Arus Masuk Kas	**159.561.471.660,48**	**259.919.349.997,59**
b. Arus Keluar Kas		
Arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar terdiri dari:		
1) Pembayaran Pegawai	3.784.261.004,20	97.276.125.552,00
2) Pembayaran Barang dan Jasa	147.120.798.290,11	141.424.602.796,43
3) Pembayaran Bunga	-	-
4) Pembayaran Lain-lain	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**150.905.059.294,31**	**238.700.728.348,43**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**8.656.412.366,17**	**21.218.621.649,16**

8.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2025	2024
a. Arus Masuk Kas		
Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari:		
1) Penerimaan Penjualan atas Tanah	-	-
2) Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
3) Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
4) Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
5) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	-	-
6) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
b. Arus Keluar Kas		
Arus kas keluar dari aktivitas investasi terdiri dari:		
1) Perolehan Tanah	-	-
2) Perolehan Peralatan dan Mesin	9.407.883.813,46	33.762.273.637,55
3) Perolehan Gedung dan Bangunan	1.174.300.360,00	4.649.195.342,00
4) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
5) Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
6) Perolehan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**10.582.184.173,46**	**38.411.468.979,55**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(10.582.184.173,46)**	**(38.411.468.979,55)**

8.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2025	2024
a. Arus Masuk Kas		
Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan terdiri dari:		
1) Penerimaan Pinjaman	-	-
2) Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-

	2025	2024
b. Arus Keluar Kas		
Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan terdiri dari:		
1) Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-
2) Setoran ke Kas Daerah	170.607.450,00	204.621.116,00
3) Pemberian Pinjaman	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**170.607.450,00**	**204.621.116,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(170.607.450,00)**	**(204.621.116,00)**

8.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**2025**	**2024**
a. Arus Masuk Kas		
Arus kas masuk dari aktivitas transitoris terdiri dari:		
1) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		12.406.407.284,00
- Sumber Dana BLUD	6.784.182.137,16	
- Sumber Dana APBD	2.164.892.359,35	
Jumlah Arus Masuk Kas	**8.949.074.496,50**	**12.406.407.284,00**
b. Arus Keluar Kas		
Arus kas keluar dari aktivitas transitoris terdiri dari:		
1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		12.406.407.284,00
- Sumber Dana BLUD	4.837.786.256,00	
- Sumber Dana APBD	2.164.892.359,35	
Jumlah Arus Keluar Kas	**7.002.678.615,34**	**12.406.407.284,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**1.946.395.881,16**	**-**

8.5 Saldo Kas	**2025**	**2024**
1) Saldo Awal Kas	17.163.575.639,20	34.561.044.085,59
2) Kenaikan/Penurunan kas Per 31 Desember 2024	(149.983.376,13)	(17.397.468.446,39)
3) Saldo Akhir Kas	**17.013.592.263,07**	**17.163.575.639,20**

9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

9.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp225.645.878.726,31 dan sebesar Rp275.366.791.186,18.

9.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp32.119.110.436,33 dan jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp40.636.322.741,64.

9.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi nilai ekuitas. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.262.734.320,37 dan sebesar Rp9.084.589.718,24, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Koreksi Saldo Awal Piutang	19.212.835.701,00	3.451.725.143,00
2) Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang Tak Tertagih	346.410.037,85	(237.843.027,40)
3) Koreksi Saldo Awal Persediaan	-	(762.275.108,02)
4) Koreksi Saldo Awal Harga Perolehan Aset Tetap	-	6.526.156.120,00
5) Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	212.073.640,00	(24.039.410.646,29)
6) Koreksi Mutasi Aset Tetap Antar OPD Gedung dan Bangunan	(1.400.000,00)	-
7) Koreksi Aset Tetap di bawah Kapitalisasi	(3.131.151.639,37)	3.034.996.789,37
8) Koreksi Saldo Awal Utang	(170.345.969,11)	3.146.682.127,09
9) Setor ke Kas Daerah	(170.607.450,00)	(204.621.116,00)
10) Koreksi Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan	(42.080.000,00)	-
11) Koreksi Saldo Awal Harga Perolehan Aset Tidak Berwujud	7.000.000,00	-
Jumlah	**16.262.734.320,37**	**(9.084.589.718,24)**

Terdapat koreksi saldo awal Piutang dan Utang dengan uraian sebagai berikut:

	2025
1) Koreksi Saldo Awal Piutang	
- Piutang JKN	(15.564.746.618,00)
- Piutang Obat Kronis	(1.051.219.735,00)
- Piutang Obat Kemoterapi	(2.674.942.788,00)
- Piutang Dana Pengaman	66.780.440,00
- Rumah Sakit SK Lerik	(35.190.000,00)
- RSUP Ben Mboi	5.083.000,00
- DINKES Prov NTT	41.400.000,00
Jumlah	**(19.212.835.701,00)**

	2025
2) Koreksi Saldo Awal Utang	
- Hutang Obat	(191.299.952,39)
- Hutang BHP	268.851.950,50
- Hutang AHP	(1.416.500.237,14)
- Hutang Bag Darah	(110.000,00)
- Hutang Gas Medis	(1,00)
- Hutang Bahan Dan Alat	481.492.524,60
- BHP Hemodialisasi	192.981.226,74
- BHP Radiologi	171.832.109,00
- CSSD	(13.862.419,00)
- Jasa Pengangkutan Sampah	42.000.000,00
- Biaya Rujukan Partial di Rumah Sakit Siloam	83.274.000,00
- Jasa Pembakaran Limba Bahan Beracun	(0,20)
- ATK	230.577.896,00
- Bahan dan alat kebersihan	116.078.872,00
Jumlah	**(34.684.030,89)**

9.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp209.789.502.610,35 dan sebesar Rp225.645.878.726,31.

10. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian laporan keuangan sama dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 20 April 2026.

Terdapat pencairan klaim BPJS Tahun Layanan 2025 yang diajukan dan diverifikasi pada Tahun Anggaran 2026, adapun rincian klaim yang diverifikasi tahun 2026 dan menjadi piutang pada laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jenis Layanan	No. BA	Nilai Piutang	Pembayaran
1	Pending III Juli 2025	RITL	181/BA/XI-04/0126	71.627.700,00	71.839.100,00
		RJTL	181/BA/XI-04/0126	211.400,00	
2	Pending II Agustus 2025	RJTL	185/BA/XI-04/0126	3.972.200,00	324.031.000,00
		RITL	185/BA/XI-04/0126	320.058.800,00	
3	Pending I September 2025	RITL	186/BA/XI-04/0126	1.458.492.400,00	1.492.965.400,00
		RJTL	186/BA/XI-04/0126	34.473.000,00	
4	Pending III Agustus 2025	RJTL	706/BA/XI-04/0226	170.300,00	177.352.100,00
		RITL	706/BA/XI-04/0226	177.181.800,00	
5	Pending II September 2025	RITL	707/BA/XI-04/0226	521.654.200,00	531.046.700,00
		RJTL	707/BA/XI-04/0226	9.392.500,00	
6	Pending I Oktober 2025	RITL	711/BA/XI-04/0226	1.855.165.355,00	1.892.753.155,00
		RJTL	711/BA/XI-04/0226	37.587.800,00	
7	Reguler Desember 2025	RITL	856/BA/XI-04/0326	3.908.363.700,00	6.409.991.800,00
		RJTL	856/BA/XI-04/0326	2.501.628.100,00	
8	Pending IV Agustus 2025	RITL	1142/BA/XI-04/0326	43.156.100,00	43.156.100,00
9	Pending III September 2025	RITL	1143/BA/XI-04/0326	175.043.800,00	183.543.600,00
		RJTL	1143/BA/XI-04/0326	8.499.800,00	
10	Pending II Oktober 2025	RITL	1144/BA/XI-04/0326	565.099.800,00	568.275.800,00
		RJTL	1144/BA/XI-04/0326	3.176.000,00	
11	November 2025	Obat Kronis	140/BA/XI-04/0126	274.012.712,00	274.012.712,00
12	Desember 2025	Obat Kronis	527/BA/XI-04/0226	296.615.883,00	296.615.883,00
13	November 2025	Obat Kemoterapi RJTL	140/BA/XI-04/0126	647.617.927,00	875.194.393,00
		Obat Kemoterapi RITL	141/BA/XI-04/0126	227.576.466,00	
14	Desember 2025	Obat Kemoterapi RJTL	528/BA/XI-04/0226	124.662.495,00	815.042.840,00
		Obat Kemoterapi RITL	527/BA/XI-04/0226	690.380.345,00	
15	Oktober 2025	RJTL CAPD	445/616/RSUD3.31	32.000.000,00	32.000.000,00
16	November 2025	RJTL CAPD	445/616/RSUD3.31	24.500.000,00	24.500.000,00
17	Desember 2025	RJTL CAPD	445/59/RSUD3.31	48.000.000,00	48.000.000,00
18	November 2025	RJTL Imunohistokimia	N/A	14.040.000,00	14.040.000,00
19	Desember 2025	RJTL Imunohistokimia	N/A	11.700.000,00	11.700.000,00

Kantor Akuntan Publik
I GEDE OKA & REKAN
Registered Public Accountant
Izin Usaha KAP: KMK No. 131/MK/SK/2025

Laporan No.: 00070/ML/KAP.IGOR/1/IV/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Kupang

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini Wajar yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00070/2.1516/AU.5/11/0463-2/1/IV/2026 tanggal 20 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Kupang merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan

keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Kupang terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pemeriksaan kami terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kami tidak menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan Laporan Keuangan RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Kupang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Namun demikian, kami menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berpengaruh langsung dan tidak material terhadap Laporan Keuangan RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Kupang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan pokok-pokok temuan:

1. Peraturan Pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana dimandatkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang belum menetapkan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Piutang yang sudah tidak dapat ditagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.382.938.279,00 belum dilakukan penghapusan dari laporan keuangan.
4. Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib.
5. Pelaksanaan anggaran berupa Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD serta Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD belum sesuai ketentuan.
6. Terdapat Persediaan Obat dan BHP Kedaluwarsa sebanyak 97 jenis senilai Rp357.433.559,00 belum dilakukan pemusnahan dan penghapusan dari Laporan Keuangan.
7. Penatausahaan Pencatatan BKU pada Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD Belum Dilakukan Secara Optimal.
8. Optimalisasi Penggunaan SIM RS Belum Memadai

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan,

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP. 0463
Badung, 20 April 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan Pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana dimandatkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 433/KEP/HK/2010 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang. Sebagai BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang diberikan fleksibilitas untuk menggunakan secara langsung penerimaan fungsionalnya guna membiayai kegiatan operasionalnya. Pemeriksaan terhadap dokumen rumah sakit, diketahui bahwa RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang belum sepenuhnya memiliki ketentuan yang diwajibkan sebagai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.	Pasal 4	Ada	Pergub Nomor 45 Tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai non PNS, namun perlu direvisi mengacu pada Permendagri No. 79 Tahun 2018
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 22	Ada	Pergub Nomor 96 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas SK Gubernur Nomor 420 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas
3	Remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin	Pasal 24 ayat (1)	Ada	Pergub Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa, tapi perlu disempurnakan menjadi Pergub Tentang Remunerasi
4	Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 38	Ada	Pergub Nomor 45 tahun 2010 tentang pedoman tata kelola
5	Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 41	Ada	Pergub Nomor 43a Tahun 2019 tentang Renstra tahun 2018-2023
6	Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 43	Ada	Pergub Nomor 38 Tahun 2020 tentang SPM
7	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 64 ayat (3)	Ada	Pergub Nomor 44 Tahun 2013 tentang Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta pelaksanaannya, namun perlu direvisi sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Keterangan
8	Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 73	Ada	Pergub Nomor 44 Tahun 2013 tentang Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta pelaksanaannya, namun perlu direvisi sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018
9	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 77 ayat (1)	Ada	Pergub Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman pengadaan Barang Jasa
10	Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 83 ayat (6)	Ada	Pergub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
11	Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 85 ayat (2)	Tidak Relevan	Pergub Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
12	Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 87 ayat (5)	Tidak Ada	Pergub Nomor 103 Tahun 2019 tentang pedoman pinjaman
13	Tata cara kerjasama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah	Pasal 91 ayat (6)	Ada	Pergub Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Dengan Pihak Lain
14	Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 94	Tidak Ada	Pergub Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z Johannes Kupang
15	Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 96	Tidak Ada	Pergub Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang
16	BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 99 ayat (5)	Tidak Ada	Pergub Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:

a. Pasal 4, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. Pasal 22, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. Pasal 24 ayat (1), Remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin;
d. Pasal 38, Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
e. Pasal 41, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
f. Pasal 43, Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
g. Pasal 64 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
h. Pasal 73, Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
i. Pasal 77 ayat (1), Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
j. Pasal 83 ayat (6), Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
k. Pasal 85 ayat (2), Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
l. Pasal 87 ayat (5), Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
m. Pasal 91 ayat (6), Tata cara kerjasama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah;
n. Pasal 94, Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
o. Pasal 96, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
p. Pasal 99 ayat (5), BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap mengakibatkan RSUD belum sepenuhnya memiliki pedoman teknis sebagai dasar pelaksanaan fleksibilitas BLUD.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM dalam menyusun dan mengusulkan peraturan pelaksanaan PPK BLUD sesuai yang dimandatkan dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018.

Atas permasalahan tersebut kami merekomendasikan Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang segera dapat melengkapi aturan pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan PPK-BLUD dengan memperhatikan ketentuan penyederhanaan atau simplifikasi dalam penyusunannya melalui pengelompokan jenis-jenis peraturan sesuai substansinya.

2. RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang belum menetapkan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu bentuk fleksibilitas yang dimiliki Badan Layanan Umum adalah pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan layanan. Hasil pemeriksaan pada BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang diketahui belum memiliki Peraturan Pemimpin BLUD tentang

Pengadaan Barang/Jasa sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan:

a. Pasal 61 ayat (2) Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah.
b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLUD, dan
c. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dalam peraturan pimpinan BLUD meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sebagai BLUD belum sepenuhnya dapat menerapkan fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan BLUD.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang menyusun Peraturan Pemimpin BLUD tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

3. Piutang yang Sudah Tidak Dapat Ditagih per 31 Desember 2025 Sebesar Rp2.382.938.279,00 Belum Dilakukan Penghapusan dari Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2025 dan pengujian rinci terhadap akun Piutang Pelayanan, diketahui bahwa RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang memiliki saldo piutang pelayanan kepada pasien penjamin (BPJS Kesehatan dan pihak ketiga lainnya) sebesar Rp17.239.096.097,00 dengan penjabaran sebagai berikut:

Umur Piutang	%	Kualifikasi	31-12-2025
Piutang Bruto			
0 s.d. 1 Bulan	0,5%	Lancar	7.754.743.636,00
> 1 s.d. 3 Bulan	10,0%	Kurang Lancar	4.005.628.276,00
> 3 s.d. 12 Bulan	50,0%	Diragukan	3.095.785.906,00
> 12 Bulan	100,0%	Macet	2.382.938.279,00
Jumlah Piutang Bruto			**17.239.096.097,00**

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2.382.938.279,00 merupakan piutang dengan umur lebih dari 12 bulan yang dikategorikan sebagai piutang macet dan telah lama tidak dilakukan penagihan secara aktif.

Hasil penelusuran lebih lanjut atas daftar piutang menunjukkan bahwa piutang macet tersebut terdiri dari berbagai jenis piutang, antara lain Piutang JKN, Piutang Obat Kronis, Piutang Dana Pengaman, serta piutang kepada pemerintah daerah dan pihak lainnya sesuai tabel berikut:

No.	Keterangan	31-12-2025
1	Piutang Jasa Raharja	735.233,00
2	Piutang IOM	1.631.024,00
3	Piutang In-Health	1.332.448,00
4	Piutang JKN	748.257.725,00
5	Piutang Obat Kronis	603.900.804,00
6	Piutang Gigi Palsu	52.800.000,00
7	Piutang Covid-19	15.742.000,00
8	Piutang Dana Pengaman	527.759.464,00
9	Piutang Jamkesda Kab. Kupang	35.874.757,00
10	Piutang Jamkesda Kab. TTS	252.243.109,00
11	Piutang Kab. Malaka	245.690,00
12	BPJS Tenaga Kerja	57.742.425,00
13	Rumah Sakit Bhayangkara	40.600,00
14	Rumah Sakit Siloam	2.564.000,00
15	Rumah Sakit SK Lerik	36.546.000,00
16	Rumah Sakit Boromeus	15.345.000,00
17	Rumah Sakit Dedari	6.225.000,00
18	RSUP Ben Mboi	22.708.000,00
19	Rumah Sakit Leona Kupang	1.245.000,00
	Jumlah Piutang Macet	**2.382.938.279,00**

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi yang mengacu pada Pedoman Akuntansi BLUD ditetapkan bahwa penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan, adapun perhitungan penentuan umur dan prosentase penyisihan piutang yang sudah diperhitungkan oleh RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang adalah sebagai berikut:

Umur Piutang	%	Kualifikasi	31-12-2025
Penyisihan:			
s.d. 1 Bulan	0,5%	Lancar	38.773.718,18
> 2 s.d. 3 Bulan	10,0%	Kurang Lancar	400.562.827,60
> 3 s.d. 12 Bulan	50,0%	Diragukan	1.547.892.953,00
> 12 Bulan	100,0%	Macet	2.382.938.279,00
Jumlah Penyisihan			**4.370.167.777,78**
Nilai Buku			**12.868.928.319,22**

Dengan demikian, seluruh piutang dengan umur piutang lebih dari 5 tahun yang digolongkan sebagai piutang tak tertagih (macet) sebagaimana dimaksud dalam tabel diatas sudah disisihkan 100%, sehingga atas piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 sudah disisihkan 100% dan apabila dilakukan penghapusan *(write-off)* tidak mempengaruhi laporan keuangan. Meskipun seluruh piutang tersebut telah dilakukan penyisihan sebesar 100% sesuai kebijakan akuntansi, namun sampai dengan tanggal pemeriksaan belum dilakukan penghapusan *(write-off)* atas piutang yang telah dipastikan tidak dapat ditagih.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang mengatur bahwa piutang harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, serta piutang yang sudah tidak dapat ditagih perlu dilakukan penghapusan agar tidak membebani administrasi dan menjaga kewajaran penyajian laporan keuangan.
b. Pedoman Akuntansi BLUD / Kebijakan Akuntansi RSUD yang mengatur bahwa Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk berdasarkan umur piutang, Piutang yang telah disisihkan 100% dan diyakini tidak tertagih seharusnya dilakukan penghapusan sesuai prosedur yang berlaku.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum dilaksanakannya prosedur penghapusan piutang secara formal, tidak adanya kebijakan teknis atau SOP yang mengatur mekanisme penghapusan piutang secara rinci.

Kondisi tersebut mengakibatkan saldo piutang dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi riil (meskipun telah disisihkan 100%), namun dapat menambah beban administrasi dalam pengelolaan piutang yang sebenarnya sudah tidak dapat ditagih.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang untuk memerintahkan bagian keuangan untuk segera mengusulkan dan melakukan penghapusan piutang sebesar Rp2.382.938.279,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyusun dan menetapkan SOP penghapusan piutang yang jelas dan terdokumentasi, melakukan evaluasi dan penelaahan berkala atas umur piutang untuk mengidentifikasi piutang yang berpotensi tidak tertagih.

4. Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap asset tetap pada tanggal 14 April 2025 di lingkungan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang pada ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:

a. **Terdapat aset rusak berat yang belum dilakukan penghapusan dari laporan keuangan**
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2025 diketahui terdapat aset lainnya berupa aset rusak berat yang belum dilakukan penghapusan dari laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	13-12-2025
Biaya Perolehan	
1) Aset Tetap Rusak Berat	19.518.472.784,00
2) Aset Bawah Kapitalisasi	3.131.151.639,37
Jumlah Harga Perolehan	**22.649.624.423,37**
Akumulasi Penyusutan	**(19.104.546.645,00)**
Nilai Buku	**3.545.077.778,37**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa:

a. Pasal 421 huruf a pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
b. Pasal 422:
   - Ayat (1) pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
   - Ayat (3) pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
c. Pasal 423 pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Pasal 424 ayat (1) pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.
e. Pasal 432:
   - ayat (1) barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: pemusnahan.
   - ayat (3) huruf d penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap rusak berat yang disajikan dalam Aset Lain-lain di Neraca RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tidak menggambarkan nilai manfaat bagi entitas RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang sebagai Pengguna BMD.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum efektifnya Pengurus Barang RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dan Atasan Langsung dalam menyiapkan usulan penghapusan untuk disampaikan secara berjenjang sesuai kewenangannya dan pengurus barang belum melakukan inventarisasi secara evektif.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang memerintahkan Pengurus Barang menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang sudah rusak berat dan tidak dipergunakan lagi mengacu pada ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. **Kartu Inventaris Ruangan (KIR) belum diperbaharui/di-*update***

Pada saat melakukan pemeriksaan fisik atas aset tetap di lingkungan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang pada tanggal 14 April 2025 diketahui pada saat melakukan pemeriksaan keberadaan aset/inventaris di beberapa ruangan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) belum diperbaharui/di-*update*.

Hal ini mengakibatkan kesulitan mengetahui/mengontrol jenis aset/inventaris yang terdapat dalam ruangan tersebut.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Pengurus Barang RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang kurang tertib dalam melakukan pencatatan Administrasi aset tetap disamping hal tersebut juga kurangnya koordinasi dengan penanggung jawab ruangan terkait perubahan inventaris, seperti penambahan atau pengurangan barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan agar Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang memerintahkan Pengurus Barang segera melakukan perbaikan penatausahaan aset tetap.

c. **Terdapat beberapa Aset Tetap Pengadaan Baru yang belum dicantumkan nomor Registrasi**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik aset tetap, penelusuran terhadap Kartu Inventaris Barang (KIB), serta rekonsiliasi dengan daftar aset per 31 Desember 2025, diketahui bahwa terdapat beberapa aset tetap pengadaan Tahun Anggaran berjalan dalam operasional Rumah Sakit, belum dicantumkan nomor registrasi atau kode inventaris pada fisik aset dimaksud.

Aset tersebut antara lain berupa peralatan medis, peralatan kantor, dan peralatan penunjang lainnya dengan nilai perolehan keseluruhan sebesar Rp2.657.052.884,24 (sesuai hasil uji petik). Atas aset-aset tersebut belum dilakukan pelabelan atau penandaan nomor registrasi secara permanen sebagaimana praktik pengelolaan barang milik daerah yang tertib.

1) Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 mengatur bahwa BLUD wajib menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2) Ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, mengatur bahwa setiap barang milik daerah wajib dilakukan pencatatan, inventarisasi, dan pemberian kode barang/nomor register sebagai bagian dari penatausahaan barang.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

1) Proses penatausahaan aset belum dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu setelah proses pengadaan dan serah terima barang.
2) Belum optimalnya koordinasi antara Pejabat Penatausahaan Barang, pengurus barang, dan unit pengguna dalam memastikan pelabelan aset.
3) Tidak adanya monitoring berkala atas kesesuaian antara daftar aset dengan kondisi fisik di lapangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

1) Risiko kehilangan, penyalahgunaan, atau pengalihan aset tanpa terdeteksi menjadi lebih tinggi.
2) Kesulitan dalam proses inventarisasi, rekonsiliasi, dan pengendalian internal atas aset tetap.
3) Potensi ketidakwajaran penyajian aset tetap dalam laporan keuangan apabila tidak didukung dengan sistem pengendalian yang memadai.
4) Melemahnya akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada BLUD.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Direktur Rumah Sakit agar:

1) Memerintahkan Pengurus Barang untuk segera melakukan inventarisasi ulang dan memberikan nomor registrasi/kode inventaris pada seluruh aset tetap yang belum diberi penandaan.

2) Menetapkan prosedur baku bahwa setiap aset hasil pengadaan wajib dicatat dan diberi nomor register sebelum dilakukan pembayaran atau sebelum dimanfaatkan oleh unit kerja.
3) Melakukan rekonsiliasi berkala antara daftar aset pada sistem akuntansi dengan Kartu Inventaris Barang serta kondisi fisik di lapangan.
4) Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui audit internal atau monitoring rutin terhadap penatausahaan aset.

5. Pelaksanaan anggaran berupa Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD serta Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD belum sesuai ketentuan

Pelaksanaan penatausahaan anggaran berupa penyusunan laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang belum dilakukan secara berkala, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Penatausahaan pendapatan dilakukan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang ditandatangani oleh Direktur dan Bendahara Penerimaan setiap bulan dan Register Penutupan Kas.
b. Penatausahaan belanja dilakukan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh Direktur dan Bendahara Pengeluaran setiap bulan dan Register Penutupan Kas.

Setiap bulan Pejabat Keuangan menyusun Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD untuk ditandatangani oleh Direktur, selanjutnya disampaikan kepada BUD selaku PPKD untuk diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD.
Pada Tahun 2025 SP3B BLUD yang dibuat selama 12 bulan diajukan untuk mohon pengesahan, kemudian RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang melakukan pengesahan pendapatan dan belanja 2025 tidak dilakukan dengan tertib setiap bulan berikutnya secara keseluruhan. Dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Tanggal	Nomor SP2B	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7
Jan-25	28/04/2025	900.1.13.3/831/BKUD 4.2	17.163.575.639,20	5.720.019.346,83	44.830.750,00	22.838.764.236,03
Feb-25	28/04/2025	900.1.13.3/832/BKUD 4.2	22.838.764.236,03	6.739.587.083,00	3.329.438.683,00	26.248.912.636,03
Mar-25	15/05/2025	900.1.13.3/978/BKUD 4.1	26.248.912.636,03	9.209.696.252,88	21.333.830.628,00	14.124.778.260,91
Apr-25	21/05/2025	900.1.13.3/1009/BKUD 4.2	14.124.778.260,91	10.670.033.457,00	5.542.566.962,00	19.252.244.755,91
May-25	11/07/2025	900.1.13.3/1439/BKUD 4.2	19.252.244.755,91	10.927.028.017,04	11.731.553.306,00	18.447.719.466,95
Jun-25	30/07/2025	900.1.13.3/1599/BKUD 4.2	18.447.719.466,95	15.518.022.325,04	14.001.262.855,99	19.964.478.936,00
Jul-25	17/09/2025	900.1.3/2006/BKUD 4.2	19.964.478.936,00	11.388.634.996,35	8.740.901.614,14	22.612.212.318,21
Aug-25	27/10/2025	900.1.3/2363/BKUD 4.2	22.612.212.318,21	2.476.797.615,46	10.701.347.275,80	14.387.662.657,87
Sep-25	07/11/2025	900.1.3/2519/BKUD 4.2	14.387.662.657,87	9.690.386.264,31	7.700.728.226,93	16.377.320.695,25
Oct-25	11/12/2025	900.1.3/2931/BKUD 4.2	16.377.320.695,25	16.901.614.217,33	12.081.006.133,46	21.197.928.779,12
Nov-25	18/12/2025	900.1.13.3/3030/BKUD 4.1	21.197.928.779,12	11.258.387.173,53	9.581.010.659,56	22.875.305.293,09
Des-25	25/02/2026	900.1/397/BKUD 4.2	22.875.305.293,09	18.866.840.779,71	26.674.949.690,89	15.067.196.381,91
Jumlah				129.367.047.528,48	131.463.426.785,77	

Permasalahan tersebut tidak sejalan dengan substansi tata kelola PPK BLUD yang antara lain memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan termasuk dalam pelaporan pendapatan dan belanja yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pada Pasal 69 menyebutkan bahwa:

3) Ayat (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
4) Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
5) Ayat (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
6) Ayat (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Penyampaian pelaksanaan anggaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 harus dimaknai setiap bulan agar laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang juga memuat laporan realisasi anggaran BLUD dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan tidak dapat disajikan tepat waktu.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya komitmen pelaksana anggaran, khususnya Bendahara Pengeluaran BLUD dalam mengajukan SPP tidak tepat waktu, sehingga penerbitan SPM dan pencairan realisasi belanja sebagai dasar pengajuan SP3B dan SP2B menjadi terlambat.

Sehubungan dengan hal tersebut kami merekomendasikan . Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang memerintahkan Bendahara Pengeluaran dalam menerbitkan SPP tepat waktu dan pencairan realisasi belanja sebagai dasar pengajuan SP3B untuk kemudian mendapatkan pengesahan berupa SP2B setiap bulan secara tepat waktu.

6. Terdapat Persediaan Obat dan BHP Kedaluwarsa sebanyak 97 jenis senilai Rp357.433.559 belum dilakukan pemusnahan dan penghapusan dari Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan terhadap persediaan, diketahui terdapat persediaan kedaluwarsa berupa persediaan obat dan BHP sebanyak 97 jenis senilai Rp357.433.559 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Obat / BMHP	Jumlah	Satuan	Expired Date	Harga Satuan	Total Harga
1	Antasida tablet bantuan	2.500	Tablet	30/04/2022	62	155.000
2	Azitromisin 500 Mg Tab Bantuan	2.020	Tablet	31/05/2022	15.400	31.108.000
3	Benzathin Benzylpenecilline 2.400 000 Iu Bantuan	5	Vial	31/10/2022	14.500	72.500
4	Brililinta Tab	42	Tablet	05/05/2022	8.323	349.566
5	Colsancetine I G inj	8	Vial	09/05/2022	15.400	123.200
6	Ergotamine coffeine 50 Mg tab	50	Tablet	03/07/2022	224	11.200
7	Favipiravir 200 Mg Bantuan	104	Tablet	07/09/2022	14.850	1.544.400
8	Favipiravir 200 Mg Bantuan	84	Tablet	07/09/2022	10.339	868.476
9	Moxifloxacin Tab	5	Tablet	03/07/2022	9.878	49.390
10	Stessolid rectal 10 mg	218	Tube	29/08/2022	22.849	4.981.082
11	Stessolid rectal 5 mg	62	Tube	29/09/2022	15.718	974.516
12	Sebivo 600 mg tab	2	Tablet	07/03/2022	28.300	56.600

No.	Nama Obat / BMHP	Jumlah	Satuan	Expired Date	Harga Satuan	Total Harga
13	Sifrol 0,375 mg tab	14	Tablet	07/03/2022	8.300	116.200
14	Infimicyn Injeksi	19	Vial	01/02/2022	137.500	2.612.500
15	Oseltamivir Tablet	1.600	Tablet	01/08/2020	16.500	26.400.000
16	Maxprinol 500 Mg	520	Tablet	Jan-23	11.000	5.720.000
17	Maxprinol 500 Mg	272	Tablet	Apr-23	11.000	2.992.000
18	Maxprinol 500 Mg	24	Tablet	Apr-23	13.860	332.640
19	Tocilizumab 80 Mg/4ml Inj	35	Vial	Feb-23	1.006.182	35.216.370
20	Tocilizumab 80 Mg/4ml Inj	5	Vial	Feb-23	1.106.800	5.534.000
21	Avitrex 500 Mg Inj	11	Vial	Dec-22	1.887.000	20.757.000
22	Moxifloxacin Tab Bantuan	372	Tablet	Jun-23	22.500	8.370.000
23	Zidovudin Tablet Bantuan	943	Tablet	Apr-23	2.210	2.084.030
24	Kanamicyn 1.000 Mg Inj Bantuan	25	Vial	Jul-23	17.074	426.850
25	Griseofulvin 500 Mg Tab	21	Tablet	Nov-22	1.813	38.073
26	Methoklopramid 10 Mg Tab	40	Tablet	Jan-23	70	2.800
27	Propanolol 10 Mg Tab	48	Tablet	Mar-23	710	34.080
28	Oxiclorin 200 Mg Tab	44	Tablet	Mar-23	3	132
29	Piroxicam 10 Mg Tab	12	Tablet	Mar-23	275	3.300
30	Glibenklamid Tab	89	Tablet	Jun-23	121	10.769
31	Probiostin Capsul	38	Capsul	Mar-23	11.556	439.128
32	Colsancetine 1 G Inj	7	Vial	Apr-23	17.871	125.097
33	KCL	980	Vial	Nov-23	3.472	3.402.560
34	Cefotaxim 1 G Injeksi	240	Vial	Oct-23	3.197	767.280
35	Clozapin 100 Mg	205	Tablet	Oct-23	11.176	2.291.080
36	Primaquin Tablet	180	Tablet	Aug-23	389	70.020
37	Primaquin 15 Mg Tab Bantuan	5	Tablet	Aug-23	253	1.265
38	Alprazolam 0,25 Mg Tab	43	Tablet	Sep-23	579	24.897
39	Favipiravir 200 Mg Bantuan	54	Tablet	Aug-23	10.339	558.306
40	Tetagam	110	Vial	Jan-22	171.511	18.866.210
41	Gemfibroxil 300 mg/E-Cat tab	568	Tablet	Apr-24	348	197.744
42	Gemfibroxil 300 mg/E-Cat tab	160	Tablet	Apr-24	348	55.702
43	Pyrazinamide 500 Mg Tab E- Cath	2000	Tablet	Sep-24	286	572.000
44	Pyrazinamide 500 Mg Tab E- Cath	50	Tablet	Sep-24	286	14.300
45	DHP-FRIMAL(Dihydroantemisinin 40mg/Piperaquinephosphate 320mg)	51	Tablet	May-24	1.960	99.960
46	Lamivudin 150 mg TAB	69	Tablet	Oct-24	1.640	113.160
47	Primaquin 15 mg (program)/bantuan	37	Tablet	Mar-24	375	13.875
48	Primaquin tab	79	Tablet	Sep-24	242	19.118
49	PYRAZINAMIDE 500 MG TAB bantuan	207	Tablet	Jul-24	346	71.622
50	Tenofovir 300 mg bantuan	90	Tablet	Oct-24	2.576	231.840
51	Veklury (REMDESIVIR) INJ Bantuan	10	Vial	Apr-24	5.865.700	58.657.000
52	BIOSAVE 5 ml (SABU)	2	Ampul	Nov-24	688819	1.377.638
53	BIOSAVE 5 ml (SABU)	6	Ampul	Nov-24	688819	4.132.914
54	Clozapine 100 mg tab	11	Tablet	Nov-23	11.176	122.936
55	Gemfibrozil 300 mg tab	130	Tablet	Apr-24	345	44.851

No.	Nama Obat / BMHP	Jumlah	Satuan	Expired Date	Harga Satuan	Total Harga
56	Gliquidon 30 Mg tab	53	Tablet	Apr-24	1.250	66.250
57	Heplav capsul	141	Tablet	Jul-24	5.365	756.465
58	Kalxetin 10 mg kap	1050	Tablet	Nov-24	800	840.000
59	Kalxetin 10 mg kap	338	Tablet	Nov-24	800	270.400
60	Ketokonazol 200 mg TAB	56	Tablet	Aug-24	216	12.096
61	Kina tab	159	Tablet	Jan-24	1.289	204.951
62	Kina tab	79	Tablet	Feb-24	1.289	101.831
63	Lodomer 5 Mg Inj	97	Ampul	Dec-24	12.637	1.225.789
64	Lodomer 5 Mg Tab	656	Tablet	Nov-24	1.987	1.303.472
65	Meylon inj	42	Flacon	Aug-24	7.550	317.100
66	MgSO4 20% INJ	36	Flacon	Jun-24	4.973	179.028
67	Xarelto 15 mg tab	13	Tablet	Feb-24	25.779	335.127
68	ISOSORBIT 5 MG TAB E-CATH	22.200	Tablet	28/02/2025	-	-
69	KN-2 500 ML E-CATH	20	Botol	30/09/2025	11.850	237.000
70	RIFAMPICIN 450 MG E-CATH	1.200	Tablet	30/12/2025	1.074	1.288.800
71	Acyclovir 200 mg tab	1.600	Tablet	31/12/2024	525	840.048
72	Dopamin 20 mg/ml Inj	40	Ampul	31/03/2025	4.650	186.000
73	FLAMICORT 10 MG/5ML INJEKSI	4	Ampul	31/07/2025	138.750	555.000
74	LATANOPROST ED	3	Botol	31/05/2025	57.052	171.156
75	Lodomer 5 mg Inj	12	Ampul	31/12/2024	12.637	151.648
76	SIBITAL 50 MG TAB	200	Tablet	31/05/2025	2.424	484.848
77	Stessolid rectal 10 mg	10	Tube	30/06/2025	47.874	478.743
78	Oseltemivir 75 mg Tab	61	Tablet	31/01/2025	14.300	872.300
79	BIOSAVE 5 ml (SABU)	5	Ampul	31/01/2025	688.819	3.444.097
80	BIOSAVE 5 ml (SABU)	10	Ampul	31/01/2025	688.819	6.888.194
81	BIOSAVE 5 ml (SABU)	4	Ampul	31/01/2025	688.819	2.755.278
82	BIOSAVE 5 ml (SABU)	5	Ampul	30/04/2025	688.819	3.444.097
83	BIOSAVE 5 ml (SABU)	3	Ampul	30/04/2025	688.819	2.066.458
84	D10 0,18 inf	80	Botol	30/06/2025	13.250	1.060.006
85	OSELTAMIVIR 75 MG TAB BANTUAN	2.400	Tablet	31/07/2025	20.183	48.439.200
86	ABACAVIR 300 MG TAB. BANTUAN	120	Tablet	30/05/2025	2.161	259.368
87	ARTESUNATE INJ 60mg/ml	12	Ampul	30/05/2025	688.819	8.265.833
88	ARTESUNATE INJ 60mg/ml	3	Ampul	30/05/2025	688.819	2.066.458
89	Darplex Tab	12	Tablet	31/10/2025	2.134	25.608
90	Darplex Tab	6	Tablet	31/10/2025	2.134	12.804
91	DHP-FRIMAL (Dihydroantemisinin 40 mg/Piperaquinephosphate 320 mg)	29	Tablet	31/10/2025	1.960	56.840
92	Ethionamide 250 mg bantuan	207	Tablet	31/01/2025	1.566	324.162
93	Ethionamide 250 mg bantuan	200	Tablet	31/01/2025	1.566	313.200
94	PRIMAQUINE 15mg (Program)/ BANTUAN	66	Tablet	30/06/2025	375	24.750
95	PRIMAQUINE 15mg (Program)/ BANTUAN	20	Tablet	30/11/2025	375	7.500
96	Zidovudin 300+Lamivudin 150 Bantuan	5.340	Tablet	31/08/2025	4.110	21.947.400
97	Zidovudin 300+Lamivudin 150 Bantuan	82	Tablet	31/08/2025	4.110	337.020
TOTAL						357.433.559

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 421 dan Pasal 432 Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengolahan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa:

a. Pemusnahaan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena pemindahtangankan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan, atau sebab lain.

7. **Penatausahaan Pencatatan BKU pada Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD Belum Dilakukan Secara Optimal**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu, serta rekonsiliasi antara saldo kas menurut BKU dengan rekening koran dan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025, diketahui bahwa penatausahaan pencatatan BKU pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD belum dilakukan secara optimal.

Adapun permasalahan yang ditemukan antara lain:

a. Terdapat keterlambatan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran sehingga tidak dilakukan secara harian.
b. Ditemukan selisih antara saldo kas menurut BKU dengan saldo rekening koran yang belum direkonsiliasi sampai dengan tanggal pemeriksaan.
c. Buku pembantu (buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu rincian objek penerimaan) belum diselenggarakan secara lengkap dan tertib.
d. BKU belum ditutup dan ditandatangani secara periodik oleh Bendahara dan pejabat yang berwenang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengendalian atas kas belum berjalan secara memadai.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

a. Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 mengatur bahwa BLUD wajib menerapkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
b. Ketentuan mengenai penatausahaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa Bendahara wajib menyelenggarakan BKU dan buku pembantu serta melakukan pencatatan setiap transaksi secara lengkap dan tepat waktu.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a. Kurangnya pemahaman bendahara terhadap ketentuan teknis penatausahaan BKU.
b. Tidak dilakukannya pengawasan dan reviu secara berkala oleh atasan langsung maupun pejabat pengelola keuangan BLUD.
c. Beban kerja bendahara yang tinggi tanpa didukung sistem administrasi atau aplikasi pencatatan yang memadai.
d. Belum adanya SOP tertulis yang mengatur tata cara penatausahaan dan penutupan BKU secara periodik.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Informasi saldo kas tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya (real time).
b. Meningkatnya risiko kesalahan pencatatan, penyalahgunaan kas, atau terjadinya fraud yang tidak segera terdeteksi.
c. Penyajian laporan keuangan berpotensi tidak andal dan tidak akurat.

d. Melemahnya sistem pengendalian intern pada pengelolaan kas BLUD.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Direktur BLUD agar:

a. Memerintahkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencatatan transaksi secara harian dan menutup BKU setiap akhir bulan secara tertib.
b. Melakukan rekonsiliasi rutin antara BKU dan rekening koran sekurang-kurangnya setiap akhir bulan serta mendokumentasikan hasil rekonsiliasi tersebut.
c. Menyusun dan menetapkan SOP penatausahaan kas yang mengatur mekanisme pencatatan, penutupan, dan pengawasan BKU.
d. Meningkatkan fungsi pengawasan melalui reviu berkala oleh Pejabat Pengelola Keuangan BLUD atau Satuan Pengawas Internal.
e. Memberikan pembinaan teknis (bimtek) kepada bendahara terkait penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Optimalisasi Penggunaan SIM RS Belum Memadai

Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS), wawancara dengan unit pelayanan, serta pengujian atas integrasi data keuangan dan pelayanan per 31 Desember 2025, diketahui bahwa pemanfaatan SIM RS pada BLUD belum dilakukan secara optimal.

Adapun kondisi yang ditemukan antara lain:

a. Beberapa unit pelayanan masih melakukan pencatatan manual dan melakukan input data secara tidak real time ke dalam sistem.
b. Modul keuangan dan modul pelayanan belum terintegrasi secara penuh sehingga diperlukan rekonsiliasi manual antara laporan pelayanan dan laporan pendapatan.
c. SIM RS belum dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan manajerial seperti analisis pendapatan per poli, BOR (Bed Occupancy Rate), atau laporan umur piutang secara otomatis.
d. Terdapat perbedaan data antara laporan yang dihasilkan sistem dengan laporan manual yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi belum sepenuhnya mendukung efektivitas pengendalian dan pengambilan keputusan manajerial.

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 mengatur bahwa BLUD wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat dan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan Standar pengelolaan rumah sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 menekankan pentingnya dukungan sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a. Belum adanya kebijakan yang mewajibkan seluruh unit menggunakan SIM RS secara penuh (mandatory system usage).
b. Keterbatasan pelatihan dan pemahaman pengguna terhadap fitur dan modul yang tersedia dalam sistem.
c. Keterbatasan dukungan teknis dan pengembangan sistem untuk menyesuaikan kebutuhan manajemen.
d. Kurangnya monitoring dan evaluasi berkala atas efektivitas penggunaan SIM RS.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Proses penyusunan laporan keuangan dan laporan manajerial menjadi kurang efisien karena masih bergantung pada rekonsiliasi manual.
b. Meningkatnya risiko kesalahan pencatatan dan inkonsistensi data.

c. Informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan manajerial kurang optimal dan tidak real time.
d. Sistem pengendalian intern atas pendapatan dan pelayanan menjadi kurang efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Direktur BLUD agar:

a. Menetapkan kebijakan yang mewajibkan seluruh unit pelayanan dan keuangan menggunakan SIM RS sebagai satu-satunya sumber data resmi (single source of truth).
b. Melakukan evaluasi dan pengembangan modul agar seluruh proses bisnis (pelayanan, farmasi, klaim, keuangan, dan aset) terintegrasi secara penuh.
c. Menyelenggarakan pelatihan berkala bagi pengguna untuk meningkatkan kompetensi dan pemanfaatan fitur sistem.
d. Melakukan monitoring dan audit internal secara berkala atas konsistensi penggunaan SIM RS serta kesesuaian data dengan laporan keuangan.
e. Mengembangkan dashboard manajerial berbasis SIM RS untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada . Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang melakukan pemusnahan dan penghapusan terhadap persediaan kedaluwarsa untuk kemudian berdasarkan berita acara pemusnahan tersebut maka akan dilakukan pengusulan penghapusan persediaan yang telah kedaluwarsa dari Laporan Keuangan.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan

LAPORAN KEUANGAN
BLUD RSKD JIWA NAIMATA
KUPANG

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RSKD JIWA NAIMATA KUPANG

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RSKD JIWA NAIMATA KUPANG

Jalan Taebenu RT 007/RW 03 Kelurahan Naimata,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
Kode Pos: 85147
Email : rsjnaimatakupang@yahoo.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA BLUD	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	3
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. Laporan Realisasi Anggaran	6
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	7
3. Laporan Neraca	8
4. Laporan Operasional	9
5. Laporan Arus Kas	10
6. Laporan Perubahan Ekuitas	12
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
1. Umum	13
2. Pernyataan Kepatuhan terhadap PSAP BLU	28
3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	28
4. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	69
5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	75
6. Penjelasan Pos-pos Neraca	76
7. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	82
8. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas	86
9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	87
10. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan	87
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	88

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH JIWA NAIMATA KUPANG
Jalan Taebenu RT 007/RW 03 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa
Kota Kupang, Kode Pos 85147, Email : rsjnaimatakupang@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 RSKD JIWA NAIMATA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Novy Enggelin Elim, S. Farm.Apt
   Alamat Kantor : Jalan Taebenu RT 007/RW 03 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
   Alamat Sesuai KTP : Jln. Ainiba I-F, RT 023/RW 007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang
   NIP : 19761116 199603 2 002
   Jabatan : Plt. Direktur/Pemimpin

2. Nama : Thobi F. Ndaumanu, SE
   Alamat Kantor : Jalan Taebenu RT 007/RW 03 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
   Alamat Sesuai KTP : BTN Kolhua Blok M. No. 6, RT 015/RW 005, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
   NIP : 19750305 200112 1 003
   Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha/Pejabat Keuangan

3. Nama : I Nyoman Suwastika, SKM.,M.Sc
   Alamat Kantor : Jalan Taebenu RT 007/RW 03 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
   Alamat Sesuai KTP : BTN Kolhua Blok D. No. 83, RT 012/RW 004, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
   NIP : 19700128 199303 1 009
   Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan/Pejabat Teknis Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

4. Nama : Nelci Ndun, S. Farm., Apt
   Alamat Kantor : Jalan Taebenu RT 007/RW 03 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
   Alamat Sesuai KTP : Jln. Melodi, RT 023/RW 011, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang
   NIP : 19750101 199501 2 001
   Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis/ Pejabat Teknis Bidang Penunjang Medis

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama RSKD Jiwa Naimata Kupang.

Pejabat Pengelola BLUD RSKD Jiwa Naimata Kupang.

Nama	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Pengelola BLUD	Tanda Tangan
Novy Enggelin Elim, S. Farm.Apt NIP. 19761116 199603 2 002	Plt. Direktur	Pemimpin BLUD	.....
Thobi F. Ndaumanu, SE NIP. 19750305 200112 1 003	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan	.....
I Nyoman Suwastika, SKM.,M.Sc NIP. 19700128 199303 1 009	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Pejabat Teknis Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	.....
Nelci Ndun, S. Far. Apt NIP. 19750101 199501 2 001	Kepala Bidang Penunjang Medis	Pejabat Teknis Bidang Penunjang Medis	.....

Kupang, 30 Maret 2026

Laporan No: 00055/2.1516/AU.5/11/0463-2/1/III/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh

hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00055/ML/KAP.IGOR/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan

00055

KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA & REKAN

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 30 Maret 2026

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH JIWA NAIMATA KUPANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan**	*4.*				
2	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	*4.1.a*	8.550.045.387,00	11.453.653.752,00	133,96%	5.324.519.593,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	*4.1.b*	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	*4.1.c*	-	10.200.000,00	-	2.250.000,00
5	Pendapatan Hibah	*4.1.d*	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	*4.1.e*	81.939.613,00	125.243.649,17	-	43.543.444,00
7	**Jumlah Pendapatan**		**8.631.985.000,00**	**11.589.097.401,17**	**134,26%**	**5.370.313.037,00**
8	**Belanja**					
9	**Belanja Operasi**	*4.2*				
10	Belanja Pegawai	*4.2.a*	66.480.000,00	65.980.000,00	99,25%	40.520.000,00
11	Belanja Barang dan Jasa	*4.2.b*	7.650.398.347,00	7.498.917.264,00	98,02%	2.868.153.354,33
12	Belanja Bunga	*4.2.c*	-	-	-	-
13	Belanja Lainnya	*4.2.d*	-	-	-	-
14	**Jumlah Belanja Operasi**		**7.716.878.347,00**	**7.564.897.264,00**	**98,03%**	**2.908.673.354,33**
15	**Belanja Modal**	*4.3*				
16	Belanja Modal Tanah	*4.3.a*	-	-	-	-
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	715.643.960,00	676.556.272,00	94,54%	941.902.375,00
18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	*4.3.c*	1.491.892.000,00	1.483.690.000,00	99,45%	-
19	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	*4.3.d*	-	-	-	6.750.000,00
20	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	*4.3.e*	220.108.000,00	191.771.310,00	87,13%	450.000,00
21	Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan	*4.3.f*	-	-	-	-
22	Belanja Modal Aset Lainnya	*4.3.g*	-	-	-	-
23	**Jumlah Belanja Modal**		**2.427.643.960,00**	**2.352.017.582,00**	**96,88%**	**949.102.375,00**
24	**Jumlah Belanja**		**10.144.522.307,00**	**9.916.914.846,00**	**97,76%**	**3.857.775.729,33**
25	**Surplus (Defisit)**		**(1.512.537.307,00)**	**1.672.182.555,17**	**-110,55%**	**1.512.537.307,67**
26	**Pembiayaan**					
27	**Penerimaan Pembiayaan**		-	-	-	-
28	Penerimaan SILPA Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
29	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
30	**Jumlah Penerimaan**		-	-	-	-
31	**Pengeluaran Pembiayaan**		-	-	-	-
32	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
33	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
34	**Jumlah Pengeluaran**		-	-	-	-
35	**Pembiayaan Neto**		-	-	-	-
36	**Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran**		**(1.512.537.307,00)**	**1.672.182.555,17**	**-110,55%**	**1.512.537.307,67**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 30 Maret 2026
Plt. Direktur
Rumah Sakit Khusus Daerah
Jiwa Naimata Kupang,

Novy Enggelin Elim, S.Farm.Apt
NIP. 19761116 199603 2 002

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH JIWA NAIMATA KUPANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.1*	**1.513.355.907,67**	**818.600,00**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.2*	-	-
3	**Sub Total**		**1.513.355.907,67**	**818.600,00**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	*5.3*	1.672.182.555,17	1.512.537.307,67
5	**Sub Total**		**3.185.538.462,84**	**1.513.355.907,67**
6	Pendapatan APBD	*5.4*	-	-
7	Setoran ke Kas Daerah	*5.5*	(818.600,00)	-
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	*5.6*	**3.184.719.862,84**	**1.513.355.907,67**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 30 Maret 2026
Plt. Direktur
Rumah Sakit Khusus Daerah
Jiwa Naimata Kupang,

Novy Engelin Elim, S.Farm.Apt
NIP. 19761116 199603 2 002

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH JIWA NAIMATA KUPANG
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	*6.1*	-	-
4	Kas pada BLUD	*6.2*	3.284.836.722,84	1.515.611.982,67
5	Piutang Operasional BLUD	*6.3*	530.297.139,00	422.447.484,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*6.3*	-	-
7	Persediaan BLUD	*6.4*	457.450.219,90	472.759.548,89
8	**Jumlah Aset Lancar**		**4.272.584.081,74**	**2.410.819.015,56**
9	**Aset Tetap**	*6.5*		
10	Tanah		46.100.000.000,00	46.100.000.000,00
11	Peralatan dan Mesin		72.057.748.305,00	71.303.317.317,00
12	Gedung dan Bangunan		28.319.433.802,85	26.835.743.802,85
13	Jalan, Jaringan dan Irigasi		2.712.151.000,00	2.712.151.000,00
14	Aset Tetap Lainnya		150.389.660,00	43.550.000,00
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	**Jumlah Harga Perolehan**		**149.339.722.767,85**	**146.994.762.119,85**
17	*Akumulasi Penyusutan*		(75.620.167.028,19)	(68.177.488.531,41)
18	**Nilai Buku Aset Tetap**		**73.719.555.739,66**	**78.817.273.588,44**
19	**Aset Lainnya**	*6.6*		
20	Aset Tak Berwujud		7.500.000,00	7.500.000,00
21	Aset Lain-lain		-	-
22	**Jumlah Harga Perolehan**		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**
23	*Akumulasi Amortisasi/Penyusutan*		(4.500.000,00)	(3.000.000,00)
24	**Nilai Buku Aset Lainnya**		**3.000.000,00**	**4.500.000,00**
25	**JUMLAH ASET**		**77.995.139.821,40**	**81.232.592.604,00**
26	**KEWAJIBAN**			
27	**Kewajiban Jangka Pendek**	*6.7*		
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		100.116.860,00	2.256.075,00
29	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		1.128.667.507,80	1.144.814.366,20
30	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
31	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		**1.228.784.367,80**	**1.147.070.441,20**
32	**Kewajiban Jangka Panjang**			
33	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
34	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**		-	-
35	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**1.228.784.367,80**	**1.147.070.441,20**
36	**EKUITAS**	*6.8*		
37	Ekuitas		76.766.355.453,60	80.085.522.162,80
38	**JUMLAH EKUITAS**		**76.766.355.453,60**	**80.085.522.162,80**
39	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**		**77.995.139.821,40**	**81.232.592.604,00**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 30 Maret 2026
Plt. Direktur
Rumah Sakit Khusus Daerah
Jiwa Naimata Kupang,

Novy Engelin Elim, S.Farm.Apt
NIP. 19761116 199603 2 002

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH JIWA NAIMATA KUPANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Kegiatan Operasional**			
2	**Pendapatan**	*7.1*		
3	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	*7.1.a*	11.584.521.532,00	5.130.441.430,29
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*7.1.b*	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	*7.1.c*	10.200.000,00	2.250.000,00
6	Pendapatan Hibah	*7.1.d*	-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya	*7.1.e*	102.236.149,17	43.543.444,00
8	Pendapatan APBD	*7.1.f*	-	-
9	**Jumlah Pendapatan**		**11.696.957.681,17**	**5.176.234.874,29**
10	**Beban**	*7.2*		
11	Beban Pegawai	*7.2.a*	65.980.000,00	40.520.000,00
12	Beban Barang dan Jasa	*7.2.b*	7.505.136.668,59	3.351.459.267,52
13	Beban Bunga	*7.2.c*	-	-
14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	*7.2.d*	-	-
15	Beban Penyusutan dan Amortisasi	*7.2.e*	7.444.178.496,78	11.993.835.245,57
16	Biaya Lain-lain	*7.2.f*	-	-
17	**Jumlah Beban**		**15.015.295.165,37**	**15.385.814.513,09**
18	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**(3.318.337.484,20)**	**(10.209.579.638,80)**
19	**Kegiatan Non Operasional**	*7.3*		
20	Kegiatan Non Operasional		-	-
21	**Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional**		-	-
22	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**(3.318.337.484,20)**	**(10.209.579.638,80)**
23	**Pos Luar Biasa**	*7.4*		
24	Pendapatan (Beban) Pos Luar Biasa		-	-
25	**Jumlah Pos Luar Biasa**		-	-
26	**Surplus (Defisit)-LO**		**(3.318.337.484,20)**	**(10.209.579.638,80)**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 30 Maret 2026
Plt. Direktur
Rumah Sakit Khusus Daerah
Jiwa Naimata Kupang,

Novy Engelin Elim, S.Farm.Apt
NIP. 19761116 199603 2 002

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH JIWA NAIMATA KUPANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**	*8.1*		
2	**Arus Masuk Kas**	*8.1.a*		
3	Pendapatan APBD		-	-
4	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan		11.453.653.752,00	5.324.519.593,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerja Sama		10.200.000,00	2.250.000,00
7	Pendapatan Hibah		-	-
8	Pendapatan Usaha Lainnya		125.243.649,17	43.543.444,00
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**11.589.097.401,17**	**5.370.313.037,00**
10	**Arus Kas Keluar**	*8.1.b*		
11	Belanja Pegawai		65.980.000,00	40.520.000,00
12	Belanja Barang dan Jasa		7.498.917.264,00	2.868.153.354,33
13	Belanja Bunga Utang Pinjaman Melalui BLUD		-	-
14	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**7.564.897.264,00**	**2.908.673.354,33**
15	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**4.024.200.137,17**	**2.461.639.682,67**
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	*8.2*		
17	**Arus Masuk Kas**	*8.2.a*		
18	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
21	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi		-	-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
23	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
24	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
25	**Arus Keluar Kas**	*8.2.b*		
26	Belanja Modal Tanah		-	-
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		676.556.272,00	941.902.375,00
28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.483.690.000,00	-
29	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		-	6.750.000,00
30	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		191.771.310,00	450.000,00
31	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-
32	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**2.352.017.582,00**	**949.102.375,00**
33	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(2.352.017.582,00)**	**(949.102.375,00)**
34	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	*8.3*		
35	**Arus Masuk Kas**	*8.3.a*	-	-
36	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
37	**Arus Keluar Kas**	*8.3.b*		
38	Setoran Kas ke BUD		818.600,00	-
39	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**818.600,00**	-
40	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		**(818.600,00)**	-

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH JIWA NAIMATA KUPANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
41	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	*8.4*		
42	**Arus Kas Masuk**	*8.4.a*		
43	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		744.278.393,00	212.055.608,66
44	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**744.278.393,00**	**212.055.608,66**
45	**Arus Kas Keluar**	*8.4.b*		
46	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		646.417.608,00	209.799.533,66
47	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**646.417.608,00**	**209.799.533,66**
48	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**97.860.785,00**	**2.256.075,00**
49	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**	*8.5.b*	**1.769.224.740,17**	**1.514.793.382,67**
50	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**	*8.5.a*	**1.515.611.982,67**	**818.600,00**
51	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**	*8.5.c*	**3.284.836.722,84**	**1.515.611.982,67**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 30 Maret 2026
Plt. Direktur
Rumah Sakit Khusus Daerah
Jiwa Naimata Kupang,

Novy Engelin Elim, S.Farm.Apt
NIP. 19761116 199603 2 002

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH JIWA NAIMATA KUPANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Ekuitas Awal**	*9.1*	**80.085.522.162,80**	**90.295.101.801,60**
2	**Surplus (Defisit) LO**	*9.2*	**(3.318.337.484,20)**	**(10.209.579.638,80)**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	*9.3*	**(829.225,00)**	-
	Setoran ke Kas Daerah		(818.600,00)	-
	Dampak Perubahan Nilai Piutang		(10.625,00)	-
4	**Ekuitas Akhir**	*9.4*	**76.766.355.453,60**	**80.085.522.162,80**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 30 Maret 2026
Plt. Direktur
Rumah Sakit Khusus Daerah
Jiwa Naimata Kupang,

Novy Engelin Elim, S.Farm.Apt
NIP. 19761116 199603 2 002

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH JIWA NAIMATA KUPANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

1. Umum

a. Sejarah dan Kedudukan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang

1) Sejarah Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata

Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang mulai dibangun pada tahun 2007 dengan status sebagai Poliklinik RS Jiwa Naimata Kupang. Gedung pertama yang dibangun yaitu Gedung Unit Gawat Darurat dan Gedung Administrasi, setelah itu pembangunan gedung berkelanjutan pada Tahun 2016, 2018, 2020 dan 2021. Pada tanggal 8 Desember 2018 terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa. Dengan terbitnya Perda tersebut pada tanggal 23 Desember 2018 RSKD Jiwa Naimata Kupang diresmikan oleh Gubernur NTT dengan pelayanan awal pasien rawat jalan dan pada tahun 2018 melayani pasien rawat inap.

Pada tahun 2019 RS Jiwa Naimata Kupang berubah status menjadi UPTD RS Jiwa Naimata Kupang dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan pelayanan Unit Gawat Darurat, rawat jalan, rawat inap, laboratorium dan farmasi.

Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang saat ini merupakan satu-satunya rumah sakit jiwa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan seluas 5 Hektar dan jumlah gedung sebanyak 13 gedung dan saat ini memiliki kapasitas tempat tidur 35 bed. Rumah Sakit Jiwa Naimata sebagai satu-satunya rumah sakit jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu berusaha membenahi diri dalam segala bidang sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur secara profesional dan bermutu dalam bidang kesehatan jiwa.

2) Kedudukan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata

Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang merupakan satu satunya Rumah Sakit Jiwa tipe C milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 22/KEP/HK/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka meningkatkan pelayanan public, Rumah Sakit Jiwa Naimata sebagai BLUD dapat merencanakan, mengelola secara langsung pendapatannya, dan mengendalikan semua urusan internal rumah sakit secara lebih fleksibel.

Pola pengelolaan keuangan (PPK) yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah kaidah manajemen yang baik (*good corporate governance*) dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Untuk menjamin tujuan rumah sakit tercapai dengan penggunaan sumberdaya se-efisien mungkin, maka peningkatan transparansi dan akuntabilitas perlu menerapkan konsep tata kelola yang baik (*good coorporate governance*).

b. Dasar Hukum

Untuk mendukung penerapan PPK BLUD, telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11) Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
15) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 40);
16) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor ...);
17) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
18) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 038);
19) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pihak Lain;
21) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 048);
22) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Investasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 049);

23) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 104 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusu Daerah Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 104);
25) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 114 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor ...);
26) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 116 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 116);
27) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22/KEP/HK/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
28) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 178/KEP/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
29) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/54/BKUD3/2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
30) Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Nomor UPDINKES.445.2/RSJNK/045/I/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.

c. Lokasi

RS Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang yang saat ini berada di Kota Kupang adalah merupakah rumah sakit kelas C milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terletak strategis yaitu tepatnya di Jalan Taebenu RT 007/RW 03 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa Kota Kupang dan rumah sakit ini terletak dekat dengan lokasi pemukiman.

d. Visi, Misi, Tujuan, Nilai-Nilai, dan Motto

1) Visi Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang

Visi Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang adalah "Menjadi Pusat Rujukan Kesehatan Jiwa di Nusa Tenggara Timur yang professional dan berbudaya".

2) **Misi Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang**
   a) Memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan penunjang lainnya yang bermutu dan terjangkau oleh Masyarakat;
   b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten, professional dan berintegritas;
   c) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa melalui kemitraan lintas sektor;
   d) Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan bidang kesehatan jiwa yang unggul dan professional.

3) **Motto Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang**

   "Melayani dengan Hati yang Terbuka"

4) **Maksud, Tujuan dan Sasaran**
   a) Maksud dan Tujuan

      Maksud dan tujuan rumah sakit adalah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan dan pemulihan untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna, komprehensif, bermutu dan berkeadilan demi:
      (1) Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, bermutu, terintegrasi, multidisiplin, *evidence based*, responsif dan *patient centered* dengan layanan unggulan rehabilitasi psikososial;
      (2) Terciptanya SDM unggul;
      (3) Terwujudnya peran RS Jiwa Naimata sebagai pusat riset kesehatan jiwa di bidang rehabilitasi psikososial;
      (4) Terciptanya kemitraan dalam layanan kesehatan jiwa.

   b) Sasaran
      (1) Meningkatnya jenis pelayanan unggulan untuk meningkatkan pendapatan RS;
      (2) Meningkatnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
      (3) Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit;
      (4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian Masyarakat.

e. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Rumah Sakit

1) Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang

Bagan struktur organisasi UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang seperti telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 104 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

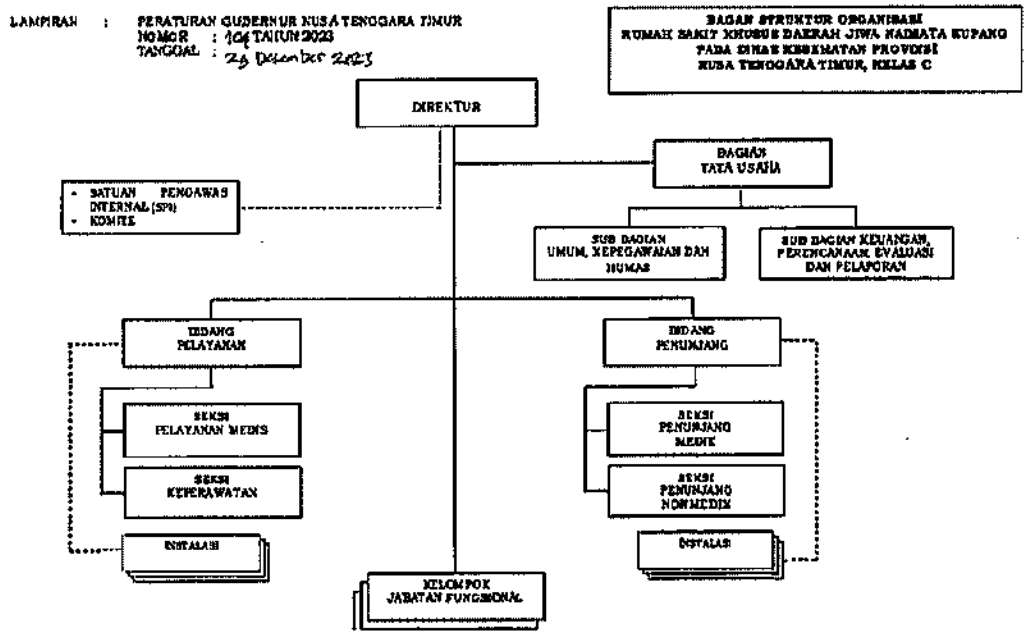

2) Susunan Pejabat Pengelola BLUD

Susunan Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 178/KEP/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Perintah Nomor: 816.2.1/168/BKD.3.2, dengan susunan sebagai berikut:

Jabatan	Kedudukan	Nama
Plt. Direktur	Pemimpin	dr. Aletha D. Pian, MPH
Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	Pejabat Keuangan	I Nyoman Suwastika, S.KM., M.Sc
Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan	Pejabat Teknis Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Servia I. Bathe, S.Farm., Apt
Kepala Seksi Penunjang Medis	Pejabat Teknis Bidang Penunjang Medis	Yansen Marthen Mbau, S.KM

Kemudian pada Tahun 2026 terdapat perubahan susunan pejabat pengelola BLUD sebagai berikut:

Jabatan	Kedudukan	Nama
Plt. Direktur	Pemimpin	Novy Enggelin Elim, S. Farm.Apt
Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan	Thobi F. Ndaumanu, SE
Kepala Bidang Pelayanan	Pejabat Teknis Bidang Pelayanan	I Nyoman Suwastika, S.KM., M.Sc
Kepala Bidang Penunjang	Pejabat Teknis Bidang Penunjang	Nelci Ndun, S. Farm. Apt

Perubahan susunan pejabat pengelola BLUD berdasarkan pada:

Jabatan	Nama	Dokumen Pengangkatan
Plt. Direktur	Novy Enggelin Elim, S. Farm.Apt	Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 816.2.1/17/BKD.3.2, tanggal 5 Maret 2026
Kepala Bagian Tata Usaha	Thobi F. Ndaumanu, SE	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 816.2.1/145/BKD.3.2, tanggal 6 Oktober 2025
Kepala Bidang Pelayanan	I Nyoman Suwastika, S.KM., M.Sc	
Kepala Bidang Penunjang	Nelci Ndun, S. Farm., Apt	

3) Statistik Pegawai

Distribusi pegawai Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang pada Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

a) Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	
		2025	2024
1	Laki-laki	105	73
2	Perempuan	399	111
	Jumlah Pegawai	**504**	**184**

b) Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

No	Pendidikan	2025			Jumlah	2024			Jumlah
		PNS	PPPK	PTT		PNS	PPPK	PTT	
1	SD	-	-	-	**0**	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	**0**	-	-	1	**1**
3	SMA	1	27	5	**33**	1	-	26	**27**
4	D1	-	-	-	**0**	-	-	-	-
5	D3	27	248	2	**277**	19	-	41	**60**
6	S1	44	124	19	**187**	17	-	71	**88**
7	S2	7	-	-	7	4	-	4	**8**
Jumlah		**79**	**399**	**26**	**504**	**41**	**-**	**143**	**184**

c) Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan bagi PNS Tahun 2025

No.	Uraian	2025
1	Direktur	1
2	Kepala Bagian Tata Usaha	1
3	Kepala Bidang Pelayanan	1
4	Kepala Bidang Penunjang	1
5	Kepala Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Humas	1
6	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1
7	Kepala Seksi Pelayanan Medis	1
8	Kepala Seksi Keperawatan	1
9	Kepala Seksi Penunjang Medik	1
10	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	1
11	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	2
12	Apoteker Ahli Muda	1
13	Apoteker Ahli Pertama	1
14	Asisten Apoteker Penyelia	2
15	Asisten Apoteker Terampil	7
16	Bidan Ahli Pertama	21
17	Bidan Terampil	135
18	Dokter Ahli Muda/Spesialis Psikiatir	1
19	Dokter Ahli Pertama	3
20	Dokter Ahli Pertama/Spesialis Patologi	1
21	Dokter Ahli Pertama/Spesialis Psikiatir	2
22	Nutrisionis Ahli Muda	1
23	Nutrisionis Ahli Pertama	8
24	Nutrisionis Penyelia	3
25	Nutrisionis Terampil	11
26	Penata Kelola dan Sistem Informasi	1
27	Penelaah Teknis Kebijakan	5
28	Pengadministrasi Perkantoran	28
29	Penata Layanan Operasional	17
30	Pengelola Data dan Informasi	1
31	Pengelola Layanan Operasional	2
32	Perawat Ahli Madya	1
33	Perawat Ahli Muda	5
34	Perawat Ahli Pertama	95
35	Perawat Mahir	1
36	Perawat Penyelia	8
37	Perawat Gigi	1
38	Perawat Terampil	98
39	Perekaman Medis Ahli Pertama	2
40	Perekaman Medis Terampil	1

No.	Uraian	2025
41	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	2
42	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	3
43	Pranata Komputer Terampil	1
44	Psikologis Klinis	1
45	Sanitarian Penyelia	1
46	Teknisi Elektromedis Mahir	1
47	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	6
48	Pengadministrasi	14
	Jumlah	**504**

d) Jumlah pegawai berdasarkan Profesi

No	Uraian	2025
1	Struktural	10
2	Dokter Spesialis	4
3	Dokter Umum	3
4	Perawat	208
5	Bidan/Manajemen	156
6	Perawat Gigi	2
7	Apoteker	3
8	Asisten Apoteker	7
9	Nutrisionis	22
10	Sanitasi	7
11	ATLM	5
12	Rekam Medik	3
13	Psikolog Klinis	1
14	Non Medis	73
	Jumlah	**504**

f. Jenis Pelayanan

Untuk mendukung tugas dan fungsi rumah sakit, maka diselenggarakan beberapa jenis pelayanan, yaitu:

a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Pelayanan Instalasi Gawat Darurat terdiri dari:
1) Pelayanan IGD Psikiatri
Pelayanan IGD yang berhubungan dengan pasien dengan gangguan jiwa yang datang dengan: gangguan sensori persepsi (halusinasi), perilaku kekerasan, gangguan proses pikir, resiko bunuh diri, panik, gejala putus zat, overdosis, defisit perawatan diri dan isolasi sosial
2) Pelayanan IGD Umum
Pelayanan yang berhubungan dengan pasien dengan gangguan kesehatan yang perlu mendapat penanganan segera untuk menyelamatkan nyawa yang tidak berhubungan dengan gangguan jiwa.

b. Pelayanan Rawat Jalan
1) Poli umum

2) Poli Jiwa

c. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang terdiri dari:

1) Paviliun
2) Kelas Satu
3) Kelas Dua
4) Kelas Tiga
5) Isolasi/Jiwa Intensif
6) Gedung ICU Covid

d. Pelayanan Farmasi

Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.

e. Pelayanan Gizi

Pelayanan gizi di Rumah Sakit bertugas memberikan makanan kepada pasien yang disesuaikan dengan standar diet masing-masing pasien dan juga harus disesuaikan dengan unit pelayanan kesehatan yang lain agar dapat mencapai pelayanan gizi yang optimal.

f. Pelayanan Patologi Klinik

Pelayanan patologi klinik di Rumah sakit dengan melakukan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan laboratorium. Setiap jenis pelayanan dan pemeriksaan laboratorium dilaksanakan berdasarkan prosedur tetap atau Standar *Operating Procedur* (SOP) yang ada.

g. Pelayanan Rehabilitas Psikiatri

Rehabilitasi psikiatri ditujukan untuk pasien yang sudah mengalami masalah mental dalam jangka waktu yang lama. Buruknya kondisi mental seseorang biasanya akan membuat seseorang tidak memiliki keahlian untuk berfungsi, berkontribusi, dan berkemampuan untuk membantu sebagaimana mestinya dalam komunitasnya. Tujuan dari rehabilitasi psikiatri adalah untuk memberikan harapan, motivasi, rasa hormat untuk pasien, serta keahlian sosial, ekonomi, dan keahlian lainnya yang mereka perlukan, agar pasien dapat kembali melanjutkan hidup di masyarakat dengan lebih efisien dan efektif.

h. Pelayanan Laundry

Pengelolaan linen merupakan suatu kegiatan yang dimulai dengan pengumpulan linen kotor dari masing-masing ruangan, pengangkutan, pencucian, penyetrikaan, penyimpanan dan penggunaan kembali linen yang sudah bersih. Untuk mendapatkan kualitas linen yang baik Instalasi laundry Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang sebagai penyedia pelayanan kesehatan berupaya untuk mencegah risiko terjadinya infeksi bagi pasien dan petugas di rumah sakit.

i. Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Pelayanan Sanitasi

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) adalah suatu unit fungsional untuk melaksanakan kegiatan teknis instalasi, pemeliharaan dan perbaikan agar fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit selalu berada dalam keadaan baik.

j. Pelayanan Diklat

Pendidikan pelatihan (Diklat) merupakan suatu upaya strategis manajemen yang bertujuan untuk mengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kinerja suatu

organisasi. Hampir setiap organisasi yang besar memiliki unit Diklat, namun tidak semua unit Diklat dapat menyelenggarakan Diklat secara baik. dalam memberikan pelayanannya tentunya staf rumah sakit secara berkala memperoleh pelatihan dari bagian diklat rumah sakit.

g. Capaian Kunjungan Pelayanan (rekap laporan kinerja)

Jumlah kunjungan yang dilayani di Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang tahun 2025 dan 2024 tersaji dalam tabel berikut:

Layanan	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Rawat Inap	569	623	-54	-9%
Rawat Jalan:	15.160	10.319		
Klinik Jiwa	14.316	10.297	4.019	39%
Klinik Neurologi		-		
Klinik Forensik		-		
Klinik Anak dan Remaja		-		
Klinik Geriatri		-		
Klinik Interna		-		
Klinik Gigi dan Mulut		-		
Klinik Fisioterapi		-		
Klinik VCT		-		
Instalasi Gawat Darurat		-		
Jumlah Kunjungan	**30.045**	**21.239**	**3.965**	**19%**

h. Indikator dan Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator	Tahun 2025		
		Standar	Capaian	Keterangan
1. Instalasi Gawat Darurat				
1	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	100%	Tercapai
2	Pemberian pelayanan gawat darurat (Dokter) dan (Perawat) yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	19,12%	Tidak Tercapai
3	*Emergency Response Time*/ERT (IGD) ≤ 5 menit	100%	100%	Tercapai
4	Kematian pasien ≤24 Jam	≤2/1000	-	Tercapai
5	Khusus untuk RS Jiwa pasien dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 Jam	100%	63,53%	Tidak Tercapai
6	Kepuasan Pelanggan	≥ 70%	92,89%	Tercapai
7	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	Tercapai
2. Instalasi Rawat Jalan				
1	Pemberi pelayanan di Poli Jiwa	100%	100%	Tercapai
2	Ketersedian Pelayanan di RS Jiwa			Tercapai
	a. Gangguan Mental Organik (GMO)		329	

No	Indikator	Tahun 2025		
		Standar	Capaian	Keterangan
	b. NAPZA		1152	
	c. Gangguan Psikotik		4316	
	d. Gangguan Ansietas - Depresi		620	
	e. Psikosomatis		0	
	f. Psikiatri anak dan remaja		251	
	g. Mental retardasi		32	
	h. Psikometri		5505	
	i. Usia lanjut		327	
	Angka jam mulai pelayanan sesuai ketentuan (pukul 08.00 WITA)	100%	100%	Tercapai
	Waktu tunggu Rawat Jalan	≤ 60 menit	32 menit	Tercapai
	Penegakan diagnosis TB *Tuberculosis*) melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%	-	Tidak ada capaian
	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60%	-	Tidak ada capaian
	Kepuasan Pelanggan	≥ 90%	Tidak dilakukan pengukuran	
3. Instalasi Rawat Inap				
	Pemberi Pelayanan Rawat Inap:			Tidak Tercapai
	a. Dokter Spesialis	100%	87%	
	b. Dokter Umum			
	c. Perawat minimal pendidikan D3			
	Dokter Spesialis Jiwa Penanggungjawab Pasien Rawat Inap Jiwa	100%	100%	Tercapai
	Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	-	-	Tercapai
	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	-	Tercapai
	Kejadian pulang paksa	≤ 5%	0%	Tercapai
	Kejadian pasien melarikan diri	-	0,25%	Tercapai
	Kepuasan Pelanggan	≥ 87,15%	93,75%	Tercapai
	Ketersediaan pelayanan rawat di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa:		-	Tercapai
	a. Gangguan mental organik		59	
	b. NAPZA		0	
	c. Gangguan psikotik		882	
	d. Gangguan neurotik		15	
	Angka *Re-admission* pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	≤ 10 %	1,50%	Tercapai
	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu (42 hari)	5 hari	Tercapai
	Kejadian adanya pasien bunuh diri	-	-	Tercapai

No	Indikator	Tahun 2025		
		Standar	Capaian	Keterangan
4. Unit Perawatan Intensif Psikiatri (UPIP)				
	Kepatuhan jam visite dokter spesialis	≥80%	47,75%	Tidak Tercapai
	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 10%	2.67%	Tercapai
	Lama perawatan di IRI (Instalasi Rawat Intensif) > 5 hari	≤ 10 %	40,50%	Tidak Tercapai
	Penanganan pasien gaduh gelisah > 48 jam	≤ 20 %	75%	Tidak Tercapai
	Pemberi pelayanan Unit Intensif	100%	91,46%	Tidak Tercapai
	a. Dokter Spesialis			
	b. Perawat minimal pendidikan D3			
5. Rehabilitasi Medik				
	kejadian luka bakar pada tindakan *heatting*	-	-	Tidak ada capaian
	Kepuasan pelanggan	≥80%	-	Tidak ada capaian
6. Rehabilitasi Mental				
	Angka Ketidaksesuaian Rehabilitan mendapatkan kegiatan sesuai hasil seleksi	≤ 5%	12,99%	Tidak Tercapai
	Angka ketidakpatuhan rehabilitan menyelesaikan proses tahapan rehabilitasi	≤ 15%	12,99%	Tercapai
7. Instalasi Farmasi				
	Waktu tunggu pelayanan obat jadi untuk pasien rawat jalan	≤ 30 menit	22, 6 menit	Tercapai
	Waktu tunggu pelayanan obat racikan untuk pasien rawat jalan	≤ 60 menit	31,5 menit	Tercapai
	Angka kesalahan pemberian Obat	-	-	Tercapai
	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	Tercapai
	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	99,80%	Tercapai
8. Pelayanan Radiologi				
	Waktu tunggu hasil pemeriksaan radiologi	≤ 3 Jam	-	Tidak ada capaian
	Pelaksana Ekspertisi oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik	100%	-	Tidak ada capaian
	Kejadian kesalahan penyerahan Hasil pemeriksaan hasil laboratorium	-	-	Tidak ada capaian
	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	-	Tidak ada capaian
9. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik				
	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit	34,5 menit	Tercapai

No	Indikator	Tahun 2025		
		Standar	Capaian	Keterangan
	Pelaksana Ekspertisi oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik	100%	85%	Tidak Tercapai
	Kejadian kesalahan penyerahan Hasil pemeriksaan hasil laboratorium	-	-	Tercapai
	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	Tidak dilakukan pengukuran	
10. Instalasi Rekam Medik				
	Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat jalan 24 jam setelah selesai pelayanan	-	-	Tercapai
	Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat inap	-	32%	Tercapai
	Angka ketidaklengkapan Informed Consent setelah mendapat informasi yang jelas	-	-	Tercapai
	Waktu penyediaan RM pelayanan Rawat Jalan	≤ 10 menit	2,6 menit	Tercapai
	Waktu penyediaan RM pelayanan Rawat Inap	≤ 15 menit	4 menit	Tercapai
	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	Tidak dilakukan pengukuran	
11. Instalasi Gizi				
	Angka keterlambatan pemberian makan kepada pasien	≤ 5%	-	Tercapai
	Angka sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien	≤10%	5,25%	Tercapai
	Kejadian kesalahan pemberian diet	-	-	Tercapai
12. Instalasi Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit				
	Kecepatan perbaikan kerusakan ringan ≤ 3 x 24 jam	≥ 90 %	100%	Tercapai
	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	-	Tidak Tercapai
	Kalibrasi alat medis tepat waktu	100%	-	Tidak Tercapai
13. Unit Sanitasi				
	Baku mutu limbah cair	100%	19,80%	Tidak Tercapai
	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%	48%	Tidak Tercapai
14. Unit Laundry				
	Kejadian linen yang hilang	-	-	Tercapai
	Angka ketidaktepatan waktu pengembalian linen untuk rawat inap ≤ 24 jam	-	-	Tercapai
15. Instalasi Ambulance Jenazah				
	Waktu pelayanan ambulance jenazah	≤ 24 jam	-	Tidak ada capaian

No	Indikator	Tahun 2025		
		Standar	Capaian	Keterangan
	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans jenazah di RS ≤ 30 menit	100%	-	Tidak ada capaian
16. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah				
	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	-	Tidak ada capaian
17. Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi				
	Komite PPI terlatih	≥ 75%	14,66%	Tidak Tercapai
	Angka Penggunaan APD (alat Pelindung Diri)	100%	94,18%	Tidak Tercapai
	Angka infeksi Hais (*Healthcare Associated Infections*) Scabies di Rawat Inap	≤ 5%	-	Tercapai
	Angka Phlebitis	≤ 5%	-	Tercapai
	Angka ketidakpatuhan Cuci tangan	≤ 15%	12,67%	Tercapai
18. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan				
	Angka Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60%	0,10%	Tidak Tercapai
	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	-	Tercapai
19. Area Manajemen				
	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	Tidak dilakukan pengukuran	
	Ketepatan waktu pengusulan naik pangkat	100%	8,37%	Tidak Tercapai
	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	25%	Tidak Tercapai
	Cost Recovery	≥ 40 %	191,31%	Tercapai
	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	Tercapai
	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≤ 2 jam	≤ 10%	-	Tercapai
	Ketepatan waktu pemberian jasa layanan sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	Tercapai
	Kecepatan respon terhadap complain	≥75%	100%	Tercapai
	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	86,31%	Tercapai
20. Pelayanan Pasien Penerima Bantuan Iuran				
	Pelayanan terhadap pasien PBI dan pasien Dinas Sosial yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	100%	Tercapai

i. Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan

Berikut disajikan capaian indikator pelayanan Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Indikator Pelayanan Kesehatan	2025	2024	Satuan
BOR	45,8	51,38	%
LOS	10,4	4	hari
TOI	15,1	4,68	hari
BTO	13,1	37,95	kali
NDR	0	0,01	‰
GDR	0	0	‰
Jml Kunj Rawat Jalan	15.160	10.319	Orang
Jml Kunj Rawat Inap	569	1.556	Orang
Jml Kunj IGD	30	70	Orang

2. Pernyataan Kepatuhan Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting Yang Diterapkan

Laporan keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Entitas yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang.
2) Laporan keuangan yang dimaksudkan dalam laporan ini adalah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
3) Laporan keuangan disajikan dalam rupiah penuh dan disusun berdasarkan biaya historis atau nilai wajar.
4) Laporan keuangan terdiri dari:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional;
   e) Laporan Arus Kas;
   f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g) Catatan atas Laporan Keuangan.
5) Laporan keuangan disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
6) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, serta Laporan Arus Kas disusun dengan metode langsung.

7) Periode akuntansi entitas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran, sedangkan laporan keuangan interim disusun untuk periode semesteran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;
   d) Penerimaan pembiayaan;
   e) Pengeluaran pembiayaan;
   f) Pembiayaan neto; dan
   g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
3) Melalui LRA, dapat diperoleh informasi mengenai penyerapan anggaran yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan terkait dengan optimalisasi penyerapan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja Entitas.
4) Adapun penyajian dalam LRA antara lain:
   a) Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Penerimaan BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD.
   b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD.
   c) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
   d) Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pinjaman/utang, investasi jangka pendek, pemberian pinjaman pada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana merupakan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;

b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
e) Lain-lain; dan
f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

d. Neraca

1) Neraca menyediakan informasi tentang posisi keuangan Entitas meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
2) Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan dapat diperoleh, baik oleh BLUD maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
3) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
4) Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
5) Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan Setara Kas;
   b) Investasi Jangka Pendek;
   c) Piutang dari Kegiatan BLUD;
   d) Persediaan;
   e) Investasi Jangka Panjang;
   f) Aset Tetap;
   g) Aset Lainnya;
   h) Kewajiban Jangka Pendek;
   i) Kewajiban Jangka Panjang; dan
   j) Ekuitas.
6) Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
   1) Kemampuan entitas dalam memberi jasa layanan secara berkelanjutan.
   2) Likuiditas dan solvabilitas kebutuhan pendanaan eksternal.

e. Laporan Operasional

1) Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk selama suatu periode tertentu.
2) Penyajian Laporan Operasional antara lain:
   a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
   b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

c) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

3) Ketiga unsur di atas akan membentuk surplus/defisit LO yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
4) Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional;
   d) Kegiatan Non-Operasional;
   e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   f) Pos Luar Biasa; dan
   g) Surplus/Defisit-LO.
5) Entitas menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.
6) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
7) Entitas menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8) Informasi dalam laporan operasional, digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:
   1) Mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi;
   2) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
   3) Menyediakan informasi mengenai efektifitas dan efisiensi operasional entitas.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menggunakan ***metode langsung***, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode laporan serta saldo kas dan setara kas pada tanggal periode pelaporan. Penyajian Laporan Arus Kas antara lain:

1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Penerimaan BLUD melalui rekening kas BLUD;
2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Pengeluaran BLUD melalui rekening kas BLUD.

Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris:

1) Aktivitas Operasi
   Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;

d) Pendapatan hasil kerja sama;
e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
a) Pembayaran pegawai;
b) Pembayaran perolehan barang/jasa;
c) Pembayaran bunga; dan
d) Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terutama diperoleh dari:
a) Penjualan aset tetap;
b) Penjualan aset lainnya;
c) Penerimaan dari divestasi; dan
d) Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
a) Perolehan aset tetap;
b) Perolehan aset lainnya;
c) Penyertaan modal;
d) Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari pemerintah pusat maupun daerah, BLUD dapat memeroleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

4) Aktivitas Transitoris
Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan pajak.
a) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
b) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

5) Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
a) Kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas.
b) Sumber dana entitas; dan
c) Pengguna dana entitas untuk memeroleh sumber dana dan penggunaannya untuk masa yang akan datang.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dikomparasikan dengan periode sebelumnya.
2) Saldo ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain.
3) Laporan Perubahan Ekuitas sedikitnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
(1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
(2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
(3) koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.
d) Ekuitas akhir.

h. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan serta informasi lain yang diharuskan diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan/mengungkapkan/menyediakan sebagai berikut:

1) mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi

2) menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
3) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya.
4) menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
5) mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam, lembar muka laporan keuangan.
6) menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Informasi dalam CaLK mencakup antara lain:

1) Gambaran umum;
2) Kebijakan akuntansi;
3) Penjelasan atas akun-akun laporan keuangan;
4) Kejadian setelah tanggal periode pelaporan dan informasi penting lainnya.

i. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
2) BLUD memiliki fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya, yang berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah memeroleh pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.

9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) Jasa giro;
    c) Pendapatan bunga;
    d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
    e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah RSUD yang berstatus BLUD memeroleh pendapatan dari layanan masyarakat terlantar yang didanai dari anggaran Perangkat Daerah Lainnya.

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja, organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah OPD.

j. Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan keuangan yang menggunakan basis kas, yang menyajikan penggunaan kas sebagai suatu akumulasi keberlebihan anggaran periode-periode sebelumnya.
2) Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal merupakan nilai SAL pada tanggal 1 Januari, nilainya sebesar saldo kas awal periode.
3) Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran tahun berjalan merupakan nilai SILPA/SIKPA LRA, yaitu sebesar realisasi Pendapatan-LRA di luar pendapatan APBD dikurangi seluruh Belanja.
4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi-koreksi atas kesalahan pembukuan periode sebelumnya yang memengaruhi kas.
5) Lain-lain merupakan koreksi-koreksi lainnya.
6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir merupakan nilai SAL pada tanggal periode pelaporan, nilainya sebesar saldo kas pada tanggal tersebut.

k. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

Definisi

a) Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah;
b) Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan;
c) Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro; dan
d) Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus

segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Penjelasan

a) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan rumah sakit. Kas terdiri dari Saldo Kas *(Cash on Hand)* dan Rekening Bank *(Cash in Bank)*;
b) Setara Kas *(Cash Equivalent)* merupakan bagian dan aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dan 3 bulan;
c) Kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu dikendalikan besarannya agar tidak menimbulkan adanya dana yang menganggur (*idle Juina*);
d) Penambahan kas dan setara kas, antara lain, karena:
   (1) Penerimaan tunai dan jasa pelayanan;
   (2) Pelunasan piutang;
   (3) Penerimaan dana dan pemerintah donatur; dan
   (4) Penerimaan tunai lainnya.
e) Pengurangan kas dan setara kas, antara lain, karena:
   (1) Pembelian tunai aset;
   (2) Pelunasan utang; dan
   (3) Pembayaran/pengeluaran lainnya.

Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan *(recognition)*
   (1) Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di bank diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar nilai nominal;
   (2) Pendapatan bunga dari Investasi Jangka Pendek diakui pada saat timbulnya hak atau tagihan; dan
   (3) Investasi Jangka Pendek berkurang ada saat menerima pencairan dari bank.
b) Pengukuran
   Penempatan dana di bank diukur pada nilai nominalnya.
c) Penyajian
   (1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca
   (2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito disajikan sebesar nilai nominal; dan
   (3) Apabila Investasi Jangka Pendek melebihi satu tahun maka akan disajikan pada investasi jangka panjang dalam neraca.
d) Pengungkapan
   Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut:
   (1) Rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
   (2) Jenis mata uang;
   (3) Tingkat bunga dan jangka waktu rata-rata atau per kelompok;
   (4) Jumlah penempatan dana pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan;
   (5) Jumlah dana yang dijadikan jaminan dan alasannya.

2) **Piutang**

Definisi

a) Piutang menurut sumber terjadinya dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu piutang pelayanan dan piutang lain-lainnya;
b) Piutang pelayanan adalah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan (jasa) dalam rangka kegiatan rumah sakit, seperti piutang kepada pasien rawat darurat, rawat inap, dan rawat jalan; dan
c) Piutang lain-lainnya adalah piutang yang timbul diluar kegiatan pelayanan medis, yang jumlahnya tidak material, seperti piutang karyawan.

Penjelasan

a) Piutang merupakan hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa atau penyerahan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara rumah sakit dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya atau uangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan;
b) Transaksi piutang memiliki empat karakteristik, sebagai berikut:
   (1) Adanya pemberian pelayanan, jasa atau penyerahan uang;
   (2) Persetujuan atau kesepakatan berulang;
   (3) Jangka waktu tertentu; dan
   (4) Jaminan.
c) Jenis piutang pada rumah sakit dikelompokan menjadi:
   (1) Piutang pelayanan adalah piutang yang diakui terhadap pasien yang sudah selesai dirawat atau pulang dan dicatat berdasarkan nota tagihan *(billing)* kepada masing-masing pasien, terdiri dari:
      (a) Piutang Umum/Perorangan;
      (b) Piutang Jaminan;
         - Jaminan Pemerintah Pusat;
         - Piutang-piutang Jaminan Pemerintah Daerah;
         - Piutang Jaminan Asuransi;
         - Piutang Jaminan Rumah Sakit; dan
         - Piutang Jaminan Lainnya,
      (c) Piutang pelayanan lainnya.
   (2) Piutang lain-lainnya, antara lain:
      (a) Piutang pegawai/karyawan;
      (b) Piutang sewa; dan
      (c) Piutang Lainnya.

Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan
   (1) Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang dan manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang Pelayanan dapat diakui ketika:
      (a) Diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
      (b) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
   (2) Piutang lain-lain diakui pada saat jasa sewa telah diberikan kepada penyewa atau uang pinjaman telah diberikan kepada karyawan. Piutang lain-lain diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
   (3) Contoh piutang lain-lain adalah: piutang Pegawai, Pendapatan yang masih harus diterima.

b) Pengukuran

Piutang Pelayanan dicatat berdasarkan surat penagihan pelayanan yang pembayarannya belum diterima dan diukur sesuai nilai yang tercantum dalam surat penagihan. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:
(1) Kualitas piutang lancar;
(2) Kualitas piutang kurang lancar;
(3) Kualitas piutang diragukan;
(4) Kualitas piutang macet

Pengelompokan piutang dilakukan per masing-masing jenis piutang, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih berdasarkan cara pemungutannya, yaitu:
(1) Kualitas piutang lancar;
(2) Kualitas piutang kurang lancar;
(3) Kualitas piutang diragukan;
(4) Kualitas piutang macet

Pengelompokan piutang dilakukan per masing-masing jenis piutang, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih berdasarkan cara pemungutannya, yaitu:

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		< 1	≥1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	> 5
1	Piutang Jasa Layanan	Lancar	KL	R	Macet	Macet
2	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	KL	R	Macet	Macet
3	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	KL	R	Macet	Macet
4	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	KL	R	Macet	Macet
5	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	KL	R	Macet	Macet
6	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	KL	R	Macet	Macet
7	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	KL	R	Macet	Macet
8	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar	Lancar	KL	R	Macet	Macet

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		< 1	≥1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	> 5
	atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan					
9	Piutang Lain-Lain	Lancar	KL	R	Macet	Macet

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(1) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;

(2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya;

(3) Kebijakan perhitungan persentase penyisihan piutang tidak tertagih pada BLUD RSJ Naimata adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		< 1	≥1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	> 5
1	Piutang Jasa Layanan	0%	40%	70%	100%	100%
2	Biaya Dibayar di Muka	0%	5%	30%	60%	100%
3	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0%	20%	40%	60%	100%
4	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0%	10%	30%	60%	100%
5	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0%	10%	30%	60%	100%
6	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0%	10%	30%	60%	100%
7	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0%	10%	30%	60%	100%
8	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0%	10%	30%	60%	100%
9	Piutang Lain-Lain	0%	10%	30%	60%	100%

Piutang Pelayanan dapat dihapuskan dari pembukuan BLU dengan menghapuskan piutang dari pembukuan BLU tanpa menghapuskan hak tagih. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tata cara penghapusan piutang dilakukan Untuk memastikan keadaan piutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi dengan berkoordinasi dengan SKPKD.

c) Penyajian
   (a) Piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca;
   (b) Piutang pelayanan dan piutang lain-lain disajikan pada pos yang terpisah;
   (c) Piutang disajikan sebesar jumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang;
   (d) Piutang pelayanan yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang pelayanan yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar;
   (e) Piutang pelayanan disajikan sebesar jumlah neto, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang;
   (f) Piutang lain-lain yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang lain-lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar; dan
   (g) Piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah neto, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurang dengan penyisihan kerugian piutang.

d) Pengungkapan

   Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
   (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
   (2) Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
   (3) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
   (4) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
   (5) Jaminan atau sita jaminan jika ada;
   (6) Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada.

3) Persediaan

Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLU, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan.

Perlakuan akuntansi

a) Pengakuan

   Persediaan diakui pada saat:

(1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga dapat dapat diverifikasi dan bersifat netral.
(2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap akhir tahun berdasarkan sisa persediaan dalam hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

b) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan hanya mencakup harga pembelian.
(2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas.

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode FIFO (barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar) maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir

c) Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa:

(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pengukuran persediaan
(2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
(3) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
(4) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

Definisi

a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau mempunyai maksud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

b) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

(2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

c) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Berwujud;
(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
(6) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;

(7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
(8) Pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal sudah selesai 100% (seratus persen) pembangunannya dan siap digunakan.

Aset tetap diakui ketika BLUD melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang penganggarannya melalui belanja modal. Apabila per 31 Desember pekerjaan belanja modal tersebut belum selesai, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap menjadi konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain.

Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Apabila mempunyai aset tetap bersejarah, maka barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya. Sehingga atas aset tetap tersebut tidak disajikan dalam neraca tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebatas nilai kuantitasnya.

Aset diakui:
(1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
(2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap
(1) Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.
(2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah. pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
(3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

(4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap:

No	Uraian	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	
	Alat-besar	100.000.000,00
	Alat-alat angkutan	500.000,00
	Alat-alat bengkel dan alat ukur	500.000,00
	Alat-alat pertanian/peternakan	500.000,00
	Alat-alat kantor dan rumah tangga	500.000,00
	Alat-alat studio dan komunikasi	500.000,00
	Alat-alat kedokteran	500.000,00
	Alat-alat laboratorium	500.000,00
	Alat-alat keamanan	500.000,00
2	Gedung dan Bangunan	
	Bangunan Gedung	20.000.000,00
	Bangunan Monumen	20.000.000,00

b) Pengukuran Aset Tetap

(1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(2) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

c) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penyusutan Aset, sebagai berikut:

No		Uraian	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
1		**Alat Besar**	
	A	Alat-Alat Besar Darat	10
	B	Alat-Alat Besar Apung	8
	C	Alat-alat Bantu	7
2		**Alat Angkutan**	
	A	Alat Angkutan Darat Bermotor	7

No		Uraian	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	B	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
	C	Alat Angkut Apung Bermotor	10
	D	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
	E	Alat Angkut Bermotor Udara	20
3		**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
	A	Alat Bengkel Bermesin	10
	B	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
	C	Alat Ukur	5
4		**Alat Pertanian**	
	A	Alat Pengolahan	4
5		**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
	A	Alat Kantor	5
	B	Alat Rumah Tangga	5
	C	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
6		**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
	A	Alat Studio	5
	B	Alat Komunikasi	5
	C	Peralatan Pemancar	10
	D	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
7		**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
	A	Alat kedokteran	5
	B	Alat Kesehatan Umum	5
8		**Alat Laboratorium**	
	A	Unit Alat Laboratorium	8
	B	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
	C	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
	D	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
	E	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
	F	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
	G	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
	H	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
	I	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	
9		**Alat Persenjataan**	
	A	Senjata Api	10
	B	Persenjataan Non Senjata Api	3
	C	Senjata Sinar	5
	D	Alat Khusus Kepolisian	4
10		**Komputer**	
	A	Komputer Unit	4
	B	Peralatan Komputer	4
11		**Alat Eksplorasi**	
	A	Alat Eksplorasi Topografi	5

No		Uraian	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	B	Alat Eksplorasi Geofisika	10
12		**Alat Pengeboran**	
	A	Alat Pengeboran Mesin	10
	B	Alat Pengeboran Non Mesin	10
13		**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
	A	Peralatan Sumur	10
	B	Peralatan Produksi	10
	C	Pengolahan dan Pemurnian	15
14		**Alat Bantu Eksplorasi**	
	A	Alat Bantu Eksplorasi	10
	B	Alat bantu Produksi	10
15		**Alat Keselamatan Kerja**	
	A	Alat Deteksi	5
	B	Alat Pelindung	5
	C	Alat SAR	2
	D	Alat Kerja Penerbangan	10
		Alat Keselamatan Kerja	
	A	Alat Deteksi	5
	B	Alat Pelindung	5
	C	Alat SAR	2
	D	Alat Kerja Penerbangan	10
16		**Alat Peraga**	
	A	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
17		**Peralatan Proses/Produksi**	
	A	Unit Peralatan proses / produksi	8
18		**Rambu - rambu**	
	A	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	7
	B	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
	C	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	15
19		**Peralatan Olah Raga**	
	A	Peralatan Olah Raga	8
Gedung dan Bangunan			
20		**Bangunan Gedung**	
	A	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
	B	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
21		**Monumen**	
	A	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	50
22		**Bangunan Menara**	
	A	Bangunan Menara Perambuan	40
23		**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
	A	Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
24		**Jalan dan Jembatan**	
	A	Jalan	10

No		Uraian	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	B	Jembatan	50
25		**Bangunan Air**	
	A	Bangunan Air Irigasi	50
	B	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
	C	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
	D	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
	E	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
	F	Bangunan Air Bersih/ Baku	40
	G	Bangunan Air Kotor	40
26		**Instalasi**	
	A	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
	B	Instalasi Air Kotor	30
	C	Instalasi Pengolahan Sampah	10
	D	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
	E	Instalasi Pembangkit Listrik	40
	F	Instalasi Gardu Listrik	40
	G	Instalasi Pertahanan	30
	H	Instalasi Gas	30
	I	Instalasi Pengaman	20
	J	Instalasi lain	20
27		**Jaringan**	
	A	Jaringan Air Minum	30
	B	Jaringan Listrik	40
	C	Jaringan Telepon	20
	D	Jaringan Gas	30

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tahun perolehan, dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan dan meskipun tanggal perolehan aset tersebut pada akhir bulan, penyusutan dihitung satu bulan penuh.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

(1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
(2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat ini dilakukan terhadap perbaikan suatu aset tetap yang berupa pengeluaran modal *(capital expenditure)*. Pengeluaran modal tersebut ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan dan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa manfaat aset tersebut. Kebijakan penambahan masa manfaat sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	6
		>50% s.d. 75%	9
		>75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	*Renovasi*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d. 40%	2
		>51% s.d. 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	4
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d 100%	7
Alat Peraga Praktik Sekolah	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Radiational Application & Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan laboratorium Hidrodinamika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d 100%	
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Peralatan Sumur	*Renovasi*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Produksi	*Renovasi*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat SAR	*Renovasi*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Peralatan/Produksi			
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Laut			
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	9
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	50
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Monumen			
Candi/tugu Peringatan/ Prasasti	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	3
		>10% s.d. 20%	5
Banguan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi gas	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
Instalasi Lain	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi / Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

Penyajian dan Pengungkapan

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   (1) penambahan;

(2) pelepasan;
(3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
(4) mutasi aset tetap lainnya.

c) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
(1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
(2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
(3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
(4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

d) Informasi penyusutan, meliputi:
(1) Nilai penyusutan;
(2) Metode penyusutan yang digunakan;
(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
(4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

5) Aset Tidak Berwujud

Definisi

a) Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh software komputer (dapat dipisahkan dari hardware), lisensi dan *franchise*, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

b) Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1) Dapat diidentifikasikan dan dikendalikan oleh entitas;
(2) Memunyai potensi manfaat ekonomi di masa yang akan datang;
(3) Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk seperti halnya aset tetap.

Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan dan Pengukuran
Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika: (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan; dan (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

b) Penyajian dan Pengungkapan
Aset tidak berwujud disajikan sebagai aset sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilainya. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional. Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu aset tidak berwujud terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

c) Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain:
   (1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
   (2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
   (3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

d) Disamping informasi-informasi di atas, laporan keuangan juga perlu mengungkapkan:
   (1) Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tak berwujud;
   (2) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan; dan
   (3) Keberadaan Aset Tak Berwujud (ATB) yang dimiliki bersama.

6) Aset Lain-lain

Definisi

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud; Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan
   Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

b) Pengukuran
   (1) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya;
   (2) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan aset tetap;
   (3) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

c) Penyajian dan Pengungkapan
   (1) Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan sebesar nilai buku setelah dilakukan penyusutan;
   (2) Aset lain lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

7) Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada

debitur. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang Beban adalah utang BLUD yang timbul karena BLUD mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan BLUD yang harus diserahkan kepada pihak lain.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban rumah sakit kepada pihak lain yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dan aset lancar atau dengan menimbulkan utang lancar lainnya dimasa datang selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

a) Utang Usaha
   Merupakan pinjaman jangka pendek BLUD RSJ Naimata dengan jatuh tempo paling lama 12 (dua belas) bulan, yang timbul dari aktivitas pembiayaan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian
b) Utang Pihak Ketiga
   Merupakan Utang BLUD RSJ Naimata yang timbul dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional (pelayanan) yang dibebankan pada alokasi dana BLUD RSJ Naimata, serta dana pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan dikuasai oleh BLUD RSJ Naimata. Dana pihak ketiga dapat berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLUD RSJ Naimata. Adapun Utang Pihak Ketiga antara lain:
   (a) Utang Taspen;
   (b) Utang Askes;
   (c) Utang PPh Pusat;
   (d) Utang PPN Pusat;
   (e) Utang Taperum; dan
   (f) Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.
c) Utang Pajak
   Pajak-pajak yang dipungut dan dipotong oleh Bendahara Pengeluaran BLUD RSJ Naimata namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.
d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   Dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
e) Belanja yang masih harus dibayar
   Merupakan tagihan atas beban dan biaya yang berupa belanja barang dan/ atau belanja modal yang bersumber dari alokasi dana APBD sehubungan dengan aktifi.tas pendukung layanan BLUD RSJ Naimata yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian.
f) Pendapatan Diterima Dimuka
   Pendapatan bukan dari pajak yang sudah di terima di rekening BLUD, tetapi belum menjadi hak BLUD RSJ Naimata sepenuhnya karena masih melekat

kewajiban BLUD RSJ Naimata untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.

Adapun yang termasuk Pendapatan Diterima Dimuka antara lain:

(a) Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III;
(b) Uang Muka Penjualan Produk BLUD Dari Pihak III;
(c) Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

g) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam utang usaha, utang pihak ketiga, utang pajak, Belanja yang masih harus dibayar, maupun pendapatan diterima dimuka. Contoh dari utang jangka pendek lainnya adalah utang bunga pinjaman. Adapun yang termasuk Utang Jangka Pendek Lainnya:

(a) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat;
(b) Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya;
(c) Utang Bunga kepada BUMN/BUMD;
(d) Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan;
(e) Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya;
(f) Utang Bunga Luar Negeri.

Perlakuan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

(1) Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

(2) Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban BLUD pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh BLUD untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban BLUD yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

a) Utang Dalam Negeri;
b) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Perlakuan Akuntansi

(1) Pengakuan

(a) Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh BLUD atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul;

(b) Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara BLUD dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi BLUD.

(2) Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
c) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
   (1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
      (a) Pengurangan pinjaman;
      (b) Modifikasi persyaratan utang;
      (c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
      (d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
      (e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
      (f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
   (2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
   (3) Biaya pinjaman:
      (a) Perlakuan biaya pinjaman;
      (b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan:

8) Ekuitas

Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

a) Ekuitas Awal;
b) Surplus/Defisit LO; dan
c) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

b) Pengungkapan

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CALK.

I. Pos-pos Laporan Operasional

1) Pendapatan-LO

Definisi

Pendapatan-LO adalah hak BLUD daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Pendapatan BLU diklasifikasikan ke dalam:

a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:
(1) Pendapatan usaha rawat jalan;
(2) Pendapatan usaha rawat darurat;
(3) Pendapatan usaha rawat inap.

b) Pendapatan Jasa Layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan Merupakan pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.

c) Pendapatan hasil Kerjasama
Merupakan pendapatan yang diperoleh dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi rumah sakit.

d) Hibah
Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLUD rumah sakit untuk menyerahkan barang/ jasa.

e) Pendapatan Usaha Lainnya
Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain) pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi rumah.

f) Pendapatan APBD
Merupakan pendapatan yang berasal dari Subsidi Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan tertuang dalam bentuk DPA rumah sakit untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi rumah sakit.

g) Pendapatan APBN
Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN dan tertuang dalam bentuk DPA rumah sakit untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi rumah sakit.

h) Dalam hal aset KSO, investor mencatat penyerahan aset KSO kepada pemilik aset di akhir masa konsesi dengan menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan dengan KSO yang bersangkutan. Pemilik aset pada sisi lain, mencatat penyerahan ini sebagai aset dengan mengkredit penghasilan KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut.

i) Bila investor melakukan penyerahan aset KSO kepada pemilik aset untuk dioperasikan pada saat aset KSO selesai dibangun, penyerahan ini harus dicatat sebagai hak bagi pendapatan atau penghasilan KSO. Penerimaan kas atau bank atas pendapatan/penghasilan secara periodik dari bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari KSO ini diakui sebagai pendapatan hasil kerjasama.

j) Sehubungan dengan bagian partisipasi *venture* Pengendalian Bersama Operasi (PBO), setiap venturer membukukan dan menyajikan dalam laporan keuangannya masing-masing:
   (1) Aset yang dikendalikannya sendiri dan kewajiban yang timbul atas aktivitasnya sendiri; dan
   (2) Beban yang terjadi tas aktivitasnya sendiri dan bagiannya atas pendapatan bersama dari penjualan barang dan jasa oleh joint venture tersebut.

k) Laporan keuangan tersendiri untuk *joint venture* wajib disusun apabila jumlahnya material dan proyek kerja sama diselesaikan dalam jangka panjang. Jenis, bentuk, dan isi laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan venturer dan perjanjian kontraktual.

l) Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan dana mudharabah.

m) Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas)

n) Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi.

o) Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk para mitra pasif diakui sebagai hak pihak para mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

p) Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

q) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

r) Khusus untuk pendapatan dari kerjasama operasi (KSO) diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan
   (1) Pendapatan- LO diakui pada saat:
      (b) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
      (c) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*) sehubungan adanya penyerahan barang dan jasa.
   (2) Hak menagih yang timbul sehubungan dengan barang/jasa yang sudah diberikan oleh BLUD tetapi belum ada pembayaran, selain diakui sebagai pendapatan LO sekaligus sebagai piutang.
   (3) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

(4) Kas atas pendapatan yang diterima RSJ Naimata tanpa mekanisme anggaran/ APBD dan digunakan langsung, maka RSJ Naimata wajib melaporkannya ke dalam laporan keuangan.

(5) Kebijakan pengakuan pendapatan jasa layanan adalah sebagai berikut:
   (a) Pendapatan jasa layanan LO diakui pada saat kas diterima atau pada saat hak untuk menagih timbul; dan
   (b) Pendapatan jasa layanan-LO diakui berdasarkan rekapitulasi pendapatan BLUD sejumlah pendapatan yang sudah terbayar tunai maupun pendapatan yang belum terbayar (piutang).

(6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah
   (a) Pendapatan hibah diakui pada saat kas diterima atau saat hak kepemilikan berpindah;
   (b) Pendapatan hibah diakui berdasarkan:
      (c) Dokumen penerimaan kas seperti kuitansi atau nota kredit, apabila hibah berupa uang;
      (d) Berita Acara Serah Terima Barang sebesar nilai barang pada saat transaksi, apabila hibah diterima berupa barang.
   (c) Jika hibah yang diterima berupa barang pakai habis, maka selain diakui sebagai pendapatan hibah, jumlah yang sama juga diakui sebagai biaya bahan atau persediaan bahan pakai habis;
   (d) Jika hibah yang diterima berupa barang modal maka selain diakui sebagai pendapatan hibah, jumlah yang sama juga diakui sebagai Aset Tetap.

(7) Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain diakui pada saat kas diterima atau hak untuk menagih timbul, berdasarkan dokumen penerimaan kas atau dokumen piutang.

(8) Pendapatan dari APBD diakui pada saat SP2D diterima

(9) Pendapatan dari Non APBD diakui pada saat kas diterima, berdasarkan dokumen penerimaan kas seperti SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan.

(10) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
   (a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, diakui saat kas diterima atau saat haka untuk menagih timbul berdasarkan dokumen penerimaan kas atau dokumen piutang BLUD;
   (b) Hasil pemanfaatan kekayaan diakui pada saat kas diterima berdasarkan dokumen penerimaan kas;
   (c) Jasa giro diakui pada saat kas diterima berdasarkan dokumen penerimaan kas seperti rekening Koran;
   (d) Pendapatan bunga, diakui pada saat diterima berdasarkan dokumen penerimaan kas;
   (e) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, diakui pada saat realisasi;
   (f) Komisi, potongan ataupun bentuk lain, sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD diakui pada saat komisi atau potongan tersebut diterima; dan
   (g) Hasil investasi diakui pada saat kas diterima atau hak untuk menagih timbul berdasarkan dokumen penerimaan kas atau dokumen piutang BLUD.

b) Pengukuran

(1) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
(2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
(3) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
(4) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non- recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
(5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non- recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
(6) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c) Penyajian dan Pengungkapan

(1) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
(2) Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
(3) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
(a) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
(b) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
(c) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang diterima tanpa melalui mekanisme anggaran/ APBD;
(d) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan BLUD; dan
(e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Beban

Definisi

a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
b) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
c) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

d) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Jasa Pelayanan, Beban Pemeliharaan, Beban Bahan, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
e) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
f) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
g) Beban Bunga merupakan alokasi BLUD RSJ Naimata untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal* outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima BLUD seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
h) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
i) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
j) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
k) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari BLUD kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
l) dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan
   (1) Beban diakui pada:
      (a) Saat timbulnya kewajiban;
      (b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
      (c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
   (2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD RSJ Naimata tanpa diikuti keluarnya kas dari kas BLUD. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar RSJ Naimata dapat diakui sebagai beban.
   (3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD RSJ Naimata.
   (4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

(5) Pengakuan beban pada periode berjalan di BLUD RSJ Naimata dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

(6) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

(7) Beban dengan mekanisme UP/ GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

(8) Beban Non APBD akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas tanpa melalui mekanisme pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

(9) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

(a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;

(b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/ jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;

(c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

(d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

(e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

b) Pengukuran

(1) Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak).

(2) Beban diukur sesuai dengan:

(a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;

(b) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

(3) Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c) Penyajian dan Pengungkapan

(1) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian beban sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   (a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Jasa Pelayanan, Beban Pemeliharaan, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
   (b) Beban Non Operasional.

(2) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

(3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
   (a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
   (b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan,dengan pengakuan belanja;
   (c) Penjelasan mengenai beban yang digunakan mekanisme anggaran/ APBD; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

(4) Beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

m. Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang yang merupakan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya disetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP: 39.702.587.5-922.000 atas nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Taebenu, RT.007 RW.003, Naimata, Maulafa, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

4. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1 Penjelasan Pos-pos Pendapatan

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.589.097.401,17 atau 134,26% dari anggaran sebesar Rp8.631.985.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.370.313.037,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.550.045.387,00	11.453.653.752,00	133,96%	5.324.519.593,00
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-	-	-
c.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	10.200.000,00	-	2.250.000,00
d.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	81.939.613,00	125.243.649,17	-	43.543.444,00
	Jumlah Pendapatan	**8.631.985.000,00**	**11.589.097.401,17**	**134,26%**	**5.370.313.037,00**

Rincian Pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Jumlah realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.453.653.752,00 atau 133,96% dari anggaran sebesar Rp8.550.045.387,00, dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.324.519.593,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024 (disajikan kembali)
		Anggaran	Realisasi		
	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan				
1)	Pendapatan Pasien Umum				
	- Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum Rawat Jalan	139.166.313,00	162.248.773,00	116,59%	49.036.000,00
	- Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum Rawat Inap	26.095.669,00	4.092.973,00	15,68%	8.413.879,00
	- Pelayanan Jasa Layanan Pelayanan Umum Pasien Baru	-	2.512.700,00	-	59.376.000,00
	- Pelayanan Jasa Layanan Pelayanan Umum Pasien Lama	-	40.300.900,00	-	37.773.000,00
	- Pendapatan Jasa Layanan Medicolegal	408.861.813,00	192.303.000,00	47,03%	78.682.700,00
	- Pendapatan Jasa Layananan Test MMPI	2.629.500.244,00	4.869.821.542,00	185,20%	729.069.800,00
	- Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	109.197.192,00	46.295.342,00	42,40%	106.717.396,00
	- Pendapatan Jasa Layanan Narkoba	1.091.199.943,00	1.728.210.000,00	158,38%	50.392.000,00
	- Pelayanan Jasa Layanan Masuk IGD	6.250.000,00	1.479.100,00	23,67%	2.152.261,00
	- Pelayanan Jasa Layanan Jemput Pasien	2.250.000,00	-	-	-
	- Pelayanan Jasa Layanan Mobil Jenazah	109.375,00	135.000,00	123,43%	3.285.000,00
2)	Pendapatan Pasien Jaminan				
	- Pendapatan Jasa Layanan BPJS Kesehatan	4.137.414.838,00	4.398.357.366,00	106,31%	4.174.183.641,00
	- Pendapatan Layanan Klaim IOM / Mandiri Inhealt	-	7.897.056,00	-	25.437.916,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	**8.550.045.387,00**	**11.453.653.752,00**	**133,96%**	**5.324.519.593,00**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Jumlah realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

c. Pendapatan Hasil Kerja Sama

Jumlah realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.200.000,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.250.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Sewa Lahan	-	10.200.000,00	-	2.250.000,00
	Jumlah Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	**10.200.000,00**	-	**2.250.000,00**

d. Pendapatan Hibah

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Pendapatan Usaha Lainnya

Jumlah realisasi Pendapatan Usaha Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp125.243.649,17 atau 152,85% dari anggaran sebesar Rp81.939.613,00, dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.543.444,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Pendapatan Lain-lain				
	- Pelayanan Jasa Pelayanan Penelitian	80.439.613,00	1.995.000,00	2,48%	14.910.500,00
	- Pendapatan Jasa Layanan Praktek Klinik	-	94.870.000,00	-	13.398.000,00
	- Pendapatan Usaha Lainnya Lahan Parkir	1.500.000,00	1.900.000,00	126,67%	-
	- Pendapatan Lainnya	-	-	-	8.374.136,33
2)	Pendapatan Jasa Lainya				
	- Pendapatan Jasa Giro	-	26.478.649,17	-	6.860.807,67
	Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	**81.939.613,00**	**125.243.649,17**	**152,85%**	**43.543.444,00**

4.2 Penjelasan Pos-pos Belanja Operasi

Jumlah realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.564.897.264,00 atau 98,03% dari anggaran sebesar Rp7.716.878.347,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.908.673.354,33, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Pegawai	66.480.000,00	65.980.000,00	99,25%	40.520.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.398.347,00	7.498.917.264,00	98,02%	2.868.153.354,33
c.	Belanja Bunga	-	-	-	-
d.	Belanja Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	**7.716.878.347,00**	**7.564.897.264,00**	**98,03%**	**2.908.673.354,33**

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp65.980.000,00 atau 99,25% dari anggaran sebesar Rp66.480.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.520.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**				
	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.000.000,00	11.500.000,00	95,83%	11.000.000,00
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	54.480.000,00	54.480.000,00	100,00%	29.520.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	**66.480.000,00**	**65.980.000,00**	**99,25%**	**40.520.000,00**

b. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.498.917.264,00 atau 98,02% dari anggaran sebesar Rp7.650.398.347,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.868.153.354,33, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	**Belanja Barang**	**1.902.536.349,00**	**1.831.495.180,00**	**96,27%**	**392.602.458,00**
	a) **Belanja Barang Pakai Habis**	**1.902.536.349,00**	**1.831.495.180,00**	**96,27%**	**389.224.158,00**
	- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.100.000,00	18.086.000,00	99,92%	8.581.420,00
	- Belanja Bahan-Bahan Kimia	680.614.000,00	674.195.475,00	99,06%	-
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	76.588.000,00	76.580.000,00	99,99%	30.960.000,00
	- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	-
	- Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.650.000,00	993.600,00	60,22%	2.382.000,00
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	60.297.000,00	47.816.697,00	79,30%	75.352.468,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	72.571.462,00	62.747.484,00	86,46%	28.003.698,00

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	66.500.000,00	60.693.694,00	91,27%	25.152.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	75.317.040,00	65.753.558,00	87,30%	29.228.372,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	1.630.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.000.000,00	3.000.000,00	42,86%	5.550.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.061.185,00	16.909.825,00	93,63%	4.200.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	45.200.000,00	45.191.315,00	99,98%	18.774.160,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	4.178.040,00
	- Belanja Obat-Obatan-Obat	350.000.000,00	345.103.532,00	98,60%	66.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	298.704.662,00	282.491.000,00	94,57%	69.895.500,00
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	76.933.000,00	76.933.000,00	100,00%	85.270.500,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00%	-
	b) Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	**3.378.300,00**
	- Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	-	3.378.300,00
2)	**Belanja Jasa**	**5.189.850.690,00**	**5.145.968.947,00**	**99,15%**	**1.614.259.094,32**
	a) Belanja Jasa Kantor	**4.809.814.219,00**	**4.779.291.632,00**	**99,37%**	**1.468.143.660,32**
	- Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	53.500.000,00	50.500.000,00	94,39%	12.600.000,00
	- Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	1.350.000,00	30,00%	-
	- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.253.004.836,00	4.253.004.829,00	100,00%	1.330.097.000,32
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	9.425.000,00	8.135.000,00	86,31%	3.105.250,00
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	12.000.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	-	-	2.000.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	162.000.000,00	161.880.000,00	99,93%	-
	- Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	40.000.000,00	39.998.850,00	100,00%	-
	- Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.800.000,00	3.775.000,00	99,34%	-
	- Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	13.500.000,00	13.350.000,00	98,89%	6.500.000,00
	- Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	-	-	-	400.000,00
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-	-	500.000,00
	- Belanja Tagihan Air	-	-	-	7.600.000,00
	- Belanja Tagihan Listrik	25.000.000,00	19.640.700,00	78,56%	-
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	75.471.230,00	59.529.150,00	78,88%	20.635.410,00
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.393.153,00	5.393.153,00	100,00%	9.000.000,00
	- Belanja Lembur	137.000.000,00	136.115.000,00	99,35%	63.706.000,00
	- Belanja jasa transportasi dan akomodasi	1.000.000,00	400.000,00	40,00%	-
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	6.220.000,00	6.219.950,00	100,00%	-
	b) Belanja Sewa Tanah	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00%**	**4.500.000,00**
	- Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	4.500.000,00
	- Belanja Sewa Lapangan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	-
	c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	**28.000.000,00**	**27.820.000,00**	**99,36%**	**3.077.000,00**
	- Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-	2.177.000,00
	- Belanja Sewa Peralatan Umum	28.000.000,00	27.820.000,00	99,36%	900.000,00

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	d) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00%**	-
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	-
	- Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	-
	e) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**100.000.000,00**	**98.786.000,00**	**98,79%**	**31.226.730,00**
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	-	-	-	31.226.730,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000,00	98.786.000,00	98,79%	-
	e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis sertaPendidikan dan Pelatihan	**233.036.471,00**	**221.071.315,00**	**94,87%**	**107.311.704,00**
	- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	233.036.471,00	221.071.315,00	94,87%	107.311.704,00
3)	**Belanja Pemeliharaan**	**93.093.000,00**	**87.686.486,00**	**94,19%**	**635.589.633,01**
	a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**93.093.000,00**	**87.686.486,00**	**94,19%**	**87.669.653,01**
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	-	-	-	19.863.450,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	19.519.875,51
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorAlat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	64.140.000,00	63.166.614,00	98,48%	-
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	10.000.000,00	5.566.872,00	55,67%	6.834.737,50
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	185.000,00	185.000,00	100,00%	5.000.400,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pendingin	18.768.000,00	18.768.000,00	100,00%	-
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-	-	7.665.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran	-	-	-	14.156.940,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-	-	7.629.250,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	-	-	-	7.000.000,00
	b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	**547.919.980,00**
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	547.919.980,00
4)	**Belanja Perjalanan Dinas**	**390.018.308,00**	**365.366.651,00**	**93,68%**	**225.702.169,00**
	a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa	390.018.308,00	365.366.651,00	93,68%	225.702.169,00
5)	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**74.900.000,00**	**68.400.000,00**	**91,32%**	-
	a) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	74.900.000,00	68.400.000,00	91,32%	-
	Total Belanja Barang dan Jasa	**7.650.398.347,00**	**7.498.917.264,00**	**98,02%**	**2.868.153.354,33**

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan dari sumber dana adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Sumber Dana BLUD	7.650.398.347,00	7.498.917.264,00	98,02%	2.868.153.354,33
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**7.650.398.347,00**	**7.498.917.264,00**	**98,02%**	**2.868.153.354,33**

c. Belanja Bunga

Jumlah realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

d. Belanja Lainnya

Jumlah realisasi Belanja Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.3 Penjelasan Pos-pos Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.352.017.582,00 atau 96,88% dari anggaran sebesar Rp2.427.643.960,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp949.102.375,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	715.643.960,00	676.556.272,00	94,54%	941.902.375,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.491.892.000,00	1.483.690.000,00	99,45%	-
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	6.750.000,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.108.000,00	191.771.310,00	87,13%	450.000,00
f.	Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
g.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	**2.427.643.960,00**	**2.352.017.582,00**	**96,88%**	**949.102.375,00**

Rincian Belanja Modal Tahun 2025 dilihat dari sumber dana adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Sumber Dana BLUD	2.427.643.960,00	2.352.017.582,00	96,88%	949.102.375,00
	Jumlah Belanja Modal	**2.427.643.960,00**	**2.352.017.582,00**	**96,88%**	**949.102.375,00**

a. Belanja Modal Tanah

Jumlah realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp676.556.272,00 atau 94,54% dari anggaran sebesar Rp715.643.960,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp941.902.375,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**				
	a) Belanja Modal Alat Ukur				
	- Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia	8.700.000,00	6.937.500,00	79,74%	-
	- Belanja Modal Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	2.395.000,00	2.264.200,00	94,54%	-
	- Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	26.735.000,00	23.577.650,00	88,19%	-
2)	**Belanja Modal Alat Besar**				
	a) Belanja Modal Alat Bantu				
	- Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	-	-	-	12.765.000,00
3)	**Belanja Modal Alat Angkutan**				
	a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor				
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	-	24.420.000,00
4)	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**				
	a) Belanja Modal Alat Kantor				
	- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	125.320.000,00	125.030.400,00	99,77%	67.211.300,00
	- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	10.360.360,00	94,19%	9.296.250,00
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	34.155.449,00	33.670.844,00	98,58%	16.794.300,00
	b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga				
	- Belanja Modal Mebel	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90%	181.131.561,00
	- Belanja Modal Alat Pendingin	26.085.000,00	26.085.000,00	100,00%	135.946.695,00
	- Belanja Modal Alat Dapur	8.500.000,00	8.424.900,00	99,12%	18.315.000,00

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.750.000,00	7.606.000,00	98,14%	6.720.000,00
	c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
	- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	36.750.000,00	36.630.000,00	99,67%	-
	- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	14.364.000,00	12.654.000,00	88,10%	6.199.350,00
	- Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-	-	11.122.200,00
	- Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	17.649.000,00	17.304.000,00	98,05%	5.130.000,00
5)	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**				
	a) Belanja Modal Alat Studio				
	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	59.243.996,00	53.929.840,00	91,03%	37.734.400,00
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.350.000,00	-	-	7.770.000,00
	b) Belanja Modal Alat Komunikasi				
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	10.656.000,00	10.273.050,00	96,41%	4.329.000,00
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-	33.522.000,00
6)	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**				
	a) Belanja Modal Alat Kedokteran				
	- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	23.536.015,00	22.140.983,00	94,07%	-
	- Belanja Modal Alat Kedokteran	-	-	-	19.413.600,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	6.500.000,00	6.431.000,00	98,94%	-
	b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum				
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.100.000,00	2.070.150,00	98,58%	12.541.899,00
7)	**Belanja Modal Alat Laboratorium**				
	a) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium				
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	-	-	-	2.553.000,00
8)	**Belanja Modal Komputer**				
	a) Belanja Modal Komputer Unit				
	- Belanja Modal Personal Computer	142.740.000,00	132.900.300,00	93,11%	173.983.620,00
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	90.364.500,00	88.809.645,00	98,28%	155.003.200,00
	- Belanja Modal Peralatan Komputer	250.000,00	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan Jaringan	25.000.000,00	18.981.000,00	75,92%	-
9)	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**				
	a) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika				
	- Belanja Modal Elektronik/Electric	1.500.000,00	1.487.800,00	99,19%	-
10)	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**				
	a) Belanja Modal Peralatan Olahraga				
	- Belanja Modal Peralatan Permainan	2.000.000,00	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	19.000.000,00	18.997.650,00	99,99%	-
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**715.643.960,00**	**676.556.272,00**	**94,54%**	**941.902.375,00**

c. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.483.690.000,00 atau 99,45% dari anggaran sebesar Rp1.491.892.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	**Belanja Modal Bangunan Gedung**				
	a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	-
	- Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.334.892.000,00	1.328.690.000,00	99,54%	-
	- Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos	145.000.000,00	143.000.000,00	98,62%	-
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**1.491.892.000,00**	**1.483.690.000,00**	**99,45%**	**-**

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.750.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	-	-	-	6.750.000,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	**6.750.000,00**

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp191.771.310,00 atau 87,13% dari anggaran sebesar Rp220.108.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp450.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**				
	a) Belanja Modal Buku Laporan	100.000.000,00	99.840.000,00	99,84%	-
	b) Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	112.800.000,00	84.931.650,00	75,29%	-
	c) Belanja Modal Buku Umum	-	-	-	450.000,00
2)	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**				
	a) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	7.308.000,00	6.999.660,00	95,78%	-
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**220.108.000,00**	**191.771.310,00**	**87,13%**	**450.000,00**

f. Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah realisasi Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

g. Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.513.355.907,67 dan Rp818.600,00.

5.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3 SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.672.182.555,17 dan Rp1.512.537.307,67, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1)	Realisasi Pendapatan-LRA	11.589.097.401,17	5.370.313.037,00
2)	Realisasi Belanja-LRA	9.916.914.846,00	3.857.775.729,33
	Jumlah	**1.672.182.555,17**	**1.512.537.307,67**

5.4 Pendapatan APBD

Jumlah realisasi Pendapatan APBD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5 Setoran ke Kas Daerah

Jumlah Setoran ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp818.600,00 dan Rp0,00.

5.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.184.719.862,84 dan Rp1.513.355.907,67.

6. Penjelasan Pos-pos Neraca

6.1 Kas di Bendahara

Kas di Bendahara merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan APBD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.2 Kas pada BLUD

Jumlah Kas pada BLUD terdiri dari saldo Kas pada Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Kas di Bank. Saldo Kas pada BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.284.836.722,84 dan Rp1.515.611.982,67, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Kas Tunai Bendahara Penerimaan-BLUD	-	-
b. Kas Tunai Bendahara Pengeluaran-BLUD	100.116.860,00	2.256.075,00
c. Kas di Bank		
- PT Bank NTT - 2508442567 a.n UPTD RSJ Naimata Penerimaan BLUD	3.184.718.292,49	1.512.529.606,24
- PT Bank NTT - 2508442818 a.n UPTD RSJ Naimata Pengeluaran BLUD	1.570,35	7.701,43
- PT Bank NTT - 2503199346 a.n Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang	-	818.600,00
Jumlah Kas pada BLUD .	**3.284.836.722,84**	**1.515.611.982,67**

Jumlah Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD Tahun 2025 sebesar Rp20.207.073,00 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pemungutan pajak atas Belanja Tahun 2025 yang disetorkan ke Kas Negara Tahun 2026.

6.3 Piutang Jasa Layanan

Piutang Jasa Layanan merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSKD Jiwa Naimata Kupang. Jumlah Piutang Jasa Layanan Netto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp530.297.139,00 dan Rp422.447.484,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Piutang Operasional BLUD-Pasien Jaminan BPJS Kesehatan	529.861.088,00	420.513.296,00
b. Piutang Operasional BLUD-Pasien Jaminan Asuransi Jiwa Mandiri Inhealth	436.051,00	1.934.188,00
Jumlah Piutang Jasa Layanan (Bruto)	**530.297.139,00**	422.447.484,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
Jumlah Piutang Netto	**530.297.139,00**	**422.447.484,00**

Berikut rincian Mutasi Piutang Tahun 2025:

Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2025		Saldo Akhir
	01-Jan-25	Tambah	Kurang	31-Des-25
a. Piutang Operasional BLUD-Pasien Jaminan BPJS Kesehatan	420.510.396,00	4.461.235.979,00	4.351.885.287,00	529.861.088,00
b. Piutang Operasional BLUD-Pasien Jaminan Asuransi Jiwa Mandiri Inhealth	1.926.463,00	5.334.086,00	6.824.498,00	436.051,00
Jumlah Piutang (bruto)	**422.436.859,00**	**4.466.570.065,00**	**4.358.709.785,00**	**530.297.139,00**

Tahun 2025 terdapat koreksi saldo awal piutang sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
	31-Des-24	Tambah	Kurang	01-Jan-25
a. Piutang Operasional BLUD-Pasien Jaminan BPJS Kesehatan	420.513.296,00	-	2.900,00	420.510.396,00
b. Piutang Operasional BLUD-Pasien Jaminan Asuransi Jiwa Mandiri Inhealth	1.934.188,00	-	7.725,00	1.926.463,00
Jumlah Piutang (bruto)	**422.447.484,00**	**-**	**10.625,00**	**422.436.859,00**

Berikut rincian Mutasi Piutang Tahun 2024:

Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
	01-Jan-24	Tambah	Kurang	31-Des-24
a. Piutang Operasional BLUD-Pasien Jaminan BPJS Kesehatan	615.812.069,71	3.978.884.867,29	4.174.183.641,00	420.513.296,00
b. Piutang Operasional BLUD-Pasien Jaminan Asuransi Jiwa Mandiri Inhealth	713.577,00	26.658.527,00	25.437.916,00	1.934.188,00
Jumlah Piutang (bruto)	**616.525.646,71**	**4.005.543.394,29**	**4.199.621.557,00**	**422.447.484,00**

Berikut rincian mutasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025:

Keterangan	Kualitas Piutang			
	Lancar < 1 tahun	Kurang Lancar ≥ 1 s.d 2 tahun	Diragukan > 2 s.d 3 tahun	Macet > 3 s.d 5 tahun dan > 5 tahun
a. Piutang Operasional BLUD-Pasien Jaminan BPJS Kesehatan	529.861.088,00	-	-	-
b. Piutang Operasional BLUD-Pasien Jaminan Asuransi Jiwa Mandiri Inhealth	436.051,00	-	-	-
Jumlah Piutang (bruto)	530.297.139,00	-	-	-
Persentase Penyisihan	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%
Jumlah Penyisihan	-	-	-	-
Jumlah Piutang (netto)	**530.297.139,00**	-	-	-

Berikut rincian mutasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024:

Keterangan	Kualitas Piutang			
	Lancar < 1 tahun	Kurang Lancar ≥ 1 s.d 2 tahun	Diragukan > 2 s.d 3 tahun	Macet > 3 s.d 5 tahun dan > 5 tahun
a. Piutang Operasional BLUD-Pasien Jaminan BPJS Kesehatan	420.513.296,00	-	-	-
b. Piutang Operasional BLUD-Pasien Jaminan Asuransi Jiwa Mandiri Inhealth	1.934.188,00	-	-	-
Jumlah Piutang (bruto)	422.447.484,00	-	-	-
Persentase Penyisihan	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%
Jumlah Penyisihan	-	-	-	-
Jumlah Piutang (netto)	**422.447.484,00**	-	-	-

6.4 Persediaan BLUD

Jumlah Persediaan BLUD RSKD Jiwa Naimata Kupang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp457.450.219,90 dan Rp472.759.548,89, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Barang Pakai Habis	457.450.219,90	472.759.548,89
b. Barang Tak Pakai Habis	-	-
Jumlah	**457.450.219,90**	**472.759.548,89**

Rincian mutasi Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2024	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31 Des 2025
			Penambahan	Pengurangan	
a.	**Barang Pakai Habis**	472.759.548,89	2.134.605.480,10	2.149.914.809,09	457.450.219,90
	- Alat Tulis Kantor	-	62.746.983,50	62.746.983,50	-
	- Kertas dan Cover	-	60.693.694,00	60.693.694,00	-
	- Bahan-Bahan Lainnya	-	674.195.475,00	674.195.475,00	-
	- Barang Habis Pakai	-	60.702.808,00	60.702.808,00	-
	- Materai	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	- Alat Listrik	-	45.191.314,60	45.191.314,60	-
	- Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	18.085.996,70	18.085.996,70	-
	- Bahan Bakar dan Pelumas	-	76.580.000,00	76.580.000,00	-
	- Peralatan Pertukangan	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	- Perabot Kantor	-	16.909.825,00	16.909.825,00	-
	- Obat-Obatan	472.759.548,89	1.109.499.383,30	1.124.808.712,29	457.450.219,90
c.	**Barang Tak Pakai Habis**	-	-	-	-
	- Pipa	-	-	-	-
	Total	**472.759.548,89**	**2.134.605.480,10**	**2.149.914.809,09**	**457.450.219,90**

Rincian mutasi Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2024	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31 Des 2024
			Penambahan	Pengurangan	
a.	**Barang Pakai Habis**	**347.789.726,88**	**1.278.137.013,61**	**1.153.167.191,60**	**472.759.548,89**
	- Alat Tulis Kantor	-	29.970.998,00	29.970.998,00	-
	- Kertas dan Cover	-	10.992.000,00	10.992.000,00	-
	- Bahan-Bahan Lainnya	-	89.238.105,00	89.238.105,00	-
	- Bahan Cetak	-	11.241.500,00	11.241.500,00	-
	- Materai	-	1.992.000,00	1.992.000,00	-
	- Alat Listrik	-	16.831.660,00	16.831.660,00	-
	- Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	2.848.625,00	2.848.625,00	-
	- Bahan Bakar dan Pelumas	-	25.960.000,00	25.960.000,00	-
	- Bahan Komputer	-	924.500,00	924.500,00	-
	- Perabot Kantor	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-
	- Obat-Obatan	347.789.726,88	1.083.937.625,61	958.967.803,60	472.759.548,89
c.	**Barang Tak Pakai Habis**	-	-	-	-
	- Pipa	-	-	-	-
	Total	**347.789.726,88**	**1.278.137.013,61**	**1.153.167.191,60**	**472.759.548,89**

6.5 Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap (Nilai Buku) RSKD Jiwa Naimata Kupang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp73.719.555.739,66 dan Rp78.817.273.588,44, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Tanah	46.100.000.000,00	46.100.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	72.057.748.305,00	71.303.317.317,00
c. Gedung dan Bangunan	28.319.433.802,85	26.835.743.802,85
d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.712.151.000,00	2.712.151.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	150.389.660,00	43.550.000,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Harga Perolehan Aset Tetap	**149.339.722.767,85**	**146.994.762.119,85**
g. Akumulasi Penyusutan	(75.620.167.028,19)	(68.177.488.531,41)
Nilai Buku Aset Tetap	**73.719.555.739,66**	**78.817.273.588,44**

Rincian mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 1 Jan 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
a. Tanah	46.100.000.000,00	-	-	46.100.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	71.303.317.317,00	761.487.922,00	7.056.934,00	72.057.748.305,00
c. Gedung dan Bangunan	26.835.743.802,85	1.483.690.000,00	-	28.319.433.802,85
d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.712.151.000,00	-	-	2.712.151.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	43.550.000,00	191.771.310,00	84.931.650,00	150.389.660,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**146.994.762.119,85**	**2.436.949.232,00**	**91.988.584,00**	**149.339.722.767,85**
Akumulasi Penyusutan				
a. Tanah	-	-	-	-
b. Peralatan dan Mesin	63.865.981.891,00	6.815.904.495,73	-	70.681.886.386,73
c. Gedung dan Bangunan	4.038.322.790,41	558.970.226,06	-	4.597.293.016,46
d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	273.183.850,00	67.803.775,00	-	340.987.625,00
e. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**68.177.488.531,41**	**7.442.678.496,78**	**-**	**75.620.167.028,19**
Nilai Buku				
a. Tanah	46.100.000.000,00			46.100.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	7.437.335.426,00			1.375.861.918,27
c. Gedung dan Bangunan	22.797.421.012,45			23.722.140.786,39
d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.438.967.150,00			2.371.163.375,00
e. Aset Tetap Lainnya	43.550.000,00			150.389.660,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
Jumlah	**78.817.273.588,44**			**73.719.555.739,66**

Rincian mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 1 Jan 2024	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
a. Tanah	46.100.000.000,00	-	-	46.100.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	70.369.574.541,00	933.742.776,00	-	71.303.317.317,00
c. Gedung dan Bangunan	26.280.810.016,85	554.933.786,00	-	26.835.743.802,85
d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.705.401.000,00	6.750.000,00	-	2.712.151.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	43.100.000,00	450.000,00	-	43.550.000,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**145.498.885.557,85**	**1.495.876.562,00**	-	**146.994.762.119,85**
Akumulasi Penyusutan				
a. Tanah	-	-	-	-
b. Peralatan dan Mesin	52.478.165.296,49	11.387.816.594,51	-	63.865.981.891,00
c. Gedung dan Bangunan	3.501.607.914,35	536.714.876,06	-	4.038.322.790,41
d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	205.380.075,00	67.803.775,00	-	273.183.850,00
e. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**56.185.153.285,83**	**11.992.335.245,57**	-	**68.177.488.531,41**
Nilai Buku				
a. Tanah	46.100.000.000,00			46.100.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	17.891.409.244,51			7.437.335.426,00
c. Gedung dan Bangunan	22.779.202.102,50			22.797.421.012,45
d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.500.020.925,00			2.438.967.150,00
e. Aset Tetap Lainnya	43.100.000,00			43.550.000,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
Jumlah	**89.313.732.272,02**			**78.817.273.588,44**

Rincian Tanah lokasi RSKD Jiwa Naimata Kupang adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas (M^2)	Lokasi	Nilai
1	Tanah Rencana RS Jiwa	60.000 M^2	Jl. Farmasi Kel. Liliba	42.000.000.000,00
1	Tanah Bangunan RS Jiwa	50.000 M^2	Kel. Naimata Kota	4.100.000.000,00
	Jumlah			**46.100.000.000,00**

Selama periode berjalan tahun 2024 dan 2025 terdapat penambahan dan pengurangan Harga Perolehan Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan dengan uraian sebagai berikut:

1) **Tanah**	2025	2024
Harga Perolehan		
Saldo Awal	46.100.000.000,00	46.100.000.000,00
Penambahan:	-	-
Pengurangan:	-	-
Saldo Akhir Harga Perolehan Tanah	**46.100.000.000,00**	**46.100.000.000,00**

2) **Peralatan dan Mesin**	2025	2024
Harga Perolehan		
Saldo Awal	71.303.317.317,00	70.369.574.541,00
Penambahan:		
- Belanja Modal	676.556.272,00	941.902.375,00
- Reklas antar Aset Tetap	84.931.650,00	-
Jumlah Penambahan	761.487.922,00	941.902.375,00
Pengurangan:		
- Reklas Keluar ke Extrakompatable	7.056.934,00	8.159.599,00
Jumlah Pengurangan	7.056.934,00	8.159.599,00
Saldo Akhir Harga Perolehan Peralatan dan Mesin	**72.057.748.305,00**	**71.303.317.317,00**
Akumulasi Penyusutan		
Saldo Awal	63.865.981.891,00	52.478.165.296,49
Penambahan:		
- Beban Penyusutan	6.815.904.495,73	11.387.816.594,51
Jumlah Penambahan	6.815.904.495,73	11.387.816.594,51
Pengurangan:		
- Reklas ke Klp Aset Ekstrakomptabel	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	**70.681.886.386,73**	**63.865.981.891,00**
Nilai Buku Peralatan dan Mesin	**1.375.861.918,27**	**7.437.335.426,00**

3) **Gedung dan Bangunan**	2025	2024
Saldo Awal	26.835.743.802,85	26.280.810.016,85
Penambahan:		
- Belanja Modal	1.483.690.000,00	-
- Kapitalisasi Belanja		547.919.980,00
- Reklas antar Aset Tetap	-	7.013.806,00
Jumlah Penambahan Harga Perolehan Gedung dan Bangunan	1.483.690.000,00	554.933.786,00
Pengurangan:		
- Reklas Ke Aset Lainnya (RB)	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Harga Perolehan Gedung dan Bangunan	**28.319.433.802,85**	**26.835.743.802,85**
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		
Saldo Awal	4.038.322.790,41	3.501.607.914,35
Penambahan:		
- Beban Penyusutan	558.970.226,06	536.714.876,06
Jumlah Penambahan	558.970.226,06	536.714.876,06
Pengurangan:		
- Reklas ke Klp Aset Ekstrakomptabel	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	**4.597.293.016,46**	**4.038.322.790,41**
Nilai Buku Gedung dan Bangunan	**23.722.140.786,39**	**22.797.421.012,45**

4) **Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	2025	2024
Harga Perolehan		
Saldo Awal	2.712.151.000,00	2.705.401.000,00
Penambahan:		
- Belanja Modal	-	6.750.000,00
- Reklas antar Aset Tetap	-	-
Jumlah Penambahan	-	6.750.000,00
Pengurangan:	-	-
- Reklas Keluar ke Extrakompatable	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Harga Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**2.712.151.000,00**	**2.712.151.000,00**
Akumulasi Penyusutan		
Saldo Awal	273.183.850,00	205.380.075,00
Penambahan:		
- Beban Penyusutan	67.803.775,00	67.803.775,00
Jumlah Penambahan	67.803.775,00	67.803.775,00
Pengurangan:		-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**340.987.625,00**	**273.183.850,00**
Nilai Buku Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**2.371.163.375,00**	**2.438.967.150,00**

5) **Aset Tetap Lainnya**	2025	2024
Harga Perolehan		
Saldo Awal	43.550.000,00	43.100.000,00
Penambahan:		
- Belanja Modal	191.771.310,00	450.000,00
Jumlah Penambahan	191.771.310,00	450.000,00
Pengurangan:		
- Reklas antar Aset Tetap	84.931.650,00	-
Jumlah Pengurangan	84.931.650,00	-
Saldo Akhir Harga Perolehan Aset Tetap Lainnya	**150.389.660,00**	**43.550.000,00**
Akumulasi Penyusutan		
Saldo Awal	-	-
Penambahan:		
- Beban Penyusutan	-	-
Jumlah Penambahan	-	-
Pengurangan:		-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Nilai Buku Aset Tetap Lainnya	**150.389.660,00**	**43.550.000,00**

Selama periode berjalan tahun 2025 Perubahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

	2025	2024
1) Saldo awal tahun	68.177.488.531,41	56.185.153.285,83
2) Penyusutan tahun berjalan	7.442.678.496,78	11.992.335.245,57
4) Mutasi Antar Perangkat Daerah	-	-
Saldo akhir tahun	**75.620.167.028,19**	**68.177.488.531,41**

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.442.678.496,78 dan Rp11.992.335.245,57 (lihat catatan no.7. 2c).

6.6 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya (Nilai Buku) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 dan Rp4.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
a. Aset Tak Berwujud	7.500.000,00	7.500.000,00
b. Aset Lain-lain	-	-
Jumlah	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**
Akumulasi Amortisasi	(4.500.000,00)	(3.000.000,00)
Nilai Buku	**3.000.000,00**	**4.500.000,00**

Rincian Aset Lainnya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 1 Jan 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
a. Aset Tak Berwujud	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
b. Aset Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	**7.500.000,00**	-	-	**7.500.000,00**
Akumulasi Amortisasi				
a. Aset Tak Berwujud	3.000.000,00	1.500.000,00	-	4.500.000,00
b. Aset Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	-	**4.500.000,00**
Nilai Buku				
a. Aset Tak Berwujud	4.500.000,00			3.000.000,00
b. Aset Lain-lain	-			-
Jumlah	**4.500.000,00**			**3.000.000,00**

Rincian Aset Lainnya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 1 Jan 2024	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
a. Aset Tak Berwujud	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
b. Aset Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	**7.500.000,00**	-	-	**7.500.000,00**
Akumulasi Amortisasi				
a. Aset Tak Berwujud	1.500.000,00	1.500.000,00	-	3.000.000,00
b. Aset Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	-	**3.000.000,00**
Nilai Buku				
a. Aset Tak Berwujud	6.000.000,00			4.500.000,00
b. Aset Lain-lain	-			-
Jumlah	**6.000.000,00**			**4.500.000,00**

Selama periode berjalan Tahun 2025 terdapat Beban amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.500.000,00 *(lihat catatan no. 7.2e. 2))*.

6.7 Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.228.784.367,80 dan Rp1.147.070.441,20, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100.116.860,00	2.256.075,00
b. Belanja Yang Masih Harus Dibayar	1.128.667.507,80	1.144.814.366,20
c. Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**1.228.784.367,80**	**1.147.070.441,20**

Rincian Kewajiban Jangka Pendek di tahun 2024 terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Belanja Yang Masih Harus Dibayar, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
- PPh 21	2.866.000,00	1.680.450,00
- PPh 22	23.534.033,00	19.575,00
- PPh 23	10.261.929,00	-
- PPN	63.454.898,00	556.050,00
Jumlah	**100.116.860,00**	**2.256.075,00**
b. Belanja Barang dan Jasa Yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		
- Obat dan BHP	-	345.103.529,00
Belanja Jasa Yang Masih Harus Dibayar		
- Jasa Tenaga Kesehatan	1.128.667.507,80	799.710.837,20
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Yang Masih Harus Dibayar	**1.128.667.507,80**	**1.144.814.366,20**
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**1.228.784.367,80**	**1.147.070.441,20**

Belanja Jasa Yang Masih Harus Dibayar berupa Jasa Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.128.667.507,80 dan Rp799.710.837,20, merupakan Utang Jasa Pelayanan dengan perhitungan sebagai berikut:

	2025	2024
Realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat -LRA	11.453.653.752,00	5.324.519.593,00
% Jaspel menurut Pergub dan Perdir	40%	40%
Nilai Jaspel (seharusnya)	**4.581.461.500,80**	**2.129.807.837,20**
Nilai Jaspel (terbayarkan)	3.452.793.993,00	1.330.097.000,00
Sisa Hutang Jaspel Tahun 2024	**1.128.667.507,80**	**799.710.837,20**

6.8 Ekuitas

Jumlah Ekuitas RSKD Jiwa Naimata Kupang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp76.766.355.453,60 dan Rp80.085.522.162,80, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Ekuitas Awal	80.085.522.162,80	90.295.101.801,60
b. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(3.318.337.484,20)	(10.209.579.638,80)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(829.225,00)	-
Jumlah Ekuitas	**76.766.355.453,60**	**80.085.522.162,80**

7. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

7.1 Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan Operasional RSKD Jiwa Naimata Kupang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.696.957.681,17 dan Rp5.176.234.874,29, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.584.521.532,00	5.130.441.430,29
b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-
c. Pendapatan Hasil Kerjasama	10.200.000,00	2.250.000,00
d. Pendapatan Hibah	-	-
e. Pendapatan Lain-lain	102.236.149,17	43.543.444,00
f. Pendapatan APBD	-	-
Jumlah	**11.696.957.681,17**	**5.176.234.874,29**

Rincian Pendapatan adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.584.521.532,00 dan Rp5.130.441.430,29, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Pasien Umum		
Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum Rawat Jalan	185.256.273,00	49.036.000,00
Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum Rawat Inap	4.092.973,00	8.413.879,00
Pelayanan Jasa Layanan Pelayanan Umum Pasien Baru	2.512.700,00	59.376.000,00
Pelayanan Jasa Layanan Pelayanan Umum Pasien Lama	40.300.900,00	37.773.000,00
Pendapatan Jasa Layanan Medicolegal	192.303.000,00	13.231.500,00
Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	46.295.342,00	106.717.396,00
Pendapatan Jasa Layanan Narkoba	1.728.210.000,00	50.392.000,00
Jumlah Pindahan	*7.068.792.730,00*	*1.119.460.775,00*

	2025	2024
Jumlah Dipindahkan	*7.068.792.730,00*	*1.119.460.775,00*
Pelayanan Jasa Layanan Masuk IGD	1.479.100,00	2.152.261,00
Pelayanan Jasa Layanan Jemput Pasien	-	-
Pelayanan Jasa Layanan Mobil Jenazah	135.000,00	3.285.000,00
2) Pasien Jaminan		
Pendapatan Jasa Layanan BPJS Kesehatan	4.507.708.058,00	3.978.884.867,29
Pendapatan Layanan Klaim IOM / Mandiri Inhealt	6.406.644,00	26.658.527,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat - LO	**11.584.521.532,00**	**5.130.441.430,29**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

c. Pendapatan Hasil Kerjasama

Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.200.000,00 dan Rp2.250.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Sewa Lahan	10.200.000,00	2.250.000,00
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama - LO	**10.200.000,00**	**2.250.000,00**

d. Pendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan Hibah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Pendapatan Usaha Lainnya

Jumlah Pendapatan Usaha Lainya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp102.236.149,17 dan Rp43.543.444,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Pendapatan Lain - Lain		
Pelayanan Jasa Pelayanan Penelitian	13.252.500,00	13.398.000,00
Pendapatan Jasa Layanan Praktek Klinik	60.605.000,00	14.910.500,00
Pendapatan Usaha Lainnya Lahan Parkir	1.900.000,00	-
Pendapatan Lainnya	-	8.374.136,33
2) Pendapatan Jasa Lainnya		
Jasa Giro	26.478.649,17	6.860.807,67
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya - LO	**102.236.149,17**	**43.543.444,00**

f. Pendapatan APBD

Jumlah Pendapatan APBD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.2 Beban

Jumlah Beban RSKD Jiwa Naimata Kupang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.015.295.165,37 dan Rp15.385.814.513,09, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Beban Pegawai	65.980.000,00	40.520.000,00
b. Beban Barang dan Jasa	7.505.136.668,59	3.351.459.267,52
c. Beban Bunga	-	-
d. Beban Penyisihan Piutang	-	-
e. Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.444.178.496,78	11.993.835.245,57
f Beban Lain-lain	-	-
Jumlah Beban	**15.015.295.165,37**	**15.385.814.513,09**

Rincian Beban adalah sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai RSKD Jiwa Naimata Kupang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp65.980.000,00 dan Rp40.520.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN		
- Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.500.000,00	11.000.000,00
- Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	54.480.000,00	29.520.000,00
Jumlah Beban Pegawai	**65.980.000,00**	**40.520.000,00**

b. **Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa RSKD Jiwa Naimata Kupang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.505.136.668,59 dan Rp3.351.459.267,52 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) **Beban Barang**		
Beban Barang Pakai Habis		
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.086.000,00	8.581.420,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	674.195.475,00	-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	76.580.000,00	30.960.000,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.000.000,00	-
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	993.600,00	2.382.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	47.816.697,00	75.352.468,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.747.484,00	28.003.698,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.693.694,00	25.152.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.753.558,00	29.228.372,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.000.000,00	1.630.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.000.000,00	5.550.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	23.966.759,00	4.200.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	45.191.315,00	18.774.160,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainn	-	22.559.389,00
Beban Obat-Obatan-Obat	15.309.331,99	220.199.706,99
Beban Makanan dan Minuman Rapat	282.491.000,00	69.895.500,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	76.933.000,00	85.270.500,00
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	46.000.000,00	-
Beban Barang Tak Pakai Habis		
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	3.378.300,00
Jumlah Beban Barang	**1.508.757.913,99**	**631.117.513,99**
2) **Beban Jasa**		
Beban Jasa Kantor		
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.500.000,00	12.600.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatar	1.350.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	4.581.961.499,60	2.129.807.837,52
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	8.135.000,00	3.105.250,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	20.000.000,00	12.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	2.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	161.880.000,00	-
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	39.998.850,00	-
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.775.000,00	-
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	13.350.000,00	6.500.000,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	-	400.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	500.000,00
Beban Tagihan Air	-	7.600.000,00
Beban Tagihan Listrik	19.640.700,00	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	59.529.150,00	20.635.410,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.393.153,00	9.000.000,00
Beban Lembur	136.115.000,00	63.706.000,00
Beban jasa transportasi dan akomodasi	400.000,00	-
Beban Cetak dan Penggandaan	6.219.950,00	-
Beban Sewa Tanah		
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	4.500.000,00
Beban Sewa Lapangan Lainnya	4.000.000,00	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin		
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	-	2.177.000,00
Beban Sewa Peralatan Umum	27.820.000,00	900.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan		
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	-
Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	9.000.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi		-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	-	31.226.730,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	98.786.000,00	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	221.071.315,00	107.311.704,00
Jumlah Beban Jasa	**5.474.925.617,60**	**2.413.969.931,52**

	2025	2024
3) **Beban Pemeliharaan**		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	-	19.863.450,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	19.519.875,51
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.566.872,00	6.834.737,50
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	185.000,00	5.000.400,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat	18.768.000,00	7.665.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	14.156.940,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	7.629.250,00
Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan	-	-
Jumlah Beban Pemeliharaan	**87.686.486,00**	**80.669.653,01**
4) **Beban Perjalanan Dinas**		
Beban Perjalanan Dinas Biasa	365.366.651,00	225.702.169,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**365.366.651,00**	**225.702.169,00**
5) **Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**		
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	68.400.000,00	-
Jumlah Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**68.400.000,00**	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**7.505.136.668,59**	**3.351.459.267,52**

c. Beban Bunga

Jumlah Beban Bunga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

d. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.444.178.496,78 dan Rp11.993.835.245,57 dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2024
1) **Beban Penyusutan**		
- Peralatan dan Mesin	6.815.904.495,73	11.387.816.594,51
- Gedung dan Bangunan	558.970.226,06	536.714.876,06
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	67.803.775,00	67.803.775,00
Jumlah Beban Penyusutan	**7.442.678.496,78**	**11.992.335.245,57**
2) **Beban Amortisasi**		
- Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00
Jumlah Beban Amortisasi	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**7.444.178.496,78**	**11.993.835.245,57**

f. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.3 Kegiatan Non Operasional

Jumlah Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.4 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

8. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

8.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2025	2024
a. Arus Kas Masuk		
Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdiri dari:		
1) Pendapatan APBD	-	-
2) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.453.653.752,00	5.324.519.593,00
3) Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	-	-
4) Pendapatan Hasil Kerja Sama	10.200.000,00	2.250.000,00
5) Pendapatan Hibah	-	-
6) Pendapatan Usaha Lainnya	125.243.649,17	43.543.444,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**11.589.097.401,17**	**5.370.313.037,00**
b. Arus Kas Keluar		
Arus kas keluar dari aktivitas operasi terdiri dari:		
1) Belanja Pegawai	65.980.000,00	40.520.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	7.498.917.264,00	2.868.153.354,33
Jumlah Arus Kas Keluar	**7.564.897.264,00**	**2.908.673.354,33**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**4.024.200.137,17**	**2.461.639.682,67**

8.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2025	2024
a. Arus Kas Masuk		
Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari:		
1) Penerimaan Penjualan atas Tanah	-	-
2) Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
3) Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
4) Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
5) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	-	-
6) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
b. Arus Kas Keluar		
Arus kas keluar dari aktivitas investasi terdiri dari:		
1) Belanja Modal Tanah	-	-
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	676.556.272,00	941.902.375,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.483.690.000,00	-
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	6.750.000,00
5) Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	191.771.310,00	450.000,00
6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-
7) Belanja Modal Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	**2.352.017.582,00**	**949.102.375,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(2.352.017.582,00)**	**(949.102.375,00)**

8.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
a. Arus Kas Masuk		
1) Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan	-	-
b. Arus Kas Keluar		
1) Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan	818.600,00	-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**(818.600,00)**	-

8.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	2025	2024
a. Arus Kas Masuk		
1) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	744.278.393,00	212.055.608,66
b. Arus Kas Keluar		
1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	646.417.608,00	209.799.533,66
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**97.860.785,00**	**2.256.075,00**

8.5 Saldo Kas	2025	2024
a. Saldo Awal Kas	1.515.611.982,67	818.600,00
b. Kenaikan/Penurunan kas per 31 Desember 2024	1.769.224.740,17	1.514.793.382,67
c. Saldo Akhir Kas	3.284.836.722,84	1.515.611.982,67

9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

9.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 01 Januari 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp80.085.522.162,80 dan Rp90.295.101.801,60.

9.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit-LO per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.318.337.484,20 dan Rp10.209.579.638,80, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Pendapatan	11.696.957.681,17	5.176.234.874,29
b. Beban	(15.015.295.165,37)	(15.385.814.513,09)
c. Kegiatan Non Operasional	-	-
d. Pos Luar Biasa	-	-
Jumlah Surplus/Defisit-LO	**(3.318.337.484,20)**	**(10.209.579.638,80)**

9.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi nilai ekuitas. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp829.225,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Setoran ke Kas Daerah	(818.600,00)	-
b. Dampak Perubahan Nilai Piutang	(10.625,00)	-
Jumlah	**(829.225,00)**	**-**

9.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp76.766.355.453,60 dan Rp80.085.522.162,80.

10 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian laporan keuangan sama dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 30 Maret 2026.

Tidak terdapat peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal pelaporan yang memerlukan pengungkapan dalam dan atau penyesuaian terhadap laporan keuangan.

Kantor Akuntan Publik
I GEDE OKA & REKAN
Registered Public Accountants
Izin Usaha KAP: KMK No. 131/MK/SK/2025

Laporan No.: 00055/ML/KAP.IGOR/1/III/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini Wajar yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00055/2.1516/AU.5/11/0463-2/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang. Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut diatas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun,

tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pemeriksaan kami terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kami tidak menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap Laporan Keuangan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Namun demikian, kami menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berpengaruh langsung dan tidak material terhadap Laporan Keuangan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan pokok-pokok temuan:

1. Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang belum sepenuhnya menyusun Laporan Keuangan (unaudited) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Badan Layanan Umum
2. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
3. Kebijakan dan penerapan penyisihan piutang tidak sesuai dengan Permendagri 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah
4. Pelaksanaan Anggaran berupa Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) dan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang belum sesuai ketentuan
5. Penatausahaan persediaan pada Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang belum sepenuhnya memadai
6. Terdapat persediaan kedaluwarsa sebesar Rp22.117.202,90 belum dilakukan pemusnahan dan belum terdapat berita acara penghapusan dari laporan keuangan
7. Pencatatan/penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya dilakukannya dengan tertib
8. Pengajuan Klaim BPJS atas Pelayanan Kesehatan Tahun Layanan 2025 belum dilakukan secara tepat waktu dan terdapat potensi kehilangan pendapatan atas klaim pending

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan,

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP. 0463

Badung, 30 Maret 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang Tahun 2025 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan perincian sebagai berikut:

1. **Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang belum sepenuhnya menyusun Laporan Keuangan (*unaudited*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Badan Layanan Umum**

   Pada Tahun 2025 Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang belum dapat menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan PSAP BLU untuk tujuan umum yang wajib diaudit oleh auditor independen. Jenis Laporan Keuangan BLU yang harus ada sebagai berikut:

   1) Laporan Realisasi Anggaran;
   2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   3) Neraca;
   4) Laporan Operasional;
   5) Laporan Arus Kas;
   6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   7) Catatan atas Laporan Keuangan.

   Laporan Keuangan (***unaudited***) yang sudah dibuat Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang berupa:

   1) Laporan Realisasi Anggaran;
   2) Neraca;
   3) Laporan Operasional;
   4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   5) Catatan atas Laporan Keuangan.

   Laporan Keuangan (***unaudited***) yang belum dibuat Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang berupa:

   1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
   2) Laporan Arus Kas.

   Untuk memenuhi kebutuhan atas laporan keuangan dimaksud, dilakukan dengan prosedur alternatif untuk memeroleh keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara wajar dengan:

   a. menghimpun Laporan Realisasi Pendapatan dengan bukti pendukung berupa Buku Kas Umum Penerimaan dan Register Penutupan Kas.
   b. menghimpun Laporan Realisasi Belanja-BLUD dengan bukti pendukung berupa Buku Kas Umum Pengeluaran dan Register Penutupan Kas.
   c. menghimpun Rekening Koran atau Bukti Simpanan di Bank.
   d. menghimpun data aset berupa piutang dan umur piutang, data persediaan, data aset tetap/barang milik daerah, dan data utang.

e. membuat resume dan melakukan pengujian terhadap keandalan data baik pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Berdasarkan Pasal 6 PMK No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, menyatakan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum selaku entitas pelaporan menggunakan laporan keuangan dengan komponen sebagai berikut: 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Permasalahan ini mengakibatkan penurunan kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan karena informasi yang disajikan menjadi kurang memadai untuk memberikan gambaran yang transparan dan andal mengenai kondisi keuangan entitas.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh kekurangan SDM di bidang pelaporan keuangan yang berlatar belakang akuntansi dan/atau keuangan dan RSKD belum memiliki aplikasi yang handal untuk pembukuan dan pelaporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut kami merekomendasikan Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi dan/atau keuangan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

2. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang dibentuk berdasarkan Keputusan Nusa Tenggara Timur Nomor 22/KEP/HK/2023 tanggal 25 Januari 2023, tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen BLUD, diketahui bahwa BLUD belum sepenuhnya memiliki ketentuan yang diwajibkan sebagai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 4	Tidak Ada	

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Keterangan
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 22	Tidak Ada	
3	Remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin	Pasal 24 ayat (1)	Tidak Ada	
4	Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 38	Ada	Pergub NTT No. 113 Tahun 2022 tentang Pola tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang
5	Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 41	Tidak Ada	Masih gabung dengan Dinkes
6	Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 43	Ada	Pergub NTT No. 51 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur
7	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 64 ayat (3)	Ada	Pergub NTT No. 38 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT
8	Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 73	Tidak Ada	
9	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 77 ayat (1)	Tidak Ada	

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Keterangan
10	Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 83 ayat (6)	Tidak Ada	
11	Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 85 ayat (2)	Ada	Pergub NTT No. 116 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
12	Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 87 ayat (5)	Ada	Pergub NTT No. 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman
13	Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah	Pasal 91 ayat (6)	Ada	Pergub NTT No. 47 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dengan Pihak Lain
14	Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 94	Ada	Pergub NTT No. 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Investasi
15	Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 96	Ada	Pergub NTT No. 114 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
16	BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 99 ayat (5)	Ada	Pergub NTT No. 114 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Permasalahan tersebut belum sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa:

a) Pasal 4, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b) Pasal 22, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh Pembina dan Pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c) Pasal 24 ayat (1), Remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin;
d) Pasal 38, Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
e) Pasal 41, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
f) Pasal 43, Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
g) Pasal 64 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
h) Pasal 73, Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
i) Pasal 77 ayat (1), Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
j) Pasal 83 ayat (6), Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
k) Pasal 85 ayat (2), Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
l) Pasal 87 ayat (5), Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
m) Pasal 91 ayat (6), Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
n) Pasal 94, Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
o) Pasal 96, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
p) Pasal 99 ayat (5), BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang untuk melengkapi produk hukum dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan PPK-BLUD.

3. Kebijakan dan penerapan penyisihan piutang tidak sesuai dengan Permendagri 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah

Dalam kebijakan akuntansi sebagaimana disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang menyajikan kebijakan akuntansi penyisihan piutang sesuai Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		< 1	≥1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	> 5
1	Piutang Jasa Layanan	Lancar	KL	R	Macet	Macet
2	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	KL	R	Macet	Macet

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		< 1	≥1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	> 5
3	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	KL	R	Macet	Macet
4	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	KL	R	Macet	Macet
5	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	KL	R	Macet	Macet
6	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	KL	R	Macet	Macet
7	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	KL	R	Macet	Macet
8	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	KL	R	Macet	Macet
9	Piutang Lain-Lain	Lancar	KL	R	Macet	Macet

Kebijakan besaran persentase penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut:

No	Uraian	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		< 1	≥1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	> 5
1	Piutang Jasa Layanan	0%	40%	70%	100%	100%
2	Biaya Dibayar di Muka	0%	5%	30%	60%	100%
3	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0%	20%	40%	60%	100%
4	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0%	10%	30%	60%	100%
5	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0%	10%	30%	60%	100%
6	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0%	10%	30%	60%	100%
7	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0%	10%	30%	60%	100%
8	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0%	10%	30%	60%	100%
9	Piutang Lain-Lain	0%	10%	30%	60%	100%

Kebijakan dan penerapan penyisihan piutang tersebut tidak sesuai dengan Permendagri 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada

Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut bisa berdampak pada penyajian beban dan penyisihan piutang dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

a. Pasal 7 menyebutkan bahwa Penentuan besaran penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diklasifikasikan atas:
   1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
   2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
   3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
   4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
b. Lampiran huruf A "Tata Cara Penyisihan Piutang", Angka Romawi IV "Tata Cara Penyisihan Piutang", angka 2 "Kriteria Kualitas Piutang" huruf c "menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang" angka 3) "penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi" menyebutkan bahwa:
   1) Kualitas Lancar
      Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
   2) Kualitas Kurang Lancar
      Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
   3) Kualitas Diragukan
      Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
   4) Kualitas Macet
      Apabiladalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai piutang neto tidak menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai yang diatur pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, kami merekomendasikan Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang memperbaiki kebijakan akuntansi piutangnya agar sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

4. Pelaksanaan Anggaran berupa Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) dan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang belum sesuai ketentuan

Pelaksanaan penatausahaan anggaran berupa penyusunan laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang belum dilakukan secara berkala, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Penatausahaan pendapatan dilakukan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang ditandatangani oleh Direktur dan Bendahara Penerimaan setiap bulan dan Register Penutupan Kas.

b. Penatausahaan belanja dilakukan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh Direktur dan Bendahara Pengeluaran setiap bulan dan Register Penutupan Kas.

Setiap bulan Pejabat Keuangan membuat lampiran Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) BLUD untuk ditandatangani oleh Direktur, selanjutnya disampaikan kepada BUD selaku PPKD untuk diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) BLUD. Pada Tahun 2025 SP3BP BLUD yang dibuat selama 11 bulan (Januari - Desember 2025) dan diajukan untuk mohon pengesahan sekaligus pada akhir tahun berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang Nomor: RSKDJNK.445.2/3543/XII/2025 perihal Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD tanggal 30 Desember 2025, tanggal 30 Desember 2025. Rincian SP3BP sebagai berikut:

No.	Bulan	Nomor SP3BP	Tanggal	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1	Januari	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Februari	NA	27/02/2025	5.694.242.416	1.253.497.051	199.984.779	6.747.754.687
3	Maret	NA	NA	6.747.754.687	88.945.841	1.156.175.071	5.680.525.457
4	April	NA	30/04/2025	5.680.525.457	335.530.137	502.542.985	5.513.512.609
5	Mei	NA	31/05/2025	5.513.512.609	385.523.227	703.578.419	5.195.457.417
6	Juni	NA	30/06/2025	5.195.457.417	749.987.209	388.147.324	5.557.297.302
7	Juli	NA	31/07/2025	5.557.297.302	1.447.868.665	1.287.101.234	5.718.064.733
8	Agustus	NA	29/08/2025	5.718.064.733	446.132.849	169.548.963	5.994.648.619
9	September	NA	30/09/2025	5.994.648.619	438.168.564	533.351.838	5.899.465.345
10	Oktober	NA	31/10/2025	5.899.465.345	720.779.244	1.110.066.814	5.510.177.775
11	November	NA	28/11/2025	5.510.177.775	357.640.898	1.466.838.050	4.400.980.623
12	Desember	NA	31/12/2025	4.400.980.623	1.196.291.465	2.399.579.369	3.197.692.719
	Total				**7.420.365.149**	**9.916.914.846**	

Berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. **Nilai Pendapatan dan Saldo Akhir pada SP3BP Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang tidak menggambarkan kondisi Kas BLUD per 31 Desember 2025 yang sebenarnya**

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang per 31 Desember 2025 diketahui bahwa saldo akhir SP3BP Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang tidak sesuai dengan saldo akhir kas Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	SAL Akhir menurut SP2BP	3.197.692.718,58
2	SAL Akhir menurut Neraca	3.184.719.862,84
	Selisih (1-2)	**12.972.855,74**

Selisih disebabkan oleh kekurangan dan (kelebihan) pengakuan pendapatan Bulan Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Uang Pengembalian Perjalanan Dinas Tahun 2025 yang disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran ke Rek Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2025	(12.653.863,00)
2	Setoran Bendahara Pengeluaran untuk mengenolkan Rekening Bank Bendahara Pengeluaran tgl 30 Des 2025	(20.563,09)
3	Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025	1.570,35
4	Pengembalian atas kelebihan pencairan LS yang disetor kembali tgl 18 Des 2025	(300.000,00)
	Jumlah	**(12.972.855,74)**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat kelebihan permintaan pengesahan pendapatan sebesar Rp12.972.855,74.

Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan informasi yang disajikan dalam dokumen SP3BP tidak menggambarkan kondisi saldo akhir perbulan kas yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) bagian keuangan mengenai penyusunan dokumen laporan pelaksanaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan agar Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang memperbaiki penyajian pendapatan dan belanja, serta menyajikan pengeluaran pembiayaan berupa setoran ke kas daerah pada dokumen pengesahan sehingga saldo yang tersaji pada dokumen pengesahan baik dokumen SP3BP dan SP2BP sesuai dengan jumlah kas tunai dan kas di bank yang dimiliki oleh BLUD.

b. Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tidak dilakukan setiap bulan dan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang belum sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen SP3BP diketahui bahwa Pengajuan SP3BP tidak dilakukan setiap bulan. Selain itu, pelaksanaan anggaran Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang per 31 Desember 2025 diketahui Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang telah mengajukan Surat Permintaan, Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD ke Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT tetapi tidak dilanjutkan pengesahan dalam bentuk SP2BP oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pada Pasal 69 menyebutkan bahwa:

a. Ayat (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
b. Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
c. Ayat (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

d. Ayat (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Penyampaian pelaksanaan anggaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) harus dimaknai setiap bulan agar laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang juga memuat laporan realisasi anggaran BLUD dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan tidak dapat disajikan tepat waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut kami merekomendasikan Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang untuk mengajukan SP3BP rutin setiap bulan untuk kemudian mendapatkan pengesahan berupa SP2BP setiap bulan secara tepat waktu. Selain itu, kami merekomendasikan agar Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang untuk melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam melakukan pengesahan atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri 79 tentang BLUD.

5. Penatausahaan persediaan pada Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang belum sepenuhnya memadai

Berdasarkan laporan persediaan dan cek fisik atas data persediaan tanggal 6 dan 7 Maret 2026 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Pencatatan Persediaan tidak dilakukan dengan memadai

1) Farmasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap Gudang Obat dan Apotek pada tanggal 6 Maret 2026, diketahui bahwa sudah terdapat kartu persediaan dan farmasi telah membuat pencatatan mutasi persediaan secara real time dan informatif. Namun saat dilakukan pemeriksaan fisik diketahui terdapat perbedaan jumlah persediaan antara fisik dan catatan sebagai berikut:

No	Nama Persediaan	Kartu Stock	Fisik	Selisih		Keterangan
				Lebih	Kurang	
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (3-4)	7
1	Pampers Ukuran L	62	56	-	6	
2	Pampers Ukuran M	28	34	6	-	
Jumlah		**90**	**90**	**6**	**6**	

Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh pencatatan mutasi persediaan tidak akurat sesuai dengan aliran masuk dan keluar barang, serta kurangnya personil pada bagian unit instalasi farmasi untuk membantu pencatatan mutasi barang masuk dan barang keluar ke dalam sistem persediaan secara *real time*.

Permasalahan ini mengakibatkan penatausahaan dan pengendalian mutasi persediaan pada bagian unit instalasi farmasi Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang kurang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang untuk memperbaiki penatausahaan persediaan dan meningkatkan pengendalian persediaan.

2) Dapur/Gizi

Berdasarkan pemeriksaan persediaan pada dapur/gizi tanggal 6 Maret 2026, diketahui terdapat kelemahan yaitu tidak terdapat kartu *stock* secara manual yang memuat saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir, untuk masing-masing persediaan, hanya terdapat Laporan Persediaan Bahan Makanan yang dibuat per bulan yang memuat saldo awal, penambahan per hari dan saldo akhir yang hanya bisa dijumlahkan setiap bulan.

Hal ini mengakibatkan tidak ada dokumen pendukung yang memuat histori penambahan dan pengeluaran fisik barang yang dapat digunakan sebagai kontrol saat dilakukan pengecekan fisik secara *real time*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kami merekomendasikan Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang untuk memperbaiki penatausahaan persediaan dan meningkatkan pengendalian persediaan.

3) Laboratorium

Berdasarkan pemeriksaan persediaan pada Laboratorium tanggal 7 Maret 2026, diketahui terdapat kelemahan yaitu:

a) Petugas Laboratorium telah membuat laporan persediaan laboratorium yang memuat saldo awal, mutasi tambah kurang, dan saldo akhir untuk seluruh persediaan Laboratorium pada akhir tahun, yakni di bulan Desember. Sedangkan pada bulan lain, hanya terdapat rekapan penggunaan Reagen dan Bahan Laboratorium.

b) Diketahui bahwa Persediaan Laboratorium sudah memiliki kartu *stock* dan petugas laboratorium telah membuat pencatatan mutasi persediaan secara real time. Namun saat dilakukan pemeriksaan fisik diketahui terdapat perbedaan jumlah persediaan antara fisik dan catatan sebagai berikut:

No	Nama Persediaan	Kartu Stock	Fisik	Selisih		Keterangan
				Lebih	Kurang	
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (3-4)	7
1	Calibrator BA200 (Kimia Darah)	1	-	-	1	Kartu Stok belum di update
2	Uric Acid BA200	1	-	-	1	Kartu Stok belum di update
3	Creatinine BA200	1	-	-	1	Kartu Stok belum di update
4	Lyse 1 Sweleb Lumi	1	-	-	1	Kartu Stok belum di update
Jumlah		4	-	-	4	

Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh pencatatan mutasi persediaan tidak akurat sesuai dengan aliran masuk dan keluar barang, serta kurangnya personil pada bagian unit instalasi farmasi untuk membantu pencatatan mutasi barang masuk dan barang keluar ke dalam sistem persediaan secara *real time*.

Permasalahan ini mengakibatkan penatausahaan dan pengendalian mutasi persediaan pada bagian laboratorium Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang kurang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kami merekomendasikan Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang untuk memperbaiki penatausahaan persediaan dan meningkatkan pengendalian persediaan.

4) Barang Umum

Berdasarkan pemeriksaan persediaan barang umum pada tanggal 6 Maret 2026, diketahui terdapat kelemahan yaitu, tidak terdapat kartu *stock* secara manual yang memuat saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir, untuk masing-masing persediaan, hanya terdapat laporan barang masuk dan keluar yang dicatat secara manual.

Hal ini mengakibatkan tidak adanya dokumen pendukung yang memuat histori penambahan dan pengeluaran fisik barang yang dapat digunakan sebagai kontrol saat dilakukan pengecekan fisik secara *real time* dan sebagai pendukung *trace back*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kami merekomendasikan Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang untuk memperbaiki penatausahaan persediaan dan meningkatkan pengendalian persediaan.

b. Tidak terdapat sistem akuntansi persediaan

Pencatatan persediaan tidak menggunakan sistem sehingga menyulitkan bagian persediaan dalam melakukan mutasi dan *stok opname* persediaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang agar melakukan pengadaan sistem persediaan untuk meningkatkan pengendalian dan efektivitas dalam menyusun laporan persediaan.

6. Terdapat persediaan kedaluwarsa sebesar Rp22.117.202,90 belum dilakukan pemusnahan dan belum terdapat berita acara penghapusan dari laporan keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan, terdapat persediaan kedaluwarsa berupa Persediaan Obat dan Persediaan Habis Pakai dan Alat Kesehatan yang belum dimusnahkan dan belum terdapat berita acara penghapusan dari laporan keuangan per 31 Desember 2025. Atas persediaan kedaluwarsa tersebut telah dilakukan pengurangan dan diakui sebagai beban pada Laporan Keuangan. Adapun dengan rincian persediaan kedaluwarsa per 31 Des 2025, sebagai berikut:

No	Nama Obat/Alkes	Satuan	Bulan ED	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Aspilet Acid 80 Mg	Tablet	Jan 2025	200	832,50	166.500,00
2	Clofritis 10 Mg (Clobazam)	Tablet	Jan 2025	17	1.562,00	26.554,00
3	Dopamin Injeksi 200 Mg OGB	Ampul	Jan 2025	10	13.398,00	133.980,00
4	Furosemide Injeksi 10 Mg	Ampul	Jan 2025	25	3.000,00	75.000,00
5	Ngt No.16 (Romolen)	Pcs	Sep 2024	1	55.000,00	55.000,00
6	Amlodipin 5 Mg (Mega)	Tablet	Feb 2025	20	133,91	2.678,21
7	Kutoin Injeksi	Ampul	Feb 2025	20	160.000,00	3.200.000,00
8	Tablet Tambah Darah Ff+Folic Acid Tab (Marin)	Tablet	Mar 2025	1.800	264,99	476.982,54
9	Diphenhidramine 10 Mg Injeksi (Mepro)	Ampul	Mar 2025	95	3.248,60	308.617,35
10	Folavicap 400 Mcg	Tablet	Mar 2025	15	199,80	2.997,00
11	Amlodipin 5 Mg (Hexapharm)	Tablet	Mar 2025	545	721,00	392.945,00

No	Nama Obat/Alkes	Satuan	Bulan ED	Jumlah	Harga Satuan	Total
12	Aripiprazole 15 Mg	Tablet	Sep 2024	4	22.030,00	88.120,00
13	Lodomer 2 Mg	Tablet	Mei 2025	8	1.212,12	9.696,96
14	Metformin 500 Mg	Tablet	Mei 2025	15	193,00	2.895,00
15	Dexamethason Injeksi 5 Mg/Ml	Ampul	Mei 2025	71	2.650,68	188.198,28
16	Oseltamivir 75 Mg	Tablet	Jul 2025	903	14.300,00	12.912.900,00
17	Mebo	Tube	Jul 2025	5	88.245,00	441.225,00
18	Stomach Tube No. 18	Pcs	Aug 2024	1	13.875,00	13.875,00
19	Povidone 1 L	Botol	Jul 2025	1	109.890,00	109.890,00
20	Ketorolac Injeksi 30 Mg	Ampul	Aug 2025	15	1.964,15	29.462,18
21	Abbocath No. 24 (Abada)	Pcs	Aug 2025	50	13.400,00	670.000,00
22	Abbocath No. 18 (One Med)	Pcs	Jul 2025	3	7.215,00	21.645,00
23	D5% 500 Ml Infus (BRAUN)	Botol	Sep 2025	19	9.358,41	177.809,79
24	Lidocain 2% 2 Ml Inj	Ampul	Sep 2025	45	1.902,65	85.619,30
25	Ceftriaxone 1 Gr (Phapros)	Vial	Okt 2025	23	11.100,00	255.300,00
26	Nopres 20 Mg Tab (Fluoxetine)	Tablet	Okt 2025	23	901,00	20.723,00
27	Respivent Solution For Inhalation	Ampul	Okt 2025	4	13.875,00	55.500,00
28	Paracetamol 100 Ml Infus (Bernofarm)	Botol	Nov 2025	10	26.797,62	267.976,20
29	Mgso4 40% Otsu	Ampul	Nov 2025	5	8.482,62	42.413,10
30	Amitryptiline 25mg Tab	Tablet	Nov 2025	60	220,00	13.200,00
31	Alkohol 70% 1 Liter (One Med)	Botol	Nov 2025	4	55.000,00	220.000,00
32	Rivanol 100 Ml	Botol	Nov 2025	5	5.000,00	25.000,00
33	Flufenazine Dekanoat Inj. 25 Mg/Ml (Sikzonoate Inj)	Ampul	Des 2025	21	72.600,00	1.524.600,00
34	Guedel Airway 100 Mm	Pcs	Des 2025	2	49.950,00	99.900,00
TOTAL				**4.045**	**768.523,05**	**22.117.202,90**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa:

a. Pasal 421 huruf a pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.

b. Pasal 422 Ayat (1): pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.

c. Pasal 422 Ayat (3): pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

d. Pasal 423 pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 424 ayat (1) pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

f. Pasal 432 Ayat (1): Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

g. Pasal 433

Ayat (1) : Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

a. penyerahan Barang Milik Daerah;
b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pemusnahan; atau
g. sebab lain.

Ayat (2): Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.

h. Pasal 434: Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang melakukan pemusnahan dan penghapusan terhadap persediaan kedaluwarsa kemudian berdasarkan berita acara pemusnahan tersebut maka akan dilakukan pengusulan penghapusan persediaan yang telah kedaluwarsa dari Laporan Keuangan.

7. Pencatatan/penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya dilakukannya dengan tertib

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang per 31 Desember 2025 dan pencatatan/penatausahaan aset tetap diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

a. Terdapat Aset Tetap belum bernomor dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) belum di *update*

Berdasarkan pemeriksaan fisik atas aset tetap di lingkungan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang tanggal 6 Maret 2026, ditemukan permasalahan yaitu terdapat beberapa aset yang belum dinomori dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang di pasang di masing-masing ruangan belum di *update*.

Hal ini mengakibatkan kesulitan mengetahui/mengontrol jenis aset/inventaris yang terdapat pada masing-masing ruangan di lingkungan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang menugaskan Pengurus Barang untuk memperbaiki penatausahaan aset tetap.

b. Penatausahaan Aset Tetap Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang tidak memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan *unaudited* Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang per 31 Desember 2025, ditemukan bahwa penyajian aset tetap pada Neraca mencantumkan nilai akumulasi penyusutan dengan nilai yang sama dengan Tahun 2024. Selain itu, RSKD tidak memiliki daftar aset tetap yang memuat rincian lengkap, termasuk perhitungan penyusutan dan informasi mengenai kondisi fisik masing-masing aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pengelolaan aset tetap belum dilakukan secara memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan ini tidak sesuai dengan:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.08 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 52 mengatur bahwa: Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, mengatur sebagai berikut:
   a) Pasal 4 ayat (2), Daftar Barang terdiri dari:
      a. Daftar BMD Intrakomptabel;
      b. Daftar BMD Ekstrakomptabel;
      c. Daftar BMD gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel;
      d. Daftar BMD Aset bersejarah; dan
      e. Daftar BMD persediaan rusak berat atau usang.
   b) Pasal 6 ayat (1), pembukuan BMD terdiri dari:
      a. perolehan/penerimaan;
      b. penggunaan;
      c. penerimaan internal Pengguna Barang;
      d. pengeluaran internal Pengguna Barang;
      e. pemanfaatan;
      f. reklasifikasi;
      g. koreksi;
      h. penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat;
      i. penyusutan atau amortisasi;
      j. persediaan;
      k. pemeliharaan;
      l. KIR;
      m. pengamanan;
      n. penghapusan; dan
      o. KIBAR.
   c) Pasal 49 ayat (1), mengatur bahwa objek Inventarisasi BMD meliputi:
      a. persediaan;
      b. tanah;
      c. peralatan dan mesin;
      d. gedung dan bangunan;
      e. jalan, jaringan dan irigasi;
      f. Aset Tetap lainnya;
      g. Aset tidak berwujud; dan
      h. Konstruksi dalam pengerjaan.

d) Pasal 50, mengatur bahwa:
   a. Ayat (1): Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya berupa: a. persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan b. selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
   b. Ayat (2): Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
e) Pasal 51, menjelaskan bahwa Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan.

Permasalahan ini mengakibatkan laporan keuangan unaudited Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang kurang memadai. Tanpa data akumulasi penyusutan dan kondisi aset yang valid, maka nilai aset tetap yang disajikan tidak mencerminkan kondisi riil dan dapat menimbulkan salah saji material. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, dalam proses audit, auditor telah melakukan penggolongan dan perhitungan ulang atas penyusutan aset tetap berdasarkan dokumen pendukung yang tersedia dan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang agar segera melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh aset tetap yang dimiliki, untuk memastikan keberadaan fisik dan mengklasifikasikan kondisi aset menjadi baik, rusak ringan, dan rusak berat. Selain itu, RSKD perlu menyusun daftar aset tetap yang dilengkapi dengan nilai akumulasi penyusutan dan informasi kondisi terkini, serta membangun sistem pengelolaan aset yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan teknis lainnya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan aset juga menjadi langkah penting guna memastikan pengelolaan aset ke depan dapat dilakukan secara tertib dan akuntabel.

8. Pengajuan Klaim BPJS atas Pelayanan Kesehatan Tahun Layanan 2025 belum dilakukan secara tepat waktu dan terdapat potensi kehilangan pendapatan atas klaim pending

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas-berkas pengajuan klaim pelayanan kesehatan pasien BPJS bulan pelayanan Januari sampai dengan Desember 2025 diketahui pihak Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang belum bisa mengajukan klaim atas layanan kesehatan pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan secara tepat waktu, adapun rincian pengajuan dan verifikasi klaim dapat disajikan sebagai berikut:

Bulan Layanan	Pengajuan Klaim		Verifikasi Klaim		Pending/ Tidak Layak
	Tanggal	Nilai	Tanggal	Nilai	
1	2	3	4	5	6
Januari	23/04/2025	245.427.200,00	15/05/2025	242.074.900,00	3.352.300,00
Pending Januari	*tidak diajukan*				
Februari	20/05/2025	334.352.500,00	05/06/2025	316.614.600,00	17.737.900,00
Pending Februari	31/07/2025	17.737.900,00	20/08/2025	17.737.900,00	-
Maret	03/06/2025	333.617.100,00	20/06/2025	320.250.300,00	13.366.800,00
Pending Maret	27/08/2025	13.366.800,00	06/09/2025	13.366.800,00	-
April	10/07/2025	275.751.800,00	28/07/2025	262.215.200,00	13.536.600,00
Pending April	30/09/2025	13.536.600,00	13/10/2025	13.338.600,00	198.000,00
Mei	15/08/2025	308.582.600,00	27/08/2025	291.689.400,00	16.893.200,00
Pending Mei	23/10/2025	16.893.200,00	13/11/2025	16.893.200,00	-

Bulan Layanan	Pengajuan Klaim		Verifikasi Klaim		Pending/
	Tanggal	Nilai	Tanggal	Nilai	Tidak Layak
1	2	3	4	5	6
Juni	10/09/2025	284.212.900,00	25/09/2025	272.364.700,00	11.848.200,00
Pending Juni	28/11/2025	11.650.200,00	20/12/2025	11.650.200,00	-
Juli	22/09/2025	362.617.900,00	10/10/225	300.506.200,00	62.111.700,00
Pending Juli	28/11/2025	61.913.700,00	20/12/2025	61.913.700,00	-
Agustus	14/10/2025	278.986.600,00	30/10/2025	258.939.100,00	20.047.500,00
Pending Agustus	22/12/2025	20.047.500,00	08/01/2026	20.047.500,00	-
September	10/11/2005	314.380.400,00	28/11/20225	301.453.800,00	12.926.600,00
Pending September	22/01/2026	12.913.600,00	13/02/2026	12.913.600,00	-
Oktober	24/11/2025	315.970.100,00	12/12/2025	256.822.800,00	59.147.300,00
Pending Oktober	12/02/2026	59.073.600,00	02/03/2026	59.073.600,00	-
November	10/12/2025	304.202.300,00	24/12/2025	304.202.300,00	-
Desember	13/01/2026	316.268.600,00	02/02/2026	316.268.600,00	-
Jumlah		**3.901.503.100,00**		**3.670.337.000,00**	**231.166.100,00**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

a. Terdapat keterlambatan pengajuan klaim bulan Januari hingga Desember tahun 2025 dimana seharusnya pengajuan klaim tersebut tidak melewati satu bulan dari bulan pelayanan
b. Terdapat klaim pending yang tidak diajukan kembali dan terdapat klaim yang tidak layak sehingga menimbulkan potensi kehilangan pendapatan, dengan rincian sebagai berikut:

Rekap Pending	Nilai Pending	Nilai Diajukan	Selisih	Ket.
1	2	3	4 = 2-3	5
Pending Januari	3.352.300,00	-	3.352.300,00	tidak diajukan
Pending Februari	17.737.900,00	17.737.900,00	-	
Pending Maret	13.366.800,00	13.366.800,00	-	
Pending April	13.536.600,00	13.536.600,00	-	
Pending Mei	16.893.200,00	16.893.200,00	-	
Pending Juni	11.848.200,00	11.650.200,00	198.000,00	tidak diajukan
Pending Juli	62.111.700,00	61.913.700,00	198.000,00	tidak layak
Pending Agustus	20.047.500,00	20.047.500,00	-	
Pending September	12.926.600,00	12.913.600,00	13.000,00	tidak diajukan
Pending Oktober	59.147.300,00	59.073.600,00	73.700,00	tidak diajukan
Jumlah	**230.968.100,00**	**227.133.100,00**	**3.835.000,00**	

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 30
   1) Ayat (1): FKRTL mengajukan klaim secara kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap setiap bulan.
   2) Ayat (3): BPJS Kesehatan mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak klaim diajukan oleh FKRTL dan diterima oleh BPJS Kesehatan.

3) Ayat (4): Dalam hal klaim yang diajukan oleh FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kelengkapan berkas klaim, BPJS Kesehatan mengembalikan seluruh berkas klaim kepada FKRTL dan mengeluarkan berita acara pengembalian berkas klaim.
4) Ayat (5): Dalam hal BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkas klaim dinyatakan lengkap.

b. Pasal 31
1) Ayat (1): BPJS Kesehatan melakukan proses verifikasi berkas klaim sejak berkas dinyatakan lengkap dibuktikan dengan berita acara kelengkapan berkas klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) atau ayat (5).
2) Ayat (2): BPJS Kesehatan melakukan pembayaran klaim berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan sesuai.
3) Ayat (3): Dalam hal berkas klaim yang telah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan belum sesuai dan memerlukan konfirmasi, berkas klaim dikembalikan kepada FKRTL untuk mendapatkan konfirmasi.
4) Ayat (4): Pengembalian berkas klaim kepada FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai berita acara pengembalian berkas klaim berikut penjelasannya.
5) Ayat (5): Berkas klaim yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali oleh FKRTL pada pengajuan klaim bulan berikutnya.

c. Pasal 32
1) Ayat (1): BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran kepada FKRTL berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat:
   a. 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan berkas klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3); atau
   b. 15 (lima belas) hari sejak berkas klaim otomatis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5).
2) Ayat (2): Dalam hal pembayaran kepada FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran pada FKRTL dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3) Ayat (3): Dalam hal BPJS Kesehatan tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan wajib membayar denda kepada FKRTL yaitu sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.

Keterlambatan pengajuan klaim berpotensi mengganggu arus kas (*cash flow*) Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kelancaran operasional rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, tidak diajukannya kembali klaim pending serta adanya klaim yang tidak layak mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat diterima oleh Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang memerintahkan unit pengajuan klaim melakukan pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

LAPORAN KEUANGAN

BLUD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL 31 Desember 2025

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Basuki Rachmat No.1 Naikolan- Nusa Tenggara Timur

Kantor Gubernur Pertama – Kupang

Telepon. (0380) 823102

Email: spam.blud_ntt@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN PEMIMPIN UPTD	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	2
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. Laporan Realisasi Anggaran	5
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	6
3. Laporan Neraca	7
4. Laporan Operasional	8
5. Laporan Arus Kas	9
6. Laporan Perubahan Ekuitas	11
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
1. Umum	12
2. Pernyataan Kepatuhan Terhadap PSAP BLUD	16
3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	16
4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	32
5. Penjelasan Pos-Pos LP-SAL	36
6. Penjelasan Pos-Pos Neraca	37
7. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	41
8. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	43
9. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
10. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan	45
11. Informasi Penting Lainnya	45
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	46
Lampiran Catatan atas Hasil Pemeriksaan	48

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN LAYANAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Alamat : Jln. Basuki Rahmat Nomor 1 Kantor Gubernur Pertama - Kupang

SURAT PERNYATAAN TANGUNG JAWAB PEMIMPIN BLUD TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Erasmus Jogo, S.E., M.M.
Alamat Kantor	:	Jl. Basuki Rachmat No. 1 Kantor Gubernur Pertama, Kupang.
Alamat Rumah	:	-
Jabatan	:	Pemimpin BLUD UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemimpin BLUD UPTD SPAM
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Erasmus Jogo, S.E., M.M.

Kupang, 30 Maret 2026

Laporan No.: 00058/2.1516/AU.5/11/0463-4/1/III/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Sistem Penyediaan Air Minum
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami

didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00058/ML/KAP.IGOR/1/III/2026 dan tanggal 30 Maret 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan,

00058

KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA & REKAN

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 30 Maret 2026

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan**					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*4.1.a*	2.744.706.033,00	2.512.186.587,00	91,53%	1.524.077.605,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*4.1.b*	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	*4.1.c*	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	*4.1.d*	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	*4.1.e*	-	-	-	667.374,64
7	Pendapatan APBD	*4.1.f*	-	-	-	-
8	**Jumlah Pendapatan**		**2.744.706.033,00**	**2.512.186.587,00**	**91,53%**	**1.524.744.979,64**
9	**Belanja**					
10	**Belanja Operasi**					
11	Belanja Pegawai	*4.2a*	655.017.247,00	646.147.039,00	98,65%	774.538.915,00
12	Belanja Barang dan Jasa	*4.2b*	1.887.263.033,00	1.672.273.800,00	88,61%	569.554.871,00
13	Bunga	*4.2c*	-	-	-	-
14	Belanja Lain-lain	*4.2d*	-	240.000,00	-	240.000,00
15	**Jumlah Belanja Operasi**		**2.542.280.280,00**	**2.318.660.839,00**	**91,20%**	**1.344.333.786,00**
16	**Belanja Modal**					
17	Belanja Tanah	*4.3.a*	-	-	-	-
18	Belanja Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	62.175.753,00	61.427.400,00	98,80%	-
19	Belanja Gedung dan Bangunan	*4.3.c*	140.250.000,00	139.433.367,00	99,42%	-
20	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	*4.3.d*	-	-	-	-
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	*4.3.e*	-	-	-	-
22	Belanja Aset Lainnya	*4.3.f*	-	-	-	-
23	**Jumlah Belanja Modal**		**202.425.753,00**	**200.860.767,00**	**99,23%**	**-**
24	**Jumlah Belanja**		**2.744.706.033,00**	**2.519.521.606,00**	**91,80%**	**1.344.333.786,00**
25	**Surplus (Defisit)**		-	**(7.335.019,00)**	-	**180.411.193,64**
26	**Pembiayaan**					
27	**Penerimaan Pembiayaan**					
28	Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		-	-	-	-
29	Penerimaan Dari Divestasi		-	-	-	-
30	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-	-	-
31	**Jumlah Penerimaan**		-	-	-	-
32	**Pengeluaran Pembiayaan**					
33	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
34	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
35	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
36	**Jumlah Pengeluaran**		-	-	-	-
37	**Pembiayaan Neto**		-	-	-	-
38	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**		-	**(7.335.019,00)**	-	**180.411.193,64**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 30 Maret 2026
Pemimpin BLUD UPTD Sistem Penyediaan Air Minum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Erasmus Jogo, S.E., M.M.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.1*	**744.706.032,04**	**564.294.838,40**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.2*	-	-
3	**Sub Total**		**744.706.032,04**	**564.294.838,40**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	*5.3*	(7.335.019,00)	180.411.193,64
5	**Sub Total**		**737.371.013,04**	**744.706.032,04**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	*5.4*	-	-
7	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	*5.5*	**737.371.013,04**	**744.706.032,04**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 30 Maret 2026
Pemimpin BLUD UPTD Sistem Penyediaan Air Minum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Erasmus Jogo, S.E., M.M.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	*6.1*	-	-
4	Kas pada BLUD	*6.2*	737.371.012,44	744.706.032,04
5	Piutang Operasional BLUD	*6.3*	229.650.480,00	37.467.765,00
6	Piutang Non Operasional BLUD		-	-
7	Penyisihan Piutang		(71.781.931,24)	(129.627,50)
8	Persediaan BLUD	*6.4*	582.290.857,60	638.416.150,00
9	**Jumlah Aset Lancar**		**1.477.530.418,80**	**1.420.460.319,54**
10	**Aset Tetap**	*6.5*		
11	Tanah		50.000.000,00	50.000.000,00
12	Peralatan dan Mesin		61.427.400,00	-
13	Gedung dan Bangunan		139.433.367,00	-
14	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
15	Aset Tetap Lainnya		-	-
16	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
17	**Jumlah Harga Perolehan**		**250.860.767,00**	**50.000.000,00**
18	Akumulasi Penyusutan		-	-
19	**Jumlah Aset Tetap**		**250.860.767,00**	**50.000.000,00**
20	**Aset Lainnya**	*6.6*		
21	Aset Tak Berwujud		-	-
22	Aset Lain-Lain		-	-
23	**Akumulasi Penyusutan**		-	-
24	**Jumlah Aset Lainnya**		-	-
25	**JUMLAH ASET**		**1.728.391.185,80**	**1.470.460.319,54**
26	**KEWAJIBAN**			
27	**Kewajiban Jangka Pendek**			
28	Utang Usaha	*6.7*	-	-
29	Utang PFK	*6.8*	0,60	-
30	Utang Pajak	*6.9*	-	-
31	Pendapatan Diterima Dimuka	*6.10*	220.525,00	581.615,00
32	Utang Jangka Pendek Lainnya	*6.11*	-	-
33	**Jumlah Kewajiban Jk Pendek**		**220.525,60**	**581.615,00**
34	**Kewajiban Jangka Panjang**			
35	Utang Jangka Panjang		-	-
36	**Jumlah Kewajiban Jk Panjang**		-	-
37	**Kewajiban Lain-Lainnya**			
38	Cadangan Dana Meter	*6.12*	-	-
39	**Jumlah Kewajiban Lain-Lainnya**		-	-
40	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**220.525,60**	**581.615,00**
41	**EKUITAS**			
42	Ekuitas	*6.13*	1.728.170.660,20	1.469.878.704,54
43	**JUMLAH EKUITAS**		**1.728.170.660,20**	**1.469.878.704,54**
44	**JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS**		**1.728.391.185,80**	**1.470.460.319,54**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 30 Maret 2026
Pemimpin BLUD UPTD Sistem Penyediaan Air Minum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Erasmus Jogo, S.E., M.M.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Kegiatan Operasional**			
2	**Pendapatan**	*7.1*		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*7.1.a*	2.704.730.392,00	1.558.153.109,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama		-	-
6	Pendapatan APBD	*7.1.b*	-	-
7	Pendapatan Hibah	7.1.c	-	-
8	Pendapatan Lain-Lain	*7.1.d*	-	667.374,64
9	**Jumlah Pendapatan**		**2.704.730.392,00**	**1.558.820.483,64**
10	**Beban**			
11	Beban Pegawai	*7.2.a*	646.147.039,00	774.538.915,00
12	Beban Barang dan Jasa	*7.2.b*	1.728.399.093,60	1.013.001.521,00
13	Beban Penyisihan Piutang	*7.2.c*	71.781.931,24	129.627,50
14	Beban Penyusutan	*7.2.d*	-	-
15	Beban Amortisasi	*7.2.e*	-	-
16	Beban Lain-Lain	*7.2 f*	240.000,00	240.000,00
17	**Jumlah Beban**		**2.446.568.063,84**	**1.787.910.063,50**
18	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**258.162.328,16**	**(229.089.579,86)**
19	**Kegiatan Non Operasional**	*7.3*		
20	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-
22	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		129.627,50	-
23	**Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Oprasional**		**129.627,50**	-
24	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**258.291.955,66**	**(229.089.579,86)**
25	**Pos Luar Biasa**			
26	Pendapatan Luar Biasa		-	-
27	Beban Luar Biasa		-	-
28	**Jumlah Pos Luar Biasa**		-	-
29	**Surplus (Defisit)-LO**		**258.291.955,66**	**(229.089.579,86)**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 30 Maret 2026
Pemimpin BLUD UPTD Sistem Penyediaan Air Minum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Erasmus Jogo, S.E., M.M.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**			
2	**Arus Masuk Kas**	*8.1 1)*		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		2.512.186.587,00	1.524.077.605,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama		-	-
6	Pendapatan Hibah		-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya		-	667.374,64
8	Pendapatan dari APBD		-	-
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**2.512.186.587,00**	**1.524.744.979,64**
10	**Arus Kas Keluar**	*8.1 2)*		
11	Pembayaran Pegawai		646.147.039,00	774.538.915,00
12	Pembayaran Barang		1.672.273.800,00	569.554.871,00
13	Pembayaran Bunga		-	-
14	Pembayaran Lain-lain		240.000,00	240.000,00
15	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**2.318.660.839,00**	**1.344.333.786,00**
16	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**193.525.748,00**	**180.411.193,64**
17	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**			
18	**Arus Masuk Kas**	*8.2 1)*	-	-
19	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
20	**Arus Keluar Kas**	*8.2 2)*		
21	Perolehan Tanah		-	-
22	Perolehan Peralatan dan Mesin		61.427.400,00	-
23	Perolehan Gedung dan Bangunan		139.433.367,00	-
24	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
25	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
26	Perolehan Aset Lainnya		-	-
27	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**200.860.767,00**	-
28	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(200.860.767,00)**	-
29	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**			
30	**Arus Masuk Kas**	*8.3 1)*		
31	Penerimaan Pinjaman		(0,60)	-
32	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
33	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**(0,60)**	-
34	**Arus Keluar Kas**	*8.3 2)*		
35	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
36	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-
37	Pemberian Pinjaman		-	-
38	Penyetoran ke Kas Daerah		-	-
39	**Jumlah Arus Keluar Kas**		-	-
40	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		**(0,60)**	-

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
41	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**			
42	**Arus Kas Masuk**	*8.4 1)*	-	-
43	**Jumlah Arus Kas Masuk**		-	-
44	**Arus Kas Keluar**	*8.4 2)*	-	-
45	**Jumlah Arus Kas Keluar**		-	-
46	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		-	-
47	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**	*8.5*	**(7.335.019,60)**	**180.411.193,64**
48	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**		**744.706.032,04**	**564.294.838,40**
49	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**		**737.371.012,44**	**744.706.032,04**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 30 Maret 2026
Pemimpin BLUD UPTD Sistem Penyediaan Air Minum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Erasmus Jogo, S.E., M.M.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Ekuitas Awal**	*9.1*	**1.469.878.704,54**	**1.072.609.134,40**
2	**Surplus (Defisit) LO**	*9.2*	**258.291.955,66**	**(229.089.579,86)**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	*9.3*	**-**	**626.359.150,00**
	Koreksi Harga Perolehan Aset Tetap		-	-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	-
	Mutasi Persediaan Antar OPD		-	626.359.150,00
	Koreksi Saldo Awal Ekuitas		-	-
4	**Ekuitas Akhir**	*9.4*	**1.728.170.660,20**	**1.469.878.704,54**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 30 Maret 2026
Pemimpin BLUD UPTD Sistem Penyediaan Air Minum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Erasmus Jogo, S.E., M.M.

1. Umum

a. Sejarah, Perkembangan UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar pembentukan UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Pelaksanaan di Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. UPTD SPAM Provinsi NTT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.19 Tahun 2010 merupakan Unit Kerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU/BLUD bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum curah tanpa mengutamakan keuntungan. UPTD SPAM dalam melakukan operasional kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas operasi pengelolaan dengan praktik bisnis yang sehat, dengan tetap menganut pola pengelolaan keuangan BLU dalam manajemen pengelolaan profesional, akuntabilitas keuangan, transparansi dengan prinsip efisien dan efektif.

b. Dasar Hukum

Untuk mendukung penerapan PPK BLUD, telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
9) Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

12) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2026 tentang Tarif Air Curah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
14) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
15) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 134/KEP/HK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (PPK - BLUD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ***Status Bertahap***.
17) Kesepakatan Bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang dan Walikota Kupang Nomor: HK.02 Tahun 2009; Nomor 5 Tahun 2009; Nomor: 03/HK/PEMKOT/2009 tentang Kelembagaan Pengelola Air Minum.
18) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Nomor: PU.PTR.05.01/900/12/II/09 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pengajuan Permohonan Penerapan Pola PK–UPT BLUD SPAM.

c. Tempat Kedudukan

UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Jln. Basuki Rachmat No1 Kantor Gubernur Pertama, Kota Kupang.

d. Visi

Visi UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menjadikan UPTD SPAM yang sehat dan mandiri sehingga dapat melayani kebutuhan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi kebutuhan minimal air minum masyarakat dalam lingkungan damai, aman dan nyaman.

e. Misi

1) Melayani kebutuhan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi kebutuhan minimal air minum masyarakat.
2) Menjalankan manajemen UPTD SPAM dengan baik berdasarkan prinsip efektif, efisiensi dan produktivitas.
3) Sebagai pendukung pelaksana kebijakan pimpinan daerah dalam pelayanan masyarakat yang layak.

f. Sasaran

1) Melayani kebutuhan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi kebutuhan minimal air minum masyarakat.
2) Mengemban fungsi sosial dan prinsip ekonomi dalam operasionalnya sebagai perangkat Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
3) Mengelola sumber daya alam dan sumber daya yang ada dengan rekayasa dan rancang bangun teknologi air minum.
4) Bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga terkait dalam mengembangkan BLUD SPAM melalui kemitraan atas dasar saling menguntungkan.
5) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai UPTD SPAM yang profesional melalui program peningkatan kapasitas secara konsepsional.

g. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas operasional UPTD SPAM Provinsi NTT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum curah dengan standar air minum yang dijual kepada PDAM maupun pemakai air lain/lembaga dan mempunyai tugas serta kewenangan operasional antara lain:

1) Pengoperasian sistem penyediaan air minum WTP Tilong dan Tulun yang sumber air bakunya diambil dari Bendungan Tilong untuk didistribusikan ke reservoir PDAM Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
2) Meningkatkan penguatan kelembagaan UPTD SPAM dan mendorong bagi reformasi kelembagaan PDAM Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dalam kelancaran dan pemenuhan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat.
3) Mengembangkan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pemenuhan layanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
4) Percepatan cakupan penyediaan air minum dan optimalisasi pelayanan air minum masyarakat.
5) Meningkatkan efisiensi pelayanan air minum di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

h. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus UPTD SPAM

1) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, susunan organisasi sebagai berikut:

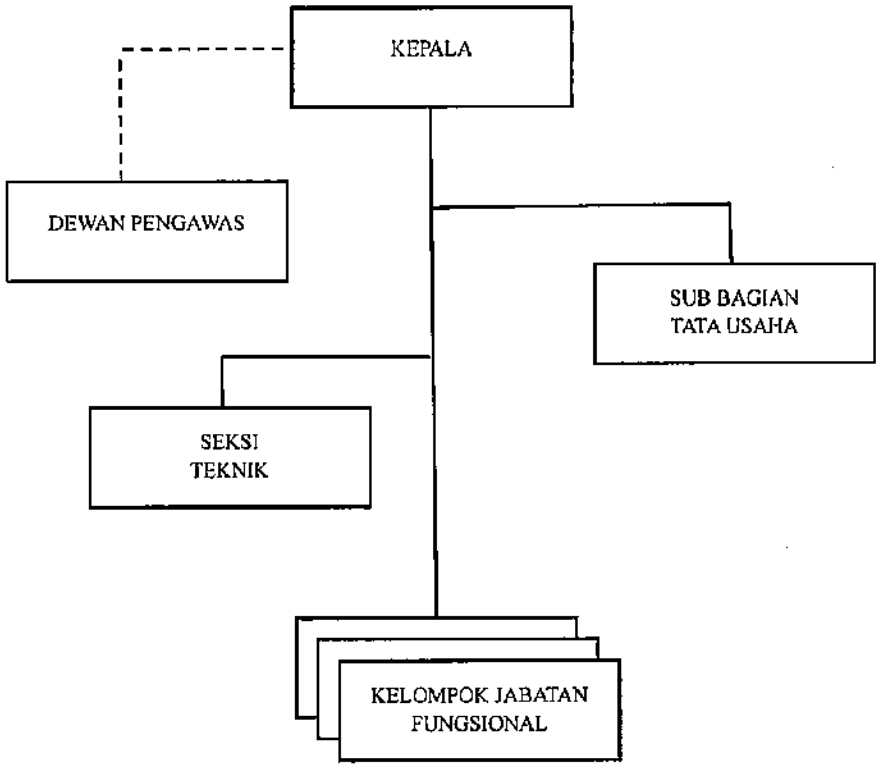

2) Susunan Pejabat Pengelola

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24/KEP/HK/2021 Tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum

Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, susunan pejabat pengelola sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam UPTD SPAM	Kedudukan dalam BLUD
1	Erasmus Jogo, SE., M.M	Kepala UPTD	Pemimpin BLUD

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 816.2.1/145/BKD.3.2, tanggal 06 Oktober 2025 menetapkan:

Nama : Ronalda Valerina Mbasi, S.Akun
NIP : 19780422010012007
Jabatan Lama : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jabatan Baru : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat /IV/a

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 816.2.1/145/BKD.3.2, tanggal 06 Oktober 2025 menetapkan:

Nama : Domingos Orleans Soares, A.Md.
NIP : 196808101993031015
Jabatan Lama : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jabatan Baru : Kepala Seksi Teknik UPTD Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat /IV/a

3) Kepegawaian

Jumlah pejabat dan pegawai tahun 2025 sebanyak 37 orang, dengan rincian:

Uraian	PNS	Non PNS	Jumlah
Pejabat	1	4	5
Pegawai	2	30	32
Jumah	3	34	37

Jumlah pejabat dan pegawai tahun 2023 sebanyak 38 orang, dengan rincian:

Uraian	PNS	Non PNS	Jumlah
Pejabat	1	4	5
Pegawai	2	31	33
Jumah	3	35	38

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dan disajikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Sedangkan Kebijakan Akuntansi mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Dasar Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, sehingga sepanjang mengenai bentuk Laporan Keuangan Pokok mengacu pada PMK ini. Sedangkan ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Periode Akuntansi

Periode akuntansi adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan laporan keuangan interim disusun untuk periode triwulanan dan semesteran.

c. Unsur Laporan Keuangan terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran;
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3) Neraca;
4) Laporan Operasional;
5) Laporan Arus Kas;
6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7) Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;

d) Penerimaan pembiayaan;
e) Pengeluaran pembiayaan;
f) Pembiayaan neto; dan
g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   e) Lain-lain; dan
   f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan setara kas;
   b) Investasi jangka pendek;
   c) Piutang dari kegiatan BLUD;
   d) Persediaan;
   e) Investasi jangka panjang;
   f) Aset tetap;
   g) Aset lainnya;
   h) Kewajiban jangka pendek;
   i) kewajiban jangka panjang; dan
   j) Ekuitas.

g. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;

d) Kegiatan non operasional;
e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
f) Pos Luar Biasa; dan
g) Surplus/Defisit-LO.

3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
a) Pendapatan dari alokasi APBD;
b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerja sama;
e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan
f) Pendapatan BLU lainnya.

4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan metode langsung, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
a) Pendapatan dari alokasi APBD;
b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerja sama;
e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
a) Pembayaran Pegawai;
b) Pembayaran Barang;
c) Pembayaran Bunga; dan
d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan

untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;

b) Penjualan Aset Lainnya;

c) Penerimaan dari Divestasi; dan

d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;

b) Perolehan Aset Lainnya;

c) Penyertaan Modal;

d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan

e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan

b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BLUD dapat memeroleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan

b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

i. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan

3) Koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.

d) Ekuitas akhir.

j. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.

5) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

6) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) Jasa giro;
    c) Pendapatan bunga;
    d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
    e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja, organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

4) Selisih antara Pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

k. Pos-pos Neraca

1) Piutang

a) Piutang usaha diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu nilai setelah dikurangi dengan nilai estimasi penyisihan piutang tak tertagih.

b) Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan. Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi dilakukan dengan ketentuan:

No.	Kualitas Piutang	Umur Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	Dari 0 sampai 1 bulan	0,5 %
2.	Kurang Lancar	Dari 1 sampai 3 bulan	10 %
3.	Diragukan	Dari 3 sampai 12 bulan	50 %
4.	Macet	12 bulan keatas	100 %

2) Persediaan

1) Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*), atau nilai yang terdapat dalam nota pesanan/surat order/SPK/perjanjian (termasuk PPN).
2) Persediaan dinilai berdasarkan harga terakhir yang masuk.
3) Hasil inventarisasi persediaan (*stock opname*) yang dilakukan pada akhir periode, dipakai sebagai dasar penyesuaian (*adjustment*) saldo akhir persediaan, baik oleh fungsi akuntansi maupun fungsi gudang. Selisih antara hasil *stock opname* dan catatan persediaan dibebankan sebagai keuntungan (kerugian) persediaan.
4) Persediaan yang rusak dan *expired* dikeluarkan dari daftar persediaan ke aset lain-lain menunggu usulan penghapusan, dan jika sudah ada SK penghapusan, dikeluarkan dari neraca.
5) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

1) Aset Tetap dan Penyusutan

a) Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh BLUD SPAM yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan/operasional dan pelayanan. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

b) Kriteria Pengakuan Aset Tetap:

(1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual dan/atau tidak diberikan kepada masyarakat.
(3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

c) Nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap meliputi:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	
2	**Peralatan dan Mesin, terdiri atas:**	
2.1	Alat-alat Berat	100.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Keamanan	500.000
3	**Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:**	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
3.2	Bangunan Monumen	20.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:**	
4.1	Jalan dan Jembatan	20.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20.000.000
4.3	Instalasi	10.000.000
4.4	Jaringan	10.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:**	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	500.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	500.000
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	20.00.000

d) Aset tetap UPTD SPAM dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Harga perolehan meliputi harga barang ditambah dengan biaya terkait dengan perolehan barang tersebut.

e) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak.

f) Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus *(straight line method)* dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sedangkan Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

g) Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan dua hari.

h) Daftar jenis aset tetap, masa manfaat dan persentase penyusutan aset tetap:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	3			ASET TETAP					
1	3	2		Peralatan dan Mesin					
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10	0	3	4	5

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8	0	2	3	4
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7	0	2	2	4
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	2	2	4
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	0	1	1	1
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10	0	3	3	5
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	0	1	1	2
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20	0	5	7	10
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10	0	3	3	6
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	1	1	2
1	3	2	11	Alat Ukur	5	0	1	1	2
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4	0	1	1	2
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	0	1	1	2
1	3	2	14	Alat Kantor	5	0	1	1	2
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5	0	1	1	2
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4	0	1	1	2
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	0	1	1	2
1	3	2	18	Alat Studio	5	0	1	1	2
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5	0	1	1	2
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10	0	3	3	5
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5	0	1	1	2
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5	0	1	1	2
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8	0	2	3	4
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	0	3	3	5
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	0	4	5	7
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	0	4	5	7
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10	0	3	4	5
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	0	3	4	5
1	3	2	29	Alat Laboratorium	7	0	2	2	3

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
				Lingkungan Hidup					
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	0	4	5	7
1	3	2	31	Senjata Api	10	0	3	4	5
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3	0	1	1	1
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	0	1	1	2
1	**3**	**3**		**Gedung dan Bangunan**					
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	10	15	25
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	10	15	25
1	3	3	3	Bangunan Menara	40	0	10	15	20
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50	0	10	15	25
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50	0	10	15	25
1	3	3	6	Candi	50	0	10	15	25
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	0	10	15	25
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50	0	10	15	25
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	0	10	15	25
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50	0	10	15	25
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	0	10	15	25
1	**3**	**4**		**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**					
1	3	4	1	Jalan	10	0	2	3	5
1	3	4	2	Jembatan	50	0	10	15	25
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50	0	10	15	25
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50	0	10	15	25
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25	0	4	8	12
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	0	2	3	5
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	0	5	10	15
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40	0	10	15	20
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40	0	10	15	20
1	3	4	10	Bangunan Air	40	0	10	15	20
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air	30	0	5	10	15

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
				Bersih					
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30	0	5	10	15
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	0	2	3	5
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	0	2	3	5
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30	0	5	10	15
1	3	4	18	Instalasi Gas	30	0	5	10	15
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20	0	5	10	10
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30	0	5	10	15
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20	0	10	15	10
1	3	4	23	Jaringan Gas	30	0	5	10	15
1	3	5		Aset Tetap Lainnya					
1	3	5	1	Buku	-	-	-	-	-
1	3	5	2	Terbitan	-	-	-	-	-
1	3	5	3	Barang Perpustakan	-	-	-	-	-
1	3	5	4	Barang Bercorak Kebudayaan	5	-	-	-	-
1	3	5	5	Alat Olahraga Lainnya	5	-	-	-	-
1	3	5	6	Hewan	-	-	-	-	-
1	3	5	8	Aset Renovasi	10	-	-	-	-

2) Aset Tidak Berwujud

a) Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik secara nyata.

b) Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.

(2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, sedangkan metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat aset tak berwujud selama 5 (lima) tahun.

3) Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang

a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.

b) Dalam entitas BLUD, Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan dan entitas pemerintah.

c) Kewajiban dikelompokkan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok Kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4) Ekuitas

a) Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban atau utang.

b) Ekuitas BLUD meliputi:

(1) Ekuitas Awal

Merupakan hak residual awal BLUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

(2) Koreksi Saldo Awal

Merupakan koreksi atas ekuitas/saldo awal periode sebelumnya.

(3) Surplus & Defisit Tahun Berjalan

Berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

(4) Ekuitas Donasi

Merupakan sumber daya yang diperoleh dari pemda namun tidak melalui DPA/RBA BLUD.

I. Pos-pos Laporan Operasional

1) Pendapatan

a) Klasifikasi

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

(1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

(a) Pendapatan usaha rawat jalan.

(b) Pendapatan usaha rawat darurat.

(c) Pendapatan usaha rawat inap.

(2) Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLUD rumah sakit untuk menyerahkan barang/jasa.

(3) Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA BLUD untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi BLUD.

(4) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD.

(5) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

b) Pengakuan

(1) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

a. Pendapatan dari alokasi APBD;

b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;

d. Pendapatan hasil kerja sama;

e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan

f. Pendapatan BLUD lainnya.

(2) Pendapatan yang bersumber dari Kas Daerah diakui pada saat SP2D dicairkan dari Rekening Kasda.

(3) Pendapatan yang bersumber dari BLUD diakui pada saat hak tagih sudah terjadi yaitu pada saat RSUD sudah memberikan barang/jasa kepada pihak ketiga.

(4) Dalam hal RSUD sudah memberikan barang/jasa kepada pihak ketiga sedangkan nominal pendapatan belum definitif sehubungan masih memerlukan waktu verifikasi pihak ketiga/independen, maka pendapatan dicatat dengan tarif sementara yang paling relevan untuk selanjutnya dilakukan koreksi pada saat nominal pendapatan diketahui secara definitif.

(5) Batas waktu penyesuaian nominal pendapatan dilakukan sampai dengan saat penerbitan Laporan Keuangan yaitu pada saat penyelesaian audit oleh pemeriksa eksternal dengan melakukan koreksi terhadap nilai pendapatan dan piutang.

(6) Koreksi yang terjadi setelah batas waktu penerbitan Laporan Keuangan dicatat dengan melakukan koreksi atas akun Ekuitas dan akun Piutang.

(7) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(8) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(9) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

c) Pengukuran

(1) Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

(2) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS dan SPJ untuk yang bukan LS.

(3) Pendapatan Hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima.

(4) Pengukuran pendapatan di atas menggunakan asas bruto.

d) Pengungkapan

(1) Pendapatan disajikan terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.

(2) Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2) Beban

a) Klasifikasi

Beban rumah sakit diklasifikasikan ke dalam:

- Beban Pegawai

  Merupakan beban yang terkait kompensasi kepada pegawai, baik kepada pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun yang berstatus Non-ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses bisnis Entitas.

- Beban Persediaan

  Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

- Beban Jasa

  Merupakan beban yang terkait dengan pemanfaatan jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

- Beban Pemeliharaan

  Merupakan beban yang terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.

- Beban Langganan Daya/Jasa

  Merupakan beban yang terdiri dari beban penggunaan listrik, air, telepon, internet, serta jasa-jasa yang dimanfaatkan secara teratur dan berulang oleh Entitas.

- Beban Perjalanan Dinas

  Merupakan beban yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.

- Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain

  Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.

- Beban Penyusutan Aset

  Merupakan beban yang timbul akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

- Beban Penyisihan Piutang

  Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait potensi ketertagihannya.

- Beban Operasional Lainnya

  Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kedaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

- Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar

Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus.

- Kerugian Penurunan Nilai Aset

  Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

- Kerugian Lainnya

  Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

b) Pengakuan

(1) Beban pada BLUD diakui pada saat:
  (a) timbulnya kewajiban;
  (b) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
  (c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

(2) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

(3) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.

(4) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

c) Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

(1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

(2) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

(3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

(4) Jumlah kerugian yang terjadi.

d) Pengungkapan

(1) Beban disajikan terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis dan rincian beban.

(2) Jenis dan rincian beban diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

m. Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi UPTD SPAM yang merupakan UPT Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. UPTD SPAM terdaftar sebagai wajib pungut pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.606.059.9-922.000 atas nama UPTD Sistem Penyedia Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1 Penjelasan Pos-pos Pendapatan

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.512.186.587,00 atau 91,53% dari anggaran sebesar Rp2.744.706.033,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.524.077.605,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Pendapatan Air	2.744.706.033,00	2.512.186.587,00	91,53%	1.524.077.605,00
Jumlah		**2.744.706.033,00**	**2.512.186.587,00**	**91,53%**	**1.524.077.605,00**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Jumlah realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

c. Pendapatan Hasil Kerjasama

Jumlah realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

d. Pendapatan Hibah

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

e. Pendapatan Usaha Lainnya

Jumlah realisasi Pendapatan Usaha Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp667.374,64, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	-			
1	Pendapatan Jasa Giro		-	-	667.374,64
Jumlah		-	-	-	**667.374,64**

f. Pendapatan APBD

Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

4.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp646.147.039,00 atau 98,65% dari anggaran sebesar Rp655.017.247,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp774.538.915,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
A	**Sumber Dana APBD**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Gaji Pokok	-	-	-	-
B	**Sumber Dana BLUD**	**655.017.247,00**	**646.147.039,00**	**98,65%**	**774.538.915,00**
	Gaji dan Tunjangan				
1	Gaji Pokok	655.017.247,00	646.147.039,00	98,65%	774.538.915,00
2	Hutang Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-
	Jumlah	**655.017.247,00**	**646.147.039,00**	**98,65%**	**774.538.915,00**

b. Belanja Barang dan Jasa

Total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.672.513.800,00 atau 88,62% dari anggaran sebesar Rp1.887.263.033,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp569.794.871,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
A	**Sumber Dana APBD**	-	-	-	-
1	**Belanja Bahan Pakai Habis**	-	-	-	-
2	**Belanja Jasa**	-	-	-	-
3	**Belanja Perjalanan Dinas**	-	-	-	-
B	**Sumber Dana BLUD**	**1.887.263.033,00**	**1.672.513.800,00**	**88,62%**	**569.794.871,00**
1	**Belanja Bahan Pakai Habis**				
	- Belanja Air Kantor	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	19.766.160,00	82,36%	13.221.670,00
	- Belanja Cetak	-	-	-	-
	- Belanja Materai	-	-	-	1.900.000,00
	- Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	200.000.000,00	198.172.900,00	99,09%	49.600.000,00
	- Belanja Bahan Kimia (Tawas)	200.000.000,00	199.398.357,00	99,70%	98.900.000,00
	- Belanja Pakaian Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	6.016.000,00
	- Belanja Bahan Bakar Minyak	-		-	-
	- Belanja Perlengkapan Komputer	-		-	-
2	**Belanja Jasa**				
	- Belanja BPJS Kesehatan	-		-	18.326.316,00
	- Belanja Cetak Formulir	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	-
	- Belanja BPJS Ketenagakerjaan	-	-	-	-
	- Belanja Fotocopy, Jilid dan Cetak	24.000.000,00	17.703.300,00	73,76%	23.643.700,00
	- Belanja Humas, Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat	-		-	5.645.000,00
	- Belanja Telepon Internet Kantor	12.000.000,00	12.086.897,00	100,72%	11.611.399,00
	- Belanja Pulsa Operator CMS	1.980.000,00	1.135.000,00	57,32%	751.000,00
	- Belanja Jasa Pembacaan Meter	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00
	- Belanja Iuran Berlangganan (Koran)	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	
	- Belanja Lembur Pegawai	78.000.000,00	82.110.000	105,27%	16.996.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	-	-	6.000.000,00
	- Belanja Jasa Tim Tarif	-		-	19.000.000,00
	- Honorarium Tim Pendukung PPK Pekerjaan Fisik	600.000,00	-	-	
	- Belanja Honorarium Petugas Verifikasi SPJ	3.000.000,00	3.000.000	100,00%	
	- Belanja BBM untuk	42.900.000,00	38.400.000	89,51%	
	- Belanja BBM untuk Pegawai Lapangan	36.600.000,00	23.100.000	63,11%	
	- Belanja Materai	6.000.000,00	2.400.000	40,00%	
	- Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.800.000,00	1.507.500	83,75%	-
	- Belanja Lembur Operasi Distribusi	-	-	-	-
	- Belanja Lembur Operator Tulun	-	-	-	-
	- Belanja Lembur Petugas Administrasi	-	-	-	-
	- Belanja Listrik Operasional BLUD	510.000.000,00	401.771.504	78,78%	36.169.538,00
	- Belanja Ongkos Angkut BBM	-		-	34.339.700,00

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00	15.951.700	88,62%	5.200.800,00
	- Belanja Hutang Pajak Air Permukaan	24.000.000,00	17.423.950	72,60%	16.106.554,00
	- Belanja Pajak Kendaraan	-		-	-
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.600.000,00	1.237.531	77,35%	2.139.160,00
	- Belanja Pelatihan dan Pendidikan Pegawai	12.000.000,00	-	-	4.792.000,00
	- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	-		-	29.325.000,00
	- Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-	-
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	18.306.033,00	5.842.141	31,91%	9.209.965,00
	- Belanja luran Jaminan Kematian Bagi ASN	-		-	-
	- Belanja Iuran Jaminan	24.000.000,00	14.157.854	58,99%	-
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja	-		-	-
	- Belanja Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan	30.000.000,00	29.970.000	99,90%	29.970.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan RSB	-		-	-
	- Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan UKL/UPL	100.000.000,00	99.900.000	99,90%	
	- Belanja Jasa Pemeliharaan Aplikasi	-		-	-
	- Belanja Rapat Tamu	-		-	-
	- Belanja Representatif Pimpinan (Direksi Fon)	6.000.000,00	6.000.000	100,00%	6.000.000,00
	- Belanja Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat	1.500.000,00	207.000	13,80%	-
	- Belanja Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	33.000.000,00	19.020.000	57,64%	
3	**Belanja Pemeliharaan**				
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah Jaga/Kantor/WTP Tilong	-	-	-	5.155.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan WTP, Reservoir, Rumah Jaga/Kantor dan Pendukung Pengolahan Lainnya di Tulun	-	-	-	-
	- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor	-	-	-	307.500,00
	- Belanja Pemeliharaan Jembatan Pipa	-	-	-	-
	- Belanja Pemeliharaan Kendaraan	9.000.000,00	8.242.000	91,58%	2.923.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Pipa Transmisi dan Distribusi di Kota Kupang	-	-	-	65.361.000,00

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	- Belanja Pemeliharaan Pipa Transmisi dan Distribusi, Pemeliharaan CP-1 Tilong, Pemeliharaan WTP Tulun.	100.000.000,00	138.159.050	138,16%	
	- Belanja Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi	-	-	-	9.761.200,00
	- Belanja Pemeliharaan Pompa di CP-1 Tilong	60.000.000,00	61.820.468	103,03%	
	- Belanja Pemeliharaan Pompa di Tulun	50.000.000,00	46.710.000	93,42%	
	- Belanja Peralatan Kebersihan	-	-	-	1.511.000,00
	- Belanja Pemeriksaan Kualitas Air	21.000.000,00	4.320.000	20,57%	-
	- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Komputer dan Aksesoris	9.000.000,00	6.050.000	67,22%	
4	**Belanja Perjalanan Dinas**				
	- Belanja perjalanan dinas biasa (dalam daerah)	42.783.000,00	28.701.400	67,09%	24.385.300,00
	- Belanja perjalanan dinas biasa (luar daerah)	136.994.000,00	136.809.088	99,87%	3.287.069,00
5.	**Bunga**				
	- Biaya Bunga	-		-	-
6.	**Belanja Lain-lain**				
	- Administrasi Bank	-	240.000,00	-	240.000,00
	Jumlah	**1.887.263.033,00**	**1.672.513.800,00**	**88,62%**	**569.794.871,00**

c. Bunga
Bunga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

d. Belanja Lain-lain
Beban Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp240.000,00 dan Rp240.000,00.

4.3 Penjelasan Pos-Pos Belanja Modal

Belanja Modal
Total realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp202.425.753,00 atau 99,23% dari anggaran sebesar Rp200.860.767,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil).

a. Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 (nihil).

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp61.427.400,00 atau 98,80% dari anggaran sebesar Rp62.175.753,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil).

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp139.433.367,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp140.250.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil).

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil).

e. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil).

f. **Belanja Aset Lainnya**
Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 (nihil).

5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp744.706.032,04 dan Rp564.294.828,40

5.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Jumlah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3 SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan
Jumlah Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(7.335.019,00) dan Rp180.431.193,64

5.4 Penyetoran ke Kas Daerah
Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 (Nihil)

5.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
Jumlah Saldo Anggaran Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp737.371.012,44 dan Rp744.726.032,04

6. Penjelasan Pos-pos Neraca

6.1 Kas di Bendahara Pengeluaran APBD

Kas di Bendahara Pengeluaran APBD merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan APBD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.2 Kas pada BLUD

Kas pada BLUD terdiri dari saldo kas pada Bendahara Penerimaan Pengeluaran dan saldo Bank dengan rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024
a. Kas di Bendahara BLUD		
- Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	-	-
b. Kas di Bank		
- PT Bank NTT dengan No. Rek. 00101080075961	737.371.012,44	635.891.593,04
c. Kas Tunai		
- Kas Tunai	-	108.814.439,00
- Kas Tunai Bendahara Penerimaan BLUD	-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	**737.371.012,44**	**744.706.032,04**

6.3 Piutang Layanan BLUD

Jumlah Piutang Pelayanan neto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp157.868.548,76 dan Rp37.338.137,00 sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Operasional BLUD		
- PDAM Kota Kupang	-	-
- PDAM Kabupaten	-	-
- Dinas PUPR	-	20.000,00
- Angkasa Pura	2.044.330,00	882.825,00
- Univ. Nusa Cendana	-	-
- Politeknik Negeri	-	2.069.030,00
- Politani Negeri	-	-
- Dinas PUPR	-	-
- DPMD	-	-
- DPMPTSP	-	160.628,00
- Perikanan & Kelautan	-	-
- RS. Siloam	44.036.973,00	-
- UPT Gor Oepoi	-	505.752,00
- KPSPAM	-	-
- Yayasan Kamilius	-	-
- Homestay Militya	-	100.368,00
- Yayasan Harapan Bangsa	253.896,00	253.896,00
- Lippo Mall Kupang	9.729.978,00	-
- Hotel Pelangi	400.044,00	400.044,00
- MBR	-	-
- Homestay Militia	100.368,00	-
- Sanjuan 2	-	-
- DKP	-	144.246,00
- SDN Tulun	44.955,00	8.675,00
- Kel Kampung Baru A, Zona 1 (32 KK)	2.962.765,00	1.207.760,00
- Kel Bogenvil, Zona 2 (5KK)	366.982,00	267.075,00
- Kel Kasih, Zona 2	3.030.865,00	1.316.137,00
- Kel Mawar, Zona 2	6.311.875,00	3.571.610,00
- Kel Komodo, Zona 3 (5 KK)	91.901,00	282.603,00
- Kel Kusambi 2 Zona 3 (9 KK)	3.688.656,00	621.873,00
- Kel Nenas, Zona 3 (9 KK)	106.055,00	3.755,00
- Kel VEN 3, ZONA 3	70.246,00	-
- Kel Asam 3, Zona 3 (13 KK)	1.131.967,00	964.549,00
- Kel Kasih Ibu, Zona 4 (7KK)	136.676,00	6.074,00
- Kel Teratai, Zona 4 (5KK)	269.265,00	584.509,00
- Kel Gresia, Zona 4 (3 KK)	2.864.306,00	1.079.174,00
- Kel GREGORIUS, ZONA 4	44.940,00	-
- Kel Sehati, Zona 4 (3 KK)	197.483,00	50.167,00
- Kelompok Masyarakat Sanjuan 1	1.173.818,00	-
Saldo dipindahkan	**79.058.344,00**	**14.500.750,00**

	2025	2024
Piutang Operasional BLUD		
Saldo pindahan	**79.058.344,00**	**14.500.750,00**
- Kelompok Masyarakat Sanjuan 2 (14 Org)	7.334.546,00	4.061.477,00
- Kelompok Masyarakat Sanjuan 3 (17 Org)	2.180.670,00	181.890,00
- KELOMPOK SETIA	2.734.962,00	-
- Kelompok Damai	17.876.316,00	7.414.158,00
- Kelompok Kasih	3.354.175,00	254.921,00
- Kelompok Mawar	6.467.164,00	325.420,00
- WILMA HOTEL	1.255.604,00	-
- SDN Balfai	-	41.526,00
- KEL Flamboyan	2.500.291,00	1.952.548,00
- KEL Kamboja	5.002.935,00	3.682.641,00
- KEL KENARI 1	1.630.335,00	-
- KEL KENARI 2	4.988.138,00	-
- KEL BUKIT CINTA BELANDA	2.623.304,00	-
- KEL Bukit Cinta	4.598.542,00	1.726.224,00
- BPP Oelnasi	204.894,00	89.985,00
- HOTEL ASTON	10.555.479,00	-
- HOTEL SOTIS	11.377.022,00	-
- HOTEL KRISTAL	10.330.172,00	-
- HOTEL ON THE ROCK	7.943.354,00	-
- SWISS BELCOURT	9.401.965,00	-
- RESTORAN NELAYAN	2.848.684,00	-
- GRAND MUTIARA	516.069,00	-
- YAMAHA	231.559,00	-
- TOYOTA	1.558.337,00	-
- KLINIK JIWA	489.782,00	-
- GEREJA TALITAKUM	697.167,00	-
- RSUD	7.667.410,00	3.236.225,00
- SMAN SEMINARI RAFEL	1.192.363,00	-
- KEUSKUPAN	176.954,00	-
- SMK WIRAKARYA	368.935,00	-
- UNIVERSITAS UMK	2.592.186,00	-
- RUSUNAWA MUHAMMADYAH	510.719,00	-
- SMK MUHAMMADIYA	492.871,00	-
- SMA MUHAMMADIYA	214.610,00	-
- UCB	6.108.456,00	-
- PENGADILAN AGAMA	-	-
- BMKG	344.220,00	-
- BANK BTN	301.349,00	-
- RSU WIRASAKTI	4.347.400,00	-
- ASRAMA PPLP	-	-
- Kel NEKAMESE, ZONA 1	178.123,00	-
- Kel MORSA, ZONA 1 (10 KK)	678.035,00	-
- Kel NOMELAKTOSI, ZONA 1	308.238,00	-
- Kel FLOBAMORA ZONA 1	1.866.377,00	-
- Kel JABATAN, ZONA 2	1.095.836,00	-
- Kel NEKABUA, ZONA 2	59.715,00	-
- KEL BOGENVIL	3.386.873,00	-
Jumlah Piutang Pelayanan (Bruto)	**229.650.480,00**	**37.467.765,00**
Penyisihan Kerugian Piutang	(71.781.931,24)	(129.627,50)
Jumlah Piutang Pelayanan (Neto)	**157.868.548,76**	**37.338.137,50**

Perhitungan Penyisihan Piutang Pelayanan per 31 Desember 2025

No.	Klasifikasi	Piutang	Penyisihan		Nilai
		Bruto	Tarif	Nominal	Buku
a.	L (< 1 Bulan)	139.491.028,00	0,5%	697.455,14	138.793.572,86
b.	KL (1 s.d. 3 Bulan)	15.226.971,00	10%	1.522.697,10	13.704.273,90
c.	D (> 3 s.d. 12 Bulan)	10.741.404,00	50%	5.370.702,00	5.370.702,00
d.	M (> 12 Bulan)	64.191.077,00	100%	64.191.077,00	-
	Jumlah Pelayanan	**229.650.480,00**		**71.781.931,24**	**157.868.548,76**

Perubahan Penyisihan Kerugian Piutang sebagai berikut :

	2025
Saldo Awal	236.597,28
Koreksi Pengurangan	(236.597,28)
Penyisihan Tahun Berjalan	71.781.931,24
Saldo Akhir Tahun	**71.781.931,24**

6.4 Persediaan

Jumlah Persediaan pada UPTD Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi NTT per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp582.290.857,60 dan Rp638.416.150,00 sebagai berikut:

	2025	2024
Persediaan		
- Kaporit	291.060.000,00	423.862.250,00
- Tawas	291.230.857,60	214.553.900,00
Jumlah Persediaan BLUD	**582.290.857,60**	**638.416.150,00**

6.5 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2025	2024
1)	Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00
2)	Peralatan dan Mesin	-	-
3)	Gedung dan Bangunan	-	-
4)	Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
5)	Aset Tetap Lainnya	-	-
6)	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah Aset Tetap	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
	Nilai Buku	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**

Aset Tetap per 31 Desember 2025 terdiri dari:

	31 Desember 2025			
	Saldo	Mutasi		Saldo
	1 Januari 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2025
Biaya Perolehan				
1) Tanah	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2) Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
3) Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi dlm Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah Biaya Perolehan	**50.000.000,00**	-	-	**50.000.000,00**
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
Jumlah Nilai Buku	**50.000.000,00**			**50.000.000,00**

Aset Tetap per 31 Desember 2024 terdiri dari:

	31 Desember 2024			
	Saldo	Mutasi		Saldo
	1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024
Biaya Perolehan				
1) Tanah	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2) Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
3) Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi dlm Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah Biaya Perolehan	**50.000.000,00**	-	-	**50.000.000,00**

	31 Desember 2024			
	Saldo	Mutasi		Saldo
	1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
Jumlah Nilai Buku	**50.000.000,00**			**50.000.000,00**

Harga Perolehan Aset Tetap Tanah Senilai Rp50.000.000 bersetatus kepemilikan UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dibeli pada tahun 2015 dengan sumber dana sendiri.
Berdasarkan **Berita Acara Nomor 13/BA/DA/2011,HK.12.Tahun 2011 Tentang Serah Terima Operasi Dan Pemeliharaan Unit Air Baku dan Unit Produksi Air Minum Tilong dan Tulun di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Direktoral Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.** Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya dimiliki dan dicatat di Kementerian PUPR dan penambahan atas Aset Tetap Belanja Modal di catat di Dinas PUPR sebagai Pengguna Anggaran APBD.
Atas Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp61.427.400,00 dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp139.433.367,00 diakui di Neraca UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur namun dalam Daftar Inventaris Aset tidak dapat diakui karena milik dan peruntukan ke UPTD Dinas PUPR, sehingga perlu akomordir bagian Aset BPKAD dan UPTD Dinas PUPR atas pencatatan pengadaan sebesar Rp200.860.767,00.

6.6 Aset Lainnya
Aset Lainnya tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan nilai buku atas aset tidak berwujud dan aset tetap rusak berat.

6.7 Utang Usaha
Utang Usaha per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.8 Utang PFK
Utang PFK per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,60 dan Rp0,00.

6.9 Utang Pajak
Utang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Utang Pajak Air Permukaan	-	-
Jumlah Utang Pajak	-	-

6.10 Pendapatan diterima dimuka
Pendapatan diterima dimuka untuk tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp220.525,00 dan Rp581.615,00

6.11 Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya untuk tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

6.12 Utang Cadangan Dana Meter
Utang Cadangan Dana Meter per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Cadangan Dana Meter	-	-
Jumlah Cadangan Dana Meter	-	-

6.13 Ekuitas
Ekuitas pada UPTD Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi NTT per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Ekuitas Awal	1.469.878.704,54	1.072.609.134,40
Koreksi Harga Perolehan Aset Tetap	-	-
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
Mutasi Persediaan Antar OPD	-	626.359.150,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-
Surplus dan Defisit Tahun Berjalan	258.291.955,66	(229.089.579,86)
Jumlah Ekuitas	**1.728.170.660,20**	**1.469.878.704,54**

7. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

7.1 Pendapatan

Pendapatan UPTD SPAM Provinsi NTT Tahun 2025 dan 2024 dengan total masing-masing sebesar Rp2.704.730.392,00 dan sebesar Rp1.558.820.483,64 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat pada UPTD SPAM Provinsi NTT Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.704.730.392,00 dan sebesar Rp1.558.153.109,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		
- Pendapatan Air	2.704.730.392,00	1.558.153.109,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	**2.704.730.392,00**	**1.558.153.109,00**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2026 tentang Tarif Air Curah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pasal 2 ayat 1 menjelaskan "Tarif air minum curah UPTD SPAM" dan ayat 2 menjelaskan "Selain tarif sebagiaman dimaksud pada ayat (1), kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, juga dikenakan:

a. biaya pemeliharaan meter
b. biaya administrasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2026 tersebut UPTD Provinsi NTT sudah mengakomodir dalam pelaksanaan dalam melakukan penagihan atas pendapatan air kepada pelanggan.

b. Pendapatan APBD

Pendapatan APBD pada UPTD SPAM Provinsi NTT Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan APBD	-	-
Jumlah Pendapatan APBD	-	-

c. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada UPTD SPAM Provinsi NTT Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

d. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain UPTD SPAM Provinsi NTT Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp667.374,64 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Pendapatan Jasa Giro	-	667.374,64
Jumlah Pendapatan Lain-lain	-	667.374,64
Total Pendapatan	**2.704.730.392,00**	**1.558.820.483,64**

7.2 Beban

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp646,147,039,00 dan sebesar Rp774.538.915,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Pegawai		
Gaji dan Tunjangan		
- Gaji Pokok	646.147.039,00	774.538.915,00
Jumlah Beban Pegawai	**646.147.039,00**	**774.538.915,00**

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.728.399.093,60 dan Rp1.013.001.521,00 terdiri dari:

	2025	2024
Beban Barang		
- Beban Bahan Kimia Kaporit dan Tawas	453.696.549,40	591.946.650,00
- Beban Alat Tulis Kantor	19.766.160,00	13.221.670,00
- Belanja Cetak	-	-
- Belanja Materai	-	1.900.000,00
- Belanja Bahan Bakar Minyak	-	34.339.700,00
- Belanja Perlengkapan Komputer	-	-
- Belanja Pakaian Dinas	15.000.000,00	6.016.000,00
Saldo dipindahkan	**488.462.709,40**	**647.424.020,00**

	2025	2024
Saldo dipindahkan	**488.462.709,40**	**647.424.020,00**
Beban Jasa		
- Beban BPJS Kesehatan	-	18.326.316,00
- Belanja BPJS Ketenagakerjaan	-	-
- Belanja Cetak Formulir	3.000.000,00	-
- Beban Fotocopy, Jilid dan Cetak	17.703.300,00	23.643.700,00
- Beban Humas, Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat	-	5.645.000,00
- Beban Telepon Internet Kantor	12.086.897,00	11.611.399,00
- Belanja Pulsa Operator CMS	1.135.000,00	751.000,00
- Belanja Iuran Berlangganan (Koran)	1.200.000,00	-
- Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.507.500,00	-
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	14.157.854,00	-
- Beban Jasa Pembacaan Meter	12.000.000,00	12.000.000,00
- Beban Lembur Operasi Distribusi	-	-
- Beban Lembur Operator Tilong	-	-
- Belanja Lembur Pegawai	82.110.000,00	16.996.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	6.000.000,00
- Belanja Jasa Tim Tarif	-	19.000.000,00
- Beban Lembur Petugas Administrasi	-	-
- Beban Honorarium Tim Pendukung PPK-Direksi Lapangan	-	-
- Belanja Honorarium Tim Pendukung PPK - Pengawas Lapangan	-	-
- Honorarium Tim Pendukung PPK Pekerjaan Fisik	-	-
- Belanja Honorarium Petugas Verifikasi SPJ	3.000.000,00	-
- Belanja Ongkos Angkut BBM	-	-
- Belanja BBM untuk Operasional	38.400.000,00	-
- Belanja BBM untuk Pegawai Lapangan	23.100.000,00	-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.951.700,00	-
- Belanja Materai	2.400.000,00	-
- Beban Pajak Air Permukaan	-	16.106.554,00
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.237.531,00	2.139.160,00
- Beban Pelatihan dan Pendidikan Pegawai	-	4.792.000,00
- Beban Representatif Pimpinan (Direksi Fon)	6.000.000,00	6.000.000,00
- Beban Hutang Pajak Air Permukaan	17.423.950,00	-
- Beban Pajak Kendaraan	-	-
Beban Jasa		
- Beban Pelatihan dan Pendidikan Pegawai	-	-
- Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	29.325.000,00
- Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.842.141,00	9.209.965,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi ASN	-	-
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan	-	-
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan Kerja	-	-
- Beban Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan	29.970.000,00	29.970.000,00
- Beban Rapat Tanu	-	-
- Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan UKL/UPL	99.900.000,00	-
- Belanja Persentatif Pimpinan/ Direksi	-	-
- Beban Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat	207.000,00	-
- Belanja Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	19.020.001,20	-
- Beban Listrik Operasional	401.771.504,00	36.169.538,00
- Belanja Makan dan Minum	-	5.200.800,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan Rumah Jaga/Kantor/WTP	-	5.155.000,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan WTP, Reservoir, Rumah Jaga/Kantor dan Pendukung Pengolahan Lainnya di Tulun	-	-
- Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	-	307.500,00
- Beban Pemeliharaan Jembatan Pipa	-	-
- Beban Pemeliharaan Kendaraan	8.242.000,00	2.923.000,00
- Beban Pemeliharaan Pipa Transmisi dan Distribusi di Kota Kupang	-	65.361.000,00
- Belanja Pemeliharaan Pipa Transmisi dan Distribusi, Pemeliharaan CP-1 Tilong, Pemeliharaan WTP Tulun.	138.159.050,00	-
- Belanja Pemeliharaan Pompa di CP-1 Tilong	61.820.468,00	-
- Belanja Pemeliharaan Pompa di Tulun	46.710.000,00	-
Saldo dipindahkan	**1.552.518.605,60**	**974.056.952,00**

	2025	2024
Saldo dipindahkan	**1.552.518.605,60**	**974.056.952,00**
- Belanja Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi	-	9.761.200,00
- Belanja Peralatan Kebersihan	-	1.511.000,00
- Beban Pemeriksaan Kualitas Air	4.320.000,00	-
- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Komputer dan Aksesoris	6.050.000,00	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-
- Beban perjalanan dinas biasa (dalam daerah)	28.701.400,00	24.385.300,00
- Beban perjalanan dinas biasa (luar daerah)	136.809.088,00	3.287.069,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**1.728.399.093,60**	**1.013.001.521,00**

c. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang UPTD SPAM Provinsi NTT per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp71.781.931,24 dan Rp129.627,50

d. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan UPTD SPAM Provinsi NTT per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Penyusutan	-	-
Jumlah Beban Penyusutan	**-**	**-**

e. Beban Amortisasi Aset Lain-Lain

Beban Amortisasi Aset Lain-Lain UPTD SPAM Provinsi NTT per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

f. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp240.000,00 dan Rp240.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban administrasi bank	240.000,00	240.000,00
Jumlah Beban Lain-lain	**240.000,00**	**240.000,00**

7.3 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional UPTD SPAM Provinsi NTT per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp129,627,50 dan Rp0,00.

8. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

8.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

1) Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdiri dari:	2025	2024
a) Pendapatan dari APBD	-	-
b) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.512.186.587,00	1.524.077.605,00
c) Pendapatan Usaha Lainnya	-	667.374,64
Jumlah Arus Kas Masuk	**2.512.186.587,00**	**1.524.744.979,64**

2) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi terdiri dari:	2025	2024
a) Pembayaran Pegawai	646.147.039,00	774.538.915,00
b) Pembayaran Barang	1.672.273.800,00	569.554.871,00
c) Pembayaran Bunga	-	-
d) Pembayaran Lain-lain	240.000,00	240.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**2.318.660.839,00**	**1.344.333.786,00**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**193.525.748,00**	**180.411.193,64**

8.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

1) Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari:

	2025	2024
a) Arus kas masuk	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-

2) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas investasi terdiri dari:

	2025	2024
a) Perolehan Tanah	-	-
b) Perolehan Peralatan dan Mesin	61.427.400,00	-
c) Perolehan Gedung dan Bangunan	139.433.367,00	-
d) Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
e) Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
f) Perolehan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	**200.860.767,00**	-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**(200.860.767,00)**	-

8.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

1) Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan

	2025	2024
a) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	(0,60)	-
Jumlah Arus Kas Masuk	**(0,60)**	-

2) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan

a) Penyetoran ke Kas Daerah	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**(0,60)**	-

8.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

1) Arus Kas Masuk

	2025	2024
Arus kas masuk dari aktivitas transitoris	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-

2) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	-	-

8.5 Saldo Kas	**2025**	**2024**
1) Saldo Awal Kas	744.706.032,04	564.294.838,40
2) Kenaikan/Penurunan kas Per 31 Desember	(7.335.019,60)	180.411.193,64
3) Saldo Akhir Kas	**737.371.012,44**	**744.706.032,04**

9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

9.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.469.878.704,54 dan Rp1.072.609.134,40

9.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp258.291.955,66 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Rp(229.089.579,86).

9.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp626.359.150,00

		2025	2024
1)	Koreksi Harga Perolehan Aset Tetap	-	-
2)	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
3)	Mutasi Persediaan Antar OPD	-	626.359.150,00
4)	Koreksi Saldo Awal Ekuitas	-	-
	Jumlah	-	**626.359.150,00**

9.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.728.170.660,20 dan Rp1.469.878.704,54.

10. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian laporan keuangan sama dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 30 Maret 2026.

Tidak terdapat peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal neraca yang memerlukan pengungkapan dalam dan atau penyesuaian terhadap laporan keuangan.

11. Peristiwa Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 816.2.1/145/BKD.3.2, tanggal 06 Oktober 2025 menetapkan:

Nama : Ronalda Valerina Mbasi, S.Akun
NIP : 19780422010012007
Jabatan : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jabatan Baru : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat /IV/a

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 816.2.1/145/BKD.3.2, tanggal 06 Oktober 2025 menetapkan:

Nama : Domingos Orleans Soares, A.Md.
NIP : 196808101993031015
Jabatan : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jabatan Baru : Kepala Seksi Teknik UPTD Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat /IV/a

Kantor Akuntan Publik
I GEDE OKA & REKAN
Registered Public Accountants
Izin Usaha KAP: KMK No. 131/MK/SK/2025

Laporan No.: 00058/ML/KAP.IGOR/1/III/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan UPTD Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini Wajar yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00058/2.1516/AU.5/11/0463-4/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang. Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari

pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pemeriksaan kami terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kami tidak menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan Laporan Keuangan UPTD Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Namun Demikian, kami juga menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berpengaruh langsung dan tidak material terhadap Laporan Keuangan UPTD Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan pokok-pokok temuan, sebagai berikut:

1. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD pada UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memadai sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur belum menetapkan peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pelaksanaan Anggaran Berupa Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (SP3BP) dan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Tidak Dilakukan Dengan Tepat.
4. Temuan belanja modal atas rekonsiliasi asset dan ketidaksesuaian peruntukan anggaran belanja modal UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025
5. Aset tetap berupa tanah senilai Rp50.000.000 belum memiliki akta sertifikat hak milik.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dan Rekan

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP. 0463
Badung, 30 Maret 2025

RESUME HASIL PEMERIKSAAN SPI
DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD pada UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memadai sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 134/KEP/HK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (PPK-UPTD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Status Bertahap. Sebagai BLUD, UPTD SPAM diberikan fleksibilitas untuk menggunakan secara langsung penerimaan fungsionalnya guna membiayai kegiatan operasionalnya. Pemeriksaan terhadap dokumen instansi, diketahui bahwa UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya memiliki ketentuan yang diwajibkan sebagai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada
1	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 4	Tidak Ada
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 22	Tidak Ada
3	Remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin	Pasal 24 ayat (1)	Ada belum sesuai
4	Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 38	Ada
5	Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 41	Ada
6	Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 43	Ada
7	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 64 ayat (3)	Tidak Ada
8	Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 73	Tidak Ada
9	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 77 ayat (1)	Tidak Ada
10	Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 83 ayat (6)	Ada
11	Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 85 ayat (2)	Tidak Ada

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada
12	Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 87 ayat (5)	Tidak Ada
13	Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah	Pasal 91 ayat (6)	Tidak Ada
14	Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 94	Tidak Ada
15	Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 96	Tidak Ada
16	BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 99 ayat (5)	Tidak Ada

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:

a. Pasal 4, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. Pasal 22, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. Pasal 24 ayat (1), Remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin;
d. Pasal 38, Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
e. Pasal 41, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
f. Pasal 43, Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
g. Pasal 64 ayat (3), ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
h. Pasal 73, Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
i. Pasal 77 ayat (1), Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
j. Pasal 85 ayat (2), Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
k. Pasal 87 ayat (5), Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
l. Pasal 91 ayat (6), Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah;
m. Pasal 94, Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
n. Pasal 96, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
o. Pasal 99 ayat (5), BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Atas permasalahan tersebut kami merekomendasikan Direktur UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur segera melengkapi produk hukum dalam rangka pelaksanaan PPK-BLUD.

2. **UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur belum menetapkan peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Salah satu bentuk fleksibilitas yang dimiliki Badan Layanan Umum Daerah adalah pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan layanan. Hasil pemeriksaan pada UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui belum memiliki Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

a. Pasal 61 ayat (2) Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah.
b. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Dalam hal terdapat hasil kajian internal BLU/BLUD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peraturan pimpinan BLU/BLUD.

Terhadap permasalahan tersebut sudah ada rancangan Peraturan Direktur tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pada UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan Direktur tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pada UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Direktur.

3. **Pelaksanaan Anggaran Berupa Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (SP3BP) dan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Tidak Dilakukan Dengan Tepat**

Pelaksanaan penatausahaan anggaran berupa penyusunan laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur belum dilakukan secara berkala, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Penatausahaan pendapatan dilakukan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD SPAM dan Bendahara Penerimaan setiap bulan dan Register Penutupan Kas.
b. Penatausahaan belanja dilakukan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala UPTD SPAM dan Bendahara Pengeluaran setiap bulan dan Register Penutupan Kas.

Setiap triwulan Pejabat Keuangan menyusun Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD (SP3B) BLU untuk ditandatangani oleh Kepala BLUD SPAM, selanjutnya disampaikan kepada BUD selaku PPKD untuk diterbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan (SP2B) BLUD. Pada Tahun 2024 SP3B BLU dan SP2BP BLUD yang diterbitkan sebagai berikut:

a. Penganjuan SP3BP:

Bulan	SP3BP		Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
	Tanggal	Nomor	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Jan	18/12/2025	PUPR.BLUDSPAM.05.01/900/616/XII/2025	744.706.032	88.499.044	20.000	833.185.076
Feb	18/12/2025	PUPR.BLUDSPAM.05.01/900/617/XII/2025	833.185.133	174.620.133	172.109.074	835.696.135
Mar	18/12/2025	PUPR.BLUDSPAM.05.01/900/618/XII/2025	835.696.135	229.607.793	193.053.791	872.250.137
Apr	18/12/2025	PUPR.BLUDSPAM.05.01/900/619/XII/2025	872.250.137	239.997.598	103.246.167	1.009.001.568
Mei	18/12/2025	PUPR.BLUDSPAM.05.01/900/620/XII/2025	1.009.001.568	189.211.120	118.614.828	1.079.597.860
Jun	18/12/2025	PUPR.BLUDSPAM.05.01/900/621/XII/2025	1.079.597.860	244.902.921	141.492.739	1.183.008.042
Jul	18/12/2025	PUPR.BLUDSPAM.05.01/900/622/XII/2025	1.183.008.042	221.861.170	91.523.046	1.313.346.166
Agt	07/01/2026	PUPR.BLUDSPAM.05.01/900/049/I/2026	1.313.346.166	206.598.992	45.371.207	1.474.573.951
Sep	07/01/2026	PUPR.BLUDSPAM.05.01/900/049/I/2026	1.474.573.951	241.917.019	533.559.859	1.182.931.111
Okt	07/01/2026	PUPR.BLUDSPAM.05.01/900/049/I/2026	1.182.931.111	211.821.764	224.193.314	1.170.559.561
Nov	07/01/2026	PUPR.BLUDSPAM.05.01/900/049/I/2026	1.170.559.561	225.170.962	161.452.820	1.234.277.703
Des	07/01/2026	PUPR.BLUDSPAM.05.01/900/049/I/2026	1.234.277.703	237.978.071	734.884.761	737.371.013
Jumlah				**2.512.186.587**	**2.519.521.606**	

b. Penganjuan SP2BP:

Bulan	SP2BP		Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
	Tanggal	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Jan	22/12/2025	900.1.3/3118/BKUD 4.2	744.706.032	88.499.044	20.000	833.185.076
Feb	22/12/2025	900.1.3/3118/BKUD 4.2	833.185.076	174.620.133	172.109.074	835.696.135
Mar	22/12/2025	900.1.3/3118/BKUD 4.2	835.696.135	229.607.793	193.053.791	872.250.137
Apr	22/12/2025	900.1.3/3118/BKUD 4.2	872.250.137	239.997.598	103.246.167	1.009.001.568
Mei	22/12/2025	900.1.3/3118/BKUD 4.2	1.009.001.568	189.211.120	118.614.828	1.079.597.860
Jun	22/12/2025	900.1.3/3118/BKUD 4.2	1.079.597.860	244.902.921	141.492.739	1.183.008.042
Jul	22/12/2025	900.1.3/3118/BKUD 4.2	1.183.008.042	221.861.170	91.523.046	1.313.346.166
Agt	22/12/2025	900.1.3/190/BKUD 4.2	1.313.346.166	206.598.992	45.371.207	1.474.573.951
Sep	26/01/2026	900.1.3/190/BKUD 4.2	1.474.573.951	241.917.019	533.559.859	1.182.931.111
Okt	26/01/2026	900.1.3/190/BKUD 4.2	1.182.931.111	211.821.764	224.193.314	1.170.559.561
Nov	26/01/2026	900.1.3/190/BKUD 4.2	1.170.559.561	225.170.962	161.452.820	1.234.277.703
Des	26/01/2026	900.1.3/190/BKUD 4.2	1.234.277.703	237.978.071	734.884.761	737.371.013
Des	26/01/2026	900.1.3/190/BKUD 4.2	1.234.277.703	237.978.071	734.884.761	737.371.013
Jumlah				**2.512.186.587**	**2.519.521.606**	

Permasalahan tersebut tidak sejalan dengan substansi tata kelola PPK BLUD yang antara lain memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan termasuk dalam pelaporan pendapatan dan belanja yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pada Pasal 69 menyebutkan bahwa:

a. Ayat (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
b. Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
c. Ayat (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

d. Ayat (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Atas permasalahan tersebut kami merekomendasikan Pemimpin UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur segera melengkapi produk hukum dalam rangka pelaksanaan PPK-BLUD. Permasalahan tersebut mengakibatkan UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai BLUD belum sepenuhnya dapat menerapkan fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan BLUD.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Peraturan Direktur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Temuan belanja modal atas rekonsiliasi asset dan ketidaksesuaian peruntukan anggaran belanja modal UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan rekonsiliasi data aset, ditemukan dua permasalahan utama terkait penatausahaan Belanja Modal pada UPTD SPAM Provinsi NTT sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp61.427.400,00 belum terakomodir dalam pencatatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Aset tersebut telah dibelanjakan dan fisik tersedia, namun statusnya belum tercatat dalam buku inventaris daerah maupun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada modul aset.
2. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp139.433.367,00 teridentifikasi salah sasaran. Anggaran yang dialokasikan pada DPA UPTD SPAM tersebut faktanya digunakan untuk pekerjaan peningkatan serta pemeliharaan bangunan pada UPTD Dinas PUPR, bukan untuk fasilitas pendukung operasional UPTD SPAM Provinsi NTT.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap belanja modal harus dicatat secara tepat pada buku inventaris sesuai dengan klasifikasi dan unit penggunanya. Prinsip Efektivitas dan Akuntabilitas Anggaran, di mana penggunaan dana harus sesuai dengan nomenklatur dan tujuan penggunaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kurangnya koordinasi dan kelalaian administratif dalam proses pelaporan data aset dari tingkat unit kerja (UPTD) ke tingkat badan pengelola (BPKAD). Ketidakcermatan dalam pengawasan distribusi beban kerja dan pengalokasian anggaran pemeliharaan antar unit di bawah naungan Dinas PUPR. Atas belanja Modal 2025 sebesar Rp Rp61.427.400,00 dan Rp139.433.367,00 tidak dibuatkan perhitungan penyusutan atas umur ekonomis dan harga perolehan aset di UPTD SPAM Nusa Tenggara Timur

Nilai Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berpotensi understated (saji rendah) karena adanya aset senilai Rp61.427.400,00 yang belum tercatat. Ketidakakuratan penyajian laporan realisasi anggaran, di mana belanja sebesar Rp139.433.367,00 tidak mencerminkan output fisik yang menjadi wewenang UPTD SPAM, sehingga menyalahi prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Segera melakukan rekonsiliasi data dengan BPKAD untuk memastikan seluruh aset Peralatan dan Mesin tahun 2025 senilai Rp61.427.400,00 masuk ke dalam KIP (Kartu Inventaris Barang). Melakukan koreksi pencatatan atau reklasifikasi belanja terkait peningkatan gedung senilai Rp139.433.367,00 agar sesuai dengan peruntukan entitas yang sebenarnya (UPTD Dinas PUPR). Meningkatkan fungsi kontrol internal dalam verifikasi dokumen belanja guna memastikan kesesuaian antara lokasi pekerjaan dengan unit kerja pemilik anggaran.

5. Aset tetap berupa tanah senilai Rp50.000.000 belum memiliki akta sertifikat hak milik

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap aset tetap UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat aset tetap tanah senilai Rp50.000.000 berstatus kepemilikan UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dibeli pada tahun 2015 dengan sumber dana sendiri.

Berdasarkan atas kepemilikan tersebut UPTD SPAM tidak memiliki akta tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas kepemilikan tanah tersebut. Permasalahan tersebut dapat membuat legalitas kepemilikan tanah menjadi kurang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan UPTD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat akta tanah atas kepemilikan tersebut.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan